SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 3/A);
35. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 28/G);
36. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 34/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 5/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 28/G) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 12 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun. Dokumen ini menjadi alat utama untuk menjamin konsistensi antara sasaran perencanaan strategis jangka menengah yang ditetapkan pemerintah daerah. RKPD tahun 2025 dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan anggaran secara menyeluruh, menetapkan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran, menyusun rencana pendapatan serta belanja daerah, hingga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut. Dengan demikian, RKPD menjadi fondasi utama yang membimbing proses perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Madiun.

RKPD yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan APBD telah mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, RKPD menjadi pedoman utama dalam perumusan, penilaian kebijakan anggaran, serta implementasi pembangunan daerah di Kota Madiun pada tahun 2025. Dengan adanya keterkaitan yang erat antara RKPD dan APBD, diharapkan arah pembangunan daerah dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah dirumuskan. RKPD pun tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan penggunaan anggaran publik yang lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Perubahan dinamika pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk secara rutin melakukan penyesuaian dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Pemerintah daerah perlu siap menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan anggaran yang dapat berdampak langsung terhadap jalannya pembangunan. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap RKPD Kota Madiun Tahun 2025 menjadi penting, terlebih jika mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya dan proyeksi kondisi keuangan daerah di tahun berjalan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar prioritas pembangunan tetap selaras dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dasar hukum yang melandasi perubahan terhadap RKPD Kota Madiun Tahun 2025 merujuk pada ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perubahan terhadap RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap perkembangan situasi aktual. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen perencanaan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di daerah, sehingga pelaksanaan program tetap sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, menurut Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah harus:

a. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Waki Wali Kota hasil pilkada serentak Tahun 2024.
b. Menyesuaikan program Asta Cita dan Asta Karya ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
c. Menyesuaikan Perkembangan yang tidak sejalan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD; dan/atau
d. Menyesuaikan keadaan yang mengharuskan penggunaan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya untuk kebutuhan tahun berjalan.



Gambar 1. 1 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Beberapa kondisi yang melatarbelakangi perlunya perubahan dalam RKPD Tahun 2025 mencakup perubahan pada struktur keuangan daerah, khususnya terkait fluktuasi pendapatan asli daerah. Di samping itu, kemampuan anggaran juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan tersebut. Selain aspek keuangan, hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I turut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan ke depan. Perubahan ini menjadi bagian integral dalam penyusunan ulang arah pembangunan daerah agar tetap relevan, adaptif, dan akuntabel yang mencakup:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
b) Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah;
c) Keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
d) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.



Gambar 1. 2 Proses Penyusunan Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2025

Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, dan penetapan dokumen tersebut. Berdasarkan Pasal 353, rancangan perubahan RKPD disempurnakan terlebih dahulu menjadi rancangan akhir sebelum ditetapkan secara resmi. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 354, rancangan akhir perubahan RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan RKPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Setelah itu, rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta kepada gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk difasilitasi.
Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, termasuk perangkat daerah, stakeholder, serta membuka ruang bagi penyampaian pokok-pokok pikiran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dokumen perubahan RKPD tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), yang menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2025. Proses penyusunan ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan keterpaduan dan kesesuaian perubahan anggaran yang direncanakan. Setelah KUPA dan PPAS-P Tahun 2025 disepakati, dokumen tersebut akan diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Madiun. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh proses ini merupakan bagian krusial dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 dilandasi oleh:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);
37. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika perubahan asumsi makro, kondisi serta kapasitas fiskal, dan kebijakan yang berlangsung sepanjang tahun berjalan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga relevansi rencana pembangunan daerah dengan perkembangan situasi ekonomi dan keuangan yang terus bergerak dinamis. Di samping itu, penyusunan perubahan RKPD juga ditujukan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara lebih tepat dan efektif.

Adapun tujuan utama dari penyusunan P-RKPD Kota Madiun Tahun 2025 antara lain:

a. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
b. Memberikan panduan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), sekaligus menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 349 menyatakan bahwa Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika dokumen.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan perubahan tahun berjalan, yang antara lain mencakup perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah tersebut mencakup semua rencana Perubahan program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI : PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menilai capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja perangkat daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian output dan outcome yang dihasilkan.

Kegiatan evaluatif ini merupakan elemen krusial dalam manajemen pemerintahan daerah karena berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai keberhasilan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi jalannya pemerintahan. Informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, hasil evaluasi tersebut menjadi landasan penting dalam melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik dari sisi perencanaan program dan kegiatan, alokasi sumber daya, maupun penetapan prioritas pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi aktual. Penyesuaian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bagian dari siklus manajemen pemerintahan yang terpadu dan berkelanjutan.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang relevan dan objektif mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Informasi ini menjadi sumber masukan yang bernilai dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, hasil evaluasi menjadi pijakan penting dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen perencanaan, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tetap relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam menilai hasil evaluasi adalah dengan mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan. Indikator-indikator ini disajikan secara terstruktur dalam tabel berikut sebagai alat ukur yang konkret terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun 2023-2024

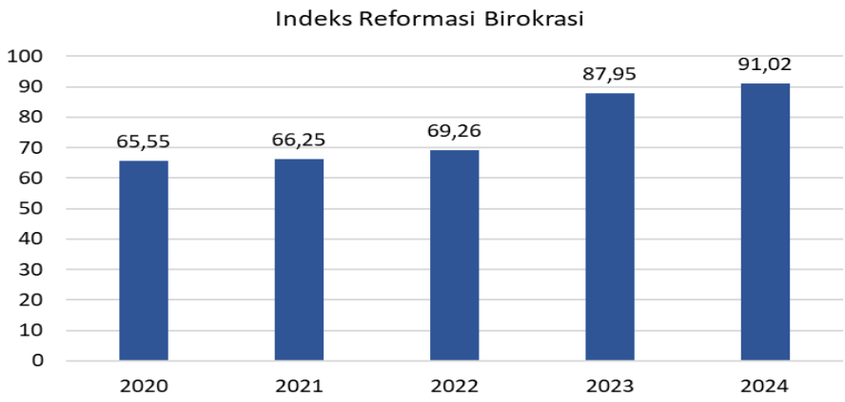
Indikator Kinerja	Satuan	2023	2024		
			Target	Realisasi	Persen
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,95 (A)	70,01 (BB)	91,95 (A)	131,34
Indeks Kenyamanan Kota *(Livable City)*	Indeks	91,93	91,93	93,933	101,52
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,71	82,35	84,51	100,96
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,57	95,18	95,26	100
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87**	6,40	6,87**	107,34**
Indeks Gini	Indeks	0,416	0,35	0,435	88,46

Sumber: Bapppeda, 2025 dan BPS Kota Madiun, 2025

2.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan transformasi secara fundamental terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini mencakup perbaikan dalam tiga pilar utama, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business process),* dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas birokrasi. Untuk mengukur capaian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah, digunakan alat ukur yang disebut Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menyajikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan berkelanjutan di sektor administrasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



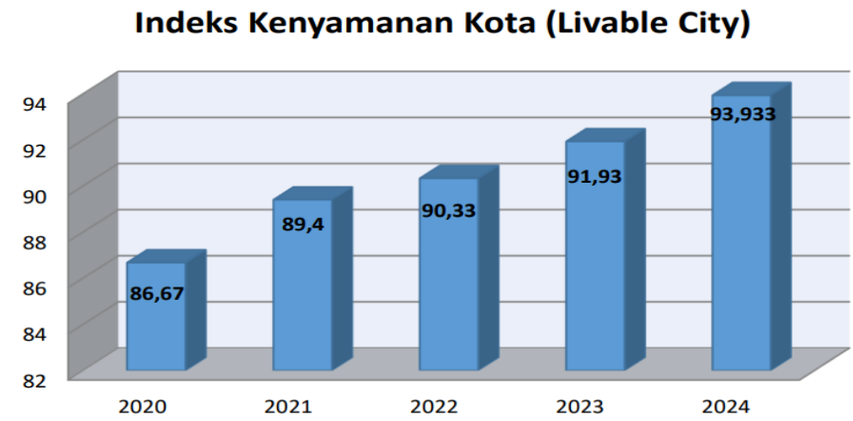
Gambar 2. 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun dari tahun 2020-2024 selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaiannya sebesar 65,55 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 66,25. Di tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,26 dan tahun 2023 sebesar 87,95. Adapun tahun 2024 data Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,02.

2.1.2. Indeks Kenyamanan Kota *(Livable City)*

Indeks Kenyamanan Kota *(Livable City)* adalah indikator untuk mengukur seberapa nyaman Kota Madiun dilihat dari:

1. Infrastruktur pendukung meliputi: akses jalan, akses air minum dan akses sanitasi perumahan;
2. Sarana prasarana pemukiman meliputi: rumah layak huni, rumah tinggal bersanitasi, cakupan lingkungan yang sehat yang didukung dengan PSU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan fasilitas permakaman; dan
3. Keamanan meliputi: persepsi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan dan keamanan dari kekerasan.



Gambar 2. 2 Indeks Kenyamanan Kota Madiun Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi kinerja Indeks *Livable City* Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar 93,933 dengan target 91,93. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,52%. Sedangkan tahun 2023 sebesar 91,653 dengan target 90,33. Hal ini menunjukan peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. IPM mengintegrasikan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), sementara dimensi pendidikan dievaluasi berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Adapun standar hidup layak ditentukan melalui besaran Pengeluaran per Kapita yang telah disesuaikan.

Ketiga dimensi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja pembangunan, tetapi juga sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan IPM menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan daerah, termasuk di Kota Madiun.

Selama lima tahun terakhir, Kota Madiun menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2024, IPM Kota Madiun tercatat sebesar 84.51, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah berjalan menuju perbaikan yang berkelanjutan. Berikut tabel IPM Kota Madiun 2020-2024.

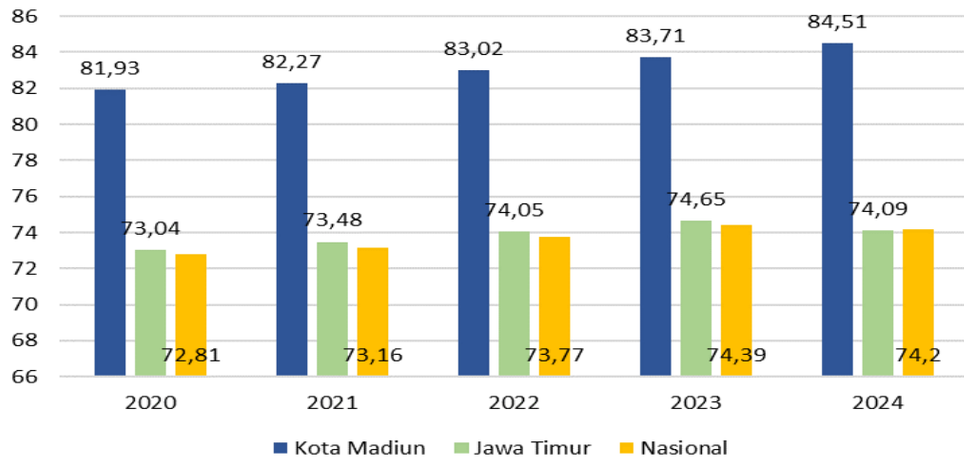
Tabel 2. 2 IPM Kota Madiun Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
UHH (tahun)	72,81	72,83	73,13	73,44	75,67
HLS (tahun)	14,40	14,41	14,43	14,44	14,54
RLS (tahun)	11,14	11,37	11,67	11,82	12,11
Pengeluaran PerKapita (000)	16.018	16.095	16.503	17.115	17.518
IPM	81,93	82,27	83,02	83,71	84,51

Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kota Madiun memiliki IPM yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota Sekitar bahkan di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, Kota Madiun dengan IPM di atas 80. Jika dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Timur dan IPM Nasional, IPM Kota Madiun memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Jawa Timur dan Nasional. Tingginya angka IPM ini tidak saja akan berdampak pada proses pembangunan namun juga pada capaian kesejahteraan.



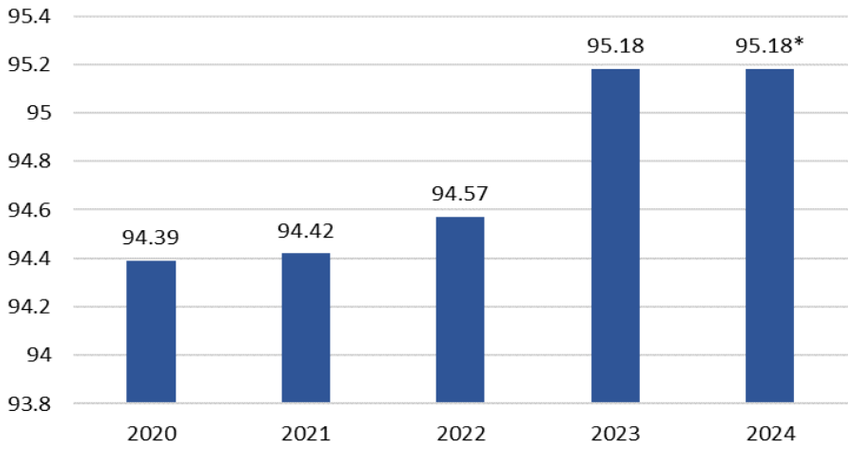
Gambar 2. 3 IPM Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. IPM Kota Madiun selama lima tahun berturut-turut terus mengalami peningkatan. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2024 yakni sebesar 75,67 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,54 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 12,11 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar Rp17.518.000, sehingga IPM Kota Madiun pada tahun 2024 mencapai 84,51 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategori tinggi jika dibandingkan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

2.1.4. Indeks Pembangunan Gender

Garis Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

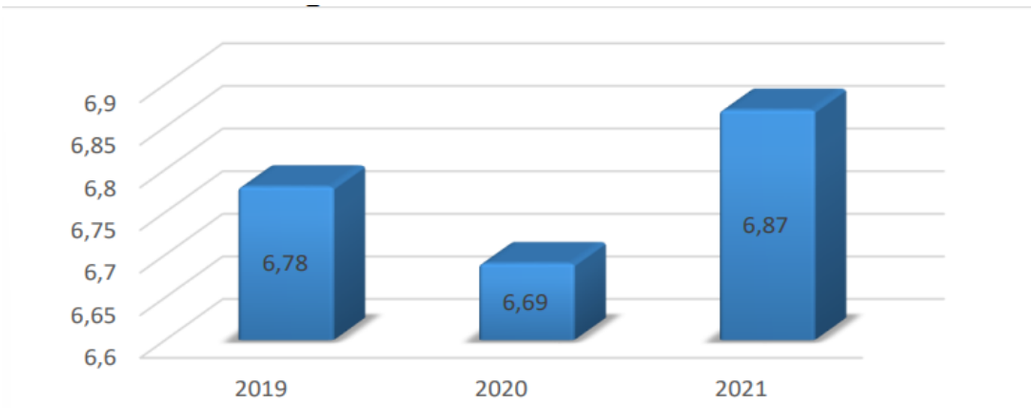


Gambar 2. 4 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 94,38. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,42. Tahun 2022, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,57, hingga Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,18. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal.

2.1.5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.



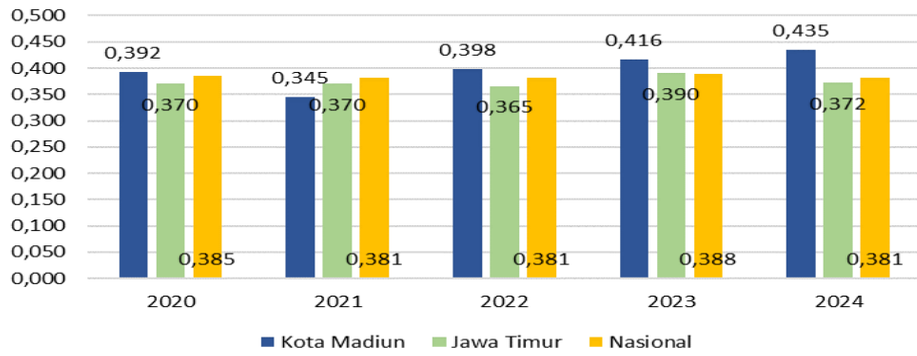
Gambar 2. 5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2019-2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di RPJMD Kota Madiun ditargetkan di tahun 2024 sebesar 6,87, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator yang dihitung oleh BAPPENAS dan terakhir mengeluarkan angka penghitungan di tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan 2023 BAPPENAS belum mengeluarkan nilai lagi sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pembangunan adalah rasio gini. Rasio gini digunakan untuk mengevaluasi seberapa merata distribusi pendapatan di antara penduduk suatu wilayah atau negara. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, terdapat tiga kategori tingkat ketimpangan, yaitu tinggi (gini rasio > 0,5), sedang (0,36 – 0,49), dan rendah (< 0,36).



Gambar 2. 6 Perkembangan Gini Rasio Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks gini Kota Madiun secara umum selama lima Tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,392 dan menurun menjadi 0,345 pada tahun 2021. Indeks gini pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0,416 dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2024 meningkat menjadi 0,435. Capaian ini fluktuatif namun berada diatas Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Capaian kinerja sasaran Kota Madiun tahun 2023 dan 2024 dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Sasaran Kota Madiun 2023-2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Skor	A (80,08)	A (80,08)	A (81,03)	101,19
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,217	3,01	3,2179	106,91
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,45	4,45	4,57	102,7
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,028	88,028	88,74	100,81
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,62	53,96	67,09	124,33
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	Indeks	98,44	98,59	98,62	100,03
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,32	57,93	62,21	107,39
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,43	14,54	100,76
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,67	12,11	103,77
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,13	75,67	103,47
7	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	78,03	77,22	78,94	102,23
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,85	5	4,3	114
9	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,6	7,98	4,59	57,51
		Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	24,7	21,57	30,48	141,3
10	Pengurangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,74	4,45	4,38	101,57
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	Indeks	77,8	B skor 77,80	78,04	100,31
		Indeks Rasa Aman	Indeks	82,47	83,31	84,16	101,02

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam periode tahun 2023-2024, capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang positif dan menggembirakan. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan angka realisasi yang melampaui target, dengan persentase capaian di atas 100%. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Pada sektor pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan masyarakat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Inovasi Daerah. Kedua indikator ini mengalami pertumbuhan positif, dengan capaian realisasi IKM mencapai 100,81% dan Indeks Inovasi Daerah sebesar 124,33%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diterapkan berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan, serta menciptakan berbagai solusi kreatif dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Dalam bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, capaian Indeks Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memberikan gambaran yang optimistis. Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 100%, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 107,39%. Data ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, guna menciptakan ekosistem perkotaan yang nyaman, layak huni, dan berwawasan lingkungan.

Pada aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat, indikator di bidang pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan kinerja yang memuaskan. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah masing-masing mencapai capaian sebesar 100,77% dan 103,77%, sedangkan Angka Harapan Hidup mencapai 103,47%. Di sisi lain, Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan realisasi sebesar 102,23%, menandakan adanya kemajuan signifikan dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun dalam bidang ekonomi dan stabilitas sosial, beberapa indikator menunjukkan keberhasilan, meskipun terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan secara signifikan dengan capaian 114% dari target, sedangkan pertumbuhan PDRB sektor jasa masih belum mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan, serta Indeks Kerukunan dan Indeks Rasa Aman mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ini menjadi bukti konkret atas keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam perencanaan pembangunan Kota Madiun ke depan.

2.2. Indikator Evaluasi RKPD Kota Madiun Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan daerah telah selaras dengan arah kebijakan dalam RPD 2025-2026. Evaluasi ini mengacu pada RPD 2025-2026 dan mencakup capaian kinerja hingga akhir tahun 2024 serta triwulan I tahun berjalan 2025. Selain mengukur kinerja, evaluasi juga bertujuan untuk menilai ketercapaian target yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan realisasi program baik pada urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara umum, hasil evaluasi RKPD Kota Madiun Tahun 2025 sampai dengan triwulan I cukup baik, meskipun ada beberapa kinerja yang perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya agar mencapai target yang ditetapkan. Secara rata-rata, capaian kinerja program-program pelayanan wajib dasar sampai triwulan I dapat mencapai sekitar 22% persen. Masih rendahnya capaian kinerja dengan berbagai tantangan yang ada, maka diperlukan perubahan RKPD 2025. Hasil evaluasi pada masing-masing program disertai dengan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	85,4	364.247.836.000	A	11.075.235.103	-	38.337.526.840	0	38.337.526.840	0%	346%	A	38.337.526.840	100%	11%	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian	%	100	15.432.250.000	100	7.382.980.983	-	37.979.000	0	37.979.000	0%	1%	100	37.979.000	100%	0%	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	15.432.250.000	6	7.382.980.983	-	37.979.000	0	37.979.000	0%	1%	0	37.979.000	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan	%	100	340.396.456.000	100	169.266.927.641	-	37.832.187.840	0	37.832.187.840	0%	22%	100	37.832.187.840	100%	11%	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1591	340.396.456.000	1537	169.266.927.641	-	37.832.187.840	0	37.832.187.840	0%	22%	0	37.832.187.840	0%	11%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan umum	%	100	7.034.130.000	167	2.606.021.000	-	467.360.000	0	467.360.000	0%	18%	100	467.360.000	100%	7%	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	6.434.130.000	37	2.306.021.000	-	467.360.000	0	467.360.000	0%	20%	0	467.360.000	0%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165	600.000.000	130	300.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	265.000.000	100	404.137.120	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	65	265.000.000	30	404.137.120	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	1.120.000.000	100	682.096.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	132	300.000.000	66	208.674.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	540.000.000	1	270.075.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	412	280.000.000	276	203.347.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	%	100	51.886.859.846	100	23.750.394.320	-	397.841.002	0	397.841.002	0%	2%	100	397.841.002	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	20.322.954.324	100	5.817.844.000	-	241.082.566	0	241.082.566	0%	4%	100	241.082.566	100%	1%	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	950.000.000	-	-	-		0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	212	900.900.000	106	662.788.000	-	142.350.000	0	142.350.000	0%	21%	0	142.350.000	0%	16%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	68	642.000.000	68	574.986.000	-	87.616.000	0	87.616.000	0%	15%	0	87.616.000	0%	14%	Dinas Pendidikan
				29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	-	-	16	2.814.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	38	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	206.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	2	600.000.000	1	1.765.500.000	-	11.116.566	0	11.116.566	0%	1%	0	11.116.566	0%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	17.024.054.324	-	-	-		0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	21.520.477.202	-	7.407.415.000	-	122.254.836	0	122.254.836	0	2%	100	122.254.836	100%	1%	
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	13.078.000.000	-	-	-		0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	845.000.000	1	1.776.500.000	-	10.845.712	0	10.845.712	0%	1%	0	10.845.712	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Siswa	5850	6.510.000.000	5850	3.975.000.000	-	44.513.424	0	44.513.424	0%	1%	0	44.513.424	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	289	563.977.202	165	548.479.000	-	66.895.700	0	66.895.700	0%	12%	0	66.895.700	0%	12%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	313.500.000	23	70.466.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
				42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		-	9	1.036.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	2	210.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	8.307.178.320	100	8.966.306.320	-	27.000.000	0	27.000.000	0%	0%	100	27.000.000	100%	0%	
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Lembaga Peserta Didik	1	200.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	2	204.933.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1989	7.149.600.000	960	4.032.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	158	382.645.320	153	718.750.000	-	27.000.000	0	27.000.000	0%	4%	0	27.000.000	0%	7%	Dinas Pendidikan
				18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-	152	3.878.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	370.000.000	6	336.736.320	-	9.200.000	0	9.200.000	0%	3%	0	9.200.000	0%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase Lembaga non formal yang dikelola dengan baik	%	100	1.736.250.000	100	1.558.829.000	-	7.503.600	0	7.503.600	0%	0%	100	7.503.600	100%	0%	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	279.500.000	6	875.509.000	-	7.503.600	0	7.503.600	0%	1%	0	7.503.600	0%	3%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	1.456.750.000	6	683.320.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	%	100	2.868.051.155	100	1.209.968.680	-	258.201.000	0	258.201.000	0%	21%	100	258.201.000	100%	9%	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	2.242.750.936	100	851.968.680	-	157.803.000	0	157.803.000	0%	19%	100	157.803.000	100%	7%	
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	664.500.000	1	223.000.000	-	41.353.000	0	41.353.000	0%	19%	0	41.353.000	0%	6%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	2	468.000.000	96	162.968.680	-	36.880.000	0	36.880.000	0%	23%	0	36.880.000	0%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	1.110.250.936	1	466.000.000	-	79.570.000	0	79.570.000	0%	17%	0	79.570.000	0%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	625.300.219	100	358.000.000	-	100.398.000	0	100.398.000	0%	28%	100	100.398.000	100%	16%	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2	625.300.219	1	358.000.000	-	100.398.000	0	100.398.000	0%	28%	0	100.398.000	0%	16%	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	%	65	2.001.400.000	63	1.486.812.000	-	52.670.300	0	52.670.300	0%	4%	100	52.670.300	154%	3%	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi	%	100	2.001.400.000	100	1.486.812.000	-	52.670.300	0	52.670.300	0%	4%	100	52.670.300	100%	3%	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	2	1.027.900.000	1	941.312.000	-	31.469.300	0	31.469.300	0%	3%	0	31.469.300	0%	3%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	2	973.500.000	2	545.500.000	-	21.201.000	0	21.201.000	0%	4%	0	21.201.000	0%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	942.780.000	100	452.340.000	-	30.323.614	0	30.323.614	0%	7%	100	30.323.614	100%	3%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang memenuhi SNP	%	100	942.780.000	100	452.340.000	-	30.323.614	0	30.323.614	0%	7%	100	30.323.614	100%	3%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	635.580.000	1	322.740.000	-	25.737.814	0	25.737.814	0%	8%	1	25.737.814	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	307.200.000	1	129.600.000	-	4.585.800	0	4.585.800	0%	4%	1	4.585.800	100%	1%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	391.500.000	100	213.570.000	-	18.242.300	0	18.242.300	0%	9%	100	18.242.300	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	391.500.000	100	213.570.000	-	18.242.300	0	18.242.300	0%	9%	100	18.242.300	100%	5%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	89.100.000	1	62.370.000	-	7.023.300	0	7.023.300	0%	11%	1	7.023.300	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	302.400.000	1	151.200.000	-	11.219.000	0	11.219.000	0%	7%	1	11.219.000	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	947.040.000	100	477.480.000	-	97.143.574	0	97.143.574	0%	20%	100	97.143.574	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	947.040.000	100	477.480.000	-	97.143.574	0	97.143.574	0%	20%	100	97.143.574	100%	10%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	649.440.000	1	328.680.000	-	63.213.574	0	63.213.574	0%	19%	1	63.213.574	100%	10%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	297.600.000	1	148.800.000	-	33.930.000	0	33.930.000	0%	23%	1	33.930.000	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	484.680.000	100	239.370.000	-	46.447.029	0	46.447.029	0%	19%	100	46.447.029	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	484.680.000	100	239.370.000	-	46.447.029	0	46.447.029	0%	19%	100	46.447.029	100%	10%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	249.480.000	1	121.770.000	-	30.641.029	0	30.641.029	0%	25%	1	30.641.029	100%	12%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	235.200.000	1	117.600.000	-	15.806.000	0	15.806.000	0%	13%	1	15.806.000	100%	7%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	970.200.000	100	479.160.000	-	98.966.476	0	98.966.476	0%	21%	100	98.966.476	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	970.200.000	100	479.160.000	-	98.966.476	0	98.966.476	0%	21%	100	98.966.476	100%	10%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	653.400.000	1	320.760.000	-	71.328.676	0	71.328.676	0%	22%	1	71.328.676	100%	11%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	316.800.000	1	158.400.000	-	27.637.800	0	27.637.800	0%	17%	1	27.637.800	100%	9%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	345.600.000	100	175.770.000	-	22.243.605	0	22.243.605	0%	13%	100	22.243.605	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	345.600.000	100	175.770.000	-	22.243.605	0	22.243.605	0%	13%	100	22.243.605	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	158.400.000	1	82.170.000	-	8.827.605	0	8.827.605	0%	11%	1	8.827.605	100%	6%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.200.000	1	93.600.000	-	13.416.000	0	13.416.000	0%	14%	1	13.416.000	100%	7%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	670.140.000	100	296.400.000	-	26.047.000	0	26.047.000	0%	9%	100	26.047.000	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	670.140.000	100	296.400.000	-	26.047.000	0	26.047.000	0%	9%	100	26.047.000	100%	4%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	461.340.000	1	198.000.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	208.800.000	1	98.400.000	-	26.047.000	0	26.047.000	0%	26%	1	26.047.000	100%	12%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	482.580.000	100	273.960.000	-	50.289.939	0	50.289.939	0%	18%	100	50.289.939	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	482.580.000	100	273.960.000	-	50.289.939	0	50.289.939	0%	18%	100	50.289.939	100%	10%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	180.180.000	1	122.760.000	-	44.872.539	0	44.872.539	0%	37%	1	44.872.539	100%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	302.400.000	1	151.200.000	-	5.417.400	0	5.417.400	0%	4%	1	5.417.400	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	287.400.000	100	146.670.000	-	18.812.000	0	18.812.000	0%	13%	100	18.812.000	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	287.400.000	100	146.670.000	-	18.812.000	0	18.812.000	0%	13%	100	18.812.000	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	138.600.000	1	72.270.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	18.812.000	0	18.812.000	0%	25%	1	18.812.000	100%	13%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	509.640.000	100	232.800.000	-	46.311.104	0	46.311.104	0%	20%	100	46.311.104	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	509.640.000	100	232.800.000	-	46.311.104	0	46.311.104	0%	20%	100	46.311.104	100%	9%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	312.840.000	1	158.400.000	-	25.428.104	0	25.428.104	0%	16%	1	25.428.104	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	196.800.000	1	74.400.000	-	20.883.000	0	20.883.000	0%	28%	1	20.883.000	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	546.060.000	100	251.010.000	-	38.823.806	0	38.823.806	0%	15%	100	38.823.806	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	546.060.000	100	251.010.000	-	38.823.806	0	38.823.806	0%	15%	100	38.823.806	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	310.860.000	1	157.410.000	-	25.823.806	0	25.823.806	0%	16%	1	25.823.806	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	235.200.000	1	93.600.000	-	13.000.000	0	13.000.000	0%	14%	1	13.000.000	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	242.640.000	100	127.260.000	-	29.150.585	0	29.150.585	0%	23%	100	29.150.585	100%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	242.640.000	100	127.260.000	-	29.150.585	0	29.150.585	0%	23%	100	29.150.585	100%	12%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	55.440.000	1	33.660.000	-	9.832.585	0	9.832.585	0%	29%	1	9.832.585	100%	18%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.200.000	1	93.600.000	-	19.318.000	0	19.318.000	0%	21%	1	19.318.000	100%	10%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	802.380.000	100	383.880.000	-	90.188.732	0	90.188.732	0%	23%	100	90.188.732	100%	11%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	802.380.000	100	383.880.000	-	90.188.732	0	90.188.732	0%	23%	100	90.188.732	100%	11%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	437.580.000	1	249.480.000	-	48.458.732	0	48.458.732	0%	19%	1	48.458.732	100%	11%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	364.800.000	1	134.400.000	-	41.730.000	0	41.730.000	0%	31%	1	41.730.000	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	467.580.000	100	243.540.000	-	34.137.449	0	34.137.449	0%	14%	100	34.137.449	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	467.580.000	100	243.540.000	-	34.137.449	0	34.137.449	0%	14%	100	34.137.449	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	318.780.000	1	164.340.000	-	26.204.749	0	26.204.749	0%	16%	1	26.204.749	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	79.200.000	-	7.932.700	0	7.932.700	0%	10%	1	7.932.700	100%	5%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	282.660.000	100	141.330.000	-	7.032.960	0	7.032.960	0%	5%	100	7.032.960	100%	2%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	282.660.000	100	141.330.000	-	7.032.960	0	7.032.960	0%	5%	100	7.032.960	100%	2%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	172.260.000	1	86.130.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000	1	55.200.000	-	7.032.960	0	7.032.960	0%	13%	1	7.032.960	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	581.400.000	100	242.940.000	-	5.772.000	0	5.772.000	0%	2%	100	5.772.000	100%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	581.400.000	100	242.940.000	-	5.772.000	0	5.772.000	0%	2%	100	5.772.000	100%	1%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	336.600.000	1	144.540.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	244.800.000	1	98.400.000	-	5.772.000	0	5.772.000	0%	6%	1	5.772.000	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	858.120.000	100	356.910.000	-	53.258.228	0	53.258.228	0%	15%	100	53.258.228	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	858.120.000	100	356.910.000	-	53.258.228	0	53.258.228	0%	15%	100	53.258.228	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	502.920.000	1	246.510.000	-	51.494.228	0	51.494.228	0%	21%	1	51.494.228	100%	10%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	355.200.000	1	110.400.000	-	1.764.000	0	1.764.000	0%	2%	1	1.764.000	100%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	983.640.000	100	452.970.000	-	38.786.512	0	38.786.512	0%	9%	100	38.786.512	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	983.640.000	100	452.970.000	-	38.786.512	0	38.786.512	0%	9%	100	38.786.512	100%	4%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	590.040.000	1	280.170.000	-	31.358.312	0	31.358.312	0%	11%	1	31.358.312	100%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	393.600.000	1	172.800.000	-	7.428.200	0	7.428.200	0%	4%	1	7.428.200	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	506.160.000	100	230.070.000	-	32.930.910	0	32.930.910	0%	14%	100	32.930.910	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	506.160.000	100	230.070.000	-	32.930.910	0	32.930.910	0%	14%	100	32.930.910	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	261.360.000	1	131.670.000	-	10.465.210	0	10.465.210	0%	8%	1	10.465.210	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	244.800.000	1	98.400.000	-	22.465.700	0	22.465.700	0%	23%	1	22.465.700	100%	9%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	369.360.000	100	181.710.000	-	3.000.000	0	3.000.000	0%	2%	100	3.000.000	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	369.360.000	100	181.710.000	-	3.000.000	0	3.000.000	0%	2%	100	3.000.000	100%	1%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	182.160.000	1	88.110.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.200.000	1	93.600.000	-	3.000.000	0	3.000.000	0%	3%	1	3.000.000	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	332.940.000	100	166.470.000	-	21.008.300	0	21.008.300	0%	13%	100	21.008.300	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	332.940.000	100	166.470.000	-	21.008.300	0	21.008.300	0%	13%	100	21.008.300	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	184.140.000	1	92.070.000	-	7.163.300	0	7.163.300	0%	8%	1	7.163.300	100%	4%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	13.845.000	0	13.845.000	0%	19%	1	13.845.000	100%	9%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.634.640.000	100	747.300.000	-	83.689.000	0	83.689.000	0%	11%	100	83.689.000	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.634.640.000	100	747.300.000	-	83.689.000	0	83.689.000	0%	11%	100	83.689.000	100%	5%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.005.840.000	1	504.900.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	628.800.000	1	242.400.000	-	83.689.000	0	83.689.000	0%	35%	1	83.689.000	100%	13%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	836.280.000	100	396.120.000	-	24.490.400	0	24.490.400	0%	6%	100	24.490.400	100%	3%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	836.280.000	100	396.120.000	-	24.490.400	0	24.490.400	0%	6%	100	24.490.400	100%	3%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	605.880.000	1	304.920.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	230.400.000	1	91.200.000	-	24.490.400	0	24.490.400	0%	27%	1	24.490.400	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.503.660.000	100	687.570.000	-	92.847.454	0	92.847.454	0%	14%	100	92.847.454	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.503.660.000	100	687.570.000	-	92.847.454	0	92.847.454	0%	14%	100	92.847.454	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	944.460.000	1	497.970.000	-	60.233.454	0	60.233.454	0%	12%	1	60.233.454	100%	6%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	559.200.000	1	189.600.000	-	32.614.000	0	32.614.000	0%	17%	1	32.614.000	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	431.220.000	100	255.030.000	-	26.786.784	0	26.786.784	0%	11%	100	26.786.784	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	431.220.000	100	255.030.000	-	26.786.784	0	26.786.784	0%	11%	100	26.786.784	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	196.020.000	1	155.430.000	-	16.988.784	0	16.988.784	0%	11%	1	16.988.784	100%	9%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	235.200.000	1	99.600.000	-	9.798.000	0	9.798.000	0%	10%	1	9.798.000	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	376.500.000	100	199.140.000	-	32.009.368	0	32.009.368	0%	16%	100	32.009.368	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	376.500.000	100	199.140.000	-	32.009.368	0	32.009.368	0%	16%	100	32.009.368	100%	9%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	227.700.000	1	124.740.000	-	25.467.268	0	25.467.268	0%	20%	1	25.467.268	100%	11%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	6.542.100	0	6.542.100	0%	9%	1	6.542.100	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	991.560.000	100	437.880.000	-	94.420.960	0	94.420.960	0%	22%	100	94.420.960	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	991.560.000	100	437.880.000	-	94.420.960	0	94.420.960	0%	22%	100	94.420.960	100%	10%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	597.960.000	1	289.080.000	-	88.348.960	0	88.348.960	0%	31%	1	88.348.960	100%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	393.600.000	1	148.800.000	-	6.072.000	0	6.072.000	0%	4%	1	6.072.000	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.005.420.000	100	457.680.000	-	11.000.000	0	11.000.000	0%	2%	100	11.000.000	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.005.420.000	100	457.680.000	-	11.000.000	0	11.000.000	0%	2%	100	11.000.000	100%	1%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	611.820.000	1	308.880.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	393.600.000	1	148.800.000	-	11.000.000	0	11.000.000	0%	7%	1	11.000.000	100%	3%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	259.680.000	100	124.890.000	-	14.012.770	0	14.012.770	0%	11%	100	14.012.770	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	259.680.000	100	124.890.000	-	14.012.770	0	14.012.770	0%	11%	100	14.012.770	100%	5%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	110.880.000	1	50.490.000	-	4.968.770	0	4.968.770	0%	10%	1	4.968.770	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	9.044.000	0	9.044.000	0%	12%	1	9.044.000	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	481.440.000	100	255.570.000	-	9.576.000	0	9.576.000	0%	4%	100	9.576.000	100%	2%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	481.440.000	100	255.570.000	-	9.576.000	0	9.576.000	0%	4%	100	9.576.000	100%	2%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	332.640.000	1	181.170.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	9.576.000	0	9.576.000	0%	13%	1	9.576.000	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	798.240.000	100	371.160.000	-	54.152.700	0	54.152.700	0%	15%	100	54.152.700	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	798.240.000	100	371.160.000	-	54.152.700	0	54.152.700	0%	15%	100	54.152.700	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	491.040.000	1	241.560.000	-	34.880.700	0	34.880.700	0%	14%	1	34.880.700	100%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	307.200.000	1	129.600.000	-	19.272.000	0	19.272.000	0%	15%	1	19.272.000	100%	6%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.107.660.000	100	510.390.000	-	17.150.400	0	17.150.400	0%	3%	100	17.150.400	100%	2%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.107.660.000	100	510.390.000	-	17.150.400	0	17.150.400	0%	3%	100	17.150.400	100%	2%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	548.460.000	1	297.990.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	559.200.000	1	212.400.000	-	17.150.400	0	17.150.400	0%	8%	0	17.150.400	0%	3%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	487.380.000	100	240.720.000	-	41.111.702	0	41.111.702	0%	17%	100	41.111.702	100%	8%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	487.380.000	100	240.720.000	-	41.111.702	0	41.111.702	0%	17%	100	41.111.702	100%	8%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	338.580.000	1	166.320.000	-	25.271.702	0	25.271.702	0%	15%	1	25.271.702	100%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	74.400.000	-	15.840.000	0	15.840.000	0%	21%	1	15.840.000	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.432.980.000	100	755.160.000	-	98.293.570	0	98.293.570	0%	13%	100	98.293.570	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.432.980.000	100	755.160.000	-	98.293.570	0	98.293.570	0%	13%	100	98.293.570	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	892.980.000	1	479.160.000	-	67.538.570	0	67.538.570	0%	14%	1	67.538.570	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	540.000.000	1	276.000.000	-	30.755.000	0	30.755.000	0%	11%	1	30.755.000	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	337.680.000	100	155.970.000	-	4.748.034	0	4.748.034	0%	3%	100	4.748.034	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	337.680.000	100	155.970.000	-	4.748.034	0	4.748.034	0%	3%	100	4.748.034	100%	1%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	150.480.000	1	62.370.000	-	2.732.034	0	2.732.034	0%	4%	1	2.732.034	100%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.200.000	1	93.600.000	-	2.016.000	0	2.016.000	0%	2%	1	2.016.000	100%	1%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	415.380.000	100	193.830.000	-	22.645.000	0	22.645.000	0%	12%	100	22.645.000	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	415.380.000	100	193.830.000	-	22.645.000	0	22.645.000	0%	12%	100	22.645.000	100%	5%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	180.180.000	1	76.230.000	-	6.712.000	0	6.712.000	0%	9%	1	6.712.000	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	235.200.000	1	117.600.000	-	15.933.000	0	15.933.000	0%	14%	1	15.933.000	100%	7%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	875.880.000	100	453.180.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	875.880.000	100	453.180.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	645.480.000	1	318.780.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	230.400.000	1	134.400.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	929.220.000	100	457.680.000	-	56.910.904	0	56.910.904	0%	12%	100	56.910.904	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	929.220.000	100	457.680.000	-	56.910.904	0	56.910.904	0%	12%	100	56.910.904	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	631.620.000	1	308.880.000	-	22.450.404	0	22.450.404	0%	7%	1	22.450.404	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	297.600.000	1	148.800.000	-	34.460.500	0	34.460.500	0%	23%	1	34.460.500	100%	12%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.188.900.000	100	583.320.000	-	33.104.150	0	33.104.150	0%	6%	100	33.104.150	100%	3%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.188.900.000	100	583.320.000	-	33.104.150	0	33.104.150	0%	6%	100	33.104.150	100%	3%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	821.700.000	1	423.720.000	-	17.960.750	0	17.960.750	0%	4%	1	17.960.750	100%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	367.200.000	1	159.600.000	-	15.143.400	0	15.143.400	0%	9%	1	15.143.400	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	456.060.000	100	220.110.000	-	22.468.900	0	22.468.900	0%	10%	100	22.468.900	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	456.060.000	100	220.110.000	-	22.468.900	0	22.468.900	0%	10%	100	22.468.900	100%	5%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	192.060.000	1	88.110.000	-	-	0	-	0%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	264.000.000	1	132.000.000	-	22.468.900	0	22.468.900	0%	17%	1	22.468.900	100%	9%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.385.820.000	100	662.970.000	-	118.207.926	0	118.207.926	0%	18%	100	118.207.926	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.385.820.000	100	662.970.000	-	118.207.926	0	118.207.926	0%	18%	100	118.207.926	100%	9%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	968.220.000	1	478.170.000	-	104.155.926	0	104.155.926	0%	22%	1	104.155.926	100%	11%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	417.600.000	1	184.800.000	-	14.052.000	0	14.052.000	0%	8%	1	14.052.000	100%	3%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	916.260.000	-	441.060.000	-	32.080.000	0	32.080.000	0	7%	100	32.080.000	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	916.260.000	-	441.060.000	-	32.080.000	0	32.080.000	0	7%	100	32.080.000	100%	4%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	647.460.000	-	330.660.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	268.800.000	-	110.400.000	-	32.080.000	0	32.080.000	0	29%	1	32.080.000	100%	12%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	869.040.000	-	433.530.000	-	32.580.000	0	32.580.000	0	8%	100	32.580.000	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	869.040.000	-	433.530.000	-	32.580.000	0	32.580.000	0	8%	100	32.580.000	100%	4%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	609.840.000	-	303.930.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	259.200.000	-	129.600.000	-	32.580.000	0	32.580.000	0	25%	1	32.580.000	100%	13%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	465.600.000	-	227.850.000	-	26.742.200	0	26.742.200	0	12%	100	26.742.200	100%	6%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	465.600.000	-	227.850.000	-	26.742.200	0	26.742.200	0	12%	100	26.742.200	100%	6%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	316.800.000	-	153.450.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	-	74.400.000	-	26.742.200	0	26.742.200	0	36%	1	26.742.200	100%	18%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	611.520.000	-	288.810.000	-	40.091.080	0	40.091.080	0	14%	100	40.091.080	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	611.520.000	-	288.810.000	-	40.091.080	0	40.091.080	0	14%	100	40.091.080	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	364.320.000	-	177.210.000	-	22.379.080	0	22.379.080	0	13%	1	22.379.080	100%	6%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	247.200.000	-	111.600.000	-	17.712.000	0	17.712.000	0	16%	1	17.712.000	100%	7%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	486.660.000	-	212.400.000	-	32.781.384	0	32.781.384	0	15%	100	32.781.384	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	486.660.000	-	212.400.000	-	32.781.384	0	32.781.384	0	15%	100	32.781.384	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	251.460.000	-	118.800.000	-	12.746.384	0	12.746.384	0	11%	1	12.746.384	100%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	235.200.000	-	93.600.000	-	20.035.000	0	20.035.000	0	21%	1	20.035.000	100%	9%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	447.780.000	-	220.920.000	-	14.572.900	0	14.572.900	0	7%	100	14.572.900	100%	3%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	447.780.000	-	220.920.000	-	14.572.900	0	14.572.900	0	7%	100	14.572.900	100%	3%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	298.980.000	-	146.520.000	-	14.572.900	0	14.572.900	0	10%	1	14.572.900	100%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	-	74.400.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	571.500.000	-	263.730.000	-	38.071.844	0	38.071.844	0	14%	100	38.071.844	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	571.500.000	-	263.730.000	-	38.071.844	0	38.071.844	0	14%	100	38.071.844	100%	7%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	326.700.000	-	165.330.000	-	22.567.244	0	22.567.244	0	14%	1	22.567.244	100%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	244.800.000	-	98.400.000	-	15.504.600	0	15.504.600	0	16%	1	15.504.600	100%	6%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	456.900.000	-	225.480.000	-	19.278.000	0	19.278.000	0	9%	100	19.278.000	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	456.900.000	-	225.480.000	-	19.278.000	0	19.278.000	0	9%	100	19.278.000	100%	4%	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	346.500.000	-	170.280.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	50	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000	-	55.200.000	-	19.278.000	0	19.278.000	0	35%	1	19.278.000	100%	17%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	329.760.000	-	236.160.000	-	3.120.000	0	3.120.000	0	1%	100	3.120.000	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	329.760.000	-	236.160.000	-	3.120.000	0	3.120.000	0	1%	100	3.120.000	100%	1%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.200.000	-	71.280.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	142.560.000	-	164.880.000	-	3.120.000	0	3.120.000	0	2%	1	3.120.000	100%	2%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	294.480.000	-	124.230.000	-	11.802.200	0	11.802.200	0	10%	100	11.802.200	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	294.480.000	-	124.230.000	-	11.802.200	0	11.802.200	0	10%	100	11.802.200	100%	4%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	223.200.000	-	87.600.000	-	3.912.200	0	3.912.200	0	4%	1	3.912.200	100%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	71.280.000	-	36.630.000	-	7.890.000	0	7.890.000	0	22%	1	7.890.000	100%	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	399.240.000	-	175.620.000	-	27.552.558	0	27.552.558	0	16%	100	27.552.558	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	399.240.000	-	175.620.000	-	27.552.558	0	27.552.558	0	16%	100	27.552.558	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	244.800.000	-	98.400.000	-	20.875.358	0	20.875.358	0	21%	1	20.875.358	100%	9%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	154.440.000	-	77.220.000	-	6.677.200	0	6.677.200	0	9%	1	6.677.200	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.513.620.000	-	1.226.800.000	-	213.501.977	0	213.501.977	0	17%	100	213.501.977	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.513.620.000	-	1.226.800.000	-	213.501.977	0	213.501.977	0	17%	100	213.501.977	100%	8%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.841.620.000	-	919.600.000	-	100.602.977	0	100.602.977	0	11%	1	100.602.977	100%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	672.000.000	-	307.200.000	-	112.899.000	0	112.899.000	0	37%	0	112.899.000	0%	17%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.717.320.000	-	1.280.650.000	-	104.179.341	0	104.179.341	0	8%	100	104.179.341	100%	4%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.717.320.000	-	1.280.650.000	-	104.179.341	0	104.179.341	0	8%	100	104.179.341	100%	4%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.805.320.000	-	901.450.000	-	32.059.341	0	32.059.341	0	4%	1	32.059.341	100%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	912.000.000	-	379.200.000	-	72.120.000	0	72.120.000	0	19%	0	72.120.000	0%	8%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.892.800.000	-	857.640.000	-	163.470.900	0	163.470.900	0	19%	100	163.470.900	100%	9%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.892.800.000	-	857.640.000	-	163.470.900	0	163.470.900	0	19%	100	163.470.900	100%	9%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.355.200.000	-	682.440.000	-	107.254.500	0	107.254.500	0	16%	1	107.254.500	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	537.600.000	-	175.200.000	-	56.216.400	0	56.216.400	0	32%	0	56.216.400	0	10%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.639.940.000	-	1.272.040.000	-	261.617.233	0	261.617.233	0	21%	100	261.617.233	100%	10%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.639.940.000	-	1.272.040.000	-	261.617.233	0	261.617.233	0	21%	100	261.617.233	100%	10%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.025.540.000	-	1.021.240.000	-	152.441.233	0	152.441.233	0	15%	1	152.441.233	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	614.400.000	-	250.800.000	-	109.176.000	0	109.176.000	0	44%	0	109.176.000	0	18%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.479.460.000	-	737.460.000	-	127.422.050	0	127.422.050	0	17%	100	127.422.050	100%	9%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.479.460.000	-	737.460.000	-	127.422.050	0	127.422.050	0	17%	100	127.422.050	100%	9%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	999.460.000	-	515.460.000	-	72.632.050	0	72.632.050	0	14%	1	72.632.050	100%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	480.000.000	-	222.000.000	-	54.790.000	0	54.790.000	0	25%	0	54.790.000	0	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.071.240.000	-	985.210.000	-	173.407.352	0	173.407.352	0	18%	100	173.407.352	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.071.240.000	-	985.210.000	-	173.407.352	0	173.407.352	0	18%	100	173.407.352	100%	8%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.456.840.000	-	727.210.000	-	77.197.352	0	77.197.352	0	11%	1	77.197.352	100%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	614.400.000	-	258.000.000	-	96.210.000	0	96.210.000	0	37%	0	96.210.000	0	16%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.572.520.000	-	1.255.040.000	-	158.342.400	0	158.342.400	0	13%	100	158.342.400	100%	6%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.572.520.000	-	1.255.040.000	-	158.342.400	0	158.342.400	0	13%	100	158.342.400	100%	6%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.708.520.000	-	851.840.000	-	60.267.400	0	60.267.400	0	7%	1	60.267.400	100%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	864.000.000	-	403.200.000	-	98.075.000	0	98.075.000	0	24%	0	98.075.000	0	11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.509.940.000	-	741.660.000	-	97.721.823	0	97.721.823	0	13%	100	97.721.823	100%	6%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.509.940.000	-	741.660.000	-	97.721.823	0	97.721.823	0	13%	100	97.721.823	100%	6%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.202.740.000	-	588.060.000	-	40.247.823	0	40.247.823	0	7%	1	40.247.823	100%	3%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	307.200.000	-	153.600.000	-	57.474.000	0	57.474.000	0	37%	0	57.474.000	0	19%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.498.740.000	-	673.560.000	-	-	0	-	0	0%	100	-	100%	0%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.498.740.000	-	673.560.000	-	-	0	-	0	0%	100	-	100%	0%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.009.140.000	-	479.160.000	-	-	0	-	0	0%	1	-	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	489.600.000	-	194.400.000	-	-	0	-	0	0%	0	-	0	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.867.160.000	-	867.760.000	-	207.933.256	0	207.933.256	0	24%	100	207.933.256	100%	11%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.867.160.000	-	867.760.000	-	207.933.256	0	207.933.256	0	24%	100	207.933.256	100%	11%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.156.760.000	-	600.160.000	-	96.353.256	0	96.353.256	0	16%	1	96.353.256	100%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	710.400.000	-	267.600.000	-	111.580.000	0	111.580.000	0	42%	0	111.580.000	0	16%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.201.520.000	-	1.042.890.000	-	174.821.000	0	174.821.000	0	17%	100	174.821.000	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.201.520.000	-	1.042.890.000	-	174.821.000	0	174.821.000	0	17%	100	174.821.000	100%	8%	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.539.120.000	-	736.890.000	-	107.666.000	0	107.666.000	0	15%	1	107.666.000	100%	7%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	58	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	662.400.000	-	306.000.000	-	67.155.000	0	67.155.000	0	22%	0	67.155.000	0	10%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.827.620.000	-	903.230.000	-	196.929.960	0	196.929.960	0	22%	100	196.929.960	100%	11%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.827.620.000	-	903.230.000	-	196.929.960	0	196.929.960	0	22%	100	196.929.960	100%	11%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	518.400.000	-	222.000.000	-	153.651.560	0	153.651.560	0	69%	0	153.651.560	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.309.220.000	-	681.230.000	-	43.278.400	0	43.278.400	0	6%	1	43.278.400	100%	3%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	2.202.320.000	-	1.120.680.000	-	90.289.025	0	90.289.025	0	8%	100	90.289.025	100%	4%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	2.202.320.000	-	1.120.680.000	-	90.289.025	0	90.289.025	0	8%	100	90.289.025	100%	4%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	566.400.000	-	264.000.000	-	28.309.025	0	28.309.025	0	11%	0	28.309.025	0%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.635.920.000	-	856.680.000	-	61.980.000	0	61.980.000	0	7%	1	61.980.000	100%	4%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	888.320.000	-	428.650.000	-	89.276.375	0	89.276.375	0	21%	100	89.276.375	100%	10%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	888.320.000	-	428.650.000	-	89.276.375	0	89.276.375	0	21%	100	89.276.375	100%	10%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	268.800.000	-	108.000.000	-	40.227.975	0	40.227.975	0	37%	0	40.227.975	0%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	619.520.000	-	320.650.000	-	49.048.400	0	49.048.400	0	15%	1	49.048.400	100%	8%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	%	100	-	-	223.520.000	-	14.652.000	0	14.652.000	0	7%	100	14.652.000	100%	0	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola	%	100	-	-	223.520.000	-	14.652.000	0	14.652.000	0	7%	100	14.652.000	100%	0	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD (TK Pembina)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	-	-	90.420.000	-		0	-	0	0%	0	-	0%	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (TK Pembina)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	-	-	133.100.000	-	14.652.000	0	14.652.000	0	11%	1	14.652.000	0	0	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
TUJUAN					TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MADIUN YANG SEHAT	PERSENTASE KELUARGA SEHAT	%	58		57												
Sasaran					Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,58		0,57												
					Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rata - Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Skor	4,78		4,78												
						Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,4		4,39												
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	88,1	122.130.031.127	88	59.156.988.149	88,6	16.118.400	0	16.118.400	0%	0%	0	16.118.400	0%	0%	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	%	100	900.046.350	100	439.047.000	68,1	-	68,1	-	68%	0%	100	-	100%	0%	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	570.231.450	8	273.326.100	3	-	3	-	38%	0%	3	-	19%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	212.110.000	3	104.800.000	2	-	2	-	67%	0%	2	-	33%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	117.704.900	5	60.920.900	5	-	5	-	100%	0%	5	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	115.748.972.167	100	55.946.579.110	100	-	100	-	100%	0%	100	-	100%	0%	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	496	115.748.972.167	496	55.946.579.110	484	-	484	-	98%	0%	484	-	98%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3.487.775.860	100	1.621.699.589	55,7	-	55,7	-	56%	0%	56	-	56%	0%	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.152.775.860	1	936.699.589	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	305	1.335.000.000	150	685.000.000	17	-	17	-	11%	0%	17	-	6%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	650.043.450	100	430.668.450	0	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	281.414.450	10	154.997.450	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	151	368.629.000	75	275.671.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	%	100	901.135.372	100	867.690.000	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	901.135.372	12	867.690.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.343.193.300	100	718.994.000	51,4	16.118.400	51,4	16.118.400	51%	2%	51	16.118.400	51%	1%	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	795.008.900	109	405.696.900	3	13.027.400	3	13.027.400	3%	3%	3	13.027.400	0	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	181.889.900	1	162.876.000	1	2.261.000	1	2.261.000	100%	1%	1	2.261.000	50%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	366.294.500	273	150.421.100	21	830.000	21	830.000	8%	1%	21	830.000	0	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91,7	86.913.310.935	75	6.749.269.134	0	5.047.101.400	0	5.047.101.400	0%	75%	0	5.047.101.400	0%	6%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	91,4	10.518.891.894	90,32	6.749.269.134	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	12	492.000.000	6	240.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	30	451.668.300	15	220.326.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	205	1.779.157.064	100	1.170.083.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	278	171.964.000	138	150.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	167	407.768.032	100	297.768.032	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	22	7.128.363.463	10	4.628.179.402	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	24	87.971.035	12	42.912.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	76.394.419.041	75	-	0	5.047.101.400	0	5.047.101.400	0%	0	0	5.047.101.400	0%	7%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4850	1.077.549.566	2430	339.891.900	702	-	702	-	29%	0%	702	-	14%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4626	215.160.593	2318	55.048.300	700	4.032.000	700	4.032.000	30%	7%	700	4.032.000	15%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4404	192.682.520	2207	77.589.500	678	420.000	678	420.000	31%	1%	678	420.000	15%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17992	674.410.040	8981	418.713.400	2509	-	2509	-	28%	0%	2509	-	14%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63164	125.366.866	31582	30.698.000	27848	-	27848	-	88%	0%	27848	-	44%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	260390	207.963.923	129950	69.802.300	38744	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70070	272.565.014	34490	43.368.200	14341	-	14341	-	42%	0%	14341	-	20%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	81774	284.614.474	40710	27.003.500	6209	-	6209	-	15%	0%	6209	-	8%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16355	439.479.377	8142	207.629.500	3303	-	3303	-	41%	0%	3303	-	20%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	689	233.121.667	343	112.931.100	141	-	141	-	41%	0%	141	-	20%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12123	1.030.057.562	5729	783.915.200	1359	-	1359	-	24%	0%	1359	-	11%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12097	311.836.954	6051	71.392.500	1975	-	1975	-	33%	0%	1975	-	16%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	1.622.656.500	3	206.459.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	219.777.500	2	171.619.000	0	14.445.000	0	14.445.000	0%	8%	0	14.445.000	0%	7%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	316.548.700	5	292.075.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	308.505.600	1	154.252.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	6	150.592.500	3	97.124.100	3	15.972.800	3	15.972.800	100%	16%	3	15.972.800	50%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	689	41.325.600	343	26.925.600	60	-	60	-	17%	0%	60	-	9%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	1.438.449.800	2	1.016.286.200	2	34.728.000	2	34.728.000	100%	3%	2	34.728.000	50%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	72	63.252.031.821	36	27.218.762.555	10	4.977.503.600	10	4.977.503.600	28%	18%	10	4.977.503.600	14%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	36	59.748.800	18	29.686.000	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	18	658.233.630	9	376.478.800	2	-	2	-	22%	0%	2	-	11%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	14	2.185.827.034	7	1.096.936.017	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	49.896.000	6	11.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1.026.017.000	1	461.017.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	93	1.328.792.500	-	-	0	-	92,5	-	0	0	93	-	99%	0%	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	%	93	138.564.000	-	-	0	-	92,5	-	0	0	93	-	99%	0%	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2363	54.081.500	1179	10.815.500	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1221	45.296.700	575	13.400.500	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	100	69.649.300	50	27.079.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	154.323.600	2	80.161.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	%	96	1.328.792.500	95	608.824.000	92	-	92	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	138.564.000	100	69.282.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	138.564.000	6	69.282.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP	%	96	1.190.228.500	95	539.542.000	92	-	92	-	97%	0%	92	-	96%	0%	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1350	1.190.228.500	650	539.542.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	89	565.248.200	89	466.827.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	90	165.732.200	89	139.761.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	111%	0%	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	165.732.200	2	139.761.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	%	90	399.516.000	89	327.066.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	111%	0%	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	399.516.000	2	327.066.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	71	6.554.597.012	71	2.767.594.600	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	%	100	399.334.012	100	312.444.600	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2	399.334.012	1	312.444.600	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota.	%	100	6.155.263.000	100	2.455.150.000	-	-	1	-	1%	0%	100	-	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	6.155.263.000	1	2.455.150.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN																	
Sasaran					Terkendalinya Jumlah Penduduk	*Contraception Prevalency Rate* (CPR) di atas rata-rata nasional	%	69		68,5		70,5										
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	15	858.875.800	14	614.587.000	13	2.097.900	13	2.097.900	93%	0%		-		-	
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	8		7		7		7		100%						
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	Sekolah	7	96.377.400	6	71.520.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	1429%	0%	
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	26	96.377.400	13	71.520.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	%	100	762.498.400	100	543.067.000	55	2.097.900	55	2.097.900	55%	0%	100	2.097.900	100%	0%	
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	54	660.969.400	27	494.521.000	27	-	27	-	100%	0%	27	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	54	101.529.000	27	48.546.000	27	2.097.900	27	2.097.900	100%	4%	27	2.097.900	50%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	%	6,75	3.227.930.084	6,8	2.098.828.000	0,63	-	1	-	9%	0%	1	-	9%	0%	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	1.220.831.000	100	736.891.000	4,88	-	4,88	-	5%	0%	100	-	100%	0%	
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	220.000.000	2	140.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	24	324.396.000	12	131.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	18	84.000.000	9	45.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	6	250.298.000	3	150.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	27	342.137.000	27	270.137.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kader yang Melakukan Updating Data	%	100	155.887.000	100	-	0	-	0	-	0%	0	100	-	100%	0%	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	300	155.887.000	150	88.687.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	%	100	1.285.375.884	100	975.777.000	86,9	-	86,9	-	87%	0%	100	-	100%	0%	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	48	28.300.000	24	15.300.000	40	-	40	-	167%	0%	40	-	83%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1322	1.228.725.884	661	943.827.000	171	-	171	-	26%	0%	171	-	13%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	8	28.350.000	4	16.650.000	1	-	1	-	25%	0%	1	-	13%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	%	100	565.836.200	100	386.160.000	74,1	-	74,1	-	74%	0%	100	-	100%	0%	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	14	7.414.000	7	3.707.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	7	558.422.200	7	382.453.000	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87,8	3.485.624.800	87,7	2.090.700.000	97	-	97	-	111%	0%	97	-	110%	0%	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	32	1.595.624.800	32	1.145.700.000	11	-	11	-	34%	0%	100	-	313%	0%	
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	16	57.600.000	8	28.800.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	64	748.032.500	32	711.456.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	50	605.372.000	25	302.686.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	420	184.620.300	210	102.757.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	%	72	1.890.000.000	72	945.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	20	900.000.000	10	450.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	20	990.000.000	10	495.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	A	254.655.266.216	88	127.994.140.651	-	20.780.614.555	0	20.780.614.555	0%	16%	0	20.780.614.555	0	8%	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	79.777.082.078	100	35.618.202.540	-	2.937.068.328	0	2.937.068.328	0%	8%	100	2.937.068.328	100%	4%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	409	79.777.082.078	409	35.618.202.540	387	2.937.068.328	387	2.937.068.328	95%	8%	387	2.937.068.328	95%	4%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	174.878.184.138	100	92.375.938.111		17.843.546.227	0	17.843.546.227	0%	19%	100	17.843.546.227	100%	10%	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2	174.878.184.138	1	92.375.938.111	1	17.843.546.227	1	17.843.546.227	100%	19%	1	17.843.546.227	50%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	%	75	110.286.653.556	75	5.099.565.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator SPM kesehatan rujukan mencapai target	%	91	110.286.653.556	90,32	5.099.565.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	110%	0%	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Unit	5	7.985.985.425	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	5	79.232.096.871	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	37	7.948.077.781	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	6	3.000.000.000	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	12.120.493.479	6	5.099.565.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	5.229.619.662	75	2.853.816.000	0	346.787.732	0	346.787.732	0%	12%	0	346.787.732	0%	7%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	5.229.619.662	75	2.853.816.000	0	346.787.732	0	346.787.732	0%	12%	100	346.787.732	133%	7%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	786.903.000	3	405.900.000	1	40.740.000	1	40.740.000	33%	10%	1	40.740.000	17%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	683.169.662	1	618.566.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.759.547.000	4	1.829.350.000	1	306.047.732	1	306.047.732	25%	17%	1	306.047.732	13%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	4.670.939.222	75	2.571.015.000	0	360.827.451	0	360.827.451	0%	14%	0	360.827.451	0%	8%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	4.670.939.222	75	2.571.015.000	0	360.827.451	0	360.827.451	0%	14%	100	360.827.451	133%	8%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	707.378.000	3	364.976.000	3	36.495.000	3	36.495.000	100%	10%	3	36.495.000	50%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	681.489.222	1	617.445.000	1		1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.282.072.000	4	1.588.594.000	3	324.332.451	3	324.332.451	75%	20%	3	324.332.451	38%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	5.254.374.774	75	2.812.153.000	0	328.917.800	0	328.917.800	0%	12%	0	328.917.800	0%	6%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	5.254.374.774	75	2.812.153.000	0	328.917.800	0	328.917.800	0%	12%	100	328.917.800	133%	6%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	983.710.000	3	497.260.000	3	99.450.000	3	99.450.000	100%	20%	3	99.450.000	50%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	683.664.774	1	617.893.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.587.000.000	4	1.697.000.000	3	229.467.800	3	229.467.800	75%	14%	3	229.467.800	38%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	4.780.144.281		2.733.929.000	0	445.954.902	0	445.954.902	0	16%	0	445.954.902	0%	9%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	4.780.144.281		2.733.929.000	0	445.954.902	0	445.954.902	0	16%	100	445.954.902	133%	9%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	631.008.000	3	335.004.000	3	66.990.000	3	66.990.000	100%	20%	3	66.990.000	50%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	667.425.231	1	605.825.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.481.711.050	4	1.793.100.000	1	378.964.902	1	378.964.902	25%	21%	1	378.964.902	13%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	6.074.038.191	75	3.432.429.000	0	489.548.628	0	489.548.628	0%	14%	0	489.548.628	0%	8%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	6.074.038.191	75	3.432.429.000		489.548.628	0	489.548.628	0%	14%	100	489.548.628	133%	8%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	1.379.159.000	3	706.200.000	3	118.590.000	3	118.590.000	100%	17%	3	118.590.000	50%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	731.879.191	1	663.229.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.963.000.000	4	2.063.000.000	2	370.958.628	2	370.958.628	50%	18%	2	370.958.628	25%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	75	5.765.048.939	75	3.152.701.000	0	363.953.213	0	363.953.213	0%	12%	0	363.953.213	0%	6%	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	5.765.048.939	75	3.152.701.000	0	363.953.213	0	363.953.213	0%	12%	100	363.953.213	133%	6%	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	1.240.660.000	3	646.954.000	3	64.695.000	3	64.695.000	100%	10%	3	64.695.000	50%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	724.388.939	1	655.747.000	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	3.800.000.000	4	1.850.000.000	2	299.258.213	2	299.258.213	50%	16%	2	299.258.213	25%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
TUJUAN					TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG MANTAB	INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR	INDEKS	92,6		92,49												
Sasaran					Meningkatnya Ketaatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sesuai Ketentuan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,94		3,94												
						Persentase ketaatan penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan	%	100		100												
					Meningkatnya Aksesbilitas Kota dalam Kondisi Mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	98,3		98,18												
					Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100		100												
					Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	80,2		80,15												
						Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	16,4		16,97												
						Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100		100												
						Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	%	100		100												
					Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Presentase pelaku jasa konstruksi yang kompeten	%	100		100												
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	85	47.474.021.003	85	14.605.919.883	-	2.247.839.973	0	2.247.839.973	0%	15%	0	2.247.839.973	0%	5%	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	15.253.382.720	100	294.251.670	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	100	15.025.000.000	8	140.868.950	3	-	3	-	38%	0%	3	-	3%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea lisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	228.382.720	12	153.382.720	2	-	2	-	17%	0%	2	-	17%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	15.025.000.000	100	7.500.000.000	0	1.126.072.739	0	1.126.072.739	0%	15%	100	1.126.072.739	100%	7%	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	48	15.025.000.000	48	7.500.000.000	0	1.126.072.739	0	1.126.072.739	0%	15%	0	1.126.072.739	0%	7%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	942.087.000	100	467.087.000	0	93.022.452	0	93.022.452	0%	20%	100	93.022.452	100%	10%	
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	942.087.000	12	467.087.000	3	93.022.452	3	93.022.452	25%	20%	3	93.022.452	25%	10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.896.721.848	100	496.721.848	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	2	1.146.721.848	2	496.721.848	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	%	100	8.725.316.799	100	4.200.316.799	0	818.097.790	0	818.097.790	0%	19%	100	818.097.790	100%	9%	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.725.316.799	12	4.200.316.799	3	818.097.790	3	818.097.790	25%	19%	3	818.097.790	25%	9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	%	100	3.631.512.636	100	1.647.542.566	0	210.646.992	0	210.646.992	0%	13%	100	210.646.992	100%	6%	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	66	1.770.673.670	54	945.673.670	13	209.796.992	13	209.796.992	24%	22%	13	209.796.992	20%	12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1.303.650.000	1	678.650.000,00	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	557.188.966	5	23.218.896	0	850.000	0	850.000	0%	4%	0	850.000	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	83	21.638.940.000	82,66	7.538.940.000	-	75.800.000	0	75.800.000	0%	1%	0	75.800.000	0%	0%	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	%	83,6	21.638.940.000	81,67	7.538.940.000	-	75.800.000	0	75.800.000	0%	1%	0	75.800.000	0%	0%	
1	3	2	2.01	25	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	1	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	4	914.460.000	2	639.460.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	2.030.260.000	1	805.260.000	-	75.800.000	0	75.800.000	0%	9%	0	75.800.000	0%	4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1	13.119.220.000	1	6.094.220.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	3	2	2.01	98	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	1	5.025.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	%	0,23	873.476.100	0,23	598.476.100	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum	SR	100	873.476.100	100	598.476.100	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	3	3	2.01	32	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	873.476.100	100	598.476.100	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	%	100	2.867.925.500	100	2.830.200.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik	%	100	2.867.925.500	100	2.830.200.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	5	2.01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	1.915.100.000	1	1.415.100.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	5	952.825.500	5	1.415.100.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	83	7.283.100.200	82,66	3.208.100.200	-	398.537.645	0	398.537.645	0%	12%	0	398.537.645	0%	5%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	%	82	7.283.100.200	81,67	3.208.100.200	-	398.537.645	0	398.537.645	0%	12%	0	398.537.645	0%	5%	
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m	2000	19.657.870.000	2000	7.632.870.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	sistem drainase perkotaan	1	21.808.020.000	1	9.783.020.000	-	599.014.000	0	599.014.000	0%	6%	0	599.014.000	0%	3%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	12	1.924.910.000	12	949.910.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	sistem drainase perkotaan	1	5.358.190.200	1	2.258.190.200	-	398.537.645	0	398.537.645	0%	18%	0	398.537.645	0%	7%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan	%	-	-	22	231.300.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	0	0	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah di wilayah kota	%	-	-	72	231.300.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0	
1	3	7	2.01	15	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari	-	-	1	231.300.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	55.341.870.000	100	19.291.870.000	-	243.608.000	0	243.608.000	0%	1%	100	243.608.000	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/ gedung yang terbangun/ terehabilitasi	%	100	55.341.870.000	100	19.291.870.000	-	243.608.000	0	243.608.000	0%	1%	100	243.608.000	100%	0%	
1	3	8	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	8	1.025.000.000	8	500.000.000	-	243.608.000	0	243.608.000	0%	49%	0	243.608.000	0%	24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	53.791.870.000	2	18.541.870.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	10	525.000.000	10	250.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	3.156.702.000	100	1.829.302.000	-	107.160.400	0	107.160.400	0%	6%	100	107.160.400	100%	3%	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	%	100	3.156.702.000	100	1.829.302.000	-	107.160.400	0	107.160.400	0%	6%	100	107.160.400	100%	3%	
1	3	9	2.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	1	3.156.702.000	1	1.829.302.000	-	107.160.400	28	107.160.400	2800%	6%	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan kota yang baik	%	95,9	75.282.671.600	95,8	37.372.671.600	-	1.372.377.920	0	1.372.377.920	0%	4%	100	1.372.377.920	104%	2%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	95,9	75.282.671.600	95,8	37.372.671.600	-	1.372.377.920	0	1.372.377.920	0%	4%	0	1.372.377.920	0%	2%	
1	3	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	5	546.998.400	5	221.998.400	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	2	3.023.710.000	2	23.710.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	1	4.216.740.000	1	2.216.740.000	-	79.200.000	0	79.200.000	0%	4%	0	79.200.000	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	8	41.313.630.000	8	23.288.630.000	-	237.280.000	0	237.280.000	0%	1%	0	237.280.000	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	37	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	1	2.454.010.000	1	929.010.000	-	47.760.000	0	47.760.000	0%	5%	0	47.760.000	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	3	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	25	496.430.000	25	221.430.000	-	99.300.000	0	99.300.000	0%	45%	0	99.300.000	0%	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	41	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM	1	10.200.930.000	1	4.175.930.000	-	59.360.000	0	59.360.000	0%	1%	0	59.360.000	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	2	518.960.000	2	243.960.000	-	15.840.000	0	15.840.000	0%	6%	0	15.840.000	0%	3%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	485	843.810.000	3	408.810.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	20	11.667.453.200	20	5.642.453.200	-	833.637.920	0	833.637.920	0%	15%	0	833.637.920	0%	7%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	23,6	2.160.698.300	22,75	1.175.698.300	-	-	0	-	0%	0%	100	-	424%	0%	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	%	23,6	787.795.000	22,75	262.795.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	60	787.795.000	60	262.795.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	%	100	228.926.500	100	103.926.500	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2	228.926.500	2	103.926.500	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	100	1.143.976.800	100	808.976.800	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	3	11	2.04	4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	paket pekerjaan	-	-	100	808.976.800	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04	7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	paket pekerjaan	100	1.143.976.800	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	2.575.000.000	100	1.250.000.000	-	27.495.352	0	27.495.352	0%	2%	100	27.495.352	100%	1%	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	1.025.000.000	100	500.000.000	-	3.471.500	0	3.471.500	0%	1%	0	3.471.500	0%	0%	
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.025.000.000	1	500.000.000	-	3.471.500	0	3.471.500	0%	1%	0	3.471.500	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4	825.000.000	0	400.000.000	-	21.987.101	0	21.987.101	0	5%	0	21.987.101	0%	3%	
1	3	12	2.03	3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	20	825.000.000	20	400.000.000	-	21.987.101	0	21.987.101	0%	5%	0	21.987.101	0%	3%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	725.000.000	100	350.000.000	-	2.036.751	0	2.036.751	0%	1%	0	2.036.751	0%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	3	12	2.04	8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	300	725.000.000	300	350.000.000	-	2.036.751	0	2.036.751	0%	1%	0	2.036.751	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1							4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
TUJUAN					TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG RAMAH, MAJU, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	98,6		97,31													
Sasaran					Meningkatnya lingkungan Permukiman yang Sehat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,15		4,15													
						Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,4		99,77													
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	84,9	11.152.581.786	84,85	10.959.331.786	-	1.563.266.315	0	1.563.266.315	0%	14%	A	1.563.266.315	100%	14%	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	63.050.000	100	18.050.000	-	3.350.000	0	3.350.000	0%	19%	100	3.350.000	100%	5%	
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	63.050.000	20	18.050.000	-	3.350.000	0	3.350.000	0%	19%	0	3.350.000	0%	5%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	122.000.000	100	5.678.750.000	-	885.788.983	0	885.788.983	0%	16%	100	885.788.983	100%	726%	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36		40	5.617.750.000	-	874.891.083	34	874.891.083	85%	16%	34	874.891.083	94%	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	13	122.000.000	13	61.000.000	-	10.897.900	0	10.897.900	0%	18%	0	10.897.900	0%	9%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	270.350.000	100	135.350.000	-	690.000	0	690.000	0%	1%	100	690.000	100%	0%	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	250.350.000	1	125.350.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	orang	34	20.000.000	34	10.000.000	-	690.000	0	690.000	0%	7%	0	690.000	0%	3%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	215.570.735	100	115.570.735	-	40.630.500	0	40.630.500	0%	35%	100	40.630.500	100%	19%	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	20	467.760.000	20	233.880.000	-	40.630.500	0	40.630.500	0%	17%	0	40.630.500	0%	9%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	215.570.735	100	115.570.735	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	215.570.735	11	115.570.735	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	4.685.795.316	100	2.185.795.316	-	405.961.380	0	405.961.380	0%	19%	100	405.961.380	100%	9%	
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.685.795.316	12	2.185.795.316	-	405.961.380	0	405.961.380	0%	19%	0	405.961.380	0%	9%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	5.580.245.000	100	2.710.245.000	-	227.535.452	0	227.535.452	0%	8%	100	227.535.452	100%	4%	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	65	4.300.000.000	65	2.100.000.000	-	155.419.452	0	155.419.452	0%	7%	0	155.419.452	0%	4%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	1	250.000.000	1	100.000.000	-	3.425.000	0	3.425.000	0%	3%	0	3.425.000	0%	1%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	106	1.030.245.000	106	510.245.000	-	68.691.000	0	68.691.000	0%	13%	0	68.691.000	0%	7%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	%	100	3.392.191.000	100	1.369.341.000	-	116.901.000	0	116.901.000	0%	9%	100	116.901.000	100%	3%	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Dokumen	1	185.310.000	1	66.360.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	185.310.000	1	66.360.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	lokasi	3	2.968.381.000	1	1.210.481.000	-	111.627.000	0	111.627.000	0%	9%	0	111.627.000	0%	4%	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	3	2.968.381.000	3	1.210.481.000	-	111.627.000	0	111.627.000	0%	9%	0	111.627.000	0%	4%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	238.500.000	100	92.500.000	-	5.274.000	0	5.274.000	0%	6%	0	5.274.000	0%	2%	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan		238.500.000	1	92.500.000	-	5.274.000	0	5.274.000	0%	6%	0	5.274.000	0	2%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	17.656.594.176	100	7.139.650.000	-	12.000.000	0	12.000.000	0%	0%	100	12.000.000	100%	0%	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	521.000.000	0,5	301.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0,5	-	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	4	3	2.02	14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	521.000.000	1	301.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	17.135.594.176	0,5	6.838.650.000	-	12.000.000	0	12.000.000	0%	0%	0	12.000.000	0%	0%	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	160	5.255.050.000	160	2.368.850.000	-	12.000.000	0	12.000.000	0%	1%	0	12.000.000	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	9	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	16,41	5.823.094.176	16,41	1.412.350.000	-	60.269.300	0	60.269.300	0%	4%	0	60.269.300	0%	1%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit	55	6.057.450.000	55	3.057.450.000	-	22.862.000	0	22.862.000	0%	1%	0	22.862.000	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	39.911.205.521	100	17.861.205.521	-	1.693.249.600	0	1.693.249.600	0%	9%	0	1.693.249.600	0%	4%	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	%	100	39.911.205.521	100	17.861.205.521	-	1.693.249.600	0	1.693.249.600	0%	9%	0	1.693.249.600	0%	4%	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	39.911.205.521	3	17.861.205.521	-	1.693.249.600	3	1.693.249.600	100%	9%	3	1.693.249.600	100%	4%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	%	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	%	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	72.400.000	100	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengekta, konflik, perkara pertanahan yang tertangani	%	100	72.400.000	100	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	72.400.000	1	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	-15.182.055.000	100	-145.855.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	15.182.055.000	100	145.855.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.109.655.000	1	109.655.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	5	2.01	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	72.400.000	1	36.200.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	%	100	1.280.000.000	100	740.000.000	-	66.986.500	0	66.986.500	0%	9%	0	66.986.500	0%	5%	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	%	100	1.280.000.000	100	740.000.000	-	66.986.500	0	66.986.500	0%	9%	0	66.986.500	0%	5%	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	1.280.000.000	10	740.000.000	-	66.986.500	0	66.986.500	0%	9%	0	66.986.500	0%	5%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1							4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
TUJUAN					TERWUJUDNYA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	INDEKS RASA AMAN	Skor	84		83												
Sasaran					Meningkatnya Penegakan Hukum dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta Peraturan Perundang-undangan lainnya	Persentase Masyarakat yang Taat Perda dan Perwal	%	98		98												
					Meningkatnya Kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100		100												
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,3		4,26												
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85	29.857.337.495	84	14.541.705.432	0	1.753.427.888	0	1.753.427.888	0%	12%	0	1.753.427.888	0%	6%	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	492.134.000	100	195.425.000	50	-	50	-	50%	0%	50	-	50%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	492.134.000	12	195.425.000	6	-	6	-	50%	0%	6	-	25%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	14.945.694.000	100	9.772.101.808	54	1.122.607.101	54	1.122.607.101	54%	11%	54	1.122.607.101	54%	8%	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	142	14.945.694.000	93	9.772.101.808	42	1.122.607.101	54	1.122.607.101	58%	11%	54	1.122.607.101	38%	8%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	%	100	1.580.600.000	100	824.086.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1.580.600.000	1	824.086.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	700.000.000	100	350.000.000	14	11.509.087	14	11.509.087	14%	3%	14	11.509.087	14%	2%	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	56	700.000.000	36	350.000.000	5	11.509.087	5	11.509.087	14%	3%	5	11.509.087	9%	2%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%	100	3.094.447.095	100	1.019.255.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	2.271.447.095	18	59.585.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	300.000.000	1	810.670.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	523.000.000	12	149.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	6.424.462.400	100	1.193.196.000	47	555.092.400	47	555.092.400	47%	47%	47	555.092.400	47%	9%	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	6.424.462.400	12	1.193.196.000	5	555.092.400	5	555.092.400	42%	47%	5	555.092.400	21%	9%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.620.000.000	100	1.187.641.624	10,7	64.219.300	1	64.219.300	1%	5%	1	64.219.300	1%	2%	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	45	1.640.000.000	25	745.500.000	8	64.219.300	8	64.219.300	32%	9%	8	64.219.300	18%	4%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	750.000.000	2	332.141.624	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	230.000.000	5	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	98	16.760.095.000	98	2.861.558.800	99,8	2.218.264.850	99	2.218.264.850	101%	78%	99	2.218.264.850	101%	13%	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	98	10.060.095.000	98	1.019.130.000	99,8	2.180.569.850	78	2.180.569.850	80%	214%	78	2.180.569.850	80%	22%	
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8	397.344.000	4	158.860.000	1	6.200.000	1	6.200.000	25%	4%	1	6.200.000	13%	2%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	8	5.936.499.000	4	2.562.125.50	1	2.132.385.850	1	2.132.385.850	25%	0	1	2.132.385.850	13%	36%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	159	1.424.000.000	119	2.562.125.50	1	2.399.000	165	2.399.000	139%	0	165	2.399.000	104%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	24	932.038.000	12	294.400.000	3	32.120.000	-	32.120.000	0%	11%	0	32.120.000	0%	3%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	24	1.370.214.000	12	565.870.000	3	7.465.000	-	7.465.000	0%	1%	0	7.465.000	0%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	6.400.000.000	98	1.692.428.800	100	16.320.000	4	16.320.000	4%	1%	4	16.320.000	4%	0%	
1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	18	4.600.000.000	6	792.428.800	2	9.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	18	1.800.000.000	6	900.000.000	2	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	%	80	300.000.000	80	150.000.000	25	21.375.000	25	21.375.000	31%	14%	25	21.375.000	31%	7%	
1	5	2	2.03	6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	3	300.000.000	1	150.000.000	1	21.375.000	1	21.375.000	100%	14%	1	21.375.000	33%	7%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	3.748.746.000	100	2.024.373.000	100	139.765.000	100	139.765.000	100%	7%	100	139.765.000	100%	4%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3.648.746.000	100	1.974.373.000	100	139.765.000	100	139.765.000	100%	7%	100	139.765.000	100%	4%	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	10	2.969.990.000	4	1.617.195.000	1	120.680.000	1	120.680.000	25%	7%	1	120.680.000	10%	4%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	18	678.756.000	12	357.178.000	2	19.085.000	2	19.085.000	17%	5%	2	19.085.000	11%	3%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	%	100	100.000.000	100	50.000.000	25	-	25	-	25%	0%	25	-	25%	0%	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	10	100.000.000	4	50.000.000	1	-	1	-	25%	0%	1	-	10%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1							4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1																						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
TUJUAN					MENURUNNYA RESIKO BENCANA DAERAH	INDEKS RESIKO BENCANA	Indeks	93,5		95,5												
						INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Indeks	4,72		4,7												
Sasaran					Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58		0,54												
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,2		90,21												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	86,3		86												
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	8.458.502.204	86	3.642.961.703		558.953.391	0	558.953.391	0%	15%	A	558.953.391	100%	7%	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	5.615.000	100	2.300.000	25	-	25	-	25%	0%	100	-	100%	0%	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.615.000	6	2.300.000	2	-	2	-	33%	0%	2	-	33%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	3.450.812.703	100	1.694.600.703	100	277.088.038	100	277.088.038	100%	16%	100	277.088.038	100%	8%	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	3.450.812.703	11	1.694.600.703	10	277.088.038	10	277.088.038	91%	16%	10	277.088.038	83%	8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	475.000.000	100	-	25	17.028.891	25	17.028.891	25%	0	100	17.028.891	100%	4%	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	475.000.000	0	-	3	17.028.891	3	17.028.891	0	0	3	17.028.891	25%	4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	159.817.000	100	52.498.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	159.817.000	3	52.498.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	3.462.478.501	100	1.559.391.000	25	233.541.893	25	233.541.893	25%	15%	100	233.541.893	100%	7%	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.462.478.501	12	1.559.391.000	3	233.541.893	3	233.541.893	25%	15%	3	233.541.893	25%	7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	904.779.000	100	334.172.000	25	31.294.569	25	31.294.569	25%	9%	100	31.294.569	100%	3%	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	661.753.000	8	214.917.000	3	27.619.569	3	27.619.569	38%	13%	3	27.619.569	30%	4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	201.010.000	1	101.010.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	42.016.000	5	18.245.000	3	3.675.000	3	3.675.000	60%	20%	3	3.675.000	60%	9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	839.267.000	100	421.830.000	100	49.875.000	100	49.875.000	100%	12%	100	49.875.000	100%	6%	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	278.965.000	100	120.490.000	33	39.365.000	33	39.365.000	33%	33%	100	39.365.000	100%	14%	
1	5	3	2.01	7	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1350	278.965.000	450	120.490.000	150	39.365.000	150	39.365.000	33%	33%	150	39.365.000	11%	14%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	-	100	8.754.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	400	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	12	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	600	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	1	58.754.000	5	8.754.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	650	146.662.000	250	47.360.000	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	126.501.000	30	25.085.000	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	11	219.611.000	11	44.260.000	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	50	65.962.000	50	21.005.000	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	11	220.119.000	11	63.360.000	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	347.670.000	100	172.419.000	100	6.285.000	100	6.285.000	100%	4%	100	6.285.000	100%	2%	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	18	92.547.000	42	34.410.000	254	6.285.000	18	6.285.000	43%	18%	18	6.285.000	100%	7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	150	209.323.000	70	122.209.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	18	45.800.000	18	15.800.000	248	-	248	-	1378%	0%	248	-	1378%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	212.632.000	100	120.167.000	0	4.225.000	0	4.225.000	0%	4%	0	4.225.000	0%	2%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
				8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	50	107.440.000	50	49.965.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	6	10.930.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	1	94.262.000	1	70.202.000	0	4.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
TUJUAN					TERWUJUDNYA FAKIR MISKIN YANG MANDIRI	JUMLAH FAKIR MISKIN YANG MANDIRI	Orang	410		400													
						INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	Indeks	0,09		0,093													
Sasaran					Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,84		4,83													
						Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100		100													
					Meningkatnya Pemberdayaan Sosial PSKS	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	92		92,01													
					Meningkatnya Rehabilitasi Sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100		100													
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	18.012.112.276	85,5	8.324.177.694	0	1.113.907.012	0	1.113.907.012	0%	13%	A	1.113.907.012	100%	6%	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	389.907.551	100	162.215.000	0	10.682.000	0	10.682.000	0%	7%	100	10.682.000	100%	3%	
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	389.907.551	10	162.215.000	3	10.682.000	3	10.682.000	30%	7%	3	10.682.000	30%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	%	100	12.715.914.163	100	6.557.938.804	0	804.528.492	0	804.528.492	0%	12%	100	804.528.492	100%	6%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	12.715.914.163	35	6.557.938.804	26	804.528.492	26	804.528.492	74%	12%	26	804.528.492	74%	6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	%	100	571.155.622	0	-	0	-	0	-	0	0	100	-	100%	0%	
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	233.940.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	337.215.622	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.935.570.992	100	927.288.840	0	163.362.570	0	163.362.570	0%	18%	100	163.362.570	100%	8%	
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.220.844.957	12	612.565.840	3	140.037.570	3	-	25%	-	-	-	-	-	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	714.726.035	12	314.723.000	11	23.325.000	11	23.325.000	92%	7%	11	23.325.000	92%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.312.080.000	100	256.610.000	0	106.700.000	0	106.700.000	0%	42%	100	106.700.000	100%	8%	
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.312.080.000	12	256.610.000	3	106.700.000	3	106.700.000	25%	42%	3	106.700.000	25%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	1.087.483.948	100	420.125.050	0	28.633.950	0	28.633.950	0%	7%	100	28.633.950	100%	3%	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	411.384.285	6	198.790.000	6	22.152.500	6	22.152.500	100%	11%	6	22.152.500	100%	5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	438.406.567	3	132.843.750	3	-	3	-	100%	0%	3	-	150%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	100	237.693.096	110	88.491.300	32	6.481.450	32	6.481.450	29%	7%	32	6.481.450	32%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	68	6.750.985.306	67	3.086.808.012	0	119.218.000	0	119.218.000	0%	4%	0	119.218.000	0%	2%	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	%	68	6.750.985.306	67	3.086.808.012	0	119.218.000	0	119.218.000	0%	4%	0	119.218.000	0%	2%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	209	869.834.879	209	379.254.841	35	25.450.000	35	25.450.000	17%	7%	35	25.450.000	17%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	3	108.161.994	3	47.159.440	3	5.700.000	3	5.700.000	100%	12%	3	5.700.000	100%	5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	13	260.064.174	6	113.386.011	9	8.740.000	9	8.740.000	150%	8%	9	8.740.000	69%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	13	5.512.924.259	13	2.547.007.720	13	79.328.000	13	79.328.000	100%	3%	13	79.328.000	100%	1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	8.367.153.694	100	3.887.602.763	-	241.560.061	0	241.560.061	0%	6%	0	241.560.061	0%	3%	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	7.066.136.299	100	3.317.915.110	-	162.041.061	0	162.041.061	0%	5%	100	162.041.061	100%	2%	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	371	1.450.090.102	185	523.410.000	48	43.775.000	48	43.775.000	26%	8%	48	43.775.000	13%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	142	504.863.699	70	163.228.310	48	17.043.100	48	17.043.100	69%	10%	48	17.043.100	34%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	55.629.901	6	25.847.000	1	5.493.000	1	5.493.000	17%	21%	1	5.493.000	8%	10%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	31	38.389.693	15	13.596.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	145	20.118.164	70	41.395.000	60	1.730.000	60	1.730.000	86%	4%	60	1.730.000	41%	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	610	4.218.613.800	300	1.876.900.000	26	1.832.000	26	1.832.000	9%	0%	26	1.832.000	4%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	152	778.430.940	75	673.538.800	8	92.167.961	8	92.167.961	11%	14%	8	92.167.961	5%	12%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	1.301.017.395	100	569.687.653		79.519.000	0	79.519.000	0%	14%	100	79.519.000	100%	6%	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	78	527.504.327	38	218.917.200	14	30.938.000	14	30.938.000	37%	14%	14	30.938.000	18%	6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	132	49.267.974	65	16.386.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	42.637.802	5	20.280.000	2	-	2	-	40%	0%	2	-	20%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	235	53.598.252	115	20.730.253	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	510	358.011.628	250	164.674.000	300	27.561.000	300	27.561.000	120%	17%	300	27.561.000	59%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185	250.802.566	90	121.902.000	170	21.020.000	75	21.020.000	83%	17%	75	21.020.000	41%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	46	19.194.846	22	6.798.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	23.734.598.109	100	11.513.773.100	-	2.291.934.000	0	2.291.934.000	0%	20%	0	2.291.934.000	0%	10%	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	23.734.598.109	100	11.513.773.100	-	2.291.934.000	0	2.291.934.000	0%	20%	100	2.291.934.000	100%	10%	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	8.400	2.341.581.862	8460	1.020.943.100	7840	55.463.000	7840	55.463.000	93%	5%	7840	55.463.000	93%	2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	3600	565.006.149	3600	246.326.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	3600	20.369.391.428	3600	10.046.564.000	3348	2.198.941.000	3348	2.198.941.000	93%	22%	3348	2.198.941.000	93%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	458.618.670	58	199.940.000	0	37.530.000	0	37.530.000	0%	19%	0	37.530.000	0%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	947.802.931	100	412.844.400	0	50.477.000	0	50.477.000	0%	12%	100	50.477.000	100%	5%	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	%	100	110.321.872	100	48.000.400	0	4.502.000	0	4.502.000	0%	9%	100	4.502.000	100%	4%	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	600	59.163.286	300	25.791.000	150	4.502.000	150	4.502.000	50%	17%	150	4.502.000	25%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	600	32.099.272	300	13.959.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.059.314	15	8.250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	%	100	837.481.059	100	364.844.000	0	45.975.000	0	45.975.000	0%	13%	100	45.975.000	100%	5%	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	38.504.049	1	16.744.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	798.977.010	26	348.100.000	23	45.975.000	30	45.975.000	115%	13%	30	45.975.000	115%	6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	355.399.758	100	154.949.300	-	14.382.100	0	14.382.100	0%	9%	100	14.382.100	100%	4%	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	355.399.758	100	154.949.300	-	14.382.100	0	14.382.100	0%	9%	100	14.382.100	100%	4%	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	966	355.399.758	966	154.949.300	0	14.382.100	966	14.382.100	100%	9%	966	14.382.100	100%	4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	100	1.894.156.082	100	824.946.939	-	27.980.000	0	27.980.000	0%	3%	100	27.980.000	100%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	%	100	204.508.457	100	88.311.842	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	65.025.931	1	28.176.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	66.604.159	2	60.135.842	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	51.878.191	34	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	21.000.176	34	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	100	20.003.714	100	8.823.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	20.003.714	1	8.823.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	%	100	1.669.643.911	100	727.812.097	-	27.980.000	0	27.980.000	0%	4%	55	27.980.000	55%	2%	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	580	1.624.997.287	580	708.412.097	-	27.980.000	0	27.980.000	0%	4%	0	27.980.000	0%	2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	44.646.624	1	19.400.000	-		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	547.921.677	100	264.471.348	-	32.600.700	0	32.600.700	0%	12%	0	32.600.700	0%	6%	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	%	100	117.592.788	100	72.165.199	-	2.400.000	0	2.400.000	0%	3%	100	2.400.000	100%	2%	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	45.148.761	1	19.628.986	-	2.400.000	0	2.400.000	0%	12%	0	2.400.000	0%	5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	72.444.027	34	52.536.213	-		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	%	100	387.041.135	100	173.472.015	-	29.800.700	0	29.800.700	0%	17%	0	29.800.700	0%	8%	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1	387.041.135	1	173.472.015	-	29.800.700	0	29.800.700	0%	17%	0	29.800.700	0%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	%	100	43.287.754	100	18.834.134	-	400.000	0	400.000	0%	2%	100	400.000	100%	1%	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	73	28.896.278	12	12.587.832	-	400.000	0	400.000	0%	3%	0	400.000	0%	1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	14.391.476	1	6.246.302	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	50	276.393.174	40	195.391.263	-	7.950.000	0	7.950.000	0%	4%	40	7.950.000	79%	3%	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	%	100	138.315.423	100	135.205.863	-	-	0	-	0%	0%	85	-	85%	0%	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	138.315.423	34	60.276.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	171.863.936	1	74.929.863	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	%	100	138.077.751	100	60.185.400	-	7.950.000	0	7.950.000	0%	13%	100	7.950.000	100%	6%	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	565	138.077.751	280	60.185.400	-	7.950.000	0	7.950.000	0%	13%	0	7.950.000	0%	6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	2	152.892.814	1	66.662.028	-	5.950.000	0	5.950.000	0%	9%	0	5.950.000	0%	4%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	%	100	152.892.814	100	66.662.028	-	5.950.000	0	5.950.000	0%	9%	100	5.950.000	100%	4%	
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	152.892.814	1	66.662.028	-	5.950.000	0	5.950.000	0%	9%	0	5.950.000	0%	4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	100	690.002.998	100	299.951.000	-	9.060.000	0	9.060.000	0%	3%	0	9.060.000	0%	1%	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	%	100	126.545.875	100	36.924.000	-	1.200.000	0	1.200.000	0%	3%	0	1.200.000	0%	1%	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	126.545.875	1	36.924.000	-	1.200.000	0	1.200.000	0%	3%	0	1.200.000	0%	1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	563.457.123	100	263.027.000	-	7.860.000	0	7.860.000	0%	3%	0	7.860.000	0%	1%	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	35.966.932	110	8.852.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	292.602.287	1	137.462.000	-	660.000	0	660.000	0%	0%	0	660.000	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	149.750.118	1	74.498.000	-	7.200.000	0	7.200.000	0%	10%	0	7.200.000	0%	5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	85.137.786	1	42.215.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,04	153.017.374	0,044	66.616.147	-	8.225.000	0	8.225.000	0%	12%	0	8.225.000	0%	5%	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	%	100	44.861.011	100	19.554.769	-	7.625.000	0	7.625.000	0%	39%	0	7.625.000	0%	17%	
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak terpadu	Dokumen	2	44.861.011	1	19.554.769	-	7.625.000	0	7.625.000	0%	39%	0	7.625.000	0%	17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	%	100	49.140.173	100	21.341.000	-	600.000	0	600.000	0%	3%	100	600.000	100%	1%	
2	8	7	2.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	20	49.140.173	10	21.341.000	-	600.000	0	600.000	0%	3%	0	600.000	0%	1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	%	100	59.016.190	100	25.720.378	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	8	7	2.03	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	2	59.016.190	1	25.720.378	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	83,4	15.352.982.071	81,02	7.027.022.967	0	909.783.926	0	909.783.926	0%	13%	0	909.783.926	0%	6%	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	180.000.000	100	100.000.000	30	11.720.800	30	11.720.800	30%	12%	100	11.720.800	100%	7%	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	180.000.000	6	100.000.000	2	11.720.800	2	11.720.800	33%	12%	2	11.720.800	33%	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	10.961.433.800	100	5.480.716.900	30	747.948.998	30	747.948.998	30%	14%	100	747.948.998	100%	7%	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	10.961.433.800	36	5.480.716.900	36	747.948.998	36	747.948.998	100%	14%	36	747.948.998	100%	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	-	100	19.710.000	10	-	10	-	10%	0%	100	-	100%	0	
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	120.000.000	70	19.710.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.783.548.271	100	983.548.271	30	137.652.118	30	137.652.118	30%	14%	100	137.652.118	100%	8%	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.275.000.000	9	700.000.000	2	122.578.118	2	122.578.118	22%	18%	2	122.578.118	29%	10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	508.548.271	75	283.548.271	7	15.074.000	7	15.074.000	9%	5%	7	15.074.000	5%	3%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	%	100	1.970.000.000	100	159.757.796	30	-	30	-	30%	0%	100	-	100%	0%	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	35.000.000	1	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	70.000.000	1	35.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	205.000.000	21	119.757.796	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.500.000.000	1	1.000.000	0	-	0	-	0%	-	0	-	0%	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54	160.000.000	5	125.000.000	0	-	0	-	0%	-	0	-	0%	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	458.000.000	100	283.290.000	25	12.462.010	25	12.462.010	25%	4%	100	12.462.010	100%	3%	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	173.000.000	22	83.290.000	3	10.877.010	3	10.877.010	14%	13%	3	10.877.010	14%	6%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	3	150.000.000	0		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	47	85.000.000	66	50.000.000	3	1.585.000	3	1.585.000	5%	3%	3	1.585.000	6%	2%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	30	4.667.377.720	30	2.122.380.000	0	30.316.190	0	30.316.190	0%	1%	100	30.316.190	333%	1%	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	135	4.603.277.720	150	2.071.900.000	0	22.896.190	0	22.896.190	0%	1%	0	22.896.190	0%	0%	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	630	4.603.277.720	210	2.071.900.000	0	22.896.190	0	22.896.190	0%	1%	0	22.896.190	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	%	50	20.480.000	50	10.480.000	0	260.000	0	260.000	0%	2%	0	260.000	0%	1%	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	20.480.000	27	10.480.000	0	260.000	0	260.000	0%	2%	0	260.000	0	1%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	perusahaan	110	43.620.000	30	40.000.000	0	7.160.000	0	7.160.000	0%	18%	0	7.160.000	0%	16%	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	6	43.620.000	2	40.000.000	0	7.160.000	0	7.160.000	0%	18%	0	7.160.000	0%	16%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	15	394.590.600	15	374.590.600	0	20.550.000	0	20.550.000	0%	5%	0	20.550.000	0%	5%	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Orang	630	394.590.600	200	374.590.600	0	20.550.000	0	20.550.000	0%	5%	0	20.550.000	0%	5%	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	216.306.600	1	116.306.600	0	15.450.000	0	15.450.000	0%	13%	0	15.450.000	0%	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	500	178.284.000	150	108.284.000	164	5.100.000	164	5.100.000	109%	5%	164	5.100.000	33%	3%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	130	200.000.000	40	150.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	%	16	6.940.457.896	16	3.391.228.948	0	693.314.455	0	693.314.455	0%	20%	0	693.314.455	0%	10%	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	Perusahaan	150	308.447.600	50	64.223.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	247.947.600	20	33.973.800	8	-	8	-	40%	0%	8	-	16%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	60.500.000	1	30.250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	75	6.632.010.296	75	3.327.005.148	0	693.314.455	0	693.314.455	0%	21%	0	693.314.455	0%	10%	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	45	175.000.000	15	100.000.000	3	5.100.000	3	5.100.000	20%	5%	3	5.100.000	7%	3%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	15000	6.457.010.296	15000	3.227.005.148	17481	688.214.455	17481	688.214.455	117%	21%	17481	688.214.455	117%	11%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	80	888.349.000	80	444.174.500	0	11.178.970	0	11.178.970	0%	3%	0	11.178.970	0%	1%	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	koperasi	105	888.349.000	35	444.174.500	0	11.178.970	56	11.178.970	160%	3%	56	11.178.970	53%	1%	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	450	888.349.000	90	444.174.500	0	11.178.970	0	11.178.970	0%	3%	0	11.178.970	0%	1%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,5	320.586.523	2,5	200.586.523	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	koperasi	15	320.586.523	5	200.586.523	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	180	320.586.523	30	200.586.523	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7,33	779.537.127	7,33	360.686.759	0	19.380.000	0	19.380.000	0%	5%	0	19.380.000	0%	2%	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	orang	33	779.537.127	11	360.686.759	0	19.380.000	0	19.380.000	0%	5%	0	19.380.000	0%	2%	
2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	360	779.537.127	150	360.686.759	0	19.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	15	4.954.477.720	5	1.171.477.000	0	28.331.050	0	28.331.050	0%	2%	0	28.331.050	0%	1%	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	IKM	66	4.954.477.720	22	1.171.477.000	0	28.331.050	0	28.331.050	0%	2%	0	28.331.050	0%	1%	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3	45.000.000	1	25.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	175.000.000	1	100.000.000	0	11.287.000	0	11.287.000	0%	11%	0	11.287.000	0%	6%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	4.594.477.720	2	85.000.000	0	1.032.550	0	1.032.550	0%	1%	0	1.032.550	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	140.000.000	2	986.477.000	0	16.011.500	0	16.011.500	0%	2%	0	16.011.500	0%	11%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	10	550.000.000	10	350.000.000	0	25.886.653	0	25.886.653	0%	7%	0	25.886.653	0%	5%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	IKM	30	550.000.000	40	350.000.000	0	25.886.653	0	25.886.653	0%	7%	0	25.886.653	0%	5%	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	12	550.000.000	3	350.000.000	0	25.886.653	0	25.886.653	0%	7%	0	25.886.653	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	81,1	14.716.952.038	81,05	7.044.268.608	0	1.162.372.895	0	1.162.372.895	0%	17%	A	1.162.372.895	100%	8%	
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	%	100	137.100.000	100	75.535.000	30	5.100.000	30	5.100.000	30%	7%	100	5.100.000	100%	4%	
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	6	137.100.000	6	75.535.000	2	5.100.000	2	5.100.000	33%	7%	2	5.100.000	33%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	10.764.914.000	100	4.995.931.000	25	920.854.251	25	920.854.251	25%	18%	25	920.854.251	25%	9%	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	24	10.764.914.000	24	4.995.931.000	26	920.854.251	26	920.854.251	108%	18%	26	920.854.251	108%	9%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	238.156.000	100	117.078.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0%	1%	0	1.290.000	0%	1%	
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	140.000.000	80	70.000.000	0	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	98.156.000	3	47.078.000	3	1.290.000	3	1.290.000	100%	3%	3	1.290.000	100%	1%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	2.475.964.030	100	1.187.137.000	25	208.373.550	25	208.373.550	25%	18%	100	208.373.550	100%	8%	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	1.737.964.030	12	827.137.000	3	183.374.900	3	183.374.900	25%	22%	3	183.374.900	25%	11%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	738.000.000	12	360.000.000	3	24.998.650	3	24.998.650	25%	7%	3	24.998.650	25%	3%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	206.540.000	100	119.727.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	206.540.000	30	119.727.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	894.278.008	100	548.860.608	25	26.755.094	25	26.755.094	25%	5%	100	26.755.094	100%	3%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	260.510.000	35	163.688.600	8	16.589.594	8	16.589.594	23%	10%	8	16.589.594	22%	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	2	524.603.008	2	322.207.008	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	109.165.000	80	62.965.000	20	10.165.500	20	10.165.500	25%	16%	20	10.165.500	0	9%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita	2000	791.846.000	2000	473.214.634	0	48.218.430	0	48.218.430	0%	10%	0	48.218.430	0%	6%	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100	446.850.000	100	230.716.634	0	29.165.000	0	29.165.000	0%	13%	0	29.165.000	0%	7%	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	1	345.680.000	1	185.862.734	0	21.010.000	0	21.010.000	0%	11%	0	21.010.000	0%	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	6	101.170.000	6	44.853.900	2	8.155.000	2	8.155.000	33%	18%	2	8.155.000	33%	8%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	gram/kapita	63	344.996.000	63	242.498.000	0	19.053.430	0	19.053.430	0%	8%	0	19.053.430	0%	6%	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	103.142.000	1	51.571.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0%	7%	0	3.650.000	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	241.854.000	1	190.927.000	0	15.403.430	0	15.403.430	0%	8%	0	15.403.430	0%	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	%	22	108.600.000	22	63.300.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0%	8%	0	4.770.000	0%	4%	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	108.600.000	1	63.300.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0%	8%	0	4.770.000	0%	4%	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	108.600.000	1	63.300.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0%	8%	0	4.770.000	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar aman yang teruji	%	80	174.526.000	80	87.263.000	-	3.600.000	0	3.600.000	0%	4%	0	3.600.000	0%	2%	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	lokasi	8	174.526.000	8	87.263.000	-	3.600.000	0	3.600.000	0%	4%	0	3.600.000	0%	2%	
2	9	5	2.01	9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	174.526.000	1	87.263.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0%	4%	0	3.600.000	0%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	290	782.500.000	290	417.000.000	92	24.373.150	92	24.373.150	32%	6%	92	24.373.150	32%	3%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	RTP	260	782.500.000	260	417.000.000	0	24.373.150	0	24.373.150	0%	6%	0	24.373.150	0%	3%	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	1	363.000.000	1	205.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	305.000.000	4	155.000.000	0	20.373.150	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	125	114.500.000	125	57.000.000	0	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	89	140.500.000	89	70.000.000	25,2	4.000.000	25,2	4.000.000	28%	6%	25	4.000.000	28%	3%	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	435	140.500.000	435	70.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0%	6%	0	4.000.000	0%	3%	
3	25	5	2.01	7	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	100	140.500.000	100	70.000.000	0	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita/ tahun	33,6	668.449.000	33,57	464.974.000	0	4.115.000	0	4.115.000	0%	1%	0	4.115.000	0%	1%	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	orang	50	131.314.000	50	65.164.000	15	4.000.000	15	4.000.000	30%	6%	15	4.000.000	30%	3%	
3	25	6	2.02	2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	131.314.000	30	65.164.000	0	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	ton	30	537.135.000	30	399.810.000	9	115.000	9	115.000	30%	0%	9	115.000	30%	0%	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	14	537.135.000	14	399.810.000	1	115.000	1	115.000	7%	0%	1	115.000	7%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	%	65	4.792.000.000	65	1.102.582.080	0	147.697.920	0	147.697.920	0%	13%	0	147.697.920	0%	3%	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	4.542.000.000	80	977.582.080	0	120.940.000	0	120.940.000	0%	12%	0	120.940.000	0%	3%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	301.800.000	1	182.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	4.240.200.000	1	795.582.080	0	120.940.000	0	120.940.000	0%	15%	0	120.940.000	0%	3%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	250.000.000	75	125.000.000	0	26.757.920	0	26.757.920	0%	21%	0	26.757.920	0%	11%	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	250.000.000	12	125.000.000	0	26.757.920	0	26.757.920	0%	21%	0	26.757.920	0%	11%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	2.844.953.852	100	751.927.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	355.000.000	100	266.427.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	1	122.254.000	1	151.427.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	232.746.000	1	115.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara	%	25	2.489.953.852	25	485.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2.069.953.852	1	500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	420.000.000	1	485.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	4	540.000.000	2	240.796.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	1.920.000.000	1	1.637.000.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0%	0%	0	5.200.000	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	675.206.000	10	337.603.000	0	24.562.000	0	24.562.000	0%	7%	0	24.562.000	0%	4%	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	500.206.000	80	250.103.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	500.206.000	4	250.103.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	175.000.000	80	87.500.000	0	24.562.000	0	24.562.000	0%	28%	0	24.562.000	0%	14%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	175.000.000	12	87.500.000	0	24.562.000	0	24.562.000	0%	28%	0	24.562.000	0%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan aman bencana pertanian	%	76	300.000.000	76	150.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	2000	300.000.000	2000	150.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	300.000.000	50	150.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	%	15	67.200.000	15	33.600.000	0	-	15,7	-	105%	0%	16	-	105%	0%	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jenis	2	67.200.000	2	33.600.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	67.200.000	2	33.600.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	%	20	4.326.299.987	20	2.443.948.000	0	19.380.000	0	19.380.000	0%	1%	0	19.380.000	0%	0%	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	orang	200	4.326.299.987	200	2.443.948.000	0	19.380.000	0	19.380.000	0%	1%	0	19.380.000	0%	0%	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	38	4.326.299.987	38	2.443.948.000	0	19.380.000	0	19.380.000	0%	1%	0	19.380.000	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80,5	27.197.856.919	80,4	13.060.357.196	-	2.033.211.033	A	2.033.211.033	0	16%	A	2.033.211.033	100%	7%	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	122.387.373	100	22.387.373	-	9.200.000	0	9.200.000	0%	41%	100	9.200.000	100%	8%	
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	122.387.373	6	22.387.373	-	9.200.000	0	9.200.000	0%	41%	0	9.200.000	0%	8%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	19.469.540.173	100	9.269.540.173	-	1.542.951.533	0	1.542.951.533	0%	17%	100	1.542.951.533	100%	8%	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	74	19.469.540.173	58	9.269.540.173	-	1.542.951.533	0	1.542.951.533	0%	17%	0	1.542.951.533	0%	8%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	366.913.608	100	129.413.608	-	2.576.000	100	2.576.000	100%	2%	100	2.576.000	100%	1%	
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	207.539.714	3	70.039.714	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	230	159.373.894	220	59.373.894	-	2.576.000	0	2.576.000	0%	4%	0	2.576.000	0%	2%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	450.000.000	100	250.000.000	-	20.284.800	0	20.284.800	0%	8%	0	20.284.800	0%	5%	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	450.000.000	30	250.000.000	-	20.284.800	0	20.284.800	0%	8%	0	20.284.800	0%	5%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	424.052.253	100	199.052.530	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	5	315.392.000	8	115.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	108.660.253	2	83.660.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.976.347.340	100	1.401.347.340	-	301.921.900	0	301.921.900	0%	22%	0	301.921.900	0%	10%	
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	1.395.382.745	4	670.382.745	-	123.617.700	4	123.617.700	100%	18%	4	123.617.700	100%	9%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.580.964.595	12	730.964.595	-	178.304.200	0	178.304.200	0%	24%	0	178.304.200	0%	11%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	3.388.616.172	100	1.788.616.172	-	156.276.800	0	156.276.800	0%	9%	0	156.276.800	0%	5%	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	2.799.956.192	6	1.399.956.192	-	142.415.200	0	142.415.200	0%	10%	0	142.415.200	0%	5%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	224.921.480	15	124.921.480	-	13.861.600	35	13.861.600	233%	11%	35	13.861.600	233%	6%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	363.738.500	3	263.738.500	-		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	79,5	423.800.000	79,5	293.800.000	-	6.822.500	0	6.822.500	0%	2%	0	6.822.500	0%	2%	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	dokumen	1	255.000.000	1	125.000.000	-	5.260.000	0	5.260.000	0%	4%	0	5.260.000	0%	2%	
2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	255.000.000	1	125.000.000	-	5.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	dokumen	4	168.800.000	1	168.800.000	-	1.562.500	0	1.562.500	0%	1%	0	1.562.500	0%	1%	
2	11	2	2.02	6	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang disusun	dokumen	1	168.800.000	1	168.800.000	-	1.562.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	50,1	2.391.400.000	50	1.176.400.000	-	202.300.000	0	202.300.000	0%	17%	0	202.300.000	0%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	kegaitan/ usaha	79	1.600.000.000	78	800.000.000	-	174.950.000	0	174.950.000	0%	22%	0	174.950.000	0%	11%	
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	600.000.000	1	500.000.000	-	174.950.000	0	174.950.000	0%	35%	0	174.950.000	0%	29%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1.000.000.000	1	300.000.000	-	15.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	usaha/ kegaitan	18	791.400.000	18	376.400.000	-	27.350.000	0	27.350.000	0%	7%	0	27.350.000	0%	3%	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2	476.400.000	2	211.400.000	-	12.850.000	0	12.850.000	0%	6%	0	12.850.000	0%	3%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	2	315.000.000	2	165.000.000	-	14.500.000	0	14.500.000	0%	9%	0	14.500.000	0%	5%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	50	62.000.000	50	27.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	spesies	5	62.000.000	5	27.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	62.000.000	1	27.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	78,7	125.000.000	78,2	60.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	lokasi	18	125.000.000	18	60.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	dokumen	5	125.000.000	5	60.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	88,2	860.000.000	88,2	420.000.000	-	10.100.000	0	10.100.000	0%	2%	0	10.100.000	0%	1%	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	perusahaan	18	860.000.000	18	420.000.000	-	10.100.000	0	10.100.000	0%	2%	0	10.100.000	0%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	4	520.000.000	4	260.000.000	-	10.100.000	5	10.100.000	125%	4%	5	10.100.000	125%	2%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	9	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan perudnag-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	10	340.000.000	10	160.000.000	-	3.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	100	1.453.750.000	100	703.750.000	-	71.095.000	0	71.095.000	0%	10%	100	71.095.000	100%	5%	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan	15	1.453.750.000	15	703.750.000	-	71.095.000	0	71.095.000	0%	10%	0	71.095.000	0%	5%	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	3	1.453.750.000	4	703.750.000	-	71.095.000	0	71.095.000	0%	10%	0	71.095.000	0%	5%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	520.000.000	100	260.000.000	-	33.333.000	0	33.333.000	0%	13%	100	33.333.000	100%	6%	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kasus	5	520.000.000	5	260.000.000	-	33.333.000	0	33.333.000	0%	13%	0	33.333.000	0%	6%	
2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	3	260.000.000	5	130.000.000	-	7.233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	5	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	260.000.000	5	130.000.000	-	26.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	71	18.267.528.928	71	10.738.728.928	-	979.731.000	0	979.731.000	0%	9%	0	979.731.000	0%	5%	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	ton	43790	18.066.528.928	43790	10.637.728.928	-	979.731.000	0	979.731.000	0%	9%	0	979.731.000	0%	5%	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	44	9.406.135.940	41	4.927.335.940	-	666.730.000	0	666.730.000	0%	14%	0	666.730.000	0%	7%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	3	3.266.792.988	3	2.666.792.988	-	25.552.200	0	25.552.200	0%	1%	0	25.552.200	0%	1%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	43780	565.600.000	43780	315.600.000	-	19.470.300	-	19.470.300	-	6%	-	19.470.300	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Ton	32180	4.828.000.000	32230	2.728.000.000	-	267.978.500	-	267.978.500	-	10%	-	267.978.500	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	kelompok	50	201.000.000	50	101.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	3	201.000.000	3	101.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,5	16.018.910.375	84,4	7.757.784.098	0	1.097.348.591	0	1.097.348.591	0%	14%	0	1.097.348.591	0%	7%	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	274.850.600	100	111.809.100	0	86.748.600	0	86.748.600	0%	78%	0	86.748.600	0%	32%	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	55.521.000	12	27.760.500	0	2.700.000	0	2.700.000	0%	10%	0	2.700.000	0%	5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	219.329.600	12	84.048.600	3	84.048.600	3	84.048.600	25%	100%	3	84.048.600	25%	38%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100	10.432.830.109	100	5.017.104.832	0	778.770.358	0	778.770.358	0%	16%	0	778.770.358	0%	7%	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	28	10.275.050.109	28	4.938.214.832	28	778.770.358	29	778.770.358	104%	16%	29	778.770.358	104%	8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	157.780.000	12	78.890.000	3	-	3	-	25%	0%	3	-	25%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	474.840.000	100	237.420.000	0	23.091.620	0	23.091.620	0%	10%	0	23.091.620	0%	5%	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	474.840.000	12	237.420.000	3	23.091.620	3	23.091.620	25%	10%	3	23.091.620	25%	5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.453.580.000	100	203.899.980	0	6.565.000	0	6.565.000	0%	3%	0	6.565.000	0%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	20	1.453.580.000	15	203.899.980	0	6.565.000	0	6.565.000	0%	3%	0	6.565.000	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.405.869.926	100	1.692.934.963		165.120.013	63	165.120.013	63%	10%	63	165.120.013	63%	5%	
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	3.405.869.926	12	1.692.934.963	0	165.120.013	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.430.519.740	100	698.515.203	0	43.618.000	0	43.618.000	0%	6%	0	43.618.000	0%	3%	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	21	191.460.000	21	95.730.000	0	11.645.500	0	11.645.500	0%	12%	0	11.645.500	0%	6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	706.510.666	1	-	0	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	0	-	1	336.510.666	0	10.961.750	0	10.961.750	0%	3%	0	10.961.750	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	75	532.549.074	75	266.274.537	14	21.010.750	14	21.010.750	19%	8%	14	21.010.750	19%	4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	95	343.097.700	98,3	151.548.850		18.700.000	0	18.700.000	0%	12%	0	18.700.000	0%	5%	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	%	100	343.097.700	100	151.548.850		18.700.000	0	18.700.000	0%	12%	0	18.700.000	0%	5%	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	12	277.817.700	12	128.908.850	3	9.900.000	3	9.900.000	25%	8%	3	9.900.000	25%	4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	38000	65.280.000	38000	22.640.000	0	8.800.000	0	8.800.000	0%	39%	0	8.800.000	0%	13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	99,75	213.818.400	99,5	81.909.200	0	13.068.000	0	13.068.000	0%	16%	0	13.068.000	0%	6%	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	%	100	213.818.400	100	81.909.200	0	13.068.000	0	13.068.000	0%	16%	0	13.068.000	0%	6%	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	8600	126.568.800	7000	53.284.400	1430	-	1430	-	20%	0%	1430	-	17%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	4	87.249.600	4	28.624.800	4	13.068.000	4	13.068.000	100%	46%	4	13.068.000	100%	15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	%	19	316.033.860	18	146.033.860	0	9.600.000	100	9.600.000	556%	7%	100	9.600.000	526%	3%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	%	100	316.033.860	100	146.033.860	0	9.600.000	0	9.600.000	0%	7%	0	9.600.000	0%	3%	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	2	210.330.500	2	98.330.500	0	6.000.000	0	6.000.000	0%	6%	0	6.000.000	0%	3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	dokumen	35	105.703.360	34	47.703.360	0	3.600.000	17	3.600.000	50%	8%	17	3.600.000	49%	3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	83,8	20.642.000.000	83,7	10.862.317.213	0	1.473.336.516	0	1.473.336.516	0%	14%	0	1.473.336.516	0%	7%	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	110.000.000	100	38.870.000	30	5.598.400	30	5.598.400	30%	14%	100	5.598.400	100%	5%	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	110.000.000	6	38.870.000	2	5.598.400	2	5.598.400	33%	14%	2	5.598.400	33%	5%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	13.460.000.000	100	8.060.523.969	30	953.701.819	30	953.701.819	30%	12%	100	953.701.819	100%	7%	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	13.460.000.000	50	8.060.523.969	50	953.701.819	54	953.701.819	108%	12%	54	953.701.819	108%	7%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	200.000.000	100	127.969.043	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000	1	127.969.043	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	%	100	500.000.000	100	250.000.000	20	20.171.800	20	20.171.800	20%	8%	100	20.171.800	100%	4%	
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	500.000.000	60	250.000.000	10	20.171.800	10	20.171.800	17%	8%	10	20.171.800	17%	4%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	%	100	400.000.000	100	128.259.720	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	300.000.000	19	128.259.720	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	%	100	3.800.000.000	100	1.022.217.951	30	382.662.360	30	382.662.360	30%	37%	100	382.662.360	100%	10%	
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.800.000.000	2	1.022.217.951	1	382.662.360	2	382.662.360	100%	37%	2	382.662.360	50%	10%	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	2.172.000.000	100	1.234.476.530	30	111.202.137	30	111.202.137	30%	9%	100	111.202.137	100%	5%	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	57	1.300.000.000	57	704.022.530	30	75.948.537	30	75.948.537	53%	11%	30	75.948.537	53%	6%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	600.000.000	2	394.454.000	0	-	2	-	100%	0%	2	-	100%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	272.000.000	10	136.000.000	30	35.253.600	10	35.253.600	100%	26%	10	35.253.600	100%	13%	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	100	13.142.540.432	100	5.431.645.693	30	3.371.148.821	30	3.371.148.821	30%	62%	30	3.371.148.821	30%	26%	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfugsi baik	%	100	5.656.630.432	100	2.054.204.767	20	3.005.248.021	20	3.005.248.021	20%	146%	100	3.005.248.021	100%	53%	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	300.000.000	1	150.000.000	0		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	2.800.000.000	200	715.633.001	30	2.859.943.766	30	2.859.943.766	15%	400%	30	2.859.943.766	15%	102%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	2.556.630.432	5	1.188.571.766	30	145.304.255	30	145.304.255	600%	12%	30	145.304.255	600%	6%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	%	100	300.000.000	100	50.000.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	300.000.000	2	50.000.000	0	-	0	-	0%	-	-	-			Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir	%	100	2.053.400.000	100	846.700.500	30	85.309.000	30	85.309.000	30%	10%	100	85.309.000	100%	4%	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	2.053.400.000	1	846.700.500	1	85.309.000	1	85.309.000	100%	10%	1	85.309.000	100%	4%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	%	100	1.156.510.000	100	387.415.600	30	59.384.000	100	59.384.000	100%	15%	100	59.384.000	100%	5%	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10	156.510.000	2	-	0	-	10	-	500%	0	10	-	100%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Buah	4000	200.000.000	4000	90.000.000	50	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	100.000.000	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	700.000.000	12	297.415.600	0	14.384.000	12	14.384.000	100%	5%	12	14.384.000	100%	2%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	-	100	375.758.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	laporan	6	953.006.970	6	375.758.000	2	26.007.600	2	26.007.600	33%	7%	2	26.007.600	33%	3%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kebijakan	%	100	1.780.000.000	100	702.460.826	10	46.016.800	10	46.016.800	10%	7%	100	46.016.800	100%	3%	
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.780.000.000	0	702.460.826	0	46.016.800	1	46.016.800	0	7%	2	46.016.800	200%	3%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	100	2.196.000.000	100	1.015.106.000	100	175.191.000	100	175.191.000	100%	17%	100	175.191.000	100%	8%	
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	25	2.196.000.000	37	1.015.106.000	37	175.191.000	41	175.191.000	111%	17%	41	175.191.000	164%	8%	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,8	3.734.944.400	82,25	7.629.734.262	-	1.265.612.426	0	1.265.612.426	0%	17%	A	1.265.612.426	100%	34%	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	430.000.000	100	65.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	430.000.000	5	65.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	-	100	5.600.000.000	-	860.021.460	0	860.021.460	0%	15%	100	860.021.460	100%	0	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	64	11.200.000.000	32	5.600.000.000	-	860.021.460	0	860.021.460	0%	15%	0	860.021.460	0%	8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	-	100	400.000.000	-	94.612.857	0	94.612.857	0%	24%	100	94.612.857	100%	0	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	650.000.000	25	400.000.000	-	94.612.857	0	94.612.857	0%	24%	0	94.612.857	0%	15%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	327.370.138	100	2.500.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	16	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	55.000.000	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	272.370.138	1	2.500.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	2.277.574.262	100	1.125.348.262	-	247.549.317	0	247.549.317	0%	22%	100	247.549.317	100%	11%	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.277.574.262	1	1.125.348.262	-	247.549.317	0	247.549.317	0%	22%	0	247.549.317	0%	11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	365.000.000	100	402.226.000	-	61.142.192	0	61.142.192	0%	15%	100	61.142.192	100%	17%	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60	365.000.000	30	252.216.000	-	50.584.092	0	50.584.092	0%	20%	0	50.584.092	0%	14%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	335.000.000	3	34.660.000	-	2.286.600	0	2.286.600	0%	7%	0	2.286.600	0%	1%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	100	364.500.000	50	115.350.000	-	8.271.500	0	8.271.500	0%	7%	0	8.271.500	0%	2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	%	86	7.158.250.000	84	2.836.000.000	-	284.560.514	0	284.560.514	0%	10%	0	284.560.514	0%	4%	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	7.158.250.000	100	2.836.000.000	-	284.560.514	0	284.560.514	0%	10%	100	284.560.514	100%	4%	
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	24	2.950.000.000	12	1.000.000.000	-	46.240.000	0	46.240.000	0%	5%	0	46.240.000	0%	2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	8	500.000.000	4	200.000.000	-	2.100.000	0	2.100.000	0%	1%	0	2.100.000	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	400	400.000.000	200	150.000.000	-	16.022.500	0	16.022.500	0%	11%	0	16.022.500	0%	4%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	200	115.000.000	100	25.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	24	50.000.000	12	10.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	2.500.000	1	1.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	240	2.940.750.000	120	1.400.000.000	-	220.198.014	0	220.198.014	0%	16%	0	220.198.014	0%	7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	60	200.000.000	30	50.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	31.351.203.078	100	14.502.890.891	-	968.665.632	0	968.665.632	0%	7%	100	968.665.632	100%	3%	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	395.100.000	100	197.550.000	-	51.272.833	0	51.272.833	0%	26%	100	51.272.833	100%	13%	
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	395.100.000	1	197.550.000	-	51.272.833	0	51.272.833	0%	26%	0	51.272.833	0%	13%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	%	100	30.956.103.078	100	14.305.340.891	-	917.392.799	0	917.392.799	0%	6%	100	917.392.799	100%	3%	
2	16	3	2.02	15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	4	201.387.078	2	97.687.078	-	13.406.000	0	13.406.000	0%	14%	0	13.406.000	0%	7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	4	734.696.000	2	364.696.000	-	40.266.125	0	40.266.125	0%	11%	0	40.266.125	0%	5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	670.800.000	1	335.400.000	-	56.980.890	0	56.980.890	0%	17%	0	56.980.890	0%	8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	68	1.910.019.375	34	890.697.193	-	60.221.180	0	60.221.180	0%	7%	0	60.221.180	0%	3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	68	2.071.180.620	34	896.180.620	-	744.820.875	0	744.820.875	0%	83%	0	744.820.875	0%	36%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	68	25.368.020.005	34	11.720.680.000	-	1.697.729	0	1.697.729	0%	0%	0	1.697.729	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	250.000.000	1	125.000.000	-	12.313.550	0	12.313.550	0%	10%	0	12.313.550	0%	5%	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	250.000.000	1	125.000.000	-	12.313.550	0	12.313.550	0%	10%	0	12.313.550	0%	5%	
2	20	2	2.01	8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	110.000.000	100	55.000.000	-	4.000.000	0	4.000.000	0%	7%	0	4.000.000	0%	4%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	4	100.000.000	2	50.000.000	-	4.108.500	0	4.108.500	0%	8%	0	4.108.500	0%	4%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	4	40.000.000	2	20.000.000	-	4.205.050	0	4.205.050	0%	21%	0	4.205.050	0%	11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	380.000.000	100	190.000.000	-	10.310.000	0	10.310.000	0%	5%	100	10.310.000	100%	3%	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	380.000.000	100	190.000.000	-	10.310.000	0	10.310.000	0%	5%	0	10.310.000	0%	3%	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	8	80.000.000	4	40.000.000	-	2.000.000	0	2.000.000	0%	5%	0	2.000.000	0%	3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	68	300.000.000	34	150.000.000	-	8.310.000	0	8.310.000	0%	6%	0	8.310.000	0%	3%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	84,1	11.537.409.880	84	5.454.980.916	-	937.054.888	0	937.054.888	0%	17%	0	937.054.888	0%	8%	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	63.000.000	100	14.410.000	-	930.000	0	930.000	0%	6%	0	930.000	0%	1%	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	63.000.000	6	14.410.000	-	930.000	0	930.000	0%	6%	0	930.000	0%	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	8.544.024.801	100	4.222.500.840	-	773.496.005	0	773.496.005	0%	18%	0	773.496.005	0%	9%	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	8.544.024.801	24	4.222.500.840	-	773.496.005	0	773.496.005	0%	18%	0	773.496.005	0%	9%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	548.467.588	100	245.213.819	-	5.100.000	0	5.100.000	0%	2%	0	5.100.000	0%	1%	
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	548.467.588	50	245.213.819	-	5.100.000	0	5.100.000	0%	2%	0	5.100.000	0%	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	427.366.185	100	52.498.560	-	29.000.000	0	29.000.000	0%	55%	0	29.000.000	0%	7%	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	427.366.185	1	52.498.560	-	29.000.000	0	29.000.000	0%	55%	0	29.000.000	0%	7%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.578.168.247	100	769.259.192	-	116.309.083	0	116.309.083	0%	15%	0	116.309.083	0%	7%	
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	38	1.578.168.247	20	769.259.192	-	116.309.083	0	116.309.083	0%	15%	0	116.309.083	0%	7%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	%	100	376.383.059	100	151.098.505	100	12.219.800	100	12.219.800	100%	8%	100	12.219.800	100%	3%	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	178.048.746	20	68.599.000	1	8.184.800	1	8.184.800	5%	12%	1	8.184.800	5%	5%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	82.281.200	1	29.280.000	1	648.000	1	648.000	100%	2%	1	648.000	100%	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	116.053.113	5	53.219.505	5	3.387.000	5	3.387.000	100%	6%	5	3.387.000	100%	3%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	persen	100	101.000.000	100	50.000.000	0	2.038.000	0	2.038.000	0%	4%	0	2.038.000	0%	2%	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	Dokumen	1	101.000.000	1	50.000.000	0	2.038.000	0	2.038.000	0%	4%	0	2.038.000	0%	2%	
2	18	2	2.01	3	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	101.000.000	1	50.000.000	0	2.038.000	0	2.038.000	0%	4%	0	2.038.000	0%	2%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	44	626.579.800	42	131.919.750	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	investor	60	626.579.800	50	131.919.750	38	-	38	-	76%	0%	38	-	63%	0%	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	626.579.800	1	131.919.750	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	98	1.180.790.000	97	497.740.000	99	77.951.670	99	77.951.670	102%	16%	99	77.951.670	101%	7%	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	izin	4500	1.180.790.000	4250	497.740.000	3170	77.951.670	3405	77.951.670	80%	16%	3405	77.951.670	76%	7%	
2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4500	449.355.000	4250	211.460.000	3079	46.216.375	3079	46.216.375	72%	22%	3079	46.216.375	68%	10%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	20	307.000.000	23	101.830.000	5	5.044.500	5	5.044.500	22%	5%	5	5.044.500	25%	2%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	325	424.435.000	300	184.450.000	78	26.690.795	78	26.690.795	26%	14%	78	26.690.795	24%	6%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan	125	932.675.000	120	462.675.000	62	13.465.275	62	13.465.275	52%	3%	62	13.465.275	50%	1%	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	400	932.675.000	390	462.675.000	30	13.465.275	0	13.465.275	0%	3%	0	13.465.275	0%	1%	
2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	8	58.982.000	8	29.491.000	1	-	1	-	13%	0%	1	-	13%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	783.990.000	390	385.882.500	30	6.685.275	30	6.685.275	8%	2%	30	6.685.275	8%	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	89.703.000	25	47.301.500	5	6.780.000	5	6.780.000	20%	14%	5	6.780.000	20%	8%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	377.500.000	100	165.800.000	100	22.861.650	100	22.861.650	100%	14%	100	22.861.650	100%	6%	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jenis izin	36	377.500.000	36	165.800.000	36	22.861.650	36	22.861.650	100%	14%	36	22.861.650	100%	6%	
2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	377.500.000	1	165.800.000	3	22.861.650	3	22.861.650	300%	14%	3	22.861.650	300%	6%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	Orang	150	400.000.000	81	200.000.000	0	9.300.000	0	9.300.000	0%	5%	0	9.300.000	0%	2%	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	Event	5	400.000.000	5	200.000.000	0	9.300.000	0	9.300.000	0%	5%	0	9.300.000	0%	2%	
2	19	2	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	1	400.000.000	1	200.000.000	0	9.300.000	0	9.300.000	0%	5%	0	9.300.000	0%	2%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Medali	132	3.600.000.000	128	3.276.388.863	0	805.103.000	0	805.103.000	0%	25%	0	805.103.000	0%	22%	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	%	100	3.600.000.000	100	1.811.388.863	25	668.425.000	25	668.425.000	25%	37%	25	668.425.000	25%	19%	
2	19	3	2.01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia	sarana prasarana olahraga	3	3.600.000.000	3	1.811.388.863	3	668.425.000	3	668.425.000	100%	37%	3	668.425.000	100%	19%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	Event	6	2.900.000.000	6	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Event	3	2.600.000.000	3	-	0	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	100	300.000.000	100	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengembangan organisasi keolahragaan	%	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	19	3	2.04	6	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapat pembinaan	Cabang Olahraga	3	730.000.000	3	365.000.000	0	136.678.000	0	136.678.000	0%	37%	0	136.678.000	0%	19%	
2	19	3	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	3	730.000.000	13	365.000.000	5	136.678.000	5	136.678.000	38%	37%	5	136.678.000	167%	19%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	82,6	13.870.000.000	82,6	7.467.521.953	0	2.020.622.502	A	2.020.622.502	0	27%	A	2.020.622.502	100%	15%	
2	22	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	40.000.000	100	19.756.000	25	4.825.000	25	4.825.000	25%	24%	115	4.825.000	115%	12%	
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	40.000.000	6	19.756.000	4	4.825.000	4	4.825.000	67%	24%	4	4.825.000	67%	12%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	9.000.000.000	100	5.255.053.953	25	1.282.907.052	25	1.282.907.052	25%	24%	100	1.282.907.052	100%	14%	
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	9.000.000.000	25	5.255.053.953	25	1.282.907.052	25	1.282.907.052	100%	24%	25	1.282.907.052	100%	14%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	200.000.000	100	94.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000	1	94.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	450.000.000	100	200.260.000	25	48.895.000	25	48.895.000	25%	24%	100	48.895.000	100%	11%	
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	450.000.000	12	200.260.000	3	48.895.000	3	48.895.000	25%	24%	3	48.895.000	25%	11%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	700.000.000	100	163.376.000	25	162.078.000	25	162.078.000	25%	99%	25	162.078.000	25%	23%	
2	22	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	220.000.000	10	106.181.000	16	105.182.000	16	105.182.000	160%	99%	16	105.182.000	160%	48%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	180.000.000	2	57.195.000	3	56.896.000	3	56.896.000	150%	99%	3	56.896.000	150%	32%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Paket	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	3.100.000.000	100	1.502.016.000	25	343.667.000	25	343.667.000	25%	23%	25	343.667.000	25%	11%	
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.100.000.000	1	1.502.016.000	1	343.667.000	1	343.667.000	100%	23%	1	343.667.000	100%	11%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	380.000.000	100	232.560.000	25	178.250.450	25	178.250.450	25%	77%	100	178.250.450	100%	47%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	22	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	180.000.000	30	80.000.000	8	26.700.450	8	26.700.450	27%	33%	8	26.700.450	27%	15%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	102.560.000	1	101.680.000	1	101.680.000	100%	99%	1	101.680.000	100%	102%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	50.000.000	1	49.870.000	1	49.870.000	100%	100%	1	49.870.000	100%	50%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event/ kegiatan pelestarian kebudayaan	Kali	31	4.250.000.000	15	2.080.000.000	0	635.520.000	0	635.520.000	0%	31%	100	635.520.000	323%	15%	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang	175	3.300.000.000	162	1.622.572.400	0	446.870.000	0	446.870.000	0%	28%	0	446.870.000	0%	14%	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	8	3.300.000.000	8	1.622.572.400	8	446.870.000	8	446.870.000	100%	28%	8	446.870.000	100%	14%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang	175	950.000.000	162	457.427.600	0	188.650.000	0	188.650.000	0%	41%	0	188.650.000	0%	20%	
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/Group	25	950.000.000	25	457.427.600	12	188.650.000	12	188.650.000	48%	41%	12	188.650.000	48%	20%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah event/kegiatan pelestarian kesenian tradisional	Kali	16	370.000.000	15	170.127.000	0	56.458.000	0	56.458.000	0%	33%	0	56.458.000	0%	15%	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	Jenis	2	370.000.000	2	170.127.000	0	56.458.000	0	56.458.000	0%	33%	0	56.458.000	0%	15%	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	40	370.000.000	40	170.127.000	15	56.458.000	15	56.458.000	38%	33%	15	56.458.000	38%	15%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	Obyek	4	200.000.000	2	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dalam bidang perekonomian	Obyek	2	200.000.000	2	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Obyek	20	200.000.000	20	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	%	82	620.000.000	79	298.000.000	0	134.775.000	0	134.775.000	0%	45%	0	134.775.000	0%	22%	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi	Lokasi	3	620.000.000	3	298.000.000	0	134.775.000	0	134.775.000	0%	45%	0	134.775.000	0%	22%	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	200.000.000	3	100.000.000	3	48.540.000	3	48.540.000	100%	49%	3	48.540.000	100%	24%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	420.000.000	1	198.000.000	1	86.235.000	1	86.235.000	100%	44%	1	86.235.000	100%	21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	%	100	665.000.000	100	315.000.000	0	168.650.000	0	168.650.000	0%	54%	0	168.650.000	0%	25%	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemasaran pariwisata	Event	3	665.000.000	3	315.000.000	0	168.650.000	0	168.650.000	0%	54%	0	168.650.000	0%	25%	
3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Event	3	665.000.000	3	315.000.000	2	168.650.000	2	168.650.000	67%	54%	2	168.650.000	67%	25%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	%	7	1.100.000.000	6,6	550.000.000	0	248.650.000	0	248.650.000	0%	45%	0	248.650.000	0%	23%	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/peningkatan SDM pariwisata	Pelatihan	2	1.100.000.000	2	550.000.000	0	248.650.000	0	248.650.000	0%	45%	0	248.650.000	0%	23%	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	1.100.000.000	20	550.000.000	15	248.650.000	15	248.650.000	75%	45%	15	248.650.000	75%	23%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	82	14.689.580.262	82	7.044.126.968	0	721.907.943	0	721.907.943	0%	10%	A	721.907.943	100%	5%	
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	61.989.710	100	57.001.532	41,7	-	41,7	-	42%	0%	100	-	100%	0%	
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Laporan	24	61.989.710	12	57.001.532	5	-	5	-	42%	0%	5	-	21%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	8.085.582.436	100	3.898.506.810	95,8	635.454.843	95,8	635.454.843	96%	16%	100	635.454.843	100%	8%	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	8.085.582.436	24	3.898.506.810	23	635.454.843	23	635.454.843	96%	16%	23	635.454.843	92%	8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	182.998.399	100	275.828.000	22,2	7.229.000	22,2	7.229.000	22%	3%	100	7.229.000	100%	4%	
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	182.998.399	45	275.828.000	10	7.229.000	10	7.229.000	22%	3%	10	7.229.000	17%	4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	469.724.900	100	34.363.280	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	23	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan	%	5	379.116.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	90.608.900	6	34.363.280	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.373.001.999	100	826.192.140	25	69.068.100	25	69.068.100	25%	8%	100	69.068.100	100%	5%	
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.373.001.999	12	826.192.140	3	69.068.100	3	69.068.100	25%	8%	3	69.068.100	13%	5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	4.516.282.818	100	1.952.235.206	0	10.156.000	0	10.156.000	0%	1%	100	10.156.000	100%	0%	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	421.050.455	22	210.814.000	4	7.356.000	4	7.356.000	18%	3%	4	7.356.000	18%	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	3.976.406.763	5	1.651.551.277	2	-	2	-	40%	0%	2	-	40%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	78	118.825.600	72	89.869.929	24	2.800.000	24	2.800.000	33%	3%	24	2.800.000	31%	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	37,3	3.573.124.572	36,79	1.272.717.543	0	151.613.000	0	151.613.000	0%	12%	6	151.613.000	16%	4%	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,9	785.589.230	4,9	504.085.230	0	70.480.000	0	70.480.000	0%	14%	0	70.480.000	0%	9%	
2	23	2	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500	165.544.110	750	180.042.110	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan	76	620.045.120	76	324.043.120	76	70.480.000	76	70.480.000	100%	22%	76	70.480.000	100%	11%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	kali	40	2.787.535.342	20	768.632.313	0	81.133.000	0	81.133.000	0%	11%	0	81.133.000	0%	3%	
2	23	2	2.02	7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	90.000.000	5	98.860.792	18	19.990.000	18	19.990.000	360%	20%	18	19.990.000	360%	22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	1	2.011.058.625	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	212	686.476.717	212	669.771.521	216	61.143.000	216	61.143.000	102%	9%	216	61.143.000	102%	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	94	94.999.670	94	17.999.885	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Eksemplar	210	94.999.670	210	17.999.885	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	23	3	2.01	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	4	56.999.885	2	26.999.89	0	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	4	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	8	37.999.785	4	17.999.885	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	skor	90	1.067.992.335	90	523.639.750	0	54.925.000	0	54.925.000	0%	10%	0	54.925.000	0%	5%	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	539.989.870	100	315.639.770	15	25.430.000	15	25.430.000	15%	8%	100	25.430.000	100%	5%	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	120000	539.989.870	60000	315.639.770	9000	25.430.000	9000	25.430.000	15%	8%	9000	25.430.000	8%	5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	%	100	447.999.965	100	207.999.980	68,2	29.495.000	68,2	29.495.000	68%	14%	68	29.495.000	68%	7%	
2	24	2	2.02	4	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	1500	447.999.965	1500	207.999.980	1023	29.495.000	1023	29.495.000	68%	14%	1023	29.495.000	68%	7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	%	3	80.002.500	3	30.001.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	55	80.002.500	25	30.001.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	skor	8,8	239.987.849	8,8	126.506.055	0	22.722.000	0	22.722.000	0%	18%	9	22.722.000	98%	9%	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	100	239.987.849	100	126.506.055	0	22.722.000	0	22.722.000	0%	18%	0	22.722.000	0%	9%	
2	24	3	2.01	3	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	1400	119.988.913	700	63.605.136	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	2.01	4	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	2000	119.998.936	1000	62.900.919	550	22.722.000	550	22.722.000	55%	36%	550	22.722.000	28%	19%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	84,4	23.704.493.605	84,4	10.393.451.201	0	1.732.851.121	0	1.732.851.121	0%	17%	0	1.732.851.121	100%	7%	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	24.000.000	100	6.710.000	25	-	25	-	25%	0%	25	-	25%	0%	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	6	24.000.000	6	6.710.000	3	-	3	-	50%	0%	3	-	50%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	17.927.000.233	100	8.917.000.233	25	1.521.652.804	25	1.521.652.804	25%	17%	100	1.521.652.804	100%	8%	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	17.927.000.233	67	8.917.000.233	67	1.521.652.804	67	1.521.652.804	100%	17%	67	1.521.652.804	89%	8%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	250.920.800	100	65.227.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	250.920.800	1	65.227.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	758.882.000	100	243.167.895	25	35.330.300	25	35.330.300	25%	15%	100	35.330.300	100%	5%	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	758.882.000	12	243.167.895	3	35.330.300	3	35.330.300	25%	15%	3	35.330.300	25%	5%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan Pemerintahan	%	100	1.629.197.800	100	60.321.800	25	20.825.000	25	20.825.000	25%	35%	100	20.825.000	100%	1%	
3	30	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1.460.661.550	1	38.288.000	0	-	0	-	0%	0%	2	-	0	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	138.536.250	2	22.033.800	2	20.825.000	2	20.825.000	100%	95%	6	20.825.000	0	15%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.376.458.572	100	706.780.073	25	114.159.847	0	114.159.847	0%	16%	100	114.159.847	100%	5%	
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	706.780.073	12	706.780.073	3	114.159.847	3	114.159.847	25%	16%	3	114.159.847	25%	16%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.669.678.499	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	738.034.200	100	394.244.200	25	40.883.170	25	40.883.170	25%	10%	100	40.883.170	100%	6%	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	44	512.800.000	44	284.010.000	5	19.198.470	5	19.198.470	11%	7%	5	19.198.470	11%	4%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	3	50.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	100%	28%	3	14.000.000	100%	14%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	160	125.234.200	122	60.234.200	15	7.684.700	15	7.684.700	12%	13%	15	7.684.700	9%	6%	Dinas Perdagangan
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	%	100	259.560.400	100	-	0	15.741.500	0	15.741.500	0%	0	100	15.741.500	100%	6%	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	dokumen	80	259.560.400	75	-	2	15.741.500	2	15.741.500	3%	0	100	15.741.500	125%	6%	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	0	-	0	-		-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
3	30	2	2.01	2	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	12	259.560.400	12	138.472.400	2	15.741.500	2	15.741.500	17%	11%	2	15.741.500	17%	6%	Dinas Perdagangan
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	11.299.093.118	100	5.196.150.078	0	791.360.123	0	791.360.123	0%	15%	0	791.360.123	0%	7%	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	pasar	17	2.129.895.518	17	775.675.278	0	124.287.901	0	124.287.901	0%	16%	17	124.287.901	100%	6%	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	411.660.240	3	111.515.00	0	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	1.718.235.278	17	775.675.278	17	124.287.901	17	124.287.901	100%	16%	17	124.287.901	100%	7%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	9.169.197.600	100	4.420.474.800	0	667.072.222	0	667.072.222	0%	15%	100	667.072.222	100%	7%	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	670.000.000	1	371.340.000	0	41.250.000	0	41.250.000	0%	11%	0	41.250.000	0%	6%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	2	8.499.197.600	1	4.049.134.800	1	625.822.222	1	625.822.222	100%	15%	1	625.822.222	50%	7%	Dinas Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100	753.054.200	100	378.804.200	0	32.537.100	0	32.537.100	0%	9%	100	32.537.100	100%	4%	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	Kali	3	707.021.200	3	357.771.200	0	31.441.600	0	31.441.600	0%	9%	100	31.441.600	3333%	4%	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	238.843.600	3	149.843.600	1	20.235.000	1	20.235.000	33%	14%	1	20.235.000	33%	8%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	468.177.600	4	207.927.600	2	11.206.600	2	11.206.600	50%	5%	2	11.206.600	50%	2%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	%	100	46.033.000	100	21.033.000	0	1.095.500	0	1.095.500	0%	5%	100	1.095.500	100%	2%	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	2	46.033.000	2	21.033.000	1	1.095.500	1	1.095.500	50%	5%	1	1.095.500	50%	2%	Dinas Perdagangan
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	728.356.386	100	383.030.385	0	36.828.000	0	36.828.000	0%	10%	100	36.828.000	100%	5%	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	bulan	12	728.356.386	12	383.030.385	0	36.828.000	0	36.828.000	0%	10%	12	36.828.000	100%	5%	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	8186	669.253.886	8186	353.927.885	277	36.678.000	277	36.678.000	3%	10%	277	36.678.000	3%	5%	Dinas Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	150	59.102.500	150	29.102.500	25	150.000	25	150.000	17%	1%	25	150.000	17%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	735.045.025	100	262.258.625	0	3.719.800	0	3.719.800	0%	1%	100	3.719.800	100%	1%	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	kali	8	735.045.025	4	262.258.625	0	3.719.800	0	3.719.800	0%	1%	0	3.719.800	0%	1%	
3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	12	735.045.025	4	262.258.625	1	3.719.800	1	3.719.800	25%	1%	1	3.719.800	8%	1%	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	2.986.201.023	85	1.586.791.023	0	79.963.065	A	79.963.065	0	5%	A	79.963.065	100%	3%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	17.500.000	100	8.500.000	0	820.000	0	820.000	0%	10%	100	820.000	100%	5%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	17.500.000	12	8.500.000	3	820.000	8	820.000	67%	10%	8	820.000	67%	5%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	1.796.820.000	100	898.410.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	187	1.796.820.000	12	898.410.000	0	-	11	-	92%	0%	11	-	6%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	376.881.023	100	176.881.023	0	38.138.365	0	38.138.365	0%	22%	100	38.138.365	100%	10%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	376.881.023	18	176.881.023	6	38.138.365	6	38.138.365	33%	22%	6	38.138.365	19%	10%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	189.262.592	100	-	-	-	0	-	0%	0	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	90.000.000	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	99.262.592	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemda	%	100	500.000.000	100	250.000.000		32.705.300	0	32.705.300	0%	13%	100	32.705.300	100%	7%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	500.000.000	12	250.000.000	3	32.705.300	3	32.705.300	25%	13%	3	32.705.300	13%	7%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	295.000.000	100	253.000.000		8.299.400	0	8.299.400	0%	3%	100	8.299.400	100%	3%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	50.000.000	4	33.000.000	1	7.129.400	1	7.129.400	25%	22%	1	7.129.400	13%	14%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	225.000.000	1	210.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	20.000.000	17	10.000.000	4	1.170.000	4	1.170.000	24%	12%	4	1.170.000	12%	6%	Bagian Pemerintahan
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	100	4.088.424.012	100	1.940.693.939	-	149.790.000	0	149.790.000	0%	8%	0	149.790.000	0%	4%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	3.398.424.012	100	1.595.693.939	-	82.610.000	0	82.610.000	0%	5%	100	82.610.000	100%	2%	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8	2.328.424.012	4	1.075.693.939	1	10.750.000	1	10.750.000	25%	1%	1	10.750.000	13%	0%	Bagian Pemerintahan
				2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	45.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	14	1.025.000.000	7	510.000.000	4	71.860.000	4	71.860.000	57%	14%	4	71.860.000	29%	7%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	%	100	690.000.000	100	345.000.000	0	67.180.000	0	67.180.000	0%	19%	100	67.180.000	100%	10%	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	690.000.000	5	345.000.000	1	67.180.000	1	67.180.000	20%	19%	1	67.180.000	10%	10%	Bagian Pemerintahan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	86	6.285.728.627	85	3.065.135.535	0	88.538.651	0	88.538.651	0%	3%	100	88.538.651	100%	1%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	30.000.000	100	15.000.000	33	-	33	-	33%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	30.000.000	12	15.000.000	4	-	4	-	33%	0%	4	-	33%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	1.850.728.627	100	920.135.535	25	12.839.468	25	12.839.468	25%	1%	100	12.839.468	100%	1%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	9	1.850.728.627	9	920.135.535	3	12.839.468	9	12.839.468	100%	1%	9	12.839.468	100%	1%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	370.000.000	100	180.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	370.000.000	12	180.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	335.000.000	100	10.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	335.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	450.000.000	100	275.200.000	25	24.733.400	25	24.733.400	25%	9%	100	24.733.400	100%	5%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450.000.000	12	275.200.000	3	24.733.400	3	24.733.400	25%	9%	3	24.733.400	25%	5%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	90.000.000	100	172.000.000	25	6.540.593	25	6.540.593	25%	4%	100	6.540.593	100%	7%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	54.000.000	6	27.000.000	1	6.540.593	1	6.540.593	17%	24%	1	6.540.593	17%	12%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	145.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	26.000.000	21	13.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	skor	46,3	3.160.000.000	46,2	1.492.800.000		44.425.190	0	44.425.190	0%	3%	0	44.425.190	0%	1%	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	820.000.000	2	370.800.000	0	2.240.000	0	2.240.000	0%	1%	0	2.240.000	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	1.520.000.000	2	722.000.000	0	38.765.190	0	38.765.190	0%	5%	0	38.765.190	0%	3%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	820.000.000	2	400.000.000	0	3.420.000	0	3.420.000	0%	1%	0	3.420.000	0%	0%	Bagian Organisasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	86	4.042.060.567	85	2.146.823.646	-	-	0	-	0%	0%	BB	-	100%	0%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	2.000.000	100	1.000.000	-	-	100	-	100%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	2.000.000	6	1.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	2.136.000.000	100	1.032.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	22	2.136.000.000	10	1.032.000.000	-	-	10	-	100%	0%	10	-	45%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	600.000.000	100	300.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	600.000.000	36	300.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	291.060.567	100	184.673.646	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	110.000.000	3		-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	78.000.000	17	184.673.646	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	103.060.567	7	40.306.312	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	850.000.000	100	425.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	500	850.000.000	250	425.000.000	-	-	14	-	6%	0%	14	-	3%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	163.000.000	100	204.150.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	76.000.000	7	38.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	7.000.000	1	126.150.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	80.000.000	30	40.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	4.104.400.000	100	1.661.956.448	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	%	100	4.104.400.000	100	1.661.956.448	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	48	1.330.000.000	24	755.493.400	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	50	1.295.000.000	25	450.237.609	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	800	1.479.400.000	400	456.225.439	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	5.323.937.000	85	2.566.140.435	0	47.350.011	0	47.350.011	0%	2%	A	47.350.011	100%	1%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	31.000.000	100	1.500.000	25	-	25	-	25%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	31.000.000	12	1.500.000	3	-	3	-	25%	0%	3	-	13%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	3.580.000.000	100	1.780.000.000	25	-	25	-	25%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	3.580.000.000	16	1.780.000.000	16	-	8	-	50%	0%	8	-	47%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	380.000.000	100	200.000.000	25	14.064.000	25	14.064.000	25%	7%	100	14.064.000	100%	4%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	380.000.000	12	200.000.000	3	14.064.000	3	14.064.000	25%	7%	3	14.064.000	13%	4%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	350.000.000	100	200.163.650	25	-	25	-	25%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	350.000.000	10	200.163.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	620.000.000	100	300.000.000	25	31.186.011	25	31.186.011	25%	10%	100	31.186.011	100%	5%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	620.000.000	12	300.000.000	1	31.186.011	1	31.186.011	8%	10%	1	31.186.011	4%	5%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	362.937.000	100	84.476.785	25	2.100.000	25	2.100.000	25%	2%	100	2.100.000	100%	1%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	65.000.000	10	30.000.000	10	2.100.000	10	2.100.000	100%	7%	10	2.100.000	50%	3%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	244.937.000	1	29.476.785	1	-	1	-	100%	0%	1	-	50%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	53.000.000	40	25.000.000	40	-	40	-	100%	0%	40	-	50%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	930.001.427	100	456.100.000	25	32.339.036	25	32.339.036	25%	7%	25	32.339.036	25%	3%	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	%	100	263.001.427	100	116.100.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25%	3%	100	3.000.000	100%	1%	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	68.001.427	1	26.100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	24	195.000.000	12	90.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	25%	3%	3	3.000.000	13%	2%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	%	100	667.000.000	100	340.000.000	25	29.339.036	25	29.339.036	25%	9%	25	29.339.036	25%	4%	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	24	347.000.000	12	190.000.000	3	-	3	-	25%	0%	3	-	13%	0%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	24	320.000.000	12	150.000.000	3	29.339.036	3	29.339.036	25%	20%	3	29.339.036	13%	9%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	4.455.912.667	85	1.897.294.810	0	75.015.561	A	75.015.561	0	4%	A	75.015.561	100%	2%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	37.000.000	100	15.000.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	37.000.000	6	15.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	2.162.589.620	100	1.081.294.810	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	2.162.589.620	13	1.081.294.810	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	500.000.000	100	200.000.000	0	23.938.261	0	23.938.261	0%	12%	100	23.938.261	100%	5%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	6	500.000.000	6	200.000.000	1	23.938.261	1	23.938.261	17%	12%	100	23.938.261	1667%	5%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	73.000.000	100	175.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	37.000.000	1	2.000.000	0	-	0	-	0%	0%	99	-	1414%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%	16	73.000.000	16	175.000.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	625%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.126.439.272	100	175.000.000	0	50.606.800	0	50.606.800	0%	29%	100	50.606.800	100%	4%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.126.439.272	12	175.000.000	2	50.606.800	2	50.606.800	17%	29%	2	50.606.800	8%	4%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	556.883.775	100	251.000.000	0	470.500	0	470.500	0%	0%	100	470.500	100%	0%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	153.276.575	12	31.000.000	1	470.500	1	470.500	8%	2%	100	470.500	833%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	350.000.000	1	200.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	31	53.607.200	31	20.000.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	323%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	3.000.000.000	100	2.154.187.108	0	300.807.500	0	300.807.500	0%	14%	100	300.807.500	100%	10%	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	%	100	3.000.000.000	100	2.154.187.108	0	300.807.500	0	300.807.500	0%	14%	100	300.807.500	100%	10%	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	15	3.000.000.000	15	2.154.187.108	1	300.807.500	1	300.807.500	7%	14%	1	300.807.500	7%	10%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	1.820.984.960	100	977.210.500	0	31.919.000	0	31.919.000	0%	3%	100	31.919.000	100%	2%	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks	81	1.020.984.960	81	577.210.500	0	31.919.000	0	31.919.000	0%	6%	0	31.919.000	0%	3%	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	2	535.984.960	2	300.000.000	1	31.919.000	1	31.919.000	50%	11%	1	31.919.000	50%	6%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	3	485.000.000	3	277.210.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	800.000.000	100	400.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2	800.000.000	2	400.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	61.209.118.337	85	30.973.071.614	-	5.147.850.599	0	5.147.850.599	0%	17%	0	5.147.850.599	0%	8%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	10.000.000	100	5.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	10.000.000	6	5.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Umum
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	27.679.515.864	100	15.298.038.714	-	2.600.092.978	0	2.600.092.978	0%	17%	100	2.600.092.978	100%	9%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	250	27.679.515.864	125	15.298.038.714	97	2.600.092.978	163	2.600.092.978	130%	17%	163	2.600.092.978	65%	9%	Bagian Umum
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	%	100	5.900.000.000	100	2.488.595.000		46.800.000	0	46.800.000	0%	2%	100	46.800.000	100%	1%	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5.900.000.000	2	2.488.595.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0%	2%	0	46.800.000	0%	1%	Bagian Umum
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	2.725.000.000	100	1.350.000.000		739.461.452	0	739.461.452	0%	55%	100	739.461.452	100%	27%	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	1	100.000.000	0	12.922.000	0	12.922.000	0%	13%	0	12.922.000	0%	7%	Bagian Umum
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.550.000.000	12	1.250.000.000	3	726.539.452	3	726.539.452	25%	58%	3	726.539.452	25%	28%	Bagian Umum
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.825.000.000	100	1.350.423.625		39.951.528	0	39.951.528	0%	3%	100	39.951.528	100%	2%	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	225.000.000	2	904.700.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Umum
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	18	950.000.000	10	279.073.625	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Umum
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	50	650.000.000	25	166.650.000	0	39.951.528	0	39.951.528	0%	24%	0	39.951.528	0%	6%	Bagian Umum
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	10.034.602.473	100	3.970.514.275	0	881.585.884	0	881.585.884	0%	22%	100	881.585.884	100%	9%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	10.034.602.473	12	3.970.514.275	3	881.585.884	3	881.585.884	25%	22%	3	881.585.884	13%	9%	Bagian Umum
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	3.750.000.000	100	1.868.000.000	-	272.467.431	0	272.467.431	0%	15%	100	272.467.431	100%	7%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	220	2.200.000.000	110	1.100.000.000	12	173.194.479	12	173.194.479	11%	16%	12	173.194.479	5%	8%	Bagian Umum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	1.000.000.000	1	500.000.000	0	81.119.952	0	81.119.952	0%	16%	0	81.119.952	0%	8%	Bagian Umum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	255	550.000.000	125	268.000.000	0	18.153.000	0	18.153.000	0%	7%	0	18.153.000	0%	3%	Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	-	173.726.703	0	173.726.703	0%	17%	100	173.726.703	100%	9%	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	4	800.000.000	2	320.000.000	2	23.726.703	2	23.726.703	100%	7%	0	0	0	0	Bagian Umum
				2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	4	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Bagian Umum
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	0	-	2	680.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	100%	22%	2	150.000.000	22%	22%	Bagian Umum
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%	100	3.325.000.000	100	1.667.500.000	-	371.559.623	0	371.559.623	0%	22%	100	371.559.623	100%	11%	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	2	1.750.000.000	1	900.000.000	-	273.325.788	0	273.325.788	0%	30%	0	273.325.788	0%	16%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	2	875.000.000	1	417.500.000	-	76.291.660	0	76.291.660	0%	18%	0	76.291.660	0%	9%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	2	700.000.000	1	350.000.000	-	21.942.175	0	21.942.175	0%	6%	0	21.942.175	0%	3%	Bagian Umum
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	%	100	3.960.000.000	100	1.975.000.000	-	22.205.000	0	22.205.000	0%	1%	100	22.205.000	100%	1%	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	24	3.960.000.000	12	1.975.000.000	-	22.205.000	0	22.205.000	0%	1%	0	22.205.000	0%	1%	Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	2				SEKRETARIAT DPRD																	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Skor	83	60.290.753.183	82	29.526.842.794	0	7.044.227.365	0	7.044.227.365	0%	24%	0	7.044.227.365	0%	12%	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	119.463.154	100	59.731.577	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	119.463.154	6	59.731.577	2	-	2	-	33%	0%	2	-	17%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	6.733.364.652	100	3.386.604.920	0	495.120.861	0	495.120.861	0%	15%	100	495.120.861	100%	7%	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	6.733.364.652	18	3.386.604.920	16	495.120.861	16	495.120.861	89%	15%	16	495.120.861	89%	7%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	379.637.788	100	164.818.894	0	5.500.000	0	5.500.000	0%	3%	100	5.500.000	100%	1%	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	129.637.788	1	64.818.894	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	18	250.000.000	17	100.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	6%	6%	1	5.500.000	6%	2%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	%	100	2.770.302.253	100	1.341.309.329	0	443.305.075	0	443.305.075	0%	33%	100	443.305.075	100%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	88	2.770.302.253	34	1.341.309.329	13	443.305.075	13	443.305.075	38%	33%	13	443.305.075	15%	16%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	%	100	16.483.500	100	8.241.750	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	16.483.500	4	8.241.750	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	%	100	5.311.312.564	100	2.514.226.687	0	522.491.471	0	522.491.471	0%	21%	100	522.491.471	100%	10%	
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.311.312.564	24	2.514.226.687	6	522.491.471	6	522.491.471	25%	21%	6	522.491.471	13%	10%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	%	100	2.042.156.920	100	1.001.078.460	0	54.696.230	0	54.696.230	0%	5%	100	54.696.230	100%	3%	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	617.682.580	26	298.841.290	7	44.542.730	7	44.542.730	27%	15%	7	44.542.730	27%	7%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	477.347.100	180	238.673.550	45	2.974.500	45	2.974.500	25%	1%	45	2.974.500	25%	1%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	947.127.240	6	463.563.620	6	7.179.000	6	7.179.000	100%	2%	6	7.179.000	100%	1%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	%	100	32.525.104.474	100	15.979.367.238	0	4.000.074.765	0	4.000.074.765	0%	25%	100	4.000.074.765	100%	12%	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	31.807.146.434	30	15.620.388.218	30	3.982.415.065	30	3.982.415.065	100%	25%	30	3.982.415.065	100%	13%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	507.958.040	3	253.979.020	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	210.000.000	30	105.000.000	9	17.659.700	9	17.659.700	30%	17%	9	17.659.700	30%	8%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	%	100	10.392.927.878	100	5.071.463.939	0	1.523.038.963	0	1.523.038.963	0%	30%	100	1.523.038.963	100%	15%	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	16	75.914.300	8	37.957.150	2	1.343.000	2	1.343.000	25%	4%	2	1.343.000	13%	2%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	32	10.317.013.578	16	5.033.506.789	6	1.521.695.963	6	1.521.695.963	38%	30%	6	1.521.695.963	19%	15%	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Skor	100	24.555.986.236	100	5.350.825.422		2.415.943.624	0	2.415.943.624	0%	45%	82	2.415.943.624	82%	10%	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	%	100	7.639.200.000	100	3.219.737.000		830.697.730	0	830.697.730	0%	26%	100	830.697.730	100%	11%	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	24	5.259.200.000	9	2.029.737.000	3	830.697.730	3	830.697.730	33%	41%	3	830.697.730	13%	16%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	6	2.380.000.000	3	1.190.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	%	100	2.903.000.000	100	1.346.000.000		50.766.000	0	50.766.000	0%	4%	100	50.766.000	100%	2%	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	2.903.000.000	5	1.346.000.000	0	50.766.000	0	50.766.000	0%	4%	0	50.766.000	0%	2%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	%	100	2.384.081.294	100	785.088.422	-	196.546.100	0	196.546.100	0%	25%	100	196.546.100	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1.147.867.800	1	373.933.900	1	166.909.200	1	166.909.200	100%	45%	1	166.909.200	100%	15%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	1.236.213.494	1	411.154.522	0	29.636.900	0	29.636.900	0%	7%	0	29.636.900	0%	2%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	%	100	9.082.394.942	100	-	0	999.192.794	0	999.192.794	0%	100	100	999.192.794	100%	11%	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	12	4.456.680.000	6	1.869.304.000	2	491.231.894	2	491.231.894	33%	26%	2	491.231.894	17%	11%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	2.010.140.000	2	1.387.857.225	1	507.960.900	1	507.960.900	50%	37%	1	507.960.900	25%	25%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	30	2.615.574.942	15	1.284.036.246	4	133.860.000	4	133.860.000	27%	10%	4	133.860.000	13%	5%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	%	100	2.547.310.000	100	-	0	338.741.000	95	338.741.000	95%	100	100	338.741.000	100%	13%	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	6	2.547.310.000	3	850.607.225	1	338.741.000	1	338.741.000	33%	40%	1	338.741.000	17%	13%	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	1				PERENCANAAN																	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	skor	90	16.202.293.898	89	7.381.702.859	0	1.041.542.810	0	1.041.542.810	0%	14%	A	1.041.542.810	100%	6%	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	347.450.800	100	149.316.160	25	8.055.100	25	8.055.100	25%	5%	100	8.055.100	100%	2%	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	284.978.400	6	56.013.060	1	8.055.100	1	8.055.100	17%	14%	1	8.055.100	17%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	22.101.200	4	44.603.100	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	40.371.200	4	48.700.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keungan	%	100	11.185.980.000	100	5.528.896.785	25	737.345.777	25	737.345.777	25%	13%	100	737.345.777	100%	7%	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	11.101.900.000	26	5.512.396.785	26	731.145.777	0	731.145.777	0%	13%	0	731.145.777	0%	7%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	16	84.080.000	4	16.500.000	1	6.200.000	1	6.200.000	25%	38%	1	6.200.000	6%	7%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	%	100	490.855.384	-	72.550.800	25	1.650.250	25	1.650.250	0	2%	100	1.650.250	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	35	308.196.624	35	63.800.000	0	1.650.250	0	1.650.250	0%	3%	0	1.650.250	0%	1%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	35	182.658.760	35	8.750.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	911.868.000	100	447.153.000	25	73.995.388	25	73.995.388	25%	17%	25	73.995.388	25%	8%	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	911.868.000	1	447.153.000	0	73.995.388	0	73.995.388	0%	17%	0	73.995.388	0%	8%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	220.734.600	100	74.667.480	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	16	220.734.600	8	74.667.480	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.531.104.854	100	848.582.204	25	170.982.995	25	170.982.995	25%	20%	100	170.982.995	100%	7%	
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.682.522.650	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	848.582.204	1	848.582.204	0	170.982.995	0	170.982.995	0%	20%	0	170.982.995	0%	20%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	514.300.260	100	260.536.430	25	49.513.300	25	49.513.300	25%	19%	100	49.513.300	100%	10%	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	217.676.000	33	112.310.000	0	23.013.300	0	23.013.300	0%	20%	0	23.013.300	0%	11%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.643.130	1	75.235.865	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	145.981.130	50	72.990.565	25	26.500.000	25	26.500.000	50%	36%	25	26.500.000	50%	18%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100	4.364.132.326	100	1.249.059.725	0	338.748.180	0	338.748.180	0%	27%	100	338.748.180	100%	8%	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Dokumen	12	3.966.132.326	3	1.045.835.625	0	319.308.180	0	319.308.180	0%	31%	0	319.308.180	0%	8%	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	304.208.740	1	145.774.500	1	10.077.750	1	10.077.750	100%	7%	1	10.077.750	50%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita Acara	2	310.412.970	1	156.715.000	1	129.740.700	1	129.740.700	100%	83%	1	129.740.700	50%	42%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	1.097.895.172	2	324.712.100	1	104.540.350	1	104.540.350	50%	32%	1	104.540.350	33%	10%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2.253.615.444	2	418.634.025	0	74.949.380	0	74.949.380	0%	18%	0	74.949.380	0%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Dokumen	8	398.000.000	4	203.224.100	1	19.440.000	1	19.440.000	25%	10%	1	19.440.000	13%	5%	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	4	198.000.000	2	178.659.000	1	19.440.000	1	19.440.000	50%	11%	1	19.440.000	25%	10%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	8	200.000.000	4	24.565.100	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100	3.176.000.000	100	1.144.032.900	0	73.702.900	0	73.702.900	0%	6%	0	73.702.900	0%	2%	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	2	1.056.000.000	1	535.992.900	0	35.748.200	0	35.748.200	0%	7%	0	35.748.200	0%	3%	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	162.000.000	1	72.000.000	0	13.043.000	0	13.043.000	0%	18%	0	13.043.000	0%	8%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	220.000.000	1	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	661.163.000	1	347.742.900	0	21.860.200	0	21.860.200	0%	6%	0	21.860.200	0%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	3	12.837.000	2	6.250.000	0	845.000	0	845.000	0%	14%	0	845.000	0%	7%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	5	820.000.000	1	216.300.000	0	13.536.700	0	13.536.700	0%	6%	0	13.536.700	0%	2%	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	800.000.000	1	103.300.000	0	8.536.700	0	8.536.700	0%	8%	0	8.536.700	0%	1%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	2	20.000.000	5	113.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0%	4%	0	5.000.000	0%	25%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	3	1.300.000.000	1	391.740.000	0	24.418.000	0	24.418.000	0%	6%	0	24.418.000	0%	2%	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	300.000.000	1	62.120.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0%	11%	0	7.000.000	0%	2%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	2	400.000.000	1	138.910.000	0	7.102.500	0	7.102.500	0%	5%	0	7.102.500	0%	2%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	300.000.000	1	114.550.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	300.000.000	1	76.160.000	0	10.315.500	0	10.315.500	0%	14%	0	10.315.500	0%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	3.246.214.000	100	1.577.768.129	0	42.466.700	0	42.466.700	0%	3%	100	42.466.700	100%	1%	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Dokumen	5	2.692.244.000	2	1.298.211.629	0	19.629.700	0	19.629.700	0%	2%	0	19.629.700	0%	1%	
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	12	2.363.766.000	2	1.171.780.829	0	7.669.700	0	7.669.700	0%	1%	0	7.669.700	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	328.478.000	1	126.430.800	0	11.960.000	0	11.960.000	0%	9%	0	11.960.000	0%	4%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Dokumen	3	553.970.000	2	279.556.500	0	22.837.000	0	22.837.000	0%	8%	0	22.837.000	0%	4%	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	4	553.970.000	4	279.556.500	0	22.837.000	0	22.837.000	0%	8%	0	22.837.000	0%	4%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN																	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	84,3	102.547.856.658	84.2	51.273.928.329	0	4.401.543.703	0	4.401.543.703	0	9%	A	4.401.543.703	100%	4%	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	4.000.000	100	2.000.000	37	-	37	-	37%	0%	100	-	100%	0%	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	4.000.000	8	2.000.000	3	-	3	-	38%	0%	3	-	19%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	73.020.000.994	100	34.360.000.497	25	2.217.792.203	25	2.217.792.203	25%	6%	100	2.217.792.203	100%	3%	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	73.020.000.994	33	34.360.000.497	33	2.217.792.203	33	2.217.792.203	100%	6%	33	2.217.792.203	94%	3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	900.000.000	100	600.000.000	25	79.766.249	25	79.766.249	25%	13%	100	79.766.249	100%	9%	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	178	900.000.000	89	600.000.000	13	79.766.249	13	79.766.249	15%	13%	13	79.766.249	7%	9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	%	100	428.000.000	100	214.000.000	46	68.628.000	46	68.628.000	46%	32%	100	68.628.000	100%	16%	
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	428.000.000	13	214.000.000	6	68.628.000	6	68.628.000	46%	32%	6	68.628.000	23%	16%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	%	100	27.609.855.664	100	15.804.927.832	25	2.004.140.512	25	2.004.140.512	25%	13%	100	2.004.140.512	100%	7%	
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	27.609.855.664	12	15.804.927.832	3	2.004.140.512	3	2.004.140.512	25%	13%	3	2.004.140.512	25%	7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	586.000.000	100	293.000.000	25	31.216.739	25	31.216.739	25%	11%	100	31.216.739	100%	5%	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	220.000.000	36	110.000.000	9	18.368.239	9	18.368.239	25%	17%	9	18.368.239	25%	8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	75.000.000	1	7.048.500	1	7.048.500	100%	9%	1	7.048.500	100%	5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	216.000.000	8	108.000.000	7	5.800.000	7	5.800.000	88%	5%	7	5.800.000	88%	3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	%	100	8.689.246.000	100	4.476.622.647	25	332.631.564	25	332.631.564	25%	7%	100	332.631.564	100%	4%	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	2.253.628.000	100	1.126.814.000	25	60.132.964	25	60.132.964	25%	5%	100	60.132.964	100%	3%	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	166.842.000	2	83.421.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	113.638.000	2	56.819.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	56	33.752.000	34	16.876.000	28	16.771.964	28	16.771.964	82%	99%	28	16.771.964	50%	50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	56	47.280.000	34	23.640.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4	309.358.000	2	113.677.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	4	309.358.000	2	195.680.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	6	1.273.400.000	4	636.700.000	0	43.361.000	0	43.361.000	0%	7%	0	43.361.000	0%	3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	%	100	110.100.000	100	55.050.000	25	10.515.000	25	10.515.000	25%	19%	100	10.515.000	100%	10%	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	94	99.900.000	47	49.950.000	13	8.050.000	13	8.050.000	28%	16%	13	8.050.000	14%	8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	6	10.200.000	3	5.100.000	3	2.465.000	3	2.465.000	100%	48%	3	2.465.000	50%	24%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	%	100	2.325.518.000	100	1.162.759.000	25	261.983.600	25	261.983.600	25%	23%	100	261.983.600	100%	11%	
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	280.000.000	2	140.000.000	1	59.260.800	1	59.260.800	50%	42%	1	59.260.800	25%	21%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	4	132.000.000	2	66.000.000	2	10.415.000	2	10.415.000	100%	16%	2	10.415.000	50%	8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	8	180.000.000	4	90.000.000	1	22.950.000	1	22.950.000	25%	26%	1	22.950.000	13%	13%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	345	1.733.518.000	345	866.759.000	0	169.357.800	0	169.357.800	0%	20%	0	169.357.800	0%	10%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100	4.000.000.000	100	2.131.999.647	25	-	25	-	25%	0%	25	-	25%	0%	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	24	4.000.000.000	12	2.131.999.647	3	-	3	-	25%	0%	3	-	13%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	%	80	3.931.896.000	100	1.965.948.000	25	10.880.000	25	10.880.000	25%	1%	100	10.880.000	125%	0%	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	100	3.931.896.000	22	1.965.948.000	0	10.880.000	0	10.880.000	0%	1%	0	10.880.000	0%	0%	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	246.284.000	2	123.142.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	4	3.606.412.000	2	1.803.206.000	0	4.590.000	0	4.590.000	0%	0%	0	4.590.000	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	36	79.200.000	18	39.600.000	0	6.290.000	0	6.290.000	0%	16%	0	6.290.000	0%	8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN																	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82	22.954.406.934	82	11.477.123.467	-	770.482.076	0	770.482.076	100%	7%	A	770.482.076	100%	3%	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	4.000.000	100	2.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	4.000.000	8	2.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya admisnitrasi keuangan perangkat daerah	%	100	21.350.347.350	100	10.675.173.675	-	601.191.416	0	601.191.416	0%	6%	0	601.191.416	0%	3%	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	28	21.350.347.350	30	10.675.173.675	-	601.191.416	0	601.191.416	0%	6%	0	601.191.416	0%	3%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	160.000.000	100		-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	2	60.000.000	2	30.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	100.000.000	40	50.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	200.000.000	100	100.000.000	-	12.901.360	0	12.901.360	0%	13%	0	12.901.360	0%	6%	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	50	200.000.000	35	100.000.000	-	12.901.360	0	12.901.360	0%	13%	0	12.901.360	0%	6%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	Unit	100	50.160.000	100	25.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	160.000	12	80.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	10	50.000.000	5	25.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.049.899.584	100	524.949.792	-	137.667.800	0	137.667.800	0%	26%	0	137.667.800	0%	13%	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	24	1.049.899.584	13	524.949.792	-	137.667.800	0	137.667.800	0%	26%	0	137.667.800	0%	13%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	300.000.000	100	150.000.000	-	18.721.500	0	18.721.500	0%	12%	0	18.721.500	0%	6%	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	32	100.000.000	30	50.000.000	-	18.551.500	0	18.551.500	0%	37%	0	18.551.500	0%	19%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	5	50.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	5	50.000.000	-	170.000	0	170.000	0%	0%	0	170.000	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	2.588.064.106		1.294.002.053	-	3.210.000	0	3.210.000	0	0%	0	3.210.000	0%	0%	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	2.588.064.106	100	1.294.002.053	-	3.210.000	0	3.210.000	0%	0%	0	3.210.000	0%	0%	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	50.000.000	2	25.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	2	20.000	3	-	-	-	0	-	0%	0	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	dokumen	450	838.004.106	450	419.002.053	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	1	20.000	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	2	400.000.000	1	200.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	2	400.000.000	1	200.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	2	200.000.000	2	100.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	2	100.000.000	1	50.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Wajib Pajak	600	60.000.000	300	30.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	%	2	300.000.000	1	150.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	2	140.000.000	1	70.000.000	-	410.000	0	410.000	0%	1%	0	410.000	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	2	20.000	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	2	20.000.000	1	10.000.000	-	2.800.000	0	2.800.000	0%	28%	0	2.800.000	0%	14%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	dokumen	2	80.000.000	1	40.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	3				KEPEGAWAIAN																	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	skor	87	14.272.800.000	86	7.257.773.820	0	1.241.036.833	0	1.241.036.833	0%	17%	A	1.241.036.833	100%	9%	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	%	100	18.800.000	100	9.400.000	20	-	20	-	20%	0%	100	-	100%	0%	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	18.800.000	5	9.400.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	12.200.000.000	100	6.275.394.183	25	1.052.568.368	25	1.052.568.368	25%	17%	100	1.052.568.368	100%	9%	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	12.200.000.000	45	6.275.394.183	45	1.052.568.368	0	1.052.568.368	0%	17%	43	1.052.568.368	96%	9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	800.000.000	100	340.000.000	17	45.000.000	17	45.000.000	17%	13%	100	45.000.000	100%	6%	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	170	800.000.000	85	340.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	18%	13%	15	45.000.000	9%	6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	64.000.000	100	50.000.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	64.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	%	100	880.000.000	100	317.979.637	10	122.990.000	10	122.990.000	10%	39%	100	122.990.000	100%	14%	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	880.000.000	12	317.979.637	3	122.990.000	3	122.990.000	25%	39%	3	122.990.000	13%	14%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	310.000.000	100	265.000.000	15	20.478.465	15	20.478.465	15%	8%	100	20.478.465	100%	7%	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	40.000.000	18	35.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	6%	20%	1	7.000.000	6%	18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	2	180.000.000	0	3.978.465	0	3.978.465	0%	2%	0	3.978.465	0%	2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	70.000.000	8	50.000.000	3	9.500.000	3	9.500.000	38%	19%	3	9.500.000	8%	14%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	%	100	3.425.247.086	100	1.862.558.400	0	107.048.044	0	107.048.044	0%	6%	0	107.048.044	0%	3%	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	2.227.180.400	100	1.128.590.200	15	90.495.044	15	90.495.044	15%	8%	100	90.495.044	100%	4%	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan formasi	2	1.838.460.400	1	934.230.200	0	82.885.044	0	82.885.044	0%	9%	0	82.885.044	0%	5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	385	178.720.000	6	89.360.000	43	-	43	-	717%	0%	43	-	11%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3000	210.000.000	3036	105.000.000	1000	7.610.000	0	7.610.000	0%	7%	0	7.610.000	0%	4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	%	100	491.493.400	100	345.746.200	0	6.390.000	0	6.390.000	0%	2%	100	6.390.000	100%	1%	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	409	350.233.400	702	275.116.200	618	5.400.000	618	5.400.000	88%	2%	618	5.400.000	151%	2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	950	141.260.000	455	70.630.000	214	990.000	214	990.000	47%	1%	214	990.000	23%	1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	%	100	150.629.286	100	100.000.000	10	4.103.000	10	4.103.000	10%	4%	100	4.103.000	100%	3%	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	Dokumen	220	150.629.286	290	100.000.000	8	4.103.000	8	4.103.000	3%	4%	8	4.103.000	4%	3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evalusai Kinerja	%	100	555.944.000	100	288.222.000	27	6.060.000	27	6.060.000	27%	2%	100	6.060.000	100%	1%	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	4	40.000.000	2	20.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0%	18%	0	3.600.000	0%	9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	400	45.700.000	200	22.850.000	938	1.080.000	938	1.080.000	469%	5%	938	1.080.000	235%	2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	60	470.244.000	60	245.372.000	283	1.380.000	283	1.380.000	472%	1%	283	1.380.000	472%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	18	3.985.234.010	17	3.022.354.448	5	221.103.000	5	221.103.000	29%	7%	5	221.103.000	28%	6%	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	2.135.234.010	100	2.117.354.448	15	206.514.000	15	206.514.000	15%	10%	15	206.514.000	18%	10%	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	580	2.135.234.010	232	2.117.354.448	205	206.514.000	205	206.514.000	88%	10%	205	206.514.000	35%	10%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	%	80	1.850.000.000	100	905.000.000	0	14.589.000	0	14.589.000	0%	2%	80	14.589.000	100%	1%	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan Orang	186	1.850.000.000	186	905.000.000	0	14.589.000	0	14.589.000	0%	2%	0	14.589.000	0%	1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH																	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,3	20.282.257.803	85	9.612.620.966	-	-	0	-	0%	0%	A	-	100%	0%	
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	107.000.000	100	2.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	16	107.000.000	8	2.000.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	15.710.000.000	85	7.600.000.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	15.710.000.000	45	7.600.000.000	-	-	45	-	100%	0%	45	-	100%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Nilai	100	2.000.000.000	100	745.536.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	8	600.000.000	0		-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	1.400.000.000	65	745.536.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	980.257.803	100	100.166	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	10	300.000.900	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	300.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.256.903	1	21.200	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	350.000.000	1	78.966	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	700.000.000	85	645.860.800	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	700.000.000	8	645.860.800	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang dapat digunakan	%	100	785.000.000	100	619.124.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	100.000.000	30	37.594.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	620.000.000	1	551.410.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	65.000.000	25	30.120.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	95	2.021.000.000	94	846.464.000	-	-	0	-	0%	0%	46	-	48%	0%	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	Laporan	31	1.881.000.000	31	771.064.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	150.000.000	3	65.764.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	30	1.000.000.000	15	483.049.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	90.000.000	4	52.981.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	6	380.000.000	3	73.940.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	6	Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	4	200.000.000	2	70.088.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	8	61.000.000	4	25.242.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	140.000.000	100	75.400.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	dokumen	2	20.000.000	1	18.300.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	2	120.000.000	1	57.100.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	%	100	2.290.000.000	100	531.046.000	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	10	290.000.000	100	84.572.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	200.000.000	2	48.461.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	2	90.000.000	2	36.111.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	24	2.000.000.000	3	446.474.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	10	600.000.000	5	446.474.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	6	1.400.000.000	2	526.768.000	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Nilai	82,9	30.291.763.355	82,92	16.134.945.121	-	2.473.099.806	0	2.473.099.806	0%	15%	0	2.473.099.806	0%	8%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	3.300.500	100	2.000.000	25	341.500	25	341.500	25%	17%	25	341.500	25%	10%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	3.300.500	12	2.000.000	3	341.500	3	341.500	25%	17%	3	341.500	13%	10%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	26.950.242.855	100	12.213.718.027	25	1.843.206.672	25	1.843.206.672	25%	15%	100	1.843.206.672	100%	7%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	80	26.950.242.855	78	12.213.718.027	78	1.843.206.672	78	1.843.206.672	100%	15%	78	1.843.206.672	98%	7%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	246.000.000	100	219.110.000	25	8.534.000	25	8.534.000	25%	4%	100	8.534.000	100%	3%	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	246.000.000	150	219.110.000	150	8.534.000	150	8.534.000	100%	4%	150	8.534.000	107%	3%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	232.470.000	100	362.410.000	25	51.046.000	25	51.046.000	25%	14%	25	51.046.000	25%	22%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	30	232.470.000	15	362.410.000	3	51.046.000	3	51.046.000	20%	14%	3	51.046.000	10%	22%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	%	100	389.500.000	100	330.946.374	8	18.870.000	8	18.870.000	8%	6%	100	18.870.000	100%	5%	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	123.000.000	9	18.794	1	18.870.000	1	18.870.000	11%	100404%	1	18.870.000	25%	15%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangungan lainnya yang disediakan	Unit	4	266.500.000	4	330.927.580	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.873.700.000	100	2.283.105.210	25	435.935.084	25	435.935.084	25%	19%	25	435.935.084	25%	23%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.873.700.000	12	2.283.105.210	3	435.935.084	3	435.935.084	25%	19%	3	435.935.084	13%	23%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	596.550.000	100	723.655.510	25	115.166.550	25	115.166.550	25%	16%	100	115.166.550	100%	19%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	215.250.000	16	145.382.450	2	13.842.550	2	13.842.550	13%	10%	2	13.842.550	13%	6%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	307.500.000	2	457.633.560	1	99.852.000	1	99.852.000	50%	22%	1	99.852.000	25%	32%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	6	73.800.000	6	120.639.500	0	1.472.000	0	1.472.000	0%	1%	0	1.472.000	0%	2%	Kecamatan Taman
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	38.470.300	92,16	16.610.000	0	-	0	-	0%	0%	92	-	100%	0%	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	18.766.000	100	16.610.000	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	18.766.000	4	16.610.000	1	2.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	19.704.300	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	19.704.300	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	430.180.046	100	217.925.000	50	61.587.700	50	61.587.700	50%	28%	50	61.587.700	50%	14%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	163.680.046	100	80.990.000	100	61.587.700	100	61.587.700	100%	76%	100	61.587.700	100%	38%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	163.680.046	7	80.990.000	7	61.587.700	7	61.587.700	100%	76%	7	61.587.700	100%	38%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	266.500.000	2	136.935.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	266.500.000	2	136.935.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	472.480.554	100	375.180.000	12	29.345.000	12	29.345.000	12%	8%	100	29.345.000	100%	6%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	251.740.000	100	265.145.000	8	11.795.000	8	11.795.000	8%	4%	8	11.795.000	8%	5%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	251.740.000	12	265.145.000	1	11.795.000	1	11.795.000	8%	4%	1	11.795.000	8%	5%	Kecamatan Taman
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	220.740.554	100	110.035.000	15	17.550.000	15	17.550.000	15%	16%	100	17.550.000	100%	8%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	6	220.740.554	6	110.035.000	1	17.550.000	1	17.550.000	17%	16%	1	17.550.000	17%	8%	Kecamatan Taman
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	244.088.785	100	120.823.000	10	4.115.200	10	4.115.200	10%	3%	100	4.115.200	100%	2%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	244.088.785	100	120.823.000	10	4.115.200	10	4.115.200	10%	3%	100	4.115.200	100%	2%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	74.718.400	60	38.060.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	126.386.600	4	66.292.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	42.983.785	4	16.471.000	1	4.115.200	1	4.115.200	25%	25%	1	4.115.200	25%	10%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,5	1.070.983.960	92,16	329.948.200	0	72.933.663	0	72.933.663	0%	22%	92	72.933.663	103%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.070.983.960	100	329.948.200	25	72.933.663	25	72.933.663	25%	22%	100	72.933.663	100%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.070.983.960	12	329.948.200	3	72.933.663	3	72.933.663	25%	22%	3	72.933.663	25%	7%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	239.850.000	100	710.900.000	25	96.000.000	25	96.000.000	25%	14%	100	96.000.000	100%	40%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	239.850.000	100	710.900.000	25	96.000.000	25	96.000.000	25%	14%	100	96.000.000	100%	40%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	92.250.000	1	250.000.000	0		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	147.600.000	2	460.900.000	1	96.000.000	1	96.000.000	50%	21%	1	96.000.000	50%	65%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.019.622.030	92,16	340.000.000	0	91.032.150	0	91.032.150	0%	27%	0	91.032.150	0%	9%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.019.622.030	100	340.000.000	25	91.032.150	25	91.032.150	25%	27%	100	91.032.150	100%	9%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.019.622.030	12	340.000.000	3	91.032.150	3	91.032.150	25%	27%	3	91.032.150	25%	9%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	101.538.550	100	677.300.000	25	96.000.000	25	96.000.000	25%	14%	25	96.000.000	25%	95%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	101.538.550	100	677.300.000	25	96.000.000	25	96.000.000	25%	14%	25	96.000.000	25%	95%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	101.538.550	2	240.000.000	0		0	-	0%	0%	0	-	#REF!	#REF!	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	155.888.150	2	437.300.000	1	96.000.000	1	96.000.000	50%	22%	1	96.000.000	100%	95%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.225.840.489	92,16	378.564.970	0	59.838.175	0	59.838.175	0%	16%	0	59.838.175	0%	5%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.225.840.489	100	378.564.970	25	59.838.175	25	59.838.175	25%	16%	25	59.838.175	25%	5%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.225.840.489	12	378.564.970	3	59.838.175	3	59.838.175	25%	16%	3	59.838.175	25%	5%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	190.663.120	100	446.500.000	50	54.000.000	50	54.000.000	50%	12%	50	54.000.000	50%	28%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	190.663.120	100	446.500.000	50	54.000.000	50	54.000.000	50%	12%	100	54.000.000	100%	28%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	95.366.000	1	180.000.000	0		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	95.297.120	1	266.500.000	1	54.000.000	1	54.000.000	100%	20%	1	54.000.000	50%	57%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	647.708.168	92,16	170.890.204	0	52.991.207	0	52.991.207	0%	31%	0	52.991.207	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	647.708.168	100	170.890.204	25	52.991.207	25	52.991.207	25%	31%	100	52.991.207	100%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	647.708.168	12	170.890.204	3	52.991.207	3	52.991.207	25%	31%	3	52.991.207	25%	8%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	86.346.000	100	200.300.000	50	16.800.000	50	16.800.000	50%	8%	50	16.800.000	50%	19%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	86.346.000	100	200.300.000	50	16.800.000	50	16.800.000	50%	8%	100	16.800.000	100%	19%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	62.730.000	1	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	23.616.000	1	100.300.000	1	16.800.000	1	16.800.000	100%	17%	1	16.800.000	50%	71%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	647.708.168	92,16	404.927.600	0	133.162.241	0	133.162.241	0%	33%	0	133.162.241	0%	21%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	647.708.168	100	404.927.600	25	133.162.241	25	133.162.241	25%	33%	25	133.162.241	25%	21%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	647.708.168	12	404.927.600	3	133.162.241	3	133.162.241	25%	33%	3	133.162.241	25%	21%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	92,2	182.450.000	100	665.100.000	35	87.600.000	35	87.600.000	35%	13%	35	87.600.000	38%	48%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	182.450.000	100	665.100.000	35	87.600.000	35	87.600.000	35%	13%	100	87.600.000	100%	48%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	107.625.000	1	240.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	74.825.000	2	425.100.000	1	87.600.000	1	87.600.000	50%	21%	1	87.600.000	50%	117%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.163.248.080	92,16	366.850.088	0	93.106.471	0	93.106.471	0%	25%	0	93.106.471	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.163.248.080	100	366.850.088	25	93.106.471	25	93.106.471	25%	25%	100	93.106.471	100%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.163.248.080	12	366.850.088	3	93.106.471	3	93.106.471	25%	25%	3	93.106.471	25%	8%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	92,2	190.153.285	100	576.700.000	35	79.200.000	35	79.200.000	35%	14%	35	79.200.000	38%	42%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	190.153.285	100	576.700.000	35	79.200.000	35	79.200.000	35%	14%	100	79.200.000	100%	42%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	84.993.000	1	210.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	105.160.285	2	366.700.000	1	79.200.000	1	79.200.000	50%	22%	1	79.200.000	50%	75%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.360.686.352	92,16	439.975.440	0	96.434.063	0	96.434.063	0%	22%	0	96.434.063	0%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.360.686.352	100	439.975.440	25	96.434.063	25	96.434.063	25%	22%	25	96.434.063	25%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.360.686.352	12	439.975.440	3	96.434.063	3	96.434.063	25%	22%	3	96.434.063	25%	7%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	169.434.550	100	413.521.400	35	50.200.000	35	50.200.000	35%	12%	35	50.200.000	35%	30%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	169.434.550	100	413.521.400	35	50.200.000	35	50.200.000	35%	12%	100	50.200.000	100%	30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	77.387.500	1	170.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	92.047.050	2	243.521.400	1	50.200.000	1	50.200.000	50%	21%	1	50.200.000	50%	55%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.131.358.100	92,1	355.150.000	0	91.856.951	0	91.856.951	0%	26%	0	91.856.951	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.131.358.100	100	355.150.000	25	91.856.951	25	91.856.951	25%	26%	25	91.856.951	25%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.131.358.100	12	355.150.000	3	91.856.951	3	91.856.951	25%	26%	3	91.856.951	25%	8%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	182.939.335	100	455.100.000	35	57.600.000	35	57.600.000	35%	13%	35	57.600.000	35%	31%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	182.939.335	100	455.100.000	35	57.600.000	35	57.600.000	35%	13%	35	57.600.000	35%	31%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	69.905.000	1	180.000.000	0	-	4	-	400%	0%	4	-	400%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	113.034.335	2	275.100.000	1	57.600.000	1	57.600.000	50%	21%	1	57.600.000	50%	51%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,2	1.063.840.940	92,16	325.133.800	0	95.488.664	0	95.488.664	0%	29%	0	95.488.664	0%	9%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.063.840.940	100	325.133.800	25	95.488.664	25	95.488.664	25%	29%	25	95.488.664	25%	9%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.063.840.940	12	325.133.800	3	95.488.664	3	95.488.664	25%	29%	3	95.488.664	25%	9%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	195.904.560	100	606.899.558	35	81.600.000	35	81.600.000	35%	13%	35	81.600.000	35%	42%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	195.904.560	100	606.899.558	35	81.600.000	35	81.600.000	35%	13%	35	81.600.000	35%	42%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	101.065.000	1	230.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	94.839.560	2	376.899.558	1	81.600.000	1	81.600.000	50%	22%	1	81.600.000	50%	86%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	81,5	26.898.881.029	82,77	14.760.644.810	-	2.449.967.828	0	2.449.967.828	0%	17%	0	2.449.967.828	0%	9%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	10.000.000	100	4.000.000	25	-	25	-	25%	0%	25	-	25%	0%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	10.000.000	18	4.000.000	4	-	4	-	22%	0%	4	-	11%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	23.201.040.049	100	11.605.840.495	25	1.812.489.660	25	1.812.489.660	25%	16%	25	1.812.489.660	25%	8%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	23.197.040.049	72	11.603.840.495	18	1.812.189.760	18	1.812.189.760	25%	16%	18	1.812.189.760	26%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	26	4.000.000	13	2.000.000	3	299.900	3	299.900	23%	15%	3	299.900	12%	7%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	60.723.000	100	30.000.000	25	1.725.000	25	1.725.000	25%	6%	100	1.725.000	100%	3%	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	70	60.723.000	150	30.000.000	50	1.725.000	50	1.725.000	33%	6%	50	1.725.000	71%	3%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	indeks	87,8	404.820.000	88,67	197.768.000	0	16.528.000	0	16.528.000	0%	8%	0	16.528.000	0%	4%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	404.820.000	12	197.768.000	3	16.528.000	3	16.528.000	25%	8%	3	16.528.000	13%	4%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	800.000.000	100	286.173.500	10	5.543.800	10	5.543.800	10%	2%	100	5.543.800	100%	1%	
	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	100.000.000	3	65.953.190	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	300.000.000	1	74.173.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	400.000.000	10	212.000.000	9	5.543.800	9	5.543.800	90%	3%	9	5.543.800	90%	1%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.052.297.980	100	2.451.862.815	25	571.219.429	25	571.219.429	25%	23%	100	571.219.429	100%	28%	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.052.297.980	12	2.451.862.815	3	571.219.429	3	571.219.429	25%	23%	3	571.219.429	25%	28%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	370.000.000	100	185.000.000	0	42.461.939	0	42.461.939	0%	23%	100	42.461.939	100%	11%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	14	120.000.000	1	60.000.000	3	10.398.939	3	10.398.939	300%	17%	3	10.398.939	21%	9%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	70.000.000	2	35.000.000	0	3.099.000	0	3.099.000	0%	9%	0	3.099.000	0%	4%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	110.000.000	1	55.000.000	0	24.974.000	0	24.974.000	0%	45%	0	24.974.000	0%	23%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	60	70.000.000	60	35.000.000	10	3.990.000	10	3.990.000	17%	11%	10	3.990.000	17%	6%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	200.000.000	88,67	57.832.400	0	-	0	-	0%	0%	89	-	101%	0%	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	200.000.000	100	57.832.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	3	200.000.000	3	57.832.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	322.048.500	100	227.622.600	0	66.212.600	0	66.212.600	0%	29%	100	66.212.600	100%	21%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	150.000.000	100	77.622.600	95	57.662.600	95	57.662.600	95%	74%	100	57.662.600	100%	38%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	150.000.000	7	77.622.600	7	57.662.600	7	57.662.600	100%	74%	7	57.662.600	100%	38%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	lembaga/ forum	1	172.048.500	1	150.000.000	0	8.550.000	0	8.550.000	0%	6%	0	8.550.000	0%	5%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	172.048.500	4	150.000.000	0	8.550.000	0	8.550.000	0%	6%	0	8.550.000	0%	5%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	333.976.500	100	352.553.600	0	70.981.100	0	70.981.100	0%	20%	100	70.981.100	100%	21%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	182.169.000	100	264.203.600	0	70.981.100	0	70.981.100	0%	27%	100	70.981.100	100%	39%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	182.169.000	16	264.203.600	10	70.981.100	10	70.981.100	63%	27%	10	70.981.100	250%	39%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	151.807.500	100	88.350.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Laporan	4	151.807.500	4	88.350.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	344.409.500	100	153.655.000	10	3.522.500	10	3.522.500	10%	2%	100	3.522.500	100%	1%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	344.409.500	100	153.655.000	10	3.522.500	10	3.522.500	10%	2%	100	3.522.500	100%	1%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	152.120.000	100	66.900.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	161.928.000	4	78.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	30.361.500	2	8.255.000	1	3.522.500	1	3.522.500	50%	43%	1	3.522.500	50%	12%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	1.095.202.400	88,67	384.317.700	0	80.441.413	0	80.441.413	0%	21%	89	80.441.413	101%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.095.202.400	100	384.317.700	25	80.441.413	25	80.441.413	25%	21%	4	80.441.413	4%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.095.202.400	12	384.317.700	3	80.441.413	3	80.441.413	25%	21%	3	80.441.413	13%	7%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.452.900.000	100	632.856.000	15	63.600.000	15	63.600.000	15%	10%	100	63.600.000	100%	4%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	1.452.900.000	100	632.856.000	15	63.600.000	15	63.600.000	15%	10%	15	63.600.000	15%	4%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.169.000.000	1	114.256.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	283.900.000	2	518.600.000	1	63.600.000	1	63.600.000	50%	12%	1	63.600.000	100%	22%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	910.358.280	88,67	298.118.858	0	64.109.541	0	64.109.541	0%	22%	89	64.109.541	101%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	910.358.280	100	298.118.858	25	64.109.541	25	64.109.541	25%	22%	3,5	64.109.541	4%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	910.358.280	12	298.118.858	3	64.109.541	3	64.109.541	25%	22%	3	64.109.541	25%	7%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	725.105.610	100	281.560.655	15	30.000.000	15	30.000.000	15%	11%	100	30.000.000	100%	4%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	725.105.610	100	281.560.655	15	30.000.000	15	30.000.000	15%	11%	15	30.000.000	15%	4%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	581.485.610	1	46.560.655	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	143.620.000	2	235.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	50%	13%	1	30.000.000	100%	21%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,82	1.091.886.886	88,67	421.688.043	0	92.954.162	0	92.954.162	0%	22%	89	92.954.162	101%	9%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	1.091.886.886	100	421.688.043	25	92.954.162	25	92.954.162	25%	22%	3,5	92.954.162	4%	9%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.091.886.886	12	421.688.043	3	92.954.162	3	92.954.162	25%	22%	3	92.954.162	13%	9%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.336.000.000	100	679.330.000	15	70.800.000	15	70.800.000	15%	10%	15	70.800.000	15%	5%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	1.336.000.000	100	679.330.000	15	70.800.000	15	70.800.000	15%	10%	15	70.800.000	15%	5%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.068.800.000	1	103.530.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	267.200.000	2	575.800.000	1	70.800.000	1	70.800.000	50%	12%	1	70.800.000	100%	26%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	1.043.953.600	88,67	391.498.612	0	67.426.506	0	67.426.506	0%	17%	89	67.426.506	101%	6%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	1.043.953.600	100	391.498.612	25	67.426.506	25	67.426.506	25%	17%	3,5	67.426.506	4%	6%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.043.953.600	12	391.498.612	3	67.426.506	3	67.426.506	25%	17%	3	67.426.506	13%	6%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	2.171.000.000	100	632.633.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15%	9%	100	60.000.000	100%	3%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	2.171.000.000	100	632.633.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15%	9%	15	60.000.000	15%	3%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.736.800.000	1	168.763.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	434.200.000	2	463.870.000	1	60.000.000	1	60.000.000	50%	13%	1	60.000.000	100%	14%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,5	985.568.600	88,67	327.693.900	0	58.234.464	0	58.234.464	0%	18%	0	58.234.464	0%	6%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100%	985.568.600	100	327.693.900	25	58.234.464	25	58.234.464	25%	18%	25	58.234.464	2500%	6%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	985.568.600	12	327.693.900	3	58.234.464	3	58.234.464	25%	18%	3	58.234.464	13%	6%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.169.000.000	100	367.241.000	15	33.600.000	15	33.600.000	15%	9%	100	33.600.000	100%	3%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	1.169.000.000	100	367.241.000	15	33.600.000	15	33.600.000	15%	9%	15	33.600.000	15%	3%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	935.200.000	1	88.641.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	233.800.000	2	278.600.000	1	33.600.000	1	33.600.000	50%	12%	1	33.600.000	100%	14%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	953.484.000	88,67	296.178.600	0	79.966.801	0	79.966.801	0%	27%	0	79.966.801	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100%	953.484.000	100	296.178.600	25	79.966.801	25	79.966.801	25%	27%	25	79.966.801	2500%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	953.484.000	12	296.178.600	3	79.966.801	3	79.966.801	25%	27%	3	79.966.801	13%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.285.900.000	100	397.311.000	15	37.200.000	15	37.200.000	15%	9%	100	37.200.000	100%	3%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	1.285.900.000	100	397.311.000	15	37.200.000	15	37.200.000	15%	9%	15	37.200.000	15%	3%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.035.400.000	1	96.211.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	250.500.000	2	301.100.000	1	37.200.000	1	37.200.000	50%	12%	1	37.200.000	100%	15%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	1.119.292.400	88,67	420.077.200	0	114.029.929	0	114.029.929	0%	27%	0	114.029.929	0%	10%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	1.119.292.400	100	420.077.200	25	114.029.929	25	114.029.929	25%	27%	25	114.029.929	25%	10%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	1.119.292.400	12	420.077.200	3	114.029.929	3	114.029.929	25%	27%	3	114.029.929	13%	10%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.790.240.000	100	759.550.000	15	78.000.000	15	78.000.000	15%	10%	100	78.000.000	100%	4%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	57	1.790.240.000	100	759.550.000	15	78.000.000	15	78.000.000	15%	10%	15	78.000.000	26%	4%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.442.880.000	1	136.550.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	347.360.000	1	623.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	100%	13%	1	78.000.000	100%	22%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	961.030.000	88,67	351.843.600	0	68.653.549	0	68.653.549	0%	20%	0	68.653.549	0%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	961.030.000	100	351.843.600	25	68.653.549	25	68.653.549	25%	20%	25	68.653.549	25%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	961.030.000	12	351.843.600	3	68.653.549	3	68.653.549	25%	20%	3	68.653.549	13%	7%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.058.780.000	100	540.222.000	15	57.600.000	15	57.600.000	15%	11%	100	57.600.000	100%	5%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	57	1.058.780.000	100	540.222.000	15	57.600.000	15	57.600.000	15%	11%	15	57.600.000	26%	5%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	848.360.000	1	81.332.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	210.420.000	2	458.890.000	1	57.600.000	1	57.600.000	50%	13%	1	57.600.000	100%	27%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	937.546.800	88,67	301.840.500	0	73.845.469	0	73.845.469	0%	24%	0	73.845.469	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	937.546.800	100	301.840.500	25	73.845.469	25	73.845.469	25%	24%	25	73.845.469	25%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	937.546.800	12	301.840.500	3	73.845.469	3	73.845.469	25%	24%	3	73.845.469	13%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.002.000.000	100	401.820.000	15	39.600.000	15	39.600.000	15%	10%	100	39.600.000	100%	4%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	57	1.002.000.000	100	401.820.000	15	39.600.000	15	39.600.000	15%	10%	15	39.600.000	26%	4%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	801.600.000	1	78.124.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	200.400.000	1	323.696.000	1	39.600.000	1	39.600.000	100%	12%	1	39.600.000	100%	20%	Kecamatan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	skor	A	33.552.672.020	83,35	16.653.342.462	0	2.596.809.296	0	2.596.809.296	0%	16%	0	2.596.809.296	100%	8%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	27.880.835	100	2.810.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	27.880.835	20	2.810.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	24.632.366.218	100	11.823.928.494	25	1.813.873.643	25	1.813.873.643	25%	15%	100	1.813.873.643	100%	7%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	24.627.303.718	70	11.821.628.494	70	1.813.298.643	70	1.813.298.643	100%	15%	70	1.813.298.643	100%	7%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	52	5.062.500	26	2.300.000	6,5	575.000	6,5	575.000	25%	25%	7	575.000	13%	11%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	165.498.294	100	68.890.000	25	16.970.000	25	16.970.000	25%	25%	100	16.970.000	100%	10%	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	165.498.294	100	68.890.000	25	16.970.000	25	16.970.000	25%	25%	25	16.970.000	25%	10%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	240.036.550	100	115.890.000	25	21.005.961	25	21.005.961	25%	18%	100	21.005.961	100%	9%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	240.036.550	12	115.890.000	3	21.005.961	3	21.005.961	25%	18%	3	21.005.961	13%	9%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	2.493.786.807	100	1.184.149.000	25	188.850.000	25	188.850.000	25%	16%	100	188.850.000	100%	8%	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	723.032.500	9	398.512.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	684.848.115	1	188.850.000	1	188.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1.085.906.192	10	596.787.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	%	100	4.029.255.339	100	2.953.840.068	25	498.991.464	25	498.991.464	25%	17%	100	498.991.464	100%	12%	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	4.029.255.339	12	2.953.840.068	2	498.991.464	2	498.991.464	17%	17%	2	498.991.464	8%	12%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	%	100	1.963.847.977	100	503.834.900	25	57.118.228	25	57.118.228	25%	11%	100	57.118.228	100%	3%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	212.625.000	15	88.680.000	2	19.861.010	2	19.861.010	13%	22%	2	19.861.010	13%	9%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.316.250.000	6	358.000.000	1	21.312.500	1	21.312.500	17%	6%	1	21.312.500	17%	2%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	434.972.977	60	57.154.900	8	15.944.718	8	15.944.718	13%	28%	8	15.944.718	13%	4%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,45	92.063.690	92,45	40.060.000	0	15.125.000	0	15.125.000	0%	38%	0	15.125.000	0%	16%	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	%	100	92.063.690	100	40.060.000	0	15.125.000	0	15.125.000	0%	38%	0	15.125.000	0%	16%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	92.063.690	1	40.060.000	0	15.125.000	0	15.125.000	0%	38%	0	15.125.000	0%	16%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	272.316.670	100	126.619.700	0	72.971.800	0	72.971.800	0%	58%	100	72.971.800	100%	27%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	145.550.000	100	60.210.000	0	49.926.800	0	49.926.800	0%	83%	100	49.926.800	100%	34%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	145.550.000	7	60.210.000	0	49.926.800	0	49.926.800	0%	83%	0	49.926.800	0%	34%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Forum	2	126.766.670	2	66.409.700	0	23.045.000	0	23.045.000	0%	35%	0	23.045.000	0%	18%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	126.766.670	1	66.409.700	0	23.045.000	0	23.045.000	0%	35%	0	23.045.000	0%	18%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	558.105.298	100	294.921.000	0	23.829.000	0	23.829.000	0%	8%	100	23.829.000	100%	4%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	290.372.250	100	192.151.000	0	23.829.000	0	23.829.000	0%	12%	100	23.829.000	100%	8%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	290.372.250	1	192.151.000	0	23.829.000	0	23.829.000	0%	12%	0	23.829.000	0%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	267.733.048	100	102.770.000	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	267.733.048	1	102.770.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	263.895.114	100	157.528.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0%	10%	100	15.000.000	100%	6%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	%	100	171.235.114	100	112.448.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0%	7%	100	7.500.000	100%	4%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	350	44.673.239	350	54.858.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	2	92.660.000	1	45.080.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0%	17%	0	7.500.000	0%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	33.901.875	2	12.510.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.183.608.890	92,45	486.984.500	0	92.262.881	0	92.262.881	0%	19%	0	92.262.881	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.183.608.890	100	486.984.500	0	92.262.881	0	92.262.881	0%	19%	100	92.262.881	100%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.183.608.890	12	486.984.500	3	92.262.881	3	92.262.881	25%	19%	3	92.262.881	13%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	688.000.000	100	346.010.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0%	16%	100	54.000.000	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	688.000.000	100	346.010.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0%	16%	100	54.000.000	100%	8%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	468.000.000	1	236.010.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0%	23%	0	54.000.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.133.210.476	92,45	462.034.790	0	109.441.625	0	109.441.625	0%	24%	0	109.441.625	0%	10%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.133.210.476	100	462.034.790	0	109.441.625	0	109.441.625	0%	24%	0	109.441.625	0%	10%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.133.210.476	12	462.034.790	3	109.441.625	3	109.441.625	25%	24%	3	109.441.625	13%	10%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	603.600.000	100	303.810.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0%	15%	100	46.800.000	100%	8%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	603.600.000	100	303.810.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0%	15%	100	46.800.000	100%	8%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	383.600.000	1	193.810.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0%	24%	0	46.800.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.093.524.768	92,45	442.388.400	0	74.068.603	0	74.068.603	0%	17%	0	74.068.603	0%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.093.524.768	100	442.388.400	0	74.068.603	0	74.068.603	0%	17%	0	74.068.603	0%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.093.524.768	12	442.388.400	3	74.068.603	3	74.068.603	25%	17%	3	74.068.603	13%	7%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	509.600.000	100	256.810.000	0	35.411.800	0	35.411.800	0%	14%	100	35.411.800	100%	7%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	509.600.000	100	256.810.000	0	35.411.800	0	35.411.800	0%	14%	100	35.411.800	100%	7%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	611.800	0	611.800	0%	1%	0	611.800	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	289.600.000	1	146.810.000	0	34.800.000	0	34.800.000	0%	24%	0	34.800.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.037.526.530	92,45	414.816.500	0	111.526.175	0	111.526.175	0%	27%	0	111.526.175	0%	11%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.037.526.530	100	414.816.500	0	111.526.175	0	111.526.175	0%	27%	0	111.526.175	0%	11%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.037.526.530	12	414.816.500	3	111.526.175	3	111.526.175	25%	27%	3	111.526.175	13%	11%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	445.200.000	100	224.460.000	0	27.600.000	0	27.600.000	0%	12%	100	27.600.000	100%	6%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	445.200.000	100	224.460.000	0	27.600.000	0	27.600.000	0%	12%	100	27.600.000	100%	6%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	225.200.000	1	114.460.000	0	27.600.000	0	27.600.000	0%	24%	0	27.600.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	93	1.147.088.300	92,45	468.905.000	0	92.481.286	0	92.481.286	0%	20%	0	92.481.286	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.147.088.300	100	468.905.000	0	92.481.286	0	92.481.286	0%	20%	0	92.481.286	0%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.147.088.300	12	468.905.000	3	92.481.286	3	92.481.286	25%	20%	3	92.481.286	13%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	707.600.000	100	355.810.000	0	58.800.000	0	58.800.000	0%	17%	100	58.800.000	100%	8%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	707.600.000	100	355.810.000	0	58.800.000	0	58.800.000	0%	17%	100	58.800.000	100%	8%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	487.600.000	1	245.810.000	0	58.800.000	0	58.800.000	0%	24%	0	58.800.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.210.390.656	92,45	499.542.800	0	133.052.402	0	133.052.402	0%	27%	0	133.052.402	0%	11%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.210.390.656	100	499.542.800	0	133.052.402	0	133.052.402	0%	27%	0	133.052.402	0%	11%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.210.390.656	12	499.542.800	3	133.052.402	3	133.052.402	25%	27%	3	133.052.402	13%	11%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	752.400.000	100	378.910.000	0	61.200.000	0	61.200.000	0%	16%	100	61.200.000	100%	8%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	752.400.000	100	378.910.000	0	61.200.000	0	61.200.000	0%	16%	100	61.200.000	100%	8%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	532.400.000	1	268.910.000	0	61.200.000	0	61.200.000	0%	23%	0	61.200.000	0%	11%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.078.326.001	92,45	448.993.070	0	89.011.944	0	89.011.944	0%	20%	0	89.011.944	0%	8%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.078.326.001	100	448.993.070	0	89.011.944	0	89.011.944	0%	20%	0	89.011.944	0%	8%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.078.326.001	12	448.993.070	3	89.011.944	3	89.011.944	25%	20%	3	89.011.944	13%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	566.400.000	100	285.210.000	0	43.200.000	0	43.200.000	0%	15%	0	43.200.000	0%	8%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	566.400.000	100	285.210.000	0	43.200.000	0	43.200.000	0%	15%	0	43.200.000	0%	8%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	220.000.000	2	110.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	346.400.000	1	175.210.000	0	43.200.000	0	43.200.000	0%	25%	0	43.200.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.607.422.599	92,45	609.615.400	0	107.007.401	0	107.007.401	0%	18%	0	107.007.401	0%	7%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.607.422.599	100	609.615.400	0	107.007.401	0	107.007.401	0%	18%	0	107.007.401	0%	7%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.607.422.599	12	609.615.400	3	107.007.401	3	107.007.401	25%	18%	3	107.007.401	13%	7%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	1.169.800.000	100	587.610.000	0	105.600.000	0	105.600.000	0%	18%	0	105.600.000	0%	9%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.169.800.000	100	587.610.000	0	105.600.000	0	105.600.000	0%	18%	0	105.600.000	0%	9%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	248.600.000	2	124.300.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	921.200.000	1	463.310.000	0	105.600.000	0	105.600.000	0%	23%	0	105.600.000	0%	11%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	92,5	1.208.350.373	92,45	498.532.759	0	121.181.173	0	121.181.173	0%	24%	0	121.181.173	0%	10%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.208.350.373	100	498.532.759	0	121.181.173	0	121.181.173	0%	24%	0	121.181.173	0%	10%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.208.350.373	12	498.532.759	3	121.181.173	3	121.181.173	25%	24%	3	121.181.173	13%	10%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	857.400.000	100	431.410.000	0	74.400.000	0	74.400.000	0%	17%	0	74.400.000	0%	9%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	857.400.000	100	431.410.000	0	74.400.000	0	74.400.000	0%	17%	0	74.400.000	0%	9%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	248.600.000	2	124.300.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1	608.800.000	1	307.110.000	0	74.400.000	0	74.400.000	0%	24%	0	74.400.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,2	15.673.118.472	81,75	5.927.739.005	0	-	0	-	0%	0%	A	-	100%	0%	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	110.000.000	100	51.910.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	110.000.000	1	51.910.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	9.053.118.472	100	4.147.854.594	25	-	25	-	25%	0%	100	-	100%	0%	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	9.053.118.472	21	4.147.854.594	21	1.057.280.871	23	1.057.280.871	110%	25%	23	1.057.280.871	110%	12%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	420.000.000	100	4.215.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Orang	31	420.000.000	31	4.215.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	2.350.000.000	100	891.552.446	25	-	25	-	25%	0%	25	-	25%	0%	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1.600.000.000	1	534.965.446	0	215.330.860	0	215.330.860	0%	40%	0	215.330.860	0%	13%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	80	750.000.000	80	356.587.000	20	46.020.440	20	46.020.440	25%	13%	20	46.020.440	25%	6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	2.905.000.000	100	686.353.680	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	-	885.000.000	14	224.131.660	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	2.020.000.000	20	462.222.020	0	-	0	-	0%	0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	%	100	835.000.000	100	145.853.285	25	17.320.000	25	17.320.000	25%	12%	100	17.320.000	100%	2%	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	300.000.000	17	59.891.000	5	1.320.000	5	1.320.000	29%	2%	5	1.320.000	500%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	365.000.000	1	35.479.485	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	170.000.000	1	50.482.800	0	16.000.000	0	16.000.000	0%	32%	0	16.000.000	0%	9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	1.550.000.000	100	1.367.239.210	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	jenis	12	1.550.000.000	6	1.367.239.210	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	200	1.550.000.000	200	581.343.210	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	-	-	2	785.896.000	0	16.793.000	0	-	0%	-	0	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	%	100	4.088.706.000	100	2.079.743.250	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	4.088.706.000	80	2.079.743.250	0	-	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	33		50	1.039.398.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	125	1.068.706.000	55	534.353.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	laporan	1	3.020.000.000	11	505.992.250	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	68	6.619.200.000	100	337.740.500	0	-	0	-	0%	0%	67	-	99%	0%	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	%	75	6.619.200.000	100	337.740.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Orang	100	6.619.200.000	300	337.740.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	10.503.433.824	100	6.774.769.912	0	128.644.447	0	128.644.447	0%	2%	100	128.644.447	100%	1%	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	kali	12	10.503.433.824	4	6.774.769.912	0	128.644.447	0	128.644.447	0%	2%	0	128.644.447	0%	1%	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Orang	100	190.588.800	100	95.294.400	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	500	10.312.845.024	500	6.679.475.512	100	128.644.447	100	128.644.447	20%	2%	100	128.644.447	20%	1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100	6.829.918.980	100	2.447.890.772	0	33.128.620	0	33.128.620	0%	1%	100	33.128.620	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	konflik	0	6.829.918.980	0	2.447.890.772	0	33.128.620	0	33.128.620	0	1%	0	33.128.620	100%	0%	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	100	6.829.918.980	100	1.984.515.074	0	5.288.000	0	5.288.000	0%	0%	0	5.288.000	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Dokumen	12	2.000.000.000	12	463.375.698	0	27.840.620	0	27.840.620	0%	6%	0	27.840.620	0%	1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam Rencana Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2025, kebijakan pembangunan ekonomi disesuaikan dengan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2025 serta mengacu pada peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan Provinsi Jawa Timur. Salah satu asumsi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang diperkirakan terkendali antara 1,5 hingga 3,5%. Selain itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada kisaran 14.900 hingga 15.300 per dolar AS, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang masih tinggi terkait prospek ekonomi global. Asumsi harga minyak dunia (ICP) diperkirakan antara US$70 hingga 90 per barel, mengingat harga komoditas diprediksi akan sedikit menurun pada tahun 2023, seiring dengan melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Di sisi lain, asumsi lifting gas diperkirakan mencapai 1.061 hingga 1.151 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Dengan pemulihan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif pada tahun 2024, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,5 hingga 6,0%. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung serta upaya reformasi struktural yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meskipun masih ada potensi risiko ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi nasional ke depan.

Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2025-2026

Indikator	2025
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,5 - 6,0
Inflasi *(%, yoy)*	1,5 - 3,5
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,3 - 7,5
Nilai Tukar (Rp/ US$)	14.900 - 15.300
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	70 - 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	606 - 684
Lifting Gas (BOE/hari)	1061 - 1151

Sumber: Kemenkeu, 2025

Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun juga memperhatikan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Disamping hal-hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan pembangunan nasional dapat diidentifikasi melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 nasional memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang didukung oleh Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.



Gambar 3. 1 8 Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandijakanrian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Prioritas Nasional RKP Tahun 2025
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun Pembangunan Nasional tahun 2024 di prioritaskan pada tujuh hal beserta sasarannya yaitu:



PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

SASARAN:
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan perbaikan pada (a) Indeks Demokrasi Indonesia; (b) Indeks Aktualisasi Pancasila; (c) Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik; (d) Indeks Hak Asasi Manusia.



PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

SASARAN 1:
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan dengan perbaikan pada (a) Asia Power Index (Military Capability); (b) Asia Power Index (Diplomatic Influence); (c) Asia Power Index (Economic Relationship); (d) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%); (e) Global Cybersecurity Index; (f) Indeks Keamanan Laut Nasional

SASARAN 2:
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan dengan perbaikan pada (a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%); (b) Indeks Ketahanan Energi; (c) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%); (d) Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional; (e) Kapasitas tampungan air (m3/kapita); (f) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%); (g) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%).

SASARAN 3:
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan dengan perbaikan pada (a) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat); (b) Indeks Ekonomi Hijau; (c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%); (d) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; (e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; (f) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (g) Kontribusi PDB Maritim (%); (h) Indonesia Blue Economy Index (IBEI); (i) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global.



PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

SASARAN 1:
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dengan perbaikan pada (a) Stok Infrastruktur terhadap PDB (%).

SASARAN 2:
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB dengan perbaikan pada (a) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%); (b) Aset Perbankan/PDB (%); (c) Aset Dana Pensiun/PDB (%); (d) Aset Asuransi/PDB (%); (e) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%); (f) Total Kredit/PDB (%); (g) Inklusi Keuangan (%); (h) Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang); (i) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%); (j) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%); (k) Rasio Kewirausahaan (%).

SASARAN 3:
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dengan perbaikan pada (a) Rasio PDB Pariwisata (%); (b) Devisa Pariwisata (Miliar USD).

SASARAN 4:
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan perbaikan pada (a) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

SASARAN 1:
Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan perbaikan pada (a) Rata-rata nilai PISA; (b) Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional; (c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun); (d) Harapan lama sekolah (tahun); (e) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%); (f) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%); (g) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%).

SASARAN 2:
Kesehatan untuk Semua dengan perbaikan pada (a) Usia Harapan Hidup (tahun); (b) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun); (c) Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup); (d) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%); (e) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%).

SASARAN 3:
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan perbaikan pada (a) Indeks Ketimpangan Gender; (b) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga; (c) Indeks Perlindungan Anak; (d) Indeks Pembangunan Pemuda; (e) Indeks Pembangunan Gender; (f) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%); (g) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%).

SASARAN 4:
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi dengan perbaikan pada (a) Peringkat Indeks Inovasi Global; (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (%); (c) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB); (d) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%); (e) Peringkat pada SEA Games.



PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

SASARAN 1:
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan perbaikan pada (a) Rasio PDB Industri Pengolahan.

SASARAN 2:
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan perbaikan pada (a) Biaya Logistik (% PDB); (b) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB); (c) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB).



PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

SASARAN 1:
Perlindungan sosial yang adaptif dengan perbaikan pada (a) Tingkat kemiskinan (%); (b) Tingkat kemiskinan ekstrem (%); (c) Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%); (d) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%); (e) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%).

SASARAN 2:
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan perbaikan pada (a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%).

SASARAN 3:
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan perbaikan pada (a) Persentase desa mandiri (%).

SASARAN 4:
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan pada (a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 3 Sasaran Masing-masing Prioritas Nasional 2025

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Sejalan dengan kondisi terkini, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2025, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta untuk memperkuat fondasi pembangunan yang solid sebagai dasar bagi kelanjutan pembangunan.

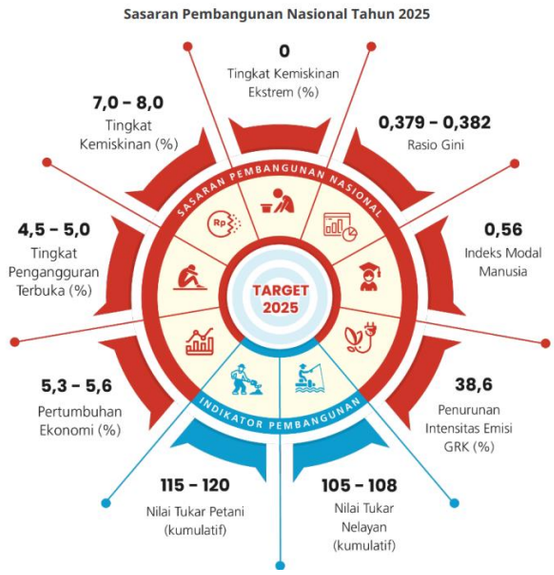


Gambar 3. 4 Tema RKP 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

Berdasarkan tema pembangunan yang telah disebutkan, sasaran pembangunan juga telah ditetapkan. Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah upaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 5 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
Sumber: RKP 2025

Seiring dengan proyeksi peningkatan kondisi ekonomi pada tahun 2025, sasaran pembangunan Indonesia juga diperkirakan akan mengalami perbaikan di berbagai bidang. Salah satu prioritas utama adalah pengurangan tingkat kemiskinan, yang ditargetkan mencapai 7-8 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, lebih rendah dibandingkan dengan angka pada tahun 2024 yang sebesar 8,57 persen. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga diharapkan turun menjadi 4,5-5,0 persen. Di sisi lain, pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia tetap menjadi perhatian utama. Rasio gini ditargetkan berada di kisaran 0,379-0,382, sementara Indeks Modal Manusia diperkirakan mencapai nilai sekitar 0,56. Selain indikator tersebut, sasaran pembangunan lainnya juga meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan, yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan delapan prioritas nasional yang menjadi fokus utama. Adapun sasaran dan arah kebijakan prioritas tersebut yaitu (1) Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan; (3) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan; (3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan; Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur; (4) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur; (5) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB; (6) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas; (7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata; (8) Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif; (9) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (10) Kesehatan untuk Semua; (11) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (12) Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan; (13) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; (14) Perlindungan sosial yang adaptif; (15) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (16) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (17) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (18) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (19) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani; (20) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (21) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan; (22) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan; (23) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi; (24) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (25) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; serta (26) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RKP 2025
Sumber: RKP 2025

Pada tingkat Provinsi, Visi pembangunan Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 7 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 9 prioritas pembangunan (Nawa Bhakti Satya), yang menjadi misi utama RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

1. Jatim Sejahtera

   Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.
2. Jatim Kerja

   Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru *(start-up).* pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 *(21st Century Skills)* yang berdaya saing.
3. Jatim Akses

   Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Cerdas

   Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua *(education for all)* yang berkualitas. merata, dan berkeadilan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Jatim Sehat

   Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua *(health for all)* yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage (UHC).*

6. Jatim Berkah - Amanah

   Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif. berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

7. Jatim Agro

   Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. Jatim Harmoni

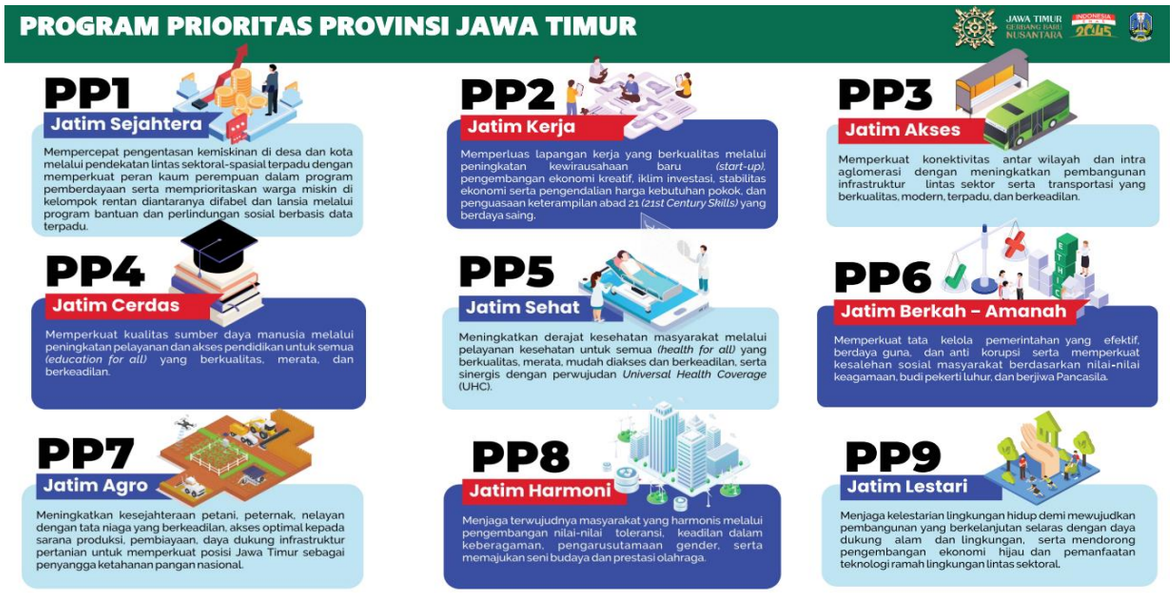
   Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman. pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. Jatim Lestari

   Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 menetapkan 9 (sembilan) Misi Nawa Bhakti Satya sebagai 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Prioritas ini menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran, kebijakan arah, rencana kerja, dan anggaran tahunan di setiap perangkat daerah, serta dalam merancang program kerja prioritas. Setiap Prioritas Pembangunan mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2030. Adapun Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 8 Sasaran Pembangunan Jawa Timur 2025

Lebih lanjut, adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 9 Sasaran Pembangunan Jawa Timur 2025
Sumber: RKPD Jawa Timur Tahun 2025

Sejalan dengan perkembangan situasi dan proyeksi ekonomi di tingkat nasional dan regional, pemerintah di berbagai tingkat menggariskan arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2025. Di tingkat nasional, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 arah kebijakan ekonomi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan; perlindungan sosial yang adaptif; pembangunan kemandirian perdesaan serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 10 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025
Sumber: RKP 2025

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, pada pembangunan jangka menengah, arah kebijakan ekonomi terletak pada prioritas pertama di antara delapan prioritas pembangunan atau pada Program Prioritas Jatim Sejahtera. Pada Jatim Sejahtera terdiri dari tiga sasaran dan 13 arah kebijakan yaitu:

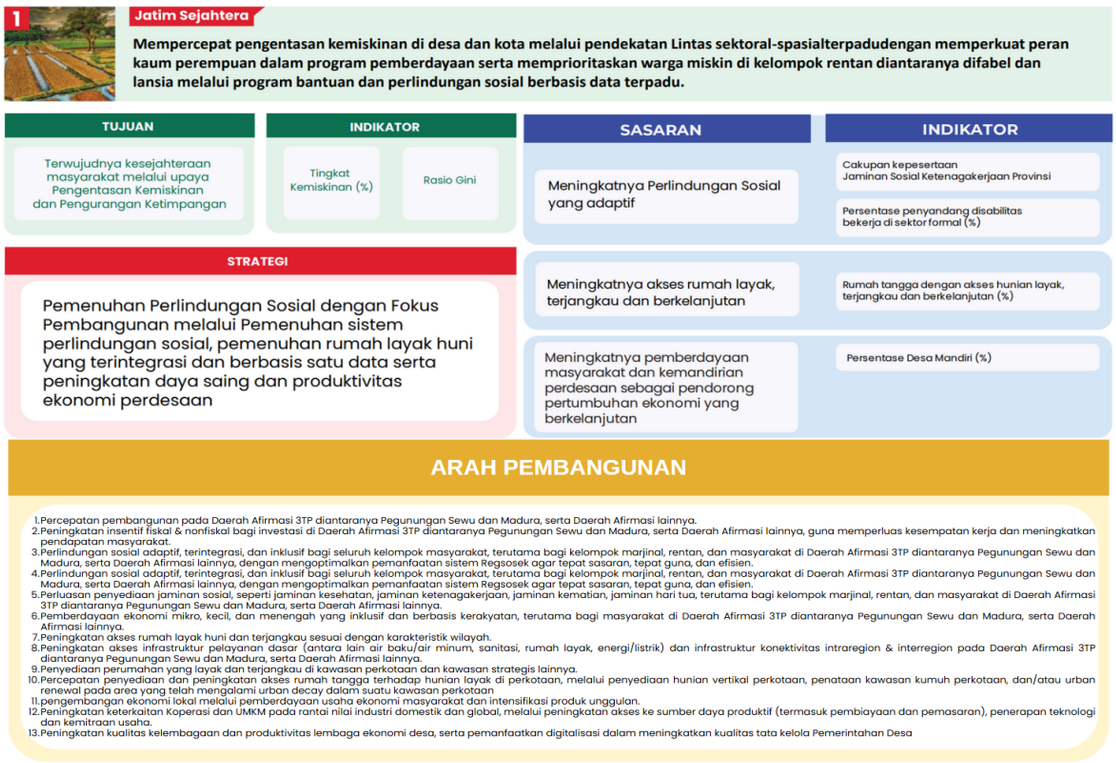
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
    - Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya;
    - Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
    - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
    - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya; dan
- Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.

2. Meningkatnya akses rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan
   - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;
   - Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya;
   - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya; dan
   - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
   - pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan;
   - Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; dan
   - Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 11 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur
Sumber: Ranwal RPJMD Jawa Timur 2025-2030

Sementara itu, pada RKPD Jawa Timur 2025, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 terdiri dari empat arah kebijakan, yaitu meningkatnya nilai tambah ekonomi, meningkatnya realisasi penanaman modal, menurunnya penduduk miskin, serta menurunnya tingkat pengangguran.



Gambar 3. 12 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2025
Sumber: RKPD Jawa Timur 2025

Untuk mencapai agenda dan prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi klasterisasi wilayah. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur mengenai percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.



Gambar 3. 13 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

Selain mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan, pembangunan kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbang Kertasusila+. Kawasan prioritas kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan prodtiktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri, dan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai tambah Agroindustri pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka. Pengembangan pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan Iainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya. Didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

Pembagian Wilayah Pembangunan pada Provinsi Jawa Timur, dibagi menjadi 8 (delapan) klister yaitu: Wilis Utara, Wilis Selatan, Malang Raya, Probomajang, Ijen, Madura, Metropolitan dan Labanegoro.



Gambar 3. 14 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.9 diatas, di Jawa Timur, penetapan klaster di Jawa Timur dirumuskan atas dasar RKP tahun 2025-2026 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 (2) yaitu Wilis Utara. Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Arahan pengembangan pada Klaster Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah:

a. Aspek Sosial

Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki-laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta.

Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat pluralistik atau majemuk.

Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal-hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap sumber daya manusia ataupun pengelolaan potensi sumber daya alamnya.

Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Kesehatan, peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil, dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

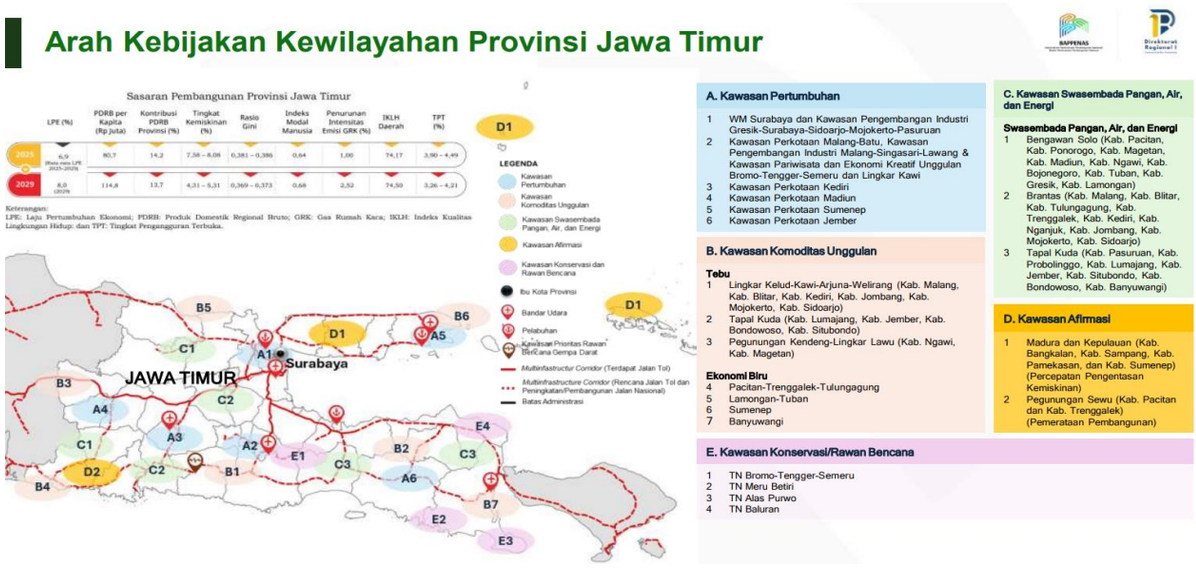
b. Aspek Ekonomi

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi anjungan cerdas, perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

c. Aspek Infrastruktur

Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dan peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

Sedangkan pada RPJMD Jawa Timur tahun 2025-2030, arah kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini merupakan upaya integrasi pembangunan antar sektor untuk menciptakan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan cakupan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan), dan pemerataan pembangunan antarwilayah.



Gambar 3. 15 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur
Sumber: Ranwal RPJMD Jawa Timur 2025-2030

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peta kawasan fungsional Provinsi Jawa Timur ini menggambarkan berbagai kawasan berdasarkan prioritas pembangunan untuk RPJMD 2025-2029. Terdapat lima kategori utama, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi/rawan bencana. Kawasan pertumbuhan meliputi pusat-pusat ekonomi seperti Surabaya dan kawasan sekitarnya, serta kawasan industri dan pariwisata di Malang-Batu dan Bromo-Tengger-Semeru. Kawasan komoditas unggulan berfokus pada pertanian tebu dan ekonomi biru, dengan potensi kelautan di daerah seperti Pacitan dan Banyuwangi. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi melibatkan daerah dengan fokus ketahanan pangan seperti Bangkalan dan Sampang. Kawasan afirmasi mencakup wilayah seperti Madura yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan memajukan daerah terpencil. Sementara itu, kawasan konservasi/rawan bencana mencakup area seperti Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, yang membutuhkan perhatian khusus terkait perlindungan alam dan potensi bencana. Peta ini juga menunjukkan jaringan infrastruktur vital, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan berdasarkan pada Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030 yang membahas terkait Arah Pembangunan Kewilayahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2025-2030.

Kawasan Perkotaan Madiun menjadi salah satu lokasi prioritas yang mencakup wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Adapun prioritas tersebut mencakup:

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Madiun, antara lain melalui - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
   a. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
   b. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
   c. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
2. Inisiasi pembangunan Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Madiun (PHTC).
3. Inisiasi pengembangan TPST Regional Madiun.

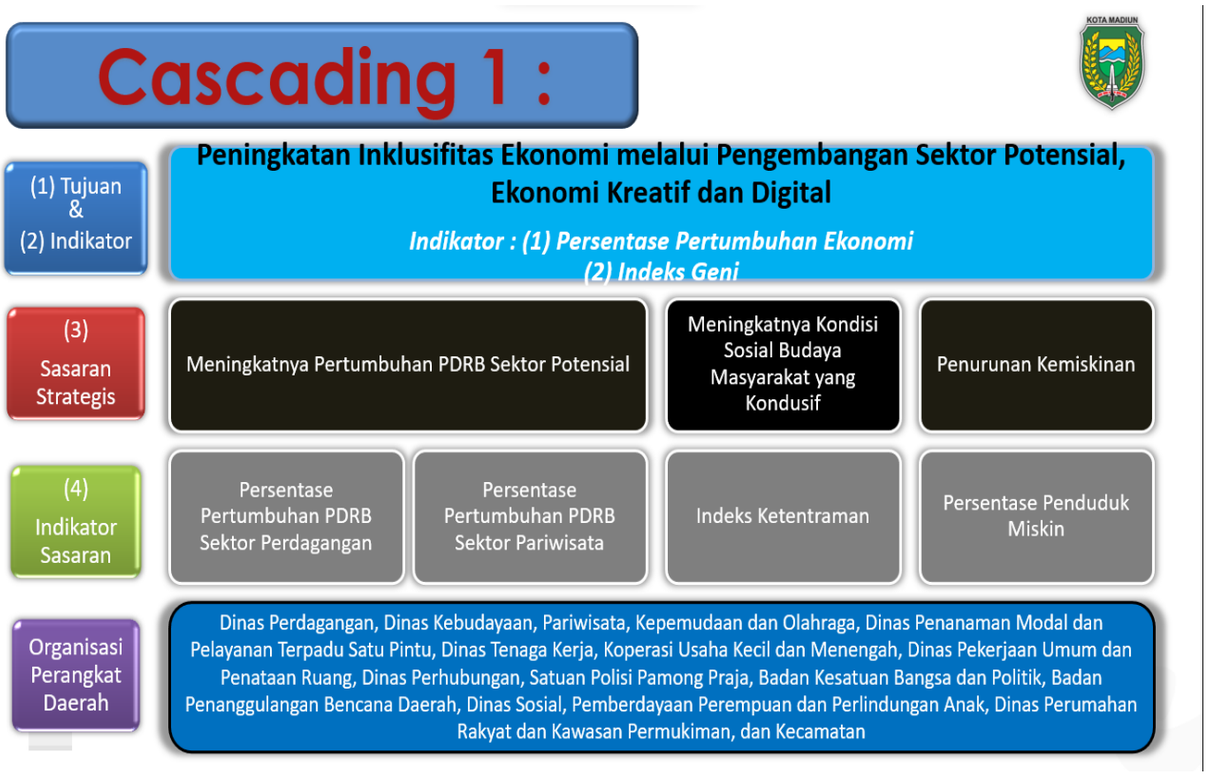
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pengembangan SPAM Regional Madiun.
5. Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Madiun.
6. Pengembangan kota agropolitan Madiun.
7. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC).
8. Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan.
9. Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai hinterland dari Kawasan Perkotaan Madiun.
10. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
11. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya.
12. Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan).

Pengembangan kawasan perkotaan Madiun sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Kota Madiun yang menekankan pada peningkatan inklusivitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pada arah kebijakan ekonomi Kota Madiun. Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat dari misi keempat dalam RPD Kota Madiun 2025-2026 yaitu Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, ekonomi kreatif, dan digital. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif, dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja, lapangan berusaha;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender;
6. Penurunan tingkat kemiskinan baik nominal maupun ekstrem;
7. Peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi;
8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik;
9. Peningkatan reformasi birokrasi;
10. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun;
11. Peningkatan infrastruktur dan kenyamanan kota; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



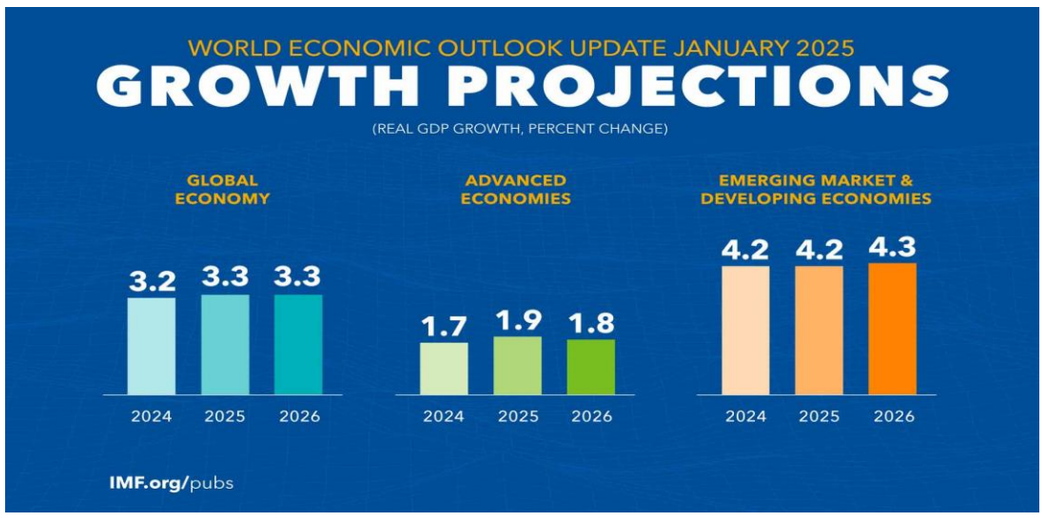
Gambar 3. 16 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026
Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025

Arah kebijakan ekonomi di berbagai level sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik di level dunia, nasional, maupun regional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menunjukkan peningkatan dari 3,2% pada tahun 2024 menjadi 3,3% pada tahun 2025, dengan tingkat yang diperkirakan tetap stabil pada 3,3% di tahun 2026. Meskipun angka pertumbuhan untuk tahun 2025 lebih tinggi 0,1% dibandingkan dengan perkiraan dalam *World Economic Outlook (WEO) January 2025*, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata historis periode 2000–2019 yang mencapai 3,7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini tidak berubah karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya membantu menopang angka pertumbuhan global. Meskipun ada penurunan proyeksi pertumbuhan di negara-negara besar lainnya, dampak negatifnya diimbangi oleh peningkatan pertumbuhan di AS, sehingga proyeksi global tetap stabil dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya dalam *World Economic Outlook (WEO)* Oktober 2024.

Inflasi global diperkirakan menurun menjadi 4,2 persen pada tahun 2025 dan 3,5 persen pada tahun 2026, dengan tingkat inflasi di negara maju cenderung kembali ke target lebih cepat dibandingkan negara berkembang dan pasar negara berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam jangka menengah, risiko terhadap proyeksi ekonomi cenderung negatif, sementara dalam jangka pendek, risiko bervariasi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, ada potensi pertumbuhan yang lebih kuat, tetapi di negara lain, ketidakpastian kebijakan yang tinggi menjadi tantangan. Gangguan kebijakan terhadap proses penurunan inflasi dapat menghambat transisi ke kebijakan moneter yang lebih longgar, yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan fiskal dan stabilitas keuangan. Untuk mengantisipasi risiko ini, kebijakan harus fokus pada keseimbangan antara inflasi dan aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan jangka menengah melalui reformasi struktural dan kerja sama global yang lebih kuat.



Gambar 3. 17 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2024-2026
Sumber: IMF, 2025

Berdasarkan Gambar 3.1, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan meningkat dari 1,7% di tahun 2024 menjadi 1,9% di tahun 2025. Namun di tahun 2026, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju turun menjadi 1,8%. Sedangkan untuk negara berkembang dan pasar negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan stagnan secara moderat, dari 4,2% pada tahun 2024 dan tetap sebesar 4,2% pada tahun 2025 yang kemudian meningkat pada tahun 2026 sebesar 4,3%.

Pasar saham di negara maju mengalami kenaikan karena ekspektasi kebijakan yang lebih ramah bisnis di Amerika Serikat. Sementara itu, di negara pasar berkembang dan negara berkembang, valuasi saham cenderung lebih lemah. Penguatan dolar AS, terutama yang didorong oleh ekspektasi tarif baru dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, membuat kondisi keuangan tetap ketat. Kebijakan fiskal diperkirakan akan diperketat pada 2025–2026, terutama di negara maju, termasuk Amerika Serikat, serta dalam skala yang lebih kecil di negara pasar berkembang dan negara berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2026

	IMF	WB	OECD
World Output	3,1	2,7	3,3
Advanced Economies	1,7	1,8	-
United States	2,1	2,0	2,1
Euro Area	1,4	1,2	1,5
Japan	0,8	0,9	0,6
Emerging Market and Developing Economies	4,2	4,0	-
China	4,5	4,0	4,4
Indonesia	5,1	5,1	5,1
Russia	1,2	1,1	0,9
Brazil	2,3	2,3	1,9
Saudi Arabia	4,1	5,4	3,8
South Africa	2,2	1,9	1,7

Sumber: *WEO IMF* Jan 2025, *GEP WB* Jan 2025, *OECD Economic Outlook* November 2025

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.1 diatas, Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2026. Proyeksi ekonomi tahun 2026 cenderung naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Negara-negara berkembang menghadapi periode pertumbuhan yang lambat selama beberapa tahun yang disebabkan oleh beban utang yang besar dan investasi yang lemah karena modal global diserap oleh negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 didukung oleh permintaan domestik yang kuat, investasi yang meningkat seiring dengan membaiknya kepercayaan bisnis, rendahnya inflasi, dan turunnya suku bunga.

Lebih lanjut, proyeksi asumsi makro ekonomi untuk tahun 2025 hingga 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2025-2026

Indikator	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Inflasi *(%, yoy)*	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,3 - 7,5	6,3 – 7,3
Nilai Tukar (Rp/ US$)	14.900 - 15.300	14.900 – 15.400
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	70 - 90	70 – 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	606 - 684	593 – 621
Lifting Gas (BOE/hari)	1061 - 1151	1.087 – 1.151

Sumber: Kemenkeu, 2025

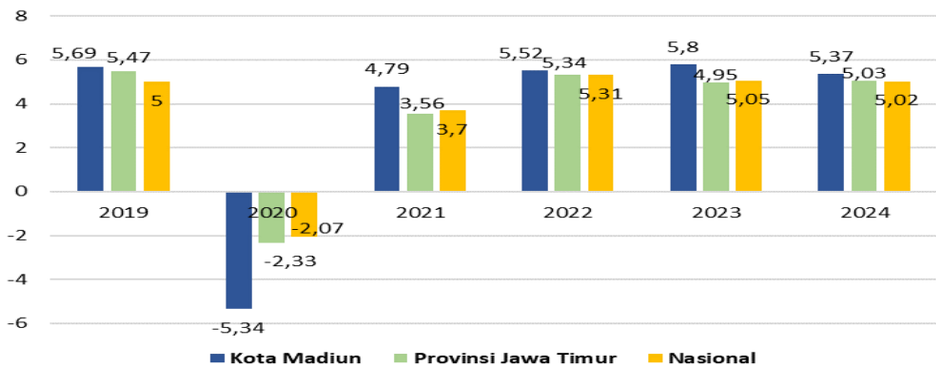
Berdasarkan Tabel 3.2, proyeksi indikator makroekonomi untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Inflasi diperkirakan tetap stabil dengan sedikit peningkatan dalam rentang 1,5–3,5% selama periode tersebut. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan menguat, bergerak dalam kisaran Rp14.900 hingga Rp15.400 per USD pada tahun 2026. Sementara itu, harga minyak diprediksi tetap stabil pada level 70–90 USD per barel sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019-2024

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Indikator ini mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah perekonomian dalam periode tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin cepat pula peningkatan output wilayah, yang pada akhirnya mendukung prospek perkembangan wilayah yang lebih baik. Di Kota Madiun, pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tanpa sektor migas.

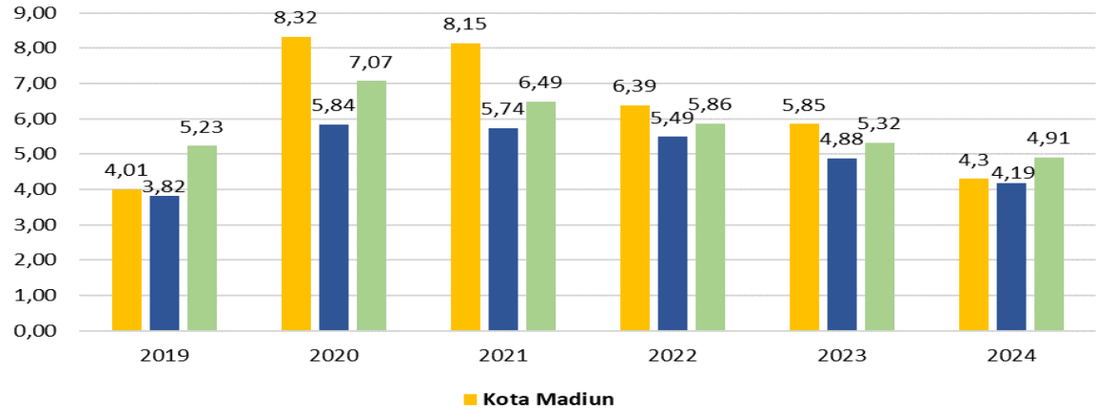
Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,69% dan mengalami kontraksi yang tajam akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga pertumbuhannya -5,34%. Setelah tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menunjukan tren yang positif dari tahun 2021-2024.



Gambar 3. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

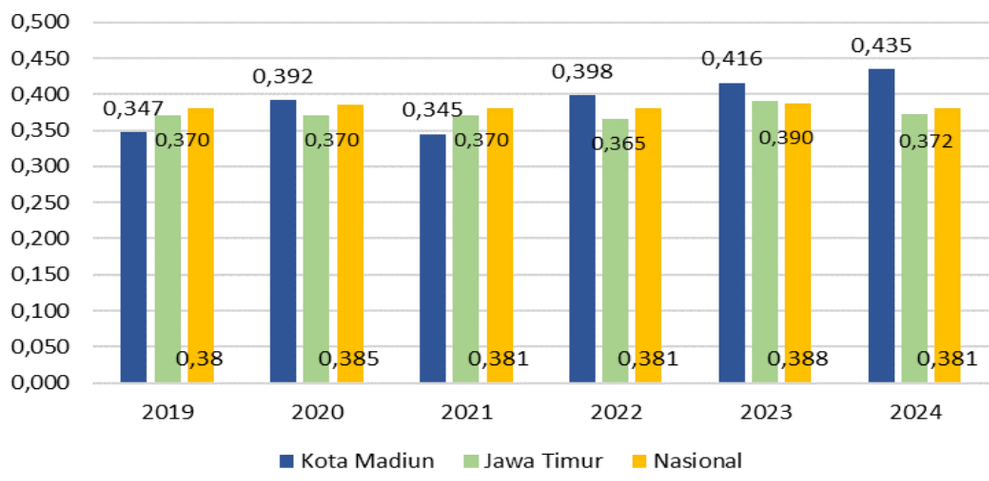
Sebagaimana yang termuat pada gambar di atas, sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 5,69% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,47% dan 5%. Sebagai dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -5,34% dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,33% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis ini mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021 hingga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,79% pada tahun 2021 menjadi 5,37% pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun sebesar 4,01% dan meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 8,32%. Sedangkan pada tahun 2021 TPT mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 8,15%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional, yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pada tahun 2022, tren penurunan TPT berlanjut dengan penurunan sebesar 1,76 poin, dari 8,15% pada tahun 2021 menjadi 6,39% pada tahun 2022. Lebih lanjut, pada tahun 2023 hingga 2024, nilai TPT terus menunjukkan tren penurunan yang lebih signifikan. Pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 4,3%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan, yang dapat dikaitkan dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan investasi, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.



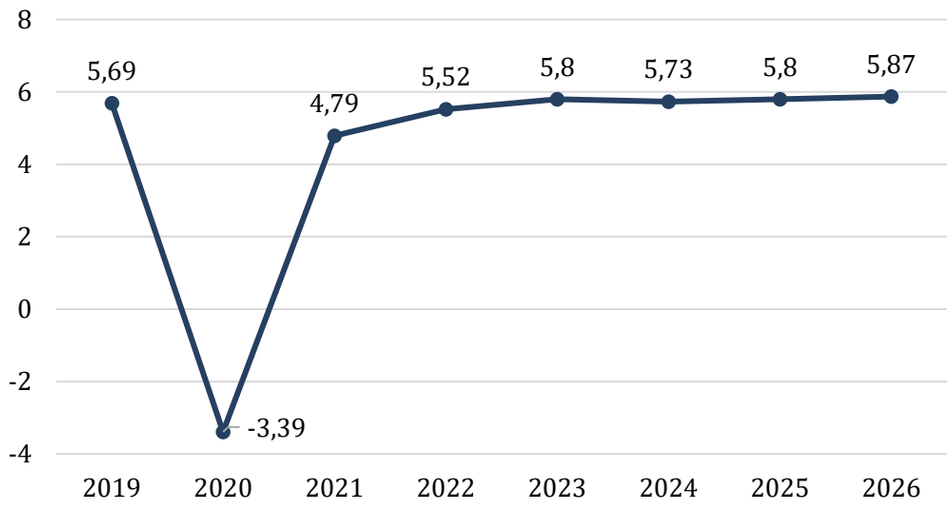
Gambar 3. 20 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek pemerataan pembangunan, salah satunya yang tercermin melalui Gini Ratio. Pada tahun 2019, Gini Ratio Kota Madiun tercatat lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (0,370) dan nasional (0,38). Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Madiun, dengan Gini Ratio naik menjadi 0,392 pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,345, yang menunjukkan kondisi pemerataan pendapatan di Kota Madiun lebih baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, tren ketimpangan kembali meningkat dengan Gini Ratio mencapai 0,435 di tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional. Peningkatan ketimpangan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pertumbuhan upah antar kelompok pendapatan, yang memperlebar kesenjangan ekonomi di Kota Madiun.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2025 dan 2026

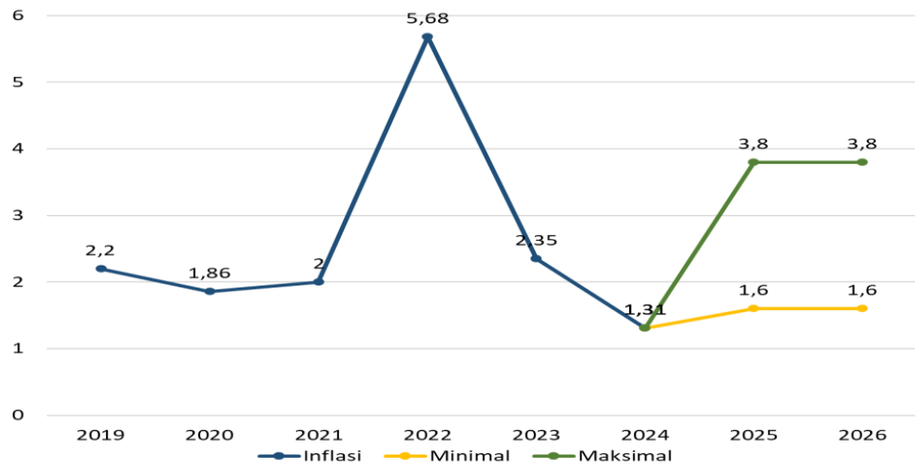
Pada tahun 2020 dan 2021, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut serta proyeksi resesi global tahun 2023. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun menunjukkan kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 3. 21 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Target Tahun 2025-2026

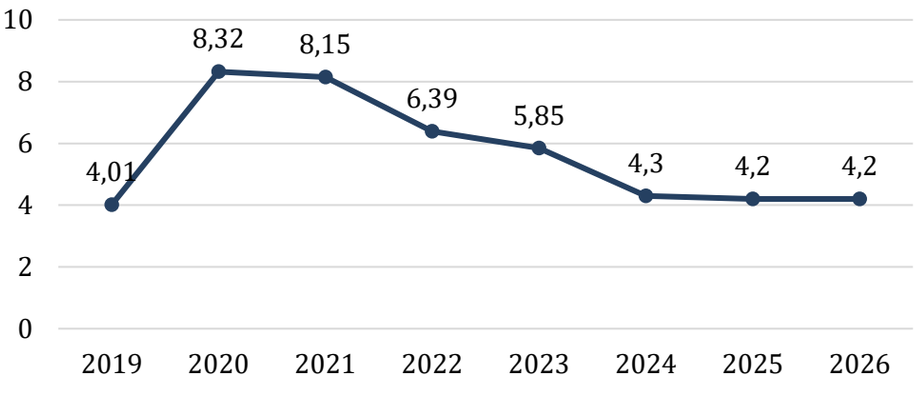
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.21 diatas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 5,69%. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga -3,39%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,80% tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,73%. Sedangkan pada tahun 2025 dan 2026, dengan asumsi stabilitas ekonomi nasional dan regional terjaga, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat hingga 5,8-5,87%.



Gambar 3. 22 Proyeksi Inflasi Kota Madiun Tahun 2019-2026

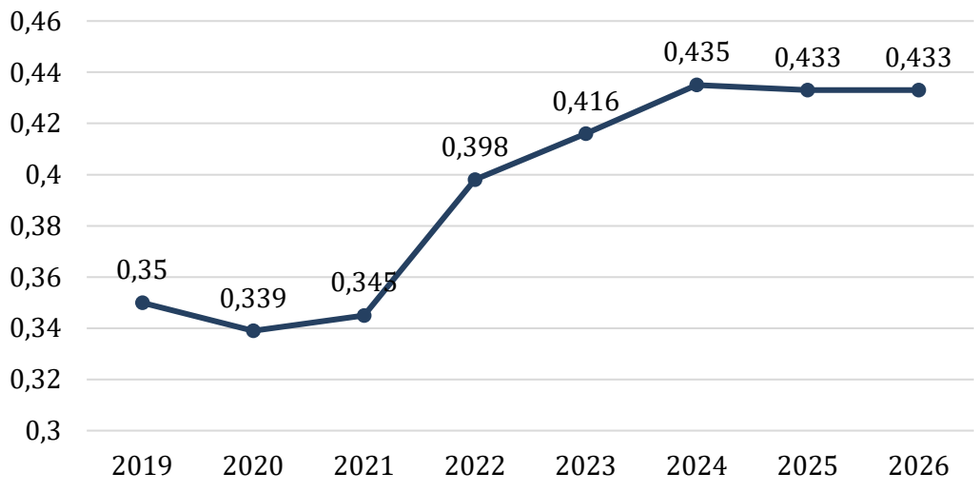
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.22 diatas, Inflasi Kota Madiun cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, inflasi sebesar 2,2% dan mengalami penurunan hingga 1,86% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 inflasi meningkat tajam hingga 5,68%.
Capaian ini secara berangsur-angsur menurun pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 2,35% dan 1,31%. Sementara itu, pada tahun 2025 dan 2026, nilai inflasi diproyeksikan tumbuhan hingga 1,6-3,8 atau dikisaran 3±1.



Gambar 3. 23 Realisasi TPT Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Target Tahun 2025-2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

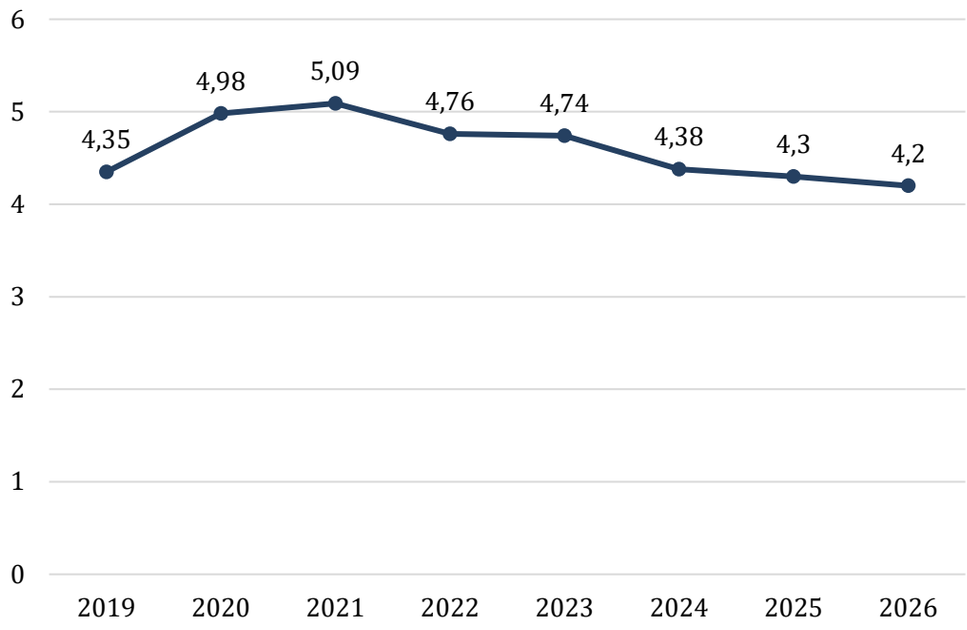
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.23 diatas, seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Angka TPT Kota Madiun per tahun 2019 mencapai angka 4,01% yang kemudian meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 hingga mencapai 8,32% sebagai imbas dari pandemi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Seiring dengan hal tersebut, per tahun 2024, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga mencapai 4,30%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT diproyeksikan akan mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 sebesar 4,20 pada tahun 2025 dan 2026.



Gambar 3. 24 Realisasi Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Target Tahun 2025-2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.24 di atas, pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak Covid-19, ketimpangan pendapatan tahun 2019 sebesar 0,35 dan turun menjadi 0,339 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan hingga 0,345 namun kembali naik menjadi 0,398 pada tahun 2022. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan mencapai 0,435. Sedangkan pada tahun 2025 dan 2026, Indeks Gini diproyeksikan menjadi 0,433%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 3. 25 Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Target Tahun 2025-2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.25 diatas, Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2019-2026 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic Covid-19 yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemik, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,09%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada tahun 2023, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,74%. Sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 4,38%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan diproyeksikan pada tahun 2025 akan mencapai 4,30% serta pada tahun 2026 mencapai 4,20%.

3.1.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2025, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan regulasi lainnya yang sesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
   b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
      1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran;
      2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil; dan
      3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
      4. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD; dan
      5. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

   Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

3. Lain–lain pendapatan yang sah

   Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan. Melalui kebijakan tersebut,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya tncapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
    a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
       Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
    b. Meningkatkan kualitas SDM (aparat daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
    c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta; dan
    d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
    a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun; dan
    b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.1.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah daerah telah menjelaskan beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Pengalokasian belanja pegawai agar di perhatikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

   Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah;
4. Dalam rangka Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcome*nya. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2025 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2025 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (m*oney follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian Indikator kinerja utama Kota Madiun pada tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20%.

   Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 37,2% dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
   b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik;
   c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
   d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal
   a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2025, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksudu ntuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua, yaitu:

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Belanja Hibah adalah Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2025 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2025, tidak dialokasikan untuk penyertaan modal; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR).* Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-*cover* oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui *(CSR)* tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2020-2024

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hotel Merdeka	Penerangan Jl. Lodayan	1.200.000				
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas	100.000				
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran	2.500.000				
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim	1.500.000				
		Bantuan untuk Kampung Tangguh	500.000				
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)	1.000.000				
2	PT. Nitama Madiun	Pocari Sweat untuk tenaga medis	3.600.000				
		Masker berlogo Nitama	3.800.000				
		Tanaman buah					
		Pohon Jambu Citra 5 buah	1.125.000				
		Pohon Jambu Camplong 5 buah	1.125.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pohon Jeruk 5 buah	2.250.000				
		Pohon Leci 2 buah	750.000				
		Pohon Sawo Mentega 3 buah	1.350.000				
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah	1.500.000				
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah	1.800.000				
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag	480.000				
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs					
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia	6.000.000				
		Beras *CSR* untuk warga sekitar	2.064.000				
		Proses pelapisan *hot dip galvanize gratting* makam	700.000				
		Proses pelapisan *hot dip galvanize gratting* makam	700.000				
		Hut Satpam	750.000				
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06	6.000.000				
3	PT. INKA (INDUSTRI KERETA API)	Bantuan Bedak Kaca	750.000				
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra	250.000.000				
		Rehab Ruang Kelas	2.000.000				
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan	1.000.000				
		Paket *Hand Sanitizer* 60.000 ml	7.300.000				
		Vitamin	1.000.000				
		Suplemen dan Vitamin	8.255.400				
		Bantuan Masker dan *Faceshield* 500 bh	5.250.000				
		Masker 1000 bh	6.500.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi Bahaya Narkoba	51.900.700				
		Penyuluhan Pencegahan Covid	53.589.400				
		Bantuan Sarpras Posko Covid	9.170.000				
		Bantuan Bilik Desinfektan	2.200.000				
		Bantuan Bilik Desinfektan	10.000.000				
		Tempat Cuci Tangan, Masker dan Hand sanitizer	2.887.500				
		Rapid tenaga medis	46.500.000				
		Pule dan bungur	184.750.000				
		Pohon Tabebuya	3.000.000				
		Pot, Media dan Bunga	2.500.000				
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah	2.000.000				
		Tempat sampah 3 unit	2.397.000				
		Sarpras Poskamling Kel. Patihan	2.246.000				
		Pembelian Pot Bunga	1.000.000				
		Pembelian Pot Bunga	1.200.000				
		Pemeliharaan mural	20.090.000				
		Bantuan Kebersihan makam	3.000.000				
		Bantuan Paket sembako 200 paket	37.300.000				
		Bantuan Sembako	1.000.000				
		Baksos Sembako	5.000.000				
		Bantuan Sembako 50 paket	10.500.000				
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket	8.749.587				
		Bantuan Baju Koko dan Mukena	35.407.990				
		Kegiatan Baksos	1.000.000				
		Santunan Yayasan Panti Asuhan	272.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Renovasi Masjid	5.000.000				
		Bantuan Terpal Tenda	5.000.000				
		Bantuan Cover tenda	4.200.000				
		Renovasi masjid	2.000.000				
		Pembangunan Masjid	5.000.000				
		Pembelian Tanah Wakaf	2.000.000				
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI	4.000.000				
		RTLH Bp. Firman	86.125.000				
		Ruang Pelayanan Masyarakat	68.186.060				
		Pembelian material pipa besi dan cat	2.000.000				
		Pembelian material Kelas lapangan	29.785.000				
		Bantuan Laptop	35.200.000				
		Bantuan Kodim	24.744.000				
		Pembuatan 200 Kaos	10.130.000				
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit	28.730.000				
		Pengadaan portal	3.950.000				
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh	2.775.200				
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul	11.009.000				
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo, Mojorejo dan Nambangan Lor	13.250.000				
		Masker		7.500.000			
		Ranjang Pasien		121.850.000		50.400.000	111.600.000
		Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan				3.830.400	
		Bantuan Beasiswa Mahasiswa				6.000.000	
		Program Peningkatan					150.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengelolaan lapak UMKM Kelurahan: a. Bazar Takjil b. Evaluasi Pengelolaan lapak c. Pemberian Bantuan/Reward Alat-alat Produksi d. Pendampingan Lapak					
		RLTH Bapak Hadi Supriyanto Jalan Merpati, Gang Platuk Bawang No. 9, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun					50.500.000
		Mesin fogging					37.254.670
		Bantuan Sarpras Lingkungan: Tempat sampah botol plastik (per kelurahan @1.725.000) 1. Pangongangan 2. Taman 3. Sukosari 4. Ngegong 5. Nambangan lor 6. Patihan 7. Oro-oro ombo 8. Madiun lor 9. Pandean 10. Kuncen 11. Kelun 12. Kanigoro					20.700.000
4	PT. KAI DAOP 7	Alat Peraga Edukasi	25.000.000				
			5.000.000				
		Pule dan Bungur	92.500.000				
5	Hotel Amaris	Sumbangan Anak Yatim	3.000.000				
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)	2.800.000				
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan	2.000.000				
6	ALFAMART	biaya pangkas pule barito	15.000.000				
		tanaman hias sumber wangi (bugenvil varigata,	27.875.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		kamboja besar, kelapa gading)					
		sulaman pohon sogo	2.400.000				
		Lampu Plenton	29.750.000				
		Lampu Penjor	150.000.000				
7	PT. BRI	Pohon berbunga					
		Masker Non Medis 1250 pcs	12.500.000				
		Paket sembako 100 paket	15.000.000				
		Masker Kain (5000 buah)		5.000.000			
		Biskuit (30 dos)		1.440.000			
8	PT. TELKOM	Bantuan Pinjaman Bergulir	820.000.000				
		Booth untuk UMKM	100.000.000				
		300 buah Hazmat untuk Satgas Covid	14.250.000				
		300 psng Sepatu Boots	22.500.000				
		300 bh faceshield	5.850.000				
		320 box Masker medis	48.800.000				
		80 box sarung tangan karet	8.200.000				
		2000 bh masker non medis	13.300.000				
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun	15.000.000				
9	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk	Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	66.896.000				
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	134.329.000				
		Paket Sembako (1500 paket)		210.000.000			
		Peket Sembako (1500 paket)		270.000.000			
		Both Container (2 buah)		545.800.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC)			541.178.000		
		Lanjutan *Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC)* dan patung pendekar			564.541.000		
		Bantuan Sarpras Lingkungan Kendaraan dan Branding				533.000.000	
10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Lapak Joglo Paleraman		2.100.000			
		Lapak Kembulsari		18.500.000			
		Lapak Sido Dadi		24.500.000			
		Lapak Lintang Tawang		16.000.000			
		Bantuan Meja, Kursi dan Lemari Kaca			3.600.000		
11	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan	1.500.000				
		Sedekah Jumat	4.800.000				
		Sumbangan Kematian	1.000.000				
		Sumbangan Bencana Alam	1.500.000				
		Takjil Ramadhan	1.000.000				
		Parsel Lebaran	1.000.000				
		Sumbangan HUT RI	500.000				
		HUT BPR Tunas Artha	1.000.000				
		Sumbangan lain-lain	1.000.000				
12	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop	2.000.000				
		Penerimaan Peserta Didik magang	15.000.000				
		Penanaman Pohon	20.000.000				
		Bukber anak yatim Piat	12.000.000				
		Parsel Lebaran	5.000.000				
		Sumbangan HUT RI	2.000.000				
		Hewan Qurban	20.000.000				
		Takjil Ramadhan	5.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Hotel Aston	Donor Darah Umum	500.000				
		Takjil Ramadhan	1.500.000				
		Berbagi Sahur	1.500.000				
		Bakti Sosial	300.000				
		Natal Bersama Panti Asuhan	2.000.000				
		Hewan Qurban	3.500.000				
14	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima	60.000.000				
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun	50.000.000				
		Program Bisafari Dhuafa	5.000.000				
15	PT. PNM	Penanaman Pohon	10.000.000				
16	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon	5.000.000				
17	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor	3.000.000				
		Buka bersama anak yatim	3.000.000				
		Takjil Ramadhan	2.000.000				
		Bingkisan lebaran	7.000.000				
		Sumbangan HUT RI	1.000.000				
		Container (2 buah)			26.061.636		
18	BRI KANCAB MAGETAN	Pule	42.000.000				
		Tiang lampu penjor klasik Badungan	50.000.000				
19	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan	1.400.000				
		Penanganan Covid	231.716.237				
		Penanaman Pohon Flamboyan	45.500.000				
		bantuan Sarana Ibadah	3.950.000				
		Khitan massal	25.000.000				
		Bantuan Sosial	25.334.587				
		Bantuan sarana umum	2.550.000				
		Program Kemitraan	1.055.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Gula Pasir (2.500 kg)		30.000.000			
		Gula Pasir (2,5 ton)			32.500.000		
20	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur	150.040.000				
		Pelatihan		28.394.000			
		Alat dan Bahan Pelatihan		33.000.000			
		Sarpras Lingkungan		17.000.000			
21	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim	20.000.000				
22	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN	*Gate Videotrone*	330.000.000				
		Videotron			278.000.000		
23	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat	170.000.000				
24	PDAM Tirta Taman Sari	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail	85.000.000				
		Balon Gate (2 unit)		20.000.000			
		BPJS Ketenagakerjaan 1.144 orang			230.630.400		
		Bantuan Bersa dan Air Minum			31.412.000		
		Kaos 92 buah			6.127.200		
		Kaos 147 buah			9.790.200		
		Kaos 177 buah			11.788.200		
		Kaos 407 buah			27.106.200		
		Kaos 177 buah			11.788.200		
		Air minum kemasan 1.646 karton			44.442.000		
		Bantuan Sarpras Lingkungan				29.175.000	
		Anjungan air siap minum					
		Bantuan Sarpras Lingkungan				7.086.996	
		Wastafel					
25	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan	280.000.000				
		Bantuan Sarpras Lingkungan: Pohon Kamboja Berkarakter					30.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
26	INDOSAT	Lampu Penjor	162.793.000				
27	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun	15.000.000				
28		RUMAH PINTAR	202.555.000				
	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	Pohon pule 2 buah, treatment dan pemeliharaan pohon, dan branding PLN peduli			75.000.000		
29		Pompa Elektrik 4 unit	3.000.000				
	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Chlorin 7 jerigen @ 20 liter	4.200.000				
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter	700.000				
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter	700.000				
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter	700.000				
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter	700.000				
30	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah	6.500.000				
		Alat Pelindung Diri 75 buah	6.375.000				
		Sarung tangan 10 box/500 psng	1.150.000				
		Hand Sanitizer 20 liter	3.600.000				
		Wastafel aluminium 4 buah	2.800.000				
		Thermogun 4 buah	6.000.000				
31	PT. CIPTA GAGAS LESTARI	Handsanitazer Merk Novo 80 ml (20 dos)		2.880.000			
		Masker Protector (20 dos)		7.680.000			
		Minuman Serbuk Merk Segar (20 dos)		2.592.000			
		Susu Milku (1500 botol)		3.562.500			
		Kopi Siap Saji (1000 cup)		2.000.000			
32	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	Healthy Kit Non Medis (2.000 buah)		56.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Susu (360 buah)		780.000			
		Gula Pasir 3 ton			45.000.000		
33	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Masker Kain (1000 buah)		6.000.000			
		Paket Sembako (130 buah)		16.250.000			
		Susu (1145 buah)		2.750.000			
		Minyak goreng 1.056 liter			25.000.000		
34	PERUM BULOG	Bantuan Sembako		54.000.000			
35	PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Gerobak/ Booth Kontainer (6 unit)		87.000.000			
36	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	Susu Milku (5.000 botol)		12.250.000			
		Masker (2000 buah)		14.000.000			
37	PT. INTI DAYA GUNA ANEKAWARNA (INDANA)	Cat Outdoor (100 galon)		20.700.000			
38	LARISSA AETHETIC CENTER MADIUN	Tempat Cuci Tangan Injak (6 unit)		9.900.000			
		Masker Medis (40 box)		2.640.000			
39	PT. CALVARY ABADI	Paket Sembako (2000 paket)		202.000.000			
		Masker Medis (100.000 lembar)		40.000.000			
		Beras 10 ton dan Minyak Goreng 5.185 liter			159.997.500		
40	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PG. PAGOTAN)	Gula Pasir (10 Sack)		5.250.000			
41	PT. BAKTI NETRA UTAMA	Mesin Potong Rumput (11 unit)		18.700.000			
		Peralatan Gergaji Mesin (6 unit)		21.300.000			
42	POLITEKNI PERKERETAAPI AN INDONESIA	Paket Sembako (300 paket)		60.000.000			
43	PT. ASTRA INTERNATIONA L, Tbk	Booth Container (10 unit)		75.000.000			
44	PT. ULER RAYA INDONESIA	Paket Sembako (100 paket)		10.000.000			
45	PT. MIDI UTAMA	Bantuan Sarpras Lingkungan		120.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
	INDONESIA, Tbk						
46	PT. PESTA PORA ABADI	Masker Medis (20 box)		5.000.000			
47	PT. PEGADAIAN PERSERO	Vitamin (100 pack)		5.000.000			
48	PT. ACE HARDWARE INDONESIA LAWU PLAZA MADIUN	Earloop Face Mask (1440 pack)		47.376.000			
49	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Soud System Mushola dan Soud Outdoor Sumber Umis, AC 2 unit, CCTV 4 titik dan Vocher belanja Rp.100.000,00 (60 vocher)			200.100.000		
50	PT. REJEKI TAMBAH BAROKAH	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, susu) sejumlah 195 paket			11.640.000		
51	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Beras 10 ton dan minyak goreng 2.962 liter			149.987.000		
52	PT. MADIUN RITELINDO (PLAZA MADIUN)	Sewa Area Café Pelayanan Publik dan Shervice Charge			26.748.660		
53	TOKO MODERN LARAIA	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, mie instan, roti roma) sejumlah 200 paket			32.000.000		
54	PT. MERAK JAYA PRACETAK	Minyak goreng 2.000 liter			26.000.000		
55	YAYASAN PELATIHAN FITRI AL BAASITU	Beras 1.000 kg dan minyak goreng 1.000 liter			23.600.000		
56	PT. LINKNET	Bantuan Sarpras Lingkungan				100.000.000	
		Mobil Jaguar					
57	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	Bantuan Sarpras Lingkungan: Pelengkap Mobil Jaguar				30.000.000	
		Kontainer				70.000.000	
58	CV. MAJU BERSAMA	Bantuan Sarpras Lingkungan:				1.032.885.258	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Replika Menara Eifel					
59	PT. EKA MAS REPUBLIK	Bantuan Sarpras Lingkungan: Kontainer				55.144.200	
60	PT. SUCCESS JAYA GROUP	Bantuan Sarpras Lingkungan: Replika Tugu Monas				554.948.000	
61	CV CITRA ANEKA PANGAN	Bantuan Sarpras Lingkungan: Kontainer					66.000.000
62	PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA	Bantuan Sarpras Lingkungan: Revitalisasi Lapangan Volley Gulun					70.200.000
		Bantuan Sarpras Lingkungan: a. Basketball Court (Sarana dan Prasarana) b. Basketball Court (Jasa Pembenahan) c. Bench Pemain Stadion d. Tempat Sampah Gantung e. Plang Himbauan Outdoor f. Totem Pylon Sign g. Papan Skor (Perbaikan) h. Meja Lipat i. Tent Production - Double Deck					91.400.000
JUMLAH			6.251.135.661	2.261.694.500	2.594.038.196	2.472.469.854	627.654.670

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2025

3.1.4. Kerangka Pendanaan 2025

Kerangka pendanaan memiliki hubungan yang sinergi dengan kondisi Indikator Ekonomi Makro. Proyeksi pendapatan Kota Madiun mengalami perubahan di hampir seluruh komponen yang disebabkan karena:

1. Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2025, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Berdasarkan peraturan di atas tunjangan penghasilan guru (TPG) dan tunjangan lain (TKG, Tamsil) yang sebelumnya disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik akan dialihkan ke sistem penyaluran langsung ke rekening guru. DAK Non Fisik ini tetap akan dicatat dalam APBN, namun penyalurannya akan dilakukan langsung ke rekening guru tanpa melalui APBD daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2025 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan, dimana pada tahun berjalan krisis energy dan krisis pangan dunia masih menghantui. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan professional.

Serta dengan ditetapkannya tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Kendaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan pendapatan bagi hasil dari provinsi menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan PAD pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 diproyeksikan mampu mencapai Rp297.172.740.156,74 yang artinya mengalami kenaikan sebesar 4,09% dari pada target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp285.500.261.209.

2. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Transfer pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Insentif Daerah, Serta Dana Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Dari Provinsi serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi. Jumlah dana Transfer yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD 2025 sampai dengan penyusunan Perubahan RKPD ini mengalami penurunan sebesar -5,60% atau berkurang sebesar Rp45.647.310.000 yaitu sebelum perubahan sebesar Rp814.774.811.000 kemudian berkurang menjadi Rp769.127.501.000. Penurunan Dana Transfer disebabkan karena terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Berdasarkan dinamika hasil proyeksi pendapatan tersebut dimana secara garis besar kekuatan anggaran terjadi penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 maka pada RKPD Perubahan Tahun 2025 untuk belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp1200.275.072.209 menjadi Rp1.179.560.397.886,31 dengan perubahan penurunan sebesar Rp20.714.674.322,69 Belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp59.630.831.173,62 dengan komponen belanja barang dan jasa turun sebesar Rp13.421.568.812,70 dan untuk belanja hibah juga mengalami penurunan sebesarRp1.131.633.000 dan belanja bantuan sosial juga mengalami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penurunan Rp600.590.000 dan sedangkan belanja Subsidi diproyeksikan naik sebesar Rp200.000.000.

Belanja Modal mengalami peningkatan dikarenakan untuk mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat serta dalam rangka mewujudkan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari Tahun 2025 dimana ada 8 (delapan) Program Unggulan dalam Asta Karya yang akan mulai di implementasikan pada dokumen perencanaan RKPD Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Peruabahan RKPD Tahun 2025 ini belanja modal yang semula di anggarkan sebesar Rp132.657.442.486,50 mengalami kenaikan sebesar Rp28.014.520.557,30 menjadi Rp160.671.963.063,80. Kenaikan belanja modal secara signifikan ada pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.234.058.820, hal ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan dalam rangka mengurangi volume sampah dengan pengadaan mesin incenerator. Proyeksi perubahan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2025 secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 5 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Madiun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (APBD 2025)	SETELAH PERUBAHAN (RKPD-P 2025)	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	285.500.261.209,00	297.172.740.156,74	11.672.478.947,74	4,09
4.1.01	Pajak Daerah	138.994.500.000,00	142.546.702.125,00	3.552.202.125,00	2,56
4.1.02	Retribusi Daerah	130.529.977.940,00	130.116.391.940,00	- 413.586.000,00	- 0,32
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.433.092.969,00	15.447.565.426,60	1.014.472.457,60	7,03
4.1.04	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.542.690.300,00	9.062.080.665,14	7.519.390.365,14	487,42
4.2	Pendapatan Transfer	814.774.811.000,00	769.127.501.000,00	- 45.647.310.000,00	-5,60
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.915.741.000,00	702.268.431.000,00	- 45.647.310.000,00	-6,10
4.2.1.01	Dana Perimbangan	718.604.820.000,00	672.957.510.000,00	- 45.647.310.000,00	-6,35
4.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.095.384.000,00	34.095.384.000,00	0,00	-
4.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	30.008.850.000,00	30.008.850.000,00	0,00	-
4.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	32.236.305.000,00	32.236.305.000,00	0,00	-
4.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	530.628.223.000,00	530.628.223.000,00	0,00	-
4.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	91.636.058.000,00	45.988.748.000,00	- 45.647.310.000,00	-49,81
4.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	29.310.921.000,00	29.310.921.000,00	0,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.859.070.000,00	66.859.070.000,00	0,00	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	66.189.020.000,00	66.189.020.000,00	0,00	-
4.2.02.02	Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi	670.050.000,00	670.050.000,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.100.275.072.209,00	1.066.300.241.156,74	- 33.974.831.052,26	- 3,09
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.059.993.938.950,24	1.000.363.107.776,62	- 59.630.831.173,62	- 5,63
5.1.01	Belanja Pegawai	483.497.707.697,99	438.820.668.337,07	- 44.677.039.360,92	- 9,24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.011.875.072,25	501.590.306.259,55	- 13.421.568.812,70	- 2,61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00
5.1.05	Belanja Hibah	27.860.583.953,00	26.728.950.953,00	- 1.131.633.000,00	- 4,06
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.523.772.227,00	32.923.182.227,00	- 600.590.000,00	- 1,79
5.2	BELANJA MODAL	132.657.442.486,50	160.671.963.063,80	28.014.520.577,30	21,12
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.141.644.933,50	47.827.306.690,80	9.685.661.757,30	25,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.745.439.302,00	53.979.498.122,00	13.234.058.820,00	32,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.771.093.151,00	57.080.393.151,00	5.309.300.000,00	10,26
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.222.835.100,00	1.422.835.100,00	200.000.000,00	16,36
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	776.430.000,00	361.930.000,00	- 414.500.000,00	- 53,39
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.623.690.772,26	18.525.327.045,89	10.901.636.273,63	143,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.623.690.772,26	18.525.327.045,89	10.901.636.273,63	143,00
	JUMLAH BELANJA	1.200.275.072.209,00	1.179.560.397.886,31	- 20.714.674.322,69	- 1,73
	SURPLUS/ (DEFISIT)	- 100.000.000.000,00	- 113.260.156.729,57	- 13.260.156.729,57	13,26
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	113.260.156.729,57	13.260.156.729,57	13,26
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	113.260.156.729,57	13.260.156.729,57	13,26
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO		100.000.000.000,00	113.260.156.729,57	13.260.156.729,57	13,26
SiLPA		0,00	0,00	0,00	

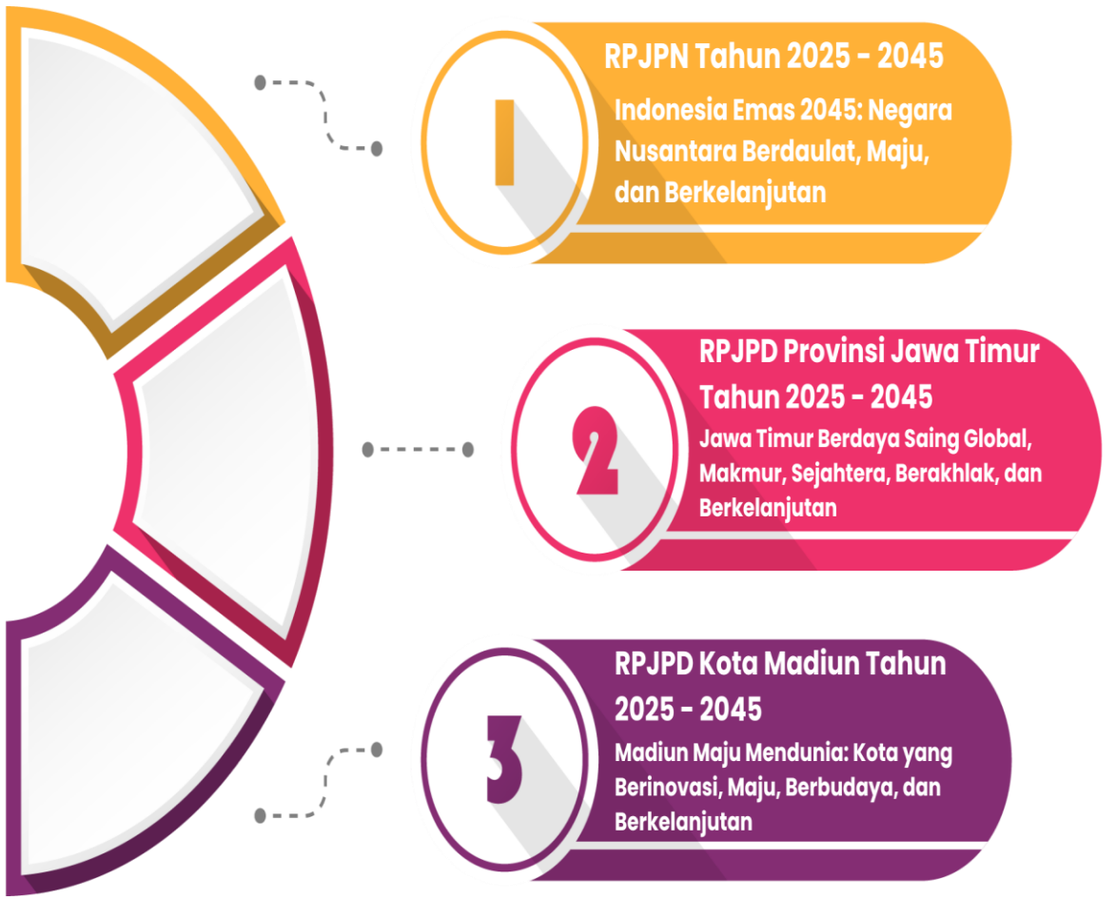
Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sinergitas arah dan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi sebuah hal yang krusial dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Maka, konsekuensi logis daripada keberhasilan pembangunan daerah adalah selarasnya tujuan pembangunan di berbagai level, terutama di level pemerintah provinsi dan pusat. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun sejalan dengan perioritas pembangunan di level Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari visi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4. 1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan

Visi RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan erat dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Presiden. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi antar dokumen. Visi Kota Madiun tahun 2025-2045 adalah: “Madiun Maju Mendunia Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2025-2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai pertama adalah “Inovasi”, yang mana Kota Madiun mampu mengembangkan ide kreatif dan solutif dalam pemecahan permasalahan pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan Kota Efisien, Berkelanjutan, dan Layanan Optimal. Nilai kedua adalah “Inovasi”, diharapkan Kota Madiun aktif mengembangkan ide-ide kreatif dan solutif dalam memecahkan permasalahan pembangunan kota meliputi transportasi, lingkungan, pendidikan, dan layanan publik. Selanjutnya, Nilai ketiga adalah “Berbudaya”, yang berarti Kota Madiun yang memberikan ruang ekspresi seni dan toleransi budaya dengan mengembangkan kekayaan seni, warisan budaya, dan keragaman sosial. Nilai ketiga adalah “Berkelanjutan”, yang berarti Kota Madiun mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.2 dibawah ini, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2025-2045. Kedelapan misi tersebut adalah 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis world class government, 2. mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global, 3. mewujudkan transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif yang berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, 4. Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan trantibumlinmas masyarakat, 5. mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan, 6. Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas, 7. mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan, dan 8. mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata.



Gambar 4. 2 Misi dalam RPJPD Kota Madiun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka pencapaian misi diatas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJPD 2025-2045 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJPD 2025-2045

Tujuan dan Sasaran		
1. Kota Madiun Menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi		
T1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
		IS1.2. Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun
		IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. *Livable city*
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Daya Saing SDM dan Peningkatan Produktivitas Daerah		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
		IT3.2. Indeks Pembangunan Gender
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah
		IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Peningkatan Pendapatan Perkapita		
T4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunen Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
5. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang		
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indek Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks rasa aman

Lebih lanjut Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran ini disusun sebagai landasan operasional dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun tujuan dan sasaran tersebut dirancang untuk mendukung keberlanjutan capaian pembangunan periode sebelumnya, sekaligus menyiapkan fondasi menuju perencanaan jangka panjang yang lebih terarah dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Berikut adalah rincian tujuan dan sasaran Kota Madiun berdasarkan RPD Tahun 2025-2026:

Tabel 4. 2 Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,92	5,80
		IT.2	Indeks Gini	Indeks	0,435	0,385	0,433
S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	IS1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,59	5,65	4,90
		IS1.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	7,6	6.97	6,97
S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	IS.2	Indeks Ketentraman	Indeks	84,23	83	84,23
S3	Menurunnya Kemiskinan	IS.3	Tingkat Kemiskinan	%	4,38	4,55	4,30
T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,51	84,10	84,51
		IT2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,26	94,60	95,26
S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IS.4	rata-rata lama Sekolah	Indeks	12,11	11,83	12,20
S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	IS.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	3,41	3,10	3,41
S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	IS.6	Indeks Kerukunan	Indeks	78,04	78,20	78,20
S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	IS.7	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100%	100%	100%
S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IS.8.1	Usia Harapan Hidup	Indeks	75,67	73,70	75,67
		IS.8.2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	11,8	10,8	11,2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	IS.9.1	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	101,4	100%	100%
		IS.9.2	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	110,4	100%	100%
S10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IS.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,21	57,94	66,23
S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	IS.11	Pengeluaran Per Kapita	Juta	17,518	17,720	17,720
S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S.12	Pendapatan Per Kapita	Juta	61,66	62,99	62,99
S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	S.13	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1
S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	S.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,56	0,40-0,60	0,56
T.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	IT.3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(A) 91,95	75,01	91,95
S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	IS.15.1	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	Skor	81,03	80,20	81,03
		IS.15.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	sedang (2,98*)	sedang (3,05)	sedang (3,05)
		IS.15.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP
S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.16	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	1	1	1
S17	Meningkatnya Kualitas E-Government	IS.17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,57	3	4,57
S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	IS.18	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67,09	54,30	67,09
S19	Penyelenggaraan Smart City	IS.19	Persentase Program Smart City yang tercapai	%	100	98,81	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun rincian tujuan dan sasaran Kota Madiun berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029:

Tabel 4. 3 Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6
MISI 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing global					
T1	TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Indeks	84,51	84,51
		IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	95,26	95,26
S1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	*Rata-rata Lama Sekolah*	Tahun	12,11	12,20
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,54
S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	*Usia Harapan Hidup*	Tahun	75,67	75,67
S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	*Indeks Ketimpangan Gender*	Indeks	0,093	0,090
S4	Menurunnya Kemiskinan	*Angka Kemiskinan*	%	4,38	4,30
S5	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	*Pengeluaran Per Kapita*	Ribu Rupiah	17.518	17.720
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan					
T2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja	*Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,73	5,80
S6	Meningkatnya Daya Saing daerah khususnya Sektor Unggulan	*Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)*	%	5,4	5,4
		PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59
		Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,16
		PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46
		Indek Daya Saing Daerah	Indeks	4,16	4,16
S7	Meningkatnya stabilitas perekonomian	*Tingkat Inflasi*	%	1,31	3±1
S8	Peningkatan Kualitas Investasi	*ICOR*	Indeks	3,75	3,70
S9	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	*Indeks Gini*	Indeks	0,435	0,433

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
S10	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	*Produktifitas Tenaga Kerja*	Rupiah (juta)	112.88	113,00
		TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	4,3	4,20
MISI 3: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan					
T2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja	*Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,73	5,80
S13	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	*Indeks Infrastruktur*	Indeks	98,62	98,62
S14	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Indeks	62,21	66,23
S15	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	*Indeks Resiko Bencana*	Indeks	91,61	90
MISI 4: Meningkatkan harmoni Sosial, Keamanan, dan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat					
T2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja	*Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,73	5,80
S11	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	*Indeks Rasa Aman*	Indeks	84,16	84
		Indeks Ketenteraman	Indeks	84,23	84,23
MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik					
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government	*Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	91,95	91,95
S16	Peningkatan Akuntabilitas KInerja dan Keuangan	*Opini BPK*	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Skor	81,03	81,03
S17	Meningkatnya Kerjasama Internasional	*Jumlah Sister city*	Jumlah Kerjasama	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
MISI 6: meningkatkan integritas Pemerintahan melalui Perilaku Antri Korupsi dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional					
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis *Smart dan World Class Government*	*Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	91,95	91,95
S18	Pemerintahan Bersih Korupsi	*Nilai Survei Penilaian Integritas*	Nilai	77,07	77,07
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Skor	96	96
		Jumlah Unit Kerja yang memiliki predikat WBK	Unit Kerja	1	1
S19	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	*Indeks Kualitas Kebijakan*	Indeks	68,67	68,67
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	91,02	91,02
S20	Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	Indeks	88,74	88,74
		Indeks SPBE	Indeks	4,57	4,57
MISI 7: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan					
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis *Smart dan World Class Government*	*Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	91,95	91,95
S21	Peningkatan Inovasi Daerah	*Indeks Inovasi Daerah*	Indeks	67,09	67,09
MISI 8: Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas					
T2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja	*Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,73	5,80
S12	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	*Indeks Kerukunan*	Indeks	78,04	78,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan acuan dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah pelaksanaan pembangunan Kota Madiun. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis pembangunan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, pokok pikiran DPRD, dan arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada isu strategis Kota Madiun pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan Kota Madiun turut mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur guna menciptakan keselarasan kebijakan pada level pemerintahan yang berbeda. Prioritas pembangunan Kota Madiun diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun tahun 2025 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPD tahun 2025-2026. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3	4
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Program Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan ekonomi digital masyarakat	
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Peningkatan kelembagaan koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
		Manajemen dan rekayasa transportasi	
		Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pembangunan Jasa Konstruksi
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan	Peningkatan kemanana dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak
8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Perlindungan Khusus Anak
9	Menurunkan tingkat kemiskinan	Pengurangan Pengangguran	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Penempatan Tenaga Kerja
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini	
11	Meningkatkan pendidikan inklusif	Pengembangan layanan pendidikan inklusif	
12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan	Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Peningkatan Minat dan Bakat	Program Pengembangan Kurikulum
15	Meningkatkan kualitas pengajar	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	
17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	Program Pemberdayaan Sosial
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
		Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan
21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Program Penyelanggaraan Penataan Ruang
		Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang	
		optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat	Program Pengembangan UMKM
		Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	
23	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Program Hubungan Industrial
24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar	Peningkatan kemudahan distribusi barang	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW	Program Rehabilitasi Sosial
		Penguatan program pengentasan kemiskinan	
		Peningkatan jejaring sosial	Program Penanganan Bencana
		Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	
			Program Kawasan Permukiman
26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Peningkatan kemandirian fiskal daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Penerapan layanan publik berbasis sistem informasi dan teknologi *(e-government)* terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
28	Meningkatkan kualitas implementasi *e-Government*	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government*	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM		
31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui *sister city*	Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
32	Meningkatkan akses dan implementasi *smart city*		

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.2 diatas, telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme reses masa sidang maupun kunjungan kerja. Hasil dari reses dan kunjungan kerja tersebut dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung prioritas pembangunan yang masuk dalam aplikasi SIPD sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4. 5 Usulan Pokok Pikiran DPRD yang Masuk dalam Aplikasi SIPD

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
1	2	3	4	5
1	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Kondisi saluran di Jalan Tawang Bhakti ini sudah rusak sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila terjadi hujan, air seringkali menggenang sehingga menyebabkan terjadinya banjir di jalan karena saluran tidak dapat menampung debit air dengan baik.	Jalan Tawang Bhakti, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perbaikan Saluran Air atau Selokan yang ada di Jalan Flores sisi Utara (depan Makam Cangkring) ini merupakan usulan perbaikan lanjutan mengingat saluran air atau selokan di Jalan Flores sisi Selatan sudah diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar serapan air di sekitar Jalan Flores dapat maksimal dan tentunya untuk mencegah terjadinya banjir.	Jalan Flores sisi Utara (depan Makam Cangkring), Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
3	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Saluran air atau selokan di sepanjang Jalan Sarean ini sudah cukup lama mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut menyebabkan sering terjadinya genangan air / banjir disekitar Jalan Sarean bilamana hujan deras. Adapun ukuran saluran ini adalah sebagai berikut, panjang = ± 400 - 500 m; lebar = 0,40 m; tinggi = 0,40 m dengan hitungan volumenya adalah 80 m^3. Mohon adanya perbaikan saluran Jalan Sarean tersebut mengingat usulan ini sudah diajukan sejak reses Tahun 2021.	Sepanjang Jalan Sarean sisi Utara dari Gapura Ujung Barat s/d Ujung Timur belok ke Selatan, meliputi wilayah RT 15/RW 05, RT 16/RW 05 dan RT 21/RW 07, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Jambu Kembar sudah banyak yang rusak dan berlubang sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Ukuran dari jalan yang rusak tersebut yaitu panjang = 200 m dan lebar = 3 m. Mohon adanya pengaspalan hotmix untuk Jalan Jambu Kembar tersebut mengingat usulan ini sudah diajukan sejak tahun 2022 tapi sampai saat ini belum terealisasi.	Jalan Jambu Kembar, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Kondisi saluran drainase di Jalan Nangka sudah mengalami kerusakan sejak lama. Air tidak dapat mengalir dengan lancar bahkan sebagian kondisinya sudah rusak dan ambrol. Mohon adanya perbaikan saluran drainase di Jalan Nangka sisi kanan maupun kiri.	Jalan Nangka (sisi kanan maupun kiri), RT 31 / RW X, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	belum adanya lampu jalan	Lingkungan RT 13, Jl. Sawo Kel Kejuro, Kota Madiun	-
7	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan jalan	Lingkungan RT 13, Jalan Sawo Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Pengajuan Alat Kesenian	Penggantian Dadak Merak Reog yang sudah rusak kelompok seni reog Blandotan Macan	Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
9	Pengajuan Alat Kesenian	Penggantian Dadak Merak Reog yang sudah rusak kelompok seni Reog Blandotan Macan	Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	-
10	Pavingisasi	Pavingisasi perempatan Jalan Ciliwung Gg IV selokan dipindah di tengah	Jalan Ciliwung Gg IV Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
11	Pavingisasi	Pavingisasi Jalan Tuntang Kelurahan Pandean RT 37	Jalan Tuntang Kelurahan Pandean RT 37 Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas	Lowongan kerja untuk disabilitas	Area Madiun Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan jalan	JL. Sultan Trenggono Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Pengadaan Sarpras Olahraga	Perbaikan ring basket dan pengecetan ring lapangan basket jalan Dwi Jaya Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun senilai Rp 3.000.000	Jl. Dwi Jaya Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
15	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perbaikan saluran pertanian Punden Kelun sepanjang 300m sebesar Rp 300.000.000	Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan di Jl. Sultan Trenggono	Jl. Sultan Trenggono Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Normalisasi Sungai atau Saluran	Jalan Guna Wijaya RT 27 depan sinilah sepanjang kurang lebih 210 meter kanan kiri pembuatan saluran yg lama terlalu kecil	Jl. Guna Wijaya RT 27 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Normalisasi Sungai atau Saluran	Saluran lingkungan di Jalan Sawo RT 14	Jl. Sawo Kel Kejuron RT 14 Kec Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Pengadaan Sarpras Olahraga	Bantuan perlengkapan voly	Jl. Sultan Trenggono RW 04, Kota Madiun	-
20	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Pengadaan rombong jualan untuk bpk Slamet Saputro	Jl. Sultan Trenggono RT/RW 17/04 Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
21	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan Pajang bagian utara	Jl. Pajang bagian utara Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	lampu penerangan jalan di Jalan Pajang sebelah utara	Jl. Pajang sebelah utara Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Bantuan Bibit Tanaman Pohon Buah	Penebangan pohon mangga di depan rumah	Jl. Gajahmada 66 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kota Madiun	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
24	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Permasalahan yang sebenarnya adalah permohonan pembangunan toilet / kamar mandi di Makam Cangkring. Namun, karena pilihan usulan tersebut tidak ada dalam kamus, sehingga sesuai arahan dari Sekretariat DPRD agar dimasukkan ke usulan yang sekiranya mirip atau hampir sama. Adapun permohonan pembangunan toilet ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah peziarah di Makam Cangkring, bahkan datang dari luar kota sehingga seringkali mereka membutuhkan toilet pada saat sedang ziarah. Ukuran toilet 2 m x 2 m	Makam Cangkring, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Perbaikan Jalan	Jalan sudah rusak sehingga tidak nyaman bagi pengguna jalan dikawatirkan nantinya mengakibatkan pengguna jalan jatuh	Perum Bumi Mas 1 RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Z dan Blok Y, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Normalisasi Sungai atau Saluran	Rehab dan normalisasi saluran perbatasan Perumnas I dan Perum Bumi Mas I RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Y	Perumnas I dan Perum Bumi Mas I RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Y, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Lanjutan renovasi saluran di Jalan Sriwibowo RT/RW 07/03 panjang -+ 100 meter	Jl. Sriwibowo RT/RW 07/03, Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Renovasi saluran air di jalan Srikaloko RT/RW 08/03 panjang -+ 250 meter	Jl. Srikaloko RT/RW 08/03 Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Perbaikan Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno mulai banyak berlubang dan terjal. Oleh karena itu mohon dapatnya untuk dilakukan pengecoran jalan tersebut. Adapun panjang jalan 120 m dan lebarnya 3 m.	Jalan Puspowarno, RT 08/ RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Perbaikan Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno tidak rata dan cukup terjal sehingga mengganggu akses masyarakat yang melewatinya. Oleh karena itu mohon dapatnya untuk dilakukan pengecoran jalan tersebut. Adapun panjang jalan 100 m serta lebarnya 3 m.	Jalan Puspowarno, RT 08/RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Mohon dapatnya dilakukan Pembuatan Saluran Tengah dengan panjang jalan 114,5 m dan lebar jalan 3 m	Jalan Campursari Gg. IV, RT 17/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Perbaikan Jalan	Kondisi jalan di Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III sudah rusak dan terjal. Mohon dapatnya dilakukan pengecoran jalan atau pengaspalan jalan pada lokasi tersebut. Panjang jalan 557 m dan lebar 3 m	alan Maskumambang Gg. I dan Gg. III, RT 07/ RW 03 dan RT 09 / RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
33	Perbaikan Jalan	Peningkatan jalan atau pengaspalan jalan dengan ukuran panjang 50 m dan lebar 5 m	Jalan Campursari Utara RT 13/ RW 05 dan RT 15/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Perbaikan Jalan	Kondisi jalan saat ini tidak rata dan perlu peningkatan atau pengaspalan. Adapun ukuran jalan yaitu panjang 90 m dan lebar 2,5 m.	Jalan Gambirsawit Selatan, RT 18/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Pavingisasi	Kondisi makam Klumpit saat ini belum terpaving. Mohon adanya pavingisasi untuk Makam Klumpit, Sogaten	Makam Klumpit, Jalan Puspowarno, RT 11/ RW 04, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
36	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Daerah	Memperbaiki lapangan voli RTH Nusa Penida untuk taman di sisi barat dan timur dirubah menjadi tribun penonton	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Pembuatan Saluran Tengah dengan panjang 82 m dan lebar bahu jalan 3 m	Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan akses menuju RTH di Jalan Nusa Penida	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan lapangan RTH di Jalan Nusa Penida untuk dibenahi biar semakin terang	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Pavingisasi	Pavingisasi jalan dengan panjan 82 m dan lebar bahu jalan 3 m	alan Gambir Sawit Selatan Gg. III RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41	Pavingisasi	Kondisi paving di Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV sudah banyak yang berubah warna dan berlumut. Mohon dapatnya untuk dilakukan pavingisasi di lokasi tersebut	Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV, RT 14/ RW 05, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
42	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Kondisi Jalan Gambir Sawit Selatan ini belum memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai. Mohon dapatnya untuk penambahan PJU di lokasi tersebut	Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III, RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
43	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno di sekitar area Makam Klumpit belum tercover PJU dengan maksimal. Mohon dapatnya untuk penambahan PJU pada lokasi tersebut	Jalan Puspowarno, RT 11/ RW 04, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Gambir Sawit Selatan agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Gambir Sawit Selatan Gang III, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	-
45	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Campursari Utara agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Campursari Utara, RT 13 dan RT 17, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
46	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	enambahan PJU untuk Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perbaikan saluran air di Gg 2 Jl. Slamet Riyadi No 8b karena setelah di paving jadi lebih tinggi jalan daripada saluran air	Gg 2 Jl. Slamet Riyadi No. 8b RT 21 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH atas nama Penis (blandar patah penghuni janda)	Jl. Mastrip 26B RT/RW 06/02 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
50	Perbaikan Jalan	Kondisi Aspal Jalan tersebut sudah banyak yang mengelupas dan rusak, sehingga memerlukan pengaspalan ulang di jalan tersebut, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Jl. Ganed : 100 Meter, Jl. Foker : 120 Meter, Jl. Elektra : 150 Meter, Jl. Dakota : 150 Meter, Jl. Catalina : 150 Meter, Jl. Albatros : 215 Meter,	Perumahan Bumi Antariksa RW. 09-10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo., Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Pemasangan Speed Bump / Speed Hump	Pengadaan pemasangan Speed Bump / Speed Hump di jalan Trijaya di timur rumah bu Karti	Jl. Trijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
52	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik akibat ukurannya yang tidak memadai. Selain itu, kerusakan juga disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan berbagai masalah kesehatan lainnya.	Jl. Kantil Winongo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Bantuan tenda untuk gali makam, 4x6 m	Makam Pagu Wareng , Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54	Perbaikan Jalan	Proses penempatan kabel jalan/kabel tanam dalam proyek tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga sering menyebabkan kecelakaan.	Pagu, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Pemasangan Speed Bump / Speed Hump	Pengadaan Speed Bump / Speed Hump karena motor kalau lewat kencang-kencang	Jl. Pendowo Gg Repelita I, Kota Madiun	Dinas Perhubungan
56	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan Pendowo untuk diperbarui dan kalau hujan jalan Pendowo yang selatan depan puskesmas banjir	Jl. Pendowo Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Sarana dan Prasarana Posyandu	Perbaikan teras untuk Posyandu IV	Jl. Nusa Tenggara No. 20 RT/RW 16/04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58	Normalisasi Sungai atau Saluran	Perlunya Pembangunan Plengsengan/Tanggul agar luapan air jika cuaca ekstrim tidak terjadi banjir masuk ke rumah warga	Perum Bumi Winongo Indah 2 RT 34 RW 07 Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
59	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Daerah	Keadaan tembok sudah banyak yang retak karena usia bangunan sudah lama di gedung pertemuan RT/RW 05/02	Jl. Thamrin Gg Perjuangan I No. 110B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
60	Pembangunan RTH	Pembangunan RTH untuk tempat ramah lansia dan anak	Jl. Karya Wijaya RT/RW 28/06 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
61	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perbaikan saluran air di jalan Bhakti Wijaya belakang pinggir sawah -+ 300 meter	Jl. Bhakti Wijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perbaikan saluran air di Jalan Satriya Wijaya -+ 300 meter	Jl. Satriya Wijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
63	Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong	Ada beberapa kerusakan dari saluran air RT 22 RW 5 Perumahan Dumai	Perumahan Dumai RT 22 RW 5, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	Pavingisasi	Pavingisasi	Jl. Thamrin selatan Gg Sarean, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
65	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH atas nama Bapak Yuli karena rumahnya sudah tidak layak huni	Gg Kantil RT/RW 02/01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
66	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Pengadaan gerobak jualan untuk Ibu Rahayu dipergunakan untuk berjualan di lapangan RTH.	Jl. Thamrin Gg. IX/12B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
67	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Koperasi Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak, berlubang serta tidak rata. Adapun kondisi jalan yang berlubang tersebut pernah diaspal tetapi tidak menyeluruh, dan hanya ditambal / diaspal bagian yang lubangnya saja. Mohon adanya perhatian pengaspalan jalan secara menyeluruh di lokasi tersebut.	Jalan Koperasi, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Perbaikan Jalan	Kondisi akses jalan masuk Makam Sedoro sudah banyak yang rusak dan perlu diaspal kembali. Mohon adanya pengaspalan jalan pada lokasi tersebut	Makam Sedoro, Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Genen Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak, berlubang serta tidak rata. Mohon adanya pengaspalan jalan di lokasi tersebut.	Jalan Genen, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Banjarwaru Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak dan berlubang. Mohon adanya pengaspalan jalan di lokasi tersebut.	Jalan Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Pengadaan Sarpras Olahraga	Bantuan Matras untuk kegiatan olahraga para pemuda atau masyarakat di lingkungan Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
72	Pengajuan Alat Kesenian	Mohon bantuan seperangkat alat Gamelan Reog sebagai sarana untuk melestarikan budaya atau kesenian tradisional	Jalan Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
73	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Mohon adanya pembangunan saluran lanjutan di Jalan Sedoro Gg. I agar lokasi tersebut tidak banjir saat hujan	Jalan Sedoro Gg. I, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Mohon adanya pengadaan saluran di Jalan Terate Gg. I agar lokasi tersebut tidak banjir jika musim penghujan	Jalan Terate Gg. I, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
75	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Pengadaan tempat untuk kemandikan jenazah dan peralatan	Jl. Jl. Mastrip No. 26B RT/RW 06/02 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
76	Sarana dan Prasarana Posyandu	Perbaikan pos kamling gang Kantil RT/RW 02/01	Gg Kantil RT/RW 02/01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
77	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH rumah Bapak Aan Kurniawan teras mau amblas	Jl. Trimulyo No. 41 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
78	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu di Sepanjang jalan tanjung manis dan gang satu membutuhkan perbaikan dan penambahan tiang	jalan tanjung manis kota madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
79	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Makam Nitinegoro Temboknya roboh	Jalan Makam Nitinegoro Kelurahan Demangan, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
80	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Perlu pembangunan saluran	Jalan Walet, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	Perbaikan Jalan	Belum ada zebra croos menuju masjid gading	masjid gading, Kota Madiun	Dinas Perhubungan
82	Pemeliharaan Pasar	Menyesuaikan	Pasar Pancasila PAngongangan, Kota Madiun	Dinas Perdagangan
83	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Akses bantuan untuk anak sekolah mohon agar dipermudah	Anak Sekolah sekota madiun, Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
84	Pelatihan Pengembangan UMKM	Pelatihan pelapak Sriti dan pancasoka	Lapak Sriti dan Pancasoka, Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
85	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN MASJID	RT 20,21,22 RW 5 KANIGORO, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	Perbaikan Jalan	pengaspalan jalan surya bakti mojorejo karena sudah rusak	jalan surya bakti kelurahan mojorejo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	Perbaikan Jalan	Jalan sudah rusak perlu pengaspalan di jalan marga bakti	jalan marga bhakti rt 36 rw 09, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan salak barat 4, 5,6 dan jalan salak barat karena sudah bolong bolong	jalan salak barat 4, 5,6 dan jalan salak barat, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	Pelatihan Pengembangan UMKM	Paguyuban Pedagang Lapangan Taman (Ciliwung) Meminta Agar Lapak Yang Sekarang Tidak Dipindah namun Digeser, Dirapikan, Diperbaiki dan Diperbarui berbarengan dengan konsep yang sama	Lapak Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
90	Pemeliharaan RTH atau Taman	Pembenahan dan Perbaikan area mainan dan RTH sebelah selatan Lapangan Ciliwung	Area mainan dan RTH sebelah selatan Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
91	Pembangunan RTH	Penambahan pompa sibel untuk pengairan lapangan taman	Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman , Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
92	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan Titik Lampu Di Jalan Sarean Utamanya Yang Sambung Ke Jati Jajar Karena Gelap	Jalan Sarean Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
93	Perbaikan Jalan	Pelebaran jalan pesanggrahan 5 karena sudah semakin ramai kendaraan lalu lalang, bisa menutup selokan di sisi barat dengan *box culvert*	Jalan Pesanggrahan 5 RW XI Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94	Pembangunan Saluran Air / Gorong-Gorong	Pembuatan saluran air	Jl. Kapten Tendean GG. Kijang, Demangan, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	Pavingisasi	Pavingisasi Area Gg Kijang Demangan	Jl. Kapten Tendean GG. Kijang, Demangan, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
96	Pengadaan Rambu - Rambu Jalan	Pemasangan cermin cembung	Jalan Pucang Jaya, Kota Madiun	Dinas Perhubungan
97	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Pembangunan saluran air jl. Pucang anom	jl. Pucang anom , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Selokan di gang.1 jl. Jatikusumo, demangan	Selokan di gang.1 jl. Jatikusumo, demangan , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
99	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Selokan + Tutup	RT. 25 Jl. Jati Kusumo , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Tutup selokan	Jl. Jatisiwur , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	PJU di Jl. Jati Siwur dan Jl. Jati Kusumo	Jl. Jati Siwur dan Jl. Jati Kusumo, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
102	Normalisasi Sungai atau Saluran	Pendalaman selokan/parit sepanjang jalan Budo manis baik yg ada disebelah barat jalan maupun di timur jalan.	Budo Manis, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Normalisasi Sungai atau Saluran	Saluran air macet perlu normalisasi	jalan pucang anom dan gang rukun pucang anom manisrejo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	Pembangunan / Perbaikan Trotoar	Trotoarisasi jalan protokal Kota Madiun sepanjang jalan Tanjung Raya antara G.J PLN s/d Pertigaan Pasar Kojop	Kanan kiri jalan Tanjung Raya , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	Normalisasi Sungai atau Saluran	Normalisasi Kali Kunto yang melintas di sepanjang area taman, pandean dan kejuron karena menjadi punjer banjir dan genangan di sekitar salak, pesanggrahan dan sekitarnya	kali kunto di sepanjang kelurahan taman, pandean dan kejuron, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
106	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	saluran sepanjang jalan salak raya utara dan selatan perlu normalisasi karena sering ada genangan	Salak Raya Taman, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	Bantuan Bibit Ikan Budidaya	Untuk instalasi bioflok baru di P2L Taman Lestari	P2L Taman Lestari Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
108	Pembangunan RTH	lunturnya budaya lokal (Bersih desa) sekitaran lokasi punden tidak terurus kotor sehingga menjadikan aset terlantar dan Bpk. Walikota madiun Dr. Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd di waktu kunjungan berjanji untuk membangun sendang tersebut sendang tersebut	Jl. Tanjung Manis gg 9 kelurahan manisrejo kecamatan taman kota madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
109	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah sudah tidak layak untuk hidup dan tidak sehat penghuni 2 orang lansia perempuan yang tidak punya penghasilan tetap	Jl. Tanjung manis gg. 2 kelurahan manirejo kecamatan taman kota madiun RT. 09 Rw. 03 an. Ibu Sulam, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
110	Bantuan Bibit Ikan Budidaya	Permohonan bibit ikan nila untuk pengembangan usaha di dalam kelompok budidaya ikan agar bisa mencukuppi kebutuhan pasar ikan nila di kota madiun	Perumahan manisrejo 1 kelurahan manisrejo kecamatan taman kota madiun kelompok budidaya ikan TIRTO MIGUNO, Kota Madiun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
111	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik akibat ukurannya yang tidak memadai. Selain itu, kerusakan juga disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan berbagai masalah kesehatan lainnya.	Jl. Semangka, Taman, Kota Madiun , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini tidak berfungsi dengan baik karena ukurannya yang kecil dan tidak mampu menampung debit air yang besar. Selain itu, saluran air juga tersumbat oleh sampah, sehingga aliran air menjadi terhambat.	Jl. Cempedak, Kel. Taman, Kec. Taman , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik dan fungsional. Kerusakan fisik disebabkan oleh ukurannya yang tidak memadai, sehingga saluran air tidak mampu menampung debit air yang besar. Kerusakan fungsional disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air.	Jl. Mundu Kel. Taman, Kec. Taman , Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
114	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran sebagian sudah ambrol sehingga air menggenang sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dikarenakan air berasal dari limbah rumah tangga berdampak dari bau tersebut pada kententraman bermasyarakat. dan di waktu hujan air meluap dari saluran dan menggenang di jalan	Jl. Tanjungmanis Rt. 08 RW. 03 Kelurahan Manisrejo kec, taman kota madiun (Timur Jalan), Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	Pengajuan Beasiswa Pendidikan	Anak dari keluarga tidak mampu beberapa kali pengajuan tidak mendapatkan beasiswa	JL. Tanjung manis no 39. Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Manisrejo Kec, Taman KOta madiun, Kota Madiun	Dinas Pendidikan
116	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Tidak saluran air di dalam lingkungan RT. 16 & 17 RW. 05 Kel. Banjarejo	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Belum ada fasilitas umum berupa saluran air sehingga mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekitar, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
117	Sarana dan Prasarana Posyandu	Pembangunan Posyandu lansia dan Posyandu balita	Jl. Thamrin Gg Perjuangan 1 No 110B RT/RW 05/02, Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
118	Sarana dan Prasarana Posyandu	Pembangunan Posyandu Lansia di RW 01 Klegen	Jl. Thamrin RW 01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
119	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Atap rumahnya sudah patah di rumah Abah Kosin	Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
120	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Plengsengan Ambrol sehingga saluran air terhambat oleh matrial runtuhan plengsengan tersebut saluran tersebut adalah salah satu saluran pembuangan dari perumahan manirejo 2, ketika hukan lebat akan terjadi banjir ketiak saluran tersebut tersumbat	Jl. Grahamanis III RT. 45 RW. 10 Kel. Manirejo Kec Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Sebagian belum adanya saluran air dan Adanya musim hujan yang hampir turun tiap hari awal tahun 2024 Sehingga saluran air (selokan) tidak dapat menampung jumlah air yang curahnya dengan volumenya sangat besar, sehingga air lari kejalan dan mencari arusnya sendiri dan mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekitar	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
122	Pavingisasi	Pemasangan Paving 160x2,5 m di Jl. Sriwibowo Gg. Sedoro Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun	Jl. Sriwibowo Gg. Sedoro Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
123	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Pemasangan lampu Penerangan di RT. 16 RW. 04 Kel. Klegen lokasi di Jl. Nusatenggara Gg. Masjid Nuzulul Jariyah RT. 16. RW.04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo	lokasi 1. Masuk gang masjid nuzulul jariyah. Di pertigaam gang 1 titik, lokasi 2. Ujung gang nuzulul jariyah 1 titik, lokasi 3. Depan masjid Nuzulul jariyah 1 titik, lokasi 4. Tengah2 gang ke arah masjid 1 titik, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
124	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Ketika hujan di jalan banjir sehingga air masuk di dalam halaman rumah warga	JL. srilangka RT. 09 RW. 02 Kelurahan kanigoro kecamatan kartoharjo kota madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak Berlubang Sering Terjadi Kecelakaan Dikarenakan Menghindari Jalan Yang Berlubang	Jl. Suryomanis Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiuin Rt. 28 & 29 Rw. 08, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	Jambanisasi	Jamban Kurang Sehat Sehingga Bakteri Dan Kuman Terkontaminasi Dengan Penghuni Rumah	Jl. Tanjung Manis Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
127	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Sebagian belum adanya saluran air dan Adanya musim hujan yang hampir turun tiap hari awal tahun 2024 Sehingga saluran air (selokan) tidak dapat menampung jumlah air yang curahnya dengan volumenya sangat besar, sehingga air lari kejalan dan mencari arusnya sendiri dan mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekita	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.2 diatas, penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis, sehingga pada RKPD Perubahan Tahun 2025 ini untuk prioritas pembangunan Kota Tahun 2025 masih sesuai dengan RKPD Murni Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

Berikut adalah keterkaitan isu strategis nasional, provinsi dan Kota Madiun Tahun 2025.



Gambar 4. 3 Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 4.3 diatas, secara detail berikut dijabarkan lebih lanjut isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2025, yaitu:

Tabel 4. 6 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	2
Isu Strategis 1: Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi di Jawa Timur tahun 2021, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS
	Masih rendahnya konstribusi BUMD
	Masih terbatasnya kontribusi PAD
	Infrastruktur pendukung investasi belum memadai
	Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun
	Masih terbtasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun
	Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun
	Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
	Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun
	Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal
	Pengangguran yang meningkat.
Isu Strategis 2: Peningkatan kapabilitas, kualitas, dan daya saing sumberdaya manusia	Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khusunya gedung dan bangunan)
	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi
	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Akses Internet yang kurang memadai
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki komptensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietesien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya menajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
	Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan
	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
	Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
	Pelakaksanaan pemilu 2024 harus bias dinatisipasi secara baik
Isi Strategis 4: Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan berkelanjutan	Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsutasi evaluasi dan penetapan RTRW kota
	Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang
	Kurang optimalnya koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
	Lemahnya koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang
	banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan
	Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar dibeberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus
	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai
	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kepenghunian dan backlog kepemilikan.
	Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
	Mash terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.4 diatas, sesuai dengan berbagai telaahan RPD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
1	2	3	4
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital
Isu Strategis 2: Peningkatan kapabilitas, kualitas, dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Isi Strategis 4: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Merata	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa tranportasi	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 4. 4 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.4 diatas, empat prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2025 didasari oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital

   Pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja namun harus mampu memberikan dampak pada pemerataan dan akses yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus bisa mencapai kesejahteraan bersama dan inklusif. Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir termasuk kedalam daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi inklusif tertinggi di Jawa Timur.

   Oleh karena itu, peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dapat terus didorong melalui pengembangan sektor unggulan di Kota Madiun, ekonomi kreatif dan pariwisata kota, serta pengembangan ekonomi berbasis digital. Pemerintah kota Madiun berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi inklusif melalui, yaitu:

   1. Penguatan Pengelolaan lapak;
   2. Digitalisasi transaksi UMKM;
   3. Pelatihan pemasaran dan transaksi digital UMKM;
   4. Percepatan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
   5. Penyiapan Pasar hasil produksi UMKM melalui Lapak Kelurahan;
   6. Kebijakan penggunaan produksi lokal hasil UMKM;
   7. Subsidi komponen upah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi (Asuransi ketenagakerjaan dan jaminan Hari Tua); dan
   8. Pemberdayaan Masyarakat melalui proyek padat karya dan swakelola dengan pokmas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Madiun termasuk kedalam salah satu daerah dengan peringkat tertinggi di Jawa Timur yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemajuan kondisi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia menjadi modal penting dalam mencapai kesejahteraan sebuah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan pada aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial Kota Madiun di arahkan pada:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan IPM Kota Madiun yang terdiri dari:
   - Akselerasi pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting;
   - Peningkatan Angka Harapan Hidup (penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, penurunan kematian akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular);
   - Peningkatan Harapan Lama Sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
2. Percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui Bantuan pelatihan dan peralatan produksi bagi UMKM;
3. Percepatan penurunan kemiskinan melalui perbaikan database kemiskinan dan bantuan sosial terintegrasi.

3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan perkotaan. Konsep *Smart City* yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Pembangunan berbasis *Smart City* akan bermuara pada pencapaian pelayanan publik yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berbasis *Smart City* harus didukung oleh reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam memperkuat penerapan reformasi birokrasi, beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital/IT;
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN; dan
3. Akselerasi pembentukan Zona Integritas pada pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Ketersedian infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mencapaia keberhasilan pembangunan. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya, optimalisasi SDM dan SDA untuk menjaga *bio-diverisity*, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi teknologi.

Penguatan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan diarahkan pada:

1. Penyelesaian infrastruktur prioritas; dan
2. Peningkataan pembangunan daerah berwawasan Kesehatan lingkungan.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2025

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	2	3
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Prioritas Pembangunan 4: Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkedilan	Prioritas Pembangunan 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 8: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastrukur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Prioritas Pembangunan 3: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 8: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapppeda Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.6 diatas, berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkroniasasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah "Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat". Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4. 5 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2021-2025
Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2025 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum, sebagaimana disajikan rincian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7
S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,59	5,65	4,90	Prioritas 1
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,6	6,97	6,97	Prioritas 1
S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	Indeks Ketentraman	84,23	83	84,23	Prioritas 3 Dan Prioritas 4
S3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,38	4,55	4,30	Prioritas 2
S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekola)	12,11	11,83	12,20	Prioritas 2
S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	3,41	3,10	3,41	Prioritas 2
S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	Indeks Kerukunan	78,04	78,20	78,20	Prioritas 2
S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	100%	100%	100%	Prioritas 2
S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,67	73,70	75,67	Prioritas 2
		Menurunnya Prevalensi Stunting	11,8	10,8	11,2	
S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan	101,4	100%	100%	Prioritas 2
		Persentase Angka Kecukupan Protein	110,4	100%	100%	
S10	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,21	57,94	66,23	Prioritas 4
S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	17,518	17,720	17,720	Prioritas 2
S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	61,66	62,99	62,99	Prioritas 2
S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	Tingkat Inflasi	1,31	3±1	3±1	Prioritas 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,56	0,40-0,60	0,56	Prioritas 2
S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	81,03	80,20	81,03	Prioritas 3
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	sedang (2,98*)	sedang (3,05)	sedang (3,05)	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	
S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	1	1	Prioritas 3
S17	Meningkatnya Kualitas E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,57	3	4,57	Prioritas 3
S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	67,09	54,30	67,09	Prioritas 3
S19	Penyelenggaraan Smart City	Persentase Program Smart City yang tercapai	100	98,81	100	Prioritas 3

berikut disampaikan Prioritas Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan yang menjadi Kewenangan beserta persentase kenaikan dan penurunan pagu per Bidang urusan yang mensuport sasaran pembangunan daerah, disajikan dalam tabel di bawah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 10 Prioritas Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan yang menjadi Kewenangan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET	BIDANG URUSAN	PAGU		TARGET	PAGU	KENAIKAN PAGU	
							2024	RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	P-RKPD 2025	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
1	P1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,92				5,80			
		S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	IS1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,59	5,65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.005.447.782	910.090.782	4,90	1.483.167.794	477.720.012	47,51
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.308.134.750	1.088.279.750		991.971.950	- 316.162.800	-24,17
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	951.974.000	959.561.000		1.417.650.300	465.676.300	48,92
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.697.456.580	7.166.178.580		11.947.777.300	5.250.320.720	78,39
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.470.230.688	6.675.680.688		7.875.390.491	1.405.159.803	21,72
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.546.477.000	1.596.280.000		1.805.646.720	259.169.720	16,76
									KECAMATAN	13.187.051.913	17.265.181.748		17.136.964.877	3.949.912.964	29,95
				IS1.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	7,6	6,97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.163.000.000	1.313.000.000	6,97	1.188.291.025	25.291.025	2,17
										32.329.772.713	36.974.252.548		43.846.860.457	11.517.087.744	35,62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
2	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.2	Indeks Gini	Indeks	0,435	0,385				0,433			
		S3	Menurunnya Kemiskinan	IS.3	Tingkat Kemiskinan	%	4,38	4,55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.901.028.275	20.424.099.182	4,30	19.099.710.516	198.682.241	1,05
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.888.199.548	5.888.199.548		6.223.041.275	334.841.727	5,69
		T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,51	84,1				84,51			
		S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IS.4	rata-rata lama Sekolah	Indeks	12,11	11,83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	237.115.917.744	239.615.917.744	12,20	197.144.237.287	-39.971.680.457	-16,86
		S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	IS.7	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.350.127.000	2.350.127.000	100%	2.418.478.310	68.351.310	2,91
		S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	IS.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	3,41	3,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.361.844.291	8.334.815.858	3,41	8.133.258.997	- 228.585.294	-2,73
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.797.503.863	6.677.503.863		6.902.659.563	2.105.155.700	43,88
		S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IS.8.1	Usia Harapan Hidup	Indeks	75,67	73,7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	194.771.826.557	192.487.253.511	75,76	197.904.937.285	3.133.110.728	1,61
				IS.8.2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	11,8	10,8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.892.802.000	4.971.612.600	11,20	3.400.720.300	- 1.492.081.700	-30,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
		S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	IS.6	Indeks Kerukunan	Indeks	78,04	78,20	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.007.383.644	12.541.876.249	78,20	11.717.637.383	- 1.289.746.261	-9,92
		S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	IS.9.1	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	101,4	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	623.777.634	659.333.000	100%	808.857.300	185.079.666	29,67
				IS.9.2	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	110,4	100%				100%			
		T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	IT2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,26	94,6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.718.038.725	1.800.044.383	95,26	1.743.853.392	25.814.667	1,50
		S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	IS.11	Pengeluaran Per Kapita	Juta	17,518	17,720				17,720			
		S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S.12	Pendapatan Per Kapita	Juta	61,66	62,99				62,99			
		S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	S.13	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1				3±1			
		S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	S.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,56	0,56				0,56			
										492.428.449.281	495.750.782.938		455.497.391.607	- 36.931.057.674	-7,50
3	P3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	T.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	IT.3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	91,95 A	91,95 A				91,95			
		S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	IS.15.1	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	Skor	81,03	80,02	SEKRETARIAT DAERAH	49.772.821.370	55.688.893.148	81,03	50.791.421.604	1.018.600.234	2,05
									PERENCANAAN	9.774.795.484	10.552.073.684		9.682.479.984	- 92.315.500	-0,94
									Rutin Semua OPD	208.320.167.827	235.846.083.117		233.943.399.478	25.623.231.651	12,30
				IS.15.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	sedang	sedang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	680.147.305	680.147.306	3,05	640.147.307	- 39.999.998	-5,88
							2,98*	3,05	KEPEGAWAIAN	9.120.332.220	9.183.324.620		8.520.289.865	- 600.042.355	-6,58
									PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.022.354.448	3.022.354.448		3.709.208.679	686.854.231	22,73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
				IS.15.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	KEUANGAN	12.851.205.520	13.801.205.520	WTP	12.694.370.573	- 156.834.947	-1,22
									KEUANGAN	57.716.498.976	55.646.492.901		65.937.758.944	8.221.259.968	14,24
									SEKRETARIAT DPRD	40.269.472.912	45.396.472.413		36.781.015.400	- 3.488.457.512	-8,66
		S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.16	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	1	1	INSPEKTORAT DAERAH	11.516.899.866	13.010.381.900	1	12.073.488.057	556.588.191	4,83
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.341.175.988	8.746.175.988		8.418.608.000	77.432.012	0,93
		S17	Meningkatnya Kualitas E-Government	IS.17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,57	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.933.965.153	28.615.340.153	4,57	32.706.324.378	7.772.359.225	31,17
		S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	IS.18	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67,09	54,3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.577.768.129	1.771.193.129	67,09	1.449.638.684	- 128.129.445	-8,12
		S19	Penyelenggaraan Smart City	IS.19	Persentase Program Smart City yang tercapai	%	100	98,81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	125.000.000	125.000.000	100	100.523.000	- 24.477.000	-19,58
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	190.000.000	190.000.000		146.975.000	- 43.025.000	-22,64
		T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.580.605.992	20.746.380.992	5,80	19.331.000.777	- 1.249.605.215	-6,07
		S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	IS.2	Indeks Ketentraman	Indeks	84,23	83							
										458.793.211.190	503.021.519.320		496.926.649.731	38.133.438.541	8,31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
4	P4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,92				5,80			
		S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	IS.2	Indeks Ketentraman	Indeks	84,23	83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.465.861.703	4.465.861.703	84,23	4.118.595.603	- 347.266.100	-7,78
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.024.373.000	2.024.373.000		1.634.058.288	- 390.314.712	-19,28
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	154.949.300	154.949.300		154.949.300	0	0,00
		T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,51	84,1				84,51			
				IT2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,26	94,6				95,26			
		S10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IS.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,21	57,94	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.655.173.700	90.752.311.064	66,23	105.420.114.445	13.764.940.745	15,02

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.370.196.521	26.061.793.521		26.392.042.930	21.846.409	0,08
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	885.855.000	885.855.000		708.167.380	- 177.687.620	-20,06
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.740.036.124	26.990.036.124		27.401.389.447	661.353.323	2,47
									PERENCANAAN	391.740.000	401.740.000		332.970.000	- 58.770.000	-15,00
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.431.645.693	13.193.337.693		17.460.178.700	12.028.533.007	221,45
										158.119.831.041	164.930.257.405		183.622.466.093	25.502.635.052	16,13
JUMLAH TOTAL										1.141.671.264.225	1.200.676.812.210		1.179.893.367.888	38.222.103.663	3,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan, nilai pendanaan masing-masing prioritas setelah perubahan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Nilai Perubahan Pendanaan Per Prioritas Pembangunan dari Pagu RKPD 2025

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN RKPD TAHUN 2025	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	% KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
Prioritas 1	Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital	32.329.772.713	43.846.860.457	11.517.087.744
Prioritas 2	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	492.428.449.281	455.497.391.607	- 36.931.057.674
Priotitas 3	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	458.401.471.190	496.593.679.731	38.192.208.541
Prioritas 4	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	158.119.831.041	183.622.466.093	25.502.635.052
TOTAL		1.141.279.524.225,00	1.179.560.397.888,31	38.819.428.663

Total Belanja Perubahan RKPD Tahun 2025 pada masing-masing prioritas keseluruhan diproyeksikan naik sebesar 3,35 persen dari Rp1.141.279.524.225 menjadi Rp1.179.560.397.888,31 Hal ini dikarenakan adanya pengalokasian anggaran pada masing-masing prioritas diantaranya:

1. Prioritas 1, naik 35,62 persen dari pagu anggaran pada prioritas 1 yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran Rp32.329.772.713 menjadi Rp.43.846.860.457,43 atau naik sebesar Rp11.517.087.744,43;
2. Prioritas 2, turun 7,50 persen dari pagu anggaran pada prioritas 2 yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran Rp492.428.449.281 menjadi Rp455.497.391.607,31 atau turun sebesar Rp36.931.057.673,69;
3. Prioritas 3, naik 8,33 persen dari pagu anggaran pada prioritas 3 yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran Rp458.401.471.190 menjadi Rp496.593.679.730,52 atau naik sebesar Rp38.192.208.540,52; dan
4. Prioritas 4, naik 16,13 persen dari pagu anggaran pada prioritas 4 yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran Rp.158.119.831.041,00 menjadi Rp183.622.466.093,05 atau naik sebesar Rp25.502.635.052,05.

Proporsi pendanaan diprioritaskan yang pertama pada prioritas (P3), Prioritas ini mengalami penambahan pendanaan sebesar Rp38.192.208.540,52 atau 8,33 persen Peningkatan ini digunakan untuk menunjang transformasi tata kelola pemerintahan salah satunya dengan penambahan kualitas program 1 RT satu free wifi, Pemasangan Video Tron 3D Lawu Plaza dan Pemeliharaan Videotron Alun-alun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selanjutnya yang kedua pada prioritas (P4) dengan alokasi penambahan pendanaan sebesar Rp25.502.635.052,05 atau 18,46 persen Hal ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas berbasis lingkungan berkelanjutan, salah satunya dengan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Trotoar Ahmad Yani, Penataan Lampu Pohon, Pengurukan Parkir Alun-alun, Pengurukan dan Pemindahan Makam Area Belakang Rusunawa, Penataan Kawasan Rusun Tower 3, dan Marka untuk Jalur Wisata.

Terakhir yang ketiga pada prioritas (P1) dengan alokasi penambahan pendanaan sebesar Rp11.517.087.744,43 atau 31,01 persen Peningkatan tersebut dalam rangka menunjang Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital dengan mengadakan kegiatan Pembinaan UMKM, kegiatan Fasilitasi/Inkubasi Bisnis, Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan Pemasaran Produk UMKM, Sarasehan Kriya Wastra Dekranasda 2025, Pengadaan Kolam Bioflog, Pembuatan kendang Kambing dan Pakan Portable, Menghidupkan Lahan Tidur, menyewa Videotron Luar Kota untuk Informasi seputar Kota Madiun, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemeliharaan Pasar, Branding PKL Pecel, Desain Paten Batik Kota Madiun, Penguatan Warung Tekan Inflasi, Galery Oleh-oleh Khas Madiun di PBC, dan Pemeliharaan *Foodcourt* Sleko.

Sedangkan alokasi pendanaan yang mengalami penurunan atau pengurangan pendanaan pada prioritas (P2) dengan pengurangan pendanaan sebesar Rp36.931.057.673,69 atau turun sebesar 7,50 Persen Hal ini disebabkan Penarikan DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru yang semula anggaran pendanaan berada di Pemerintah Daerah di kembalikan ke Pemerintah Pusat untuk diterimakan langsung ke Rekening Penerima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan daerah dapat dilihat berdasarkan urusan, dan perangkat daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan, terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang memiliki proporsi pendanaan terbesar. Urusan tersebut adalah Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun proporsi pagu indikatif belanja berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1 dan rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		PAGU RKPD 2025	PAGU APBD 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	PAGU PENDANAAN	
		Sbl	Ssd	Sbl	Ssd	Sbl	Ssd				(+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	6	6	13	13	164	164	237.115.917.744,00	239.615.917.744,00	197.144.237.287,18	- 39.971.680.456,82	-16,86
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	9	24	24	97	169	259.689.306.706,00	282.441.833.205,15	286.016.012.907,15	26.326.706.201,15	10,14
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	10	20	19	40	40	106.470.063.653,00	106.813.130.705,10	122.528.667.766,99	16.058.604.113,99	15,08
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	15	15	22	22	38.333.692.572,00	38.006.203.572,00	37.893.097.313,87	- 440.595.258,13	-1,15
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	12	12	22	23	22.604.978.992,00	22.770.753.992,00	20.965.059.065,00	- 1.639.919.927,00	-7,25
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	10	10	20	20	4.465.861.703,00	4.465.861.703,00	4.118.595.603,30	- 347.266.099,70	-7,78
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	12	26	26	58	61	29.098.193.994,00	30.675.244.257,56	28.932.868.710,29	- 165.325.283,71	-0,57
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	10	17	18	31	32	15.593.147.297,00	15.602.593.297,00	18.277.419.179,87	2.684.271.882,87	17,21
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	13	23	24	36	36	15.317.476.822,00	15.843.873.228,00	21.088.710.850,00	5.771.234.028,00	37,68
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	18	18	30	30	26.740.036.124,00	26.990.036.124,00	27.401.389.446,62	661.353.322,62	2,47
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	9	9	16	16	8.341.175.988,00	8.746.175.988,00	8.418.607.999,80	77.432.011,80	0,93
12	Dinas Perhubungan	2	2	14	14	19	19	16.293.962.906,00	24.055.654.906,00	28.053.683.666,33	11.759.720.760,33	72,17
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	11	11	28	28	25.248.965.153,00	28.930.340.153,00	32.953.822.378,00	7.704.857.225,00	30,52
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	11	11	17	17	6.763.115.666,00	6.688.390.666,00	6.378.062.585,60	- 385.053.080,40	-5,69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10	10	20	20	24	24	15.778.152.816,00	17.808.032.221,00	17.927.086.143,49	2.148.933.327,49	13,62
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	13	13	19	19	9.041.991.596,00	9.014.963.163,00	8.773.406.301,77	- 268.585.294,23	-2,97
17	Dinas Perdagangan	6	6	14	14	21	21	16.863.681.889,00	17.098.681.889,00	18.115.053.886,00	1.251.371.997,00	7,42
18	Sekretariat Daerah	3	3	18	18	79	74	49.772.821.370,00	55.688.893.148,00	50.791.421.604,00	1.018.600.234,00	2,05
19	Sekretariat DPRD	2	2	14	14	24	24	40.269.472.912,00	45.396.472.412,93	36.781.015.400,05	- 3.488.457.511,95	-8,66
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	14	14	32	32	11.352.563.613,00	12.323.266.813,00	11.132.118.667,91	- 220.444.945,09	-1,94
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	11	11	25	25	57.716.498.976,00	55.646.492.901,26	65.937.758.943,92	8.221.259.967,92	14,24
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2	8	8	22	22	12.851.205.520,00	13.801.205.520,00	12.694.370.573,00	- 156.834.947,00	-1,22
23	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	3	3	12	12	19	19	12.142.686.668,00	12.205.679.068,00	12.229.498.544,00	86.811.876,00	0,71
24	Inspektorat	3	3	10	10	22	22	11.516.899.866,00	13.010.381.900,00	12.073.488.057,40	556.588.191,40	4,83
25	Kecamatan Kartoharjo	5	5	14	14	48	48	24.729.244.381,00	26.419.812.381,00	25.599.454.295,00	870.209.914,00	3,52
26	Kecamatan Manguharjo	5	5	14	14	47	47	23.504.042.268,00	25.234.617.548,00	24.158.689.950,81	654.647.682,81	2,79
27	Kecamatan Taman	5	5	13	13	45	45	24.729.244.381,00	26.430.937.241,00	25.668.897.398,30	939.653.017,30	3,80
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	11	11	20	20	18.935.122.649,00	18.549.626.462,00	17.507.903.360,66	- 1.427.219.288,34	-7,54
	TOTAL	160	160	409	410	1047	1119	1.141.279.524.225,00	1.200.275.072.209,00	1.179.560.397.886,31	38.280.873.661,31	3,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025

PRIORITAS 1: Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.005.447.782	910.090.782	1.483.167.794	477.720.012						1.287.461.775,00	
1	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi yang Disetujui Permohonan Bersertifikat NIK	80 %	80 %	444.174.500	248.817.500	210.129.250	- 234.045.250						444.174.500,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK*	35 koperasi	35 koperasi	444.174.500	248.817.500	210.129.250	- 234.045.250		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro		444.174.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	90 Orang	150 Orang	444.174.500	248.817.500	210.129.250	- 234.045.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			444.174.500,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2,5 %	2,5 %	200.586.523	300.586.523	250.811.306	50.224.783						120.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah*	5 koperasi	5 koperasi	200.586.523	300.586.523	250.811.306	50.224.783		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Lembaga Koperasi		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	200.586.523	300.586.523	250.811.306	50.224.783	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang menerapkan manajemen usaha yang moderen	-	8 %	0,00	0,00	404.436.907	404.436.907						404.436.907,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaa*	-	6 %	0,00	0,00	404.436.907	404.436.907		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Usaha Mikro		404.436.907,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*	-	60 Orang	0,00	0,00	404.436.907	404.436.907	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			404.436.907,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7,33 %	7,33 %	360.686.759	360.686.759	617.790.331	257.103.572						318.850.368,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik*	11 Usaha Mikro	11 Usaha Mikro	360.686.759	360.686.759	617.790.331	257.103.572		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Pelaku Usaha Mikro		318.850.368,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	360.686.759	360.686.759	617.790.331	257.103.572	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			318.850.368,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.763.115.666	6.688.390.666	6.378.062.586	-385.053.080						7.404.742.001,00	
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 Persen	100 Persen	50.000.000	54.870.000	48.240.000	-1.760.000						51.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal*	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	54.870.000	48.240.000	-1.760.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Investor di Kota Madiun		51.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	54.870.000	48.240.000	-1.760.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			51.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	42 %	42 %	131.919.750	131.919.750	151.472.950	19.553.200						316.391.800,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah investor baru*	50 investor	50 investor	131.919.750	131.919.750	151.472.950	19.553.200		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Investor di Kota Madiun		316.391.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	131.919.750	131.919.750	151.472.950	19.553.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			316.391.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	97 %	97 %	497.740.000	497.740.000	436.604.000	-61.136.000						619.700.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pemohon Izin*	4250 izin	4250 izin	497.740.000	497.740.000	436.604.000	-61.136.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat pemohon izin		619.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	4250 Pelaku Usaha	4250 Pelaku Usaha	211.460.000	211.460.000	189.770.000	-21.690.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			233.215.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	23 Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	101.830.000	101.830.000	79.624.000	-22.206.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			166.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	184.450.000	184.450.000	167.210.000	-17.240.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			220.485.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	120 Perusahaan	120 Perusahaan	462.675.000	237.950.000	203.442.000	-259.233.000						470.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang dibina*	390 Pelaku Usaha	390 Pelaku Usaha	462.675.000	237.950.000	203.442.000	-259.233.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Investor di Kota Madiun		470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	29.491.000	27.850.000	22.654.000	-6.837.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			29.491.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	390 Pelaku Usaha	390 Pelaku Usaha	385.882.500	173.900.000	156.725.000	-229.157.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			398.107.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	47.301.500	36.200.000	24.063.000	-23.238.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			42.401.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 %	100 %	165.800.000	165.800.000	152.213.000	-13.587.000						197.500.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik*	36 jenis izin	36 jenis izin	165.800.000	165.800.000	152.213.000	-13.587.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat pemohon izin		197.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	165.800.000	165.800.000	152.213.000	-13.587.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			197.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				951.974.000	959.561.000	1.417.650.300	465.676.300						775.695.000,00	
1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	290 ton	290 ton	417.000.000	417.000.000	953.390.300	536.390.300						370.500.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk*	-	30 kelompok	0,00	0,00	279.949.300	279.949.300		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	-	7 Kelompok	0,00	0,00	279.949.300	279.949.300	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)*	260 RTP	260 RTP	417.000.000	417.000.000	673.441.000	256.441.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		370.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Unit	1 Unit	205.000.000	205.000.000	204.146.000	-854.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			158.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	4 Unit	4 Unit	155.000.000	155.000.000	415.000.000	260.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*	125 Unit	125 Unit	57.000.000	57.000.000	54.295.000	-2.705.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			57.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	89 Ton	70.000.000	74.865.000	69.893.000	-107.000						70.500.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)*	435 Orang	435 Orang	70.000.000	74.865.000	69.893.000	-107.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		70.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	70.000.000	74.865.000	69.893.000	-107.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			70.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	33,57 kg/kapita/tahun	33,57 kg/kapita/tahun	464.974.000	467.696.000	394.367.000	-70.607.000						334.695.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina*	50 Orang	50 Orang	65.164.000	65.164.000	61.112.000	-4.052.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		66.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	65.164.000	65.164.000	61.112.000	-4.052.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			66.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga*	30 Ton	30 Ton	399.810.000	402.532.000	333.255.000	-66.555.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		268.545.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	399.810.000	402.532.000	333.255.000	-66.555.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			268.545.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.630.521.953	8.780.401.358	8.605.948.270	-24.573.683						10.295.000.000,00	
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	79 %	79 %	298.000.000	298.000.000	435.998.800	137.998.800						325.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi*	3 Lokasi	3 Lokasi	298.000.000	298.000.000	435.998.800	137.998.800		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	3 Lokasi	3 Lokasi	100.000.000	100.000.000	270.000.000	170.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	198.000.000	198.000.000	165.998.800	-32.001.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			225.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	100 %	100 %	315.000.000	465.000.000	368.882.000	53.882.000						400.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pemasaran pariwisata*	3 Event	3 Event	315.000.000	465.000.000	368.882.000	53.882.000		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	315.000.000	465.000.000	368.882.000	53.882.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	7%	7%	550.000.000	550.000.000	383.410.225	-166.589.775						520.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah pelatihan/ peningkatan SDM pariwisata*	2 Pelatihan	2 Pelatihan	550.000.000	550.000.000	383.410.225	-166.589.775		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		520.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	20 Orang	20 Orang	550.000.000	550.000.000	383.410.225	-166.589.775	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			520.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.697.456.580	7.166.178.580	11.947.777.300	5.250.320.720						7.888.821.339,00	
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	65 %	65 %	1.102.582.080	1.152.582.080	7.439.852.357	6.337.270.277						2.396.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani*	80 %	80 %	977.582.080	1.027.582.080	5.300.160.457	4.322.578.377		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		2.271.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	1 Laporan	1 Laporan	182.000.000	182.000.000	181.900.000	-100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			150.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	1 Laporan	795.582.080	845.582.080	5.118.260.457	4.322.678.377	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			2.120.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik*	75 %	75 %	125.000.000	125.000.000	2.139.691.900	2.014.691.900		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	2.139.691.900	2.014.691.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	2.629.723.500	2.531.923.500	2.964.062.500	334.339.000						2.592.138.852,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase pengembangan prasarana pertanian*	100 %	100 %	266.427.000	151.427.000	121.745.000	-144.682.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	1 Laporan	1 Laporan	151.427.000	151.427.000	121.745.000	-29.682.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			8.627.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B*	1 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000	0,00	0,00	-115.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			116.373.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara*	25 %	25 %	2.363.296.500	2.380.496.500	2.842.317.500	479.021.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		2.467.138.852,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	500.000	500.000	350.000	-150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			2.017.138.852,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	485.000.000	130.410.000	564.731.000	79.731.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	240.796.500	240.796.500	240.796.500	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	1 Unit	1 Unit	1.637.000.000	2.008.790.000	2.036.440.000	399.440.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			145.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	10 %	337.603.000	337.603.000	370.459.740	32.856.740						337.603.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan*	80 %	80 %	250.103.000	250.103.000	290.885.240	40.782.240		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		250.103.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	4 Laporan	4 Laporan	250.103.000	250.103.000	290.885.240	40.782.240	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			250.103.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi*	80 %	80 %	87.500.000	87.500.000	79.574.500	-7.925.500		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		87.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	12 Laporan	12 Laporan	87.500.000	87.500.000	79.574.500	-7.925.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			87.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	76 %	76 %	150.000.000	150.000.000	288.617.200	138.617.200						150.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas lahan aman bencana pertanian*	2000 Ha / Tahun	2000 Ha / Tahun	150.000.000	150.000.000	288.617.200	138.617.200		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	50 Ha	50 Ha	150.000.000	150.000.000	288.617.200	138.617.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	15 %	15 %	33.600.000	33.600.000	27.898.000	-5.702.000						33.600.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten*	2 Jenis	2 Jenis	33.600.000	33.600.000	27.898.000	-5.702.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		33.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian*	2 Dokumen	2 Dokumen	33.600.000	33.600.000	27.898.000	-5.702.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			33.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	20 %	2.443.948.000	2.960.470.000	856.887.503	-1.587.060.497						2.379.479.487,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah SDM Pertanian Terlatih*	200 Orang	200 Orang	2.443.948.000	2.960.470.000	856.887.503	-1.587.060.497		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Masyarakat		2.379.479.487,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	38 Unit	38 Unit	2.443.948.000	2.960.470.000	856.887.503	-1.587.060.497	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan			2.379.479.487,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.863.681.889	17.098.681.889	18.115.053.886	1.251.371.997						18.574.876.408,00	
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan yang Diterbitkan atau Direkomendasikan	100 %	100 %	138.472.400	138.472.400	199.339.240	60.866.840						130.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan*	75 Dokumen	75 Dokumen	138.472.400	138.472.400	199.339.240	60.866.840		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	*Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik*	12 laporan	12 laporan	138.472.400	138.472.400	199.339.240	60.866.840	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	100 %	100 %	5.307.665.078	5.513.115.078	6.281.121.963	973.456.885						5.784.744.040,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya*	17 Pasar	17 Pasar	887.190.278	1.107.190.278	2.266.430.666	1.379.240.388		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		1.200.145.240,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Unit	3 Unit	111.515.000	311.515.000	1.387.255.388	1.275.740.388	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			300.145.240,00	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	17 Unit	17 Unit	775.675.278	795.675.278	879.175.278	103.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	100 %	100 %	4.420.474.800	4.405.924.800	4.014.691.297	-405.783.503		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		4.584.598.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Dokumen	1 Dokumen	371.340.000	352.390.000	316.149.000	-55.191.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			335.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	2 Dokumen	3 Dokumen	4.049.134.800	4.053.534.800	3.698.542.297	-350.592.503	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			4.249.598.800,00	DINAS PERDAGANGAN
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Ketersedian Barang Pokok dan Penting	100 %	100 %	378.804.200	378.804.200	613.728.200	234.924.000						400.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pemantauan ketersedian barang pokok dan penting*	3 Kali	3 Kali	357.771.200	357.771.200	599.058.200	241.287.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		375.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	3 Laporan	3 Laporan	149.843.600	149.843.600	134.758.600	-15.085.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4 Laporan	207.927.600	207.927.600	464.299.600	256.372.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi*	100 %	100 %	21.033.000	21.033.000	14.670.000	-6.363.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*	2 Laporan	2 Laporan	21.033.000	21.033.000	14.670.000	-6.363.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	100 %	383.030.385	383.030.385	320.848.008	-62.182.377						364.626.943,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya*	12 Bulan	12 Bulan	383.030.385	383.030.385	320.848.008	-62.182.377		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		364.626.943,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	8186 Unit	7000 Unit	353.927.885	353.927.885	300.115.508	-53.812.377	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			334.626.943,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	150 Orang	150 Orang	29.102.500	29.102.500	20.732.500	-8.370.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	100 %	100 %	262.258.625	262.258.625	460.353.080	198.094.455						335.045.025,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	4 Kali	4 Kali	262.258.625	262.258.625	460.353.080	198.094.455		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Masyarakat Kota Madiun		335.045.025,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	4 UMKM	4 UMKM	262.258.625	262.258.625	460.353.080	198.094.455	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			335.045.025,00	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.546.477.000	1.596.280.000	1.805.646.720	259.169.720						2.649.738.860,00	
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	5 %	1.196.477.000	1.246.280.000	1.304.568.600	108.091.600						2.449.738.860,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan*	22 IKM	22 IKM	1.196.477.000	1.246.280.000	1.304.568.600	108.091.600		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Industri Kecil dan Menengah (IKM)		2.449.738.860,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	46.000.000	21.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	92.632.400	-7.367.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000	85.000.000	56.656.200	-28.343.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	6 Dokumen	6 Dokumen	986.477.000	1.036.280.000	1.109.280.000	122.803.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			2.289.738.860,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	10 %	350.000.000	350.000.000	501.078.120	151.078.120						200.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang mengikuti publikasi*	40 IKM	40 IKM	350.000.000	350.000.000	501.078.120	151.078.120		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa	Industri Kecil dan Menengah (IKM)		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	350.000.000	501.078.120	151.078.120	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				24.729.244.381	26.419.812.381	25.599.454.295	870.209.914						25.825.471.703,00	
	7,01	KECAMATAN				24.729.244.381	26.419.812.381	25.599.454.295	870.209.914						25.825.471.703,00	
		KECAMATAN MANGUHARJO				3.530.359.700	4.951.929.525	4.566.253.743	1.467.534.218						25.825.471.703,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	126.619.700	123.819.700	101.667.420	- 24.952.280						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelurahan Manguhrajo)*	100 %	100 %	60.210.000	57.410.000	57.410.000	- 2.800.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	60.210.000	57.410.000	57.410.000	- 2.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			74.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan*	2 Forum	2 Forum	66.409.700	66.409.700	44.257.420	- 22.152.280		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		64.929.270,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1 Laporan	1 Laporan	66.409.700	66.409.700	44.257.420	- 22.152.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			64.929.270,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN MANGUHARJO				346.010.000	529.710.000	538.247.500	192.237.500						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	346.010.000	529.710.000	538.247.500	192.237.500						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	346.010.000	529.710.000	538.247.500	192.237.500		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	118.537.500	8.537.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	236.010.000	419.710.000	419.710.000	183.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			234.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN SOGATEN				303.810.000	452.510.000	449.143.998	145.333.998						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	303.810.000	452.510.000	449.143.998	145.333.998						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	303.810.000	452.510.000	449.143.998	145.333.998		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	107.743.998	-2.256.002	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	193.810.000	342.510.000	341.400.000	147.590.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			191.800.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN PATIHAN				256.810.000	370.510.000	369.500.000	112.690.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	256.810.000	370.510.000	369.500.000	112.690.000						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	256.810.000	370.510.000	369.500.000	112.690.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	146.810.000	260.510.000	259.500.000	112.690.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			144.800.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN NGEGONG				224.460.000	313.160.000	333.160.000	108.700.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	224.460.000	313.160.000	333.160.000	108.700.000						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	224.460.000	313.160.000	333.160.000	108.700.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	130.000.000	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	114.460.000	203.160.000	203.160.000	88.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			112.600.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN WINONGO				355.810.000	544.510.000	574.510.000	218.700.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	355.810.000	544.510.000	574.510.000	218.700.000						3.289.479.270,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	355.810.000	544.510.000	574.510.000	218.700.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	140.000.000	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	245.810.000	434.510.000	434.510.000	188.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			243.800.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN MADIUN LOR				378.910.000	587.610.000	601.635.000	222.725.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	378.910.000	587.610.000	601.635.000	222.725.000						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	378.910.000	587.610.000	601.635.000	222.725.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	124.025.000	14.025.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	268.910.000	477.610.000	477.610.000	208.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			266.200.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN PANGONGANGAN				285.210.000	418.910.000	418.610.000	133.400.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	285.210.000	418.910.000	418.610.000	133.400.000						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	285.210.000	418.910.000	418.610.000	133.400.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	110.000.000	110.000.000	109.700.000	-300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	175.210.000	308.910.000	308.910.000	133.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			173.200.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN NAMBANGAN LOR				587.610.000	946.310.000	946.310.000	358.700.000						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	587.610.000	946.310.000	946.310.000	358.700.000						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	587.610.000	946.310.000	946.310.000	358.700.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	124.300.000	124.300.000	124.300.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			124.300.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	463.310.000	822.010.000	822.010.000	358.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			460.600.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL				431.410.000	665.110.000	664.879.825	233.469.825						25.825.471.703,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	431.410.000	665.110.000	664.879.825	233.469.825						3.289.479.270,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelurahan Manguhrajo)*	100 %	100 %	431.410.000	665.110.000	664.879.825	233.469.825		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	-		3.224.550.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	124.300.000	124.300.000	124.069.825	-230.175	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			124.300.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	307.110.000	540.810.000	540.810.000	233.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			304.400.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KECAMATAN KARTOHARJO				4.920.146.255	5.779.574.255	5.652.709.268	732.563.013						24.726.680.402,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	227.622.600	227.622.600	160.717.130	-66.905.470						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	77.622.600	77.622.600	67.846.800	-9.775.800		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77.622.600	77.622.600	67.846.800	-9.775.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			80.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan*	1 lembaga/forum	1 lembaga/forum	150.000.000	150.000.000	92.870.330	-57.129.670		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		150.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000	150.000.000	92.870.330	-57.129.670	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			150.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN ORO-ORO OMBO				632.856.000	711.676.000	703.718.500	70.862.500						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	632.856.000	711.676.000	703.718.500	70.862.500						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	632.856.000	711.676.000	703.718.500	70.862.500		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	114.256.000	174.256.000	171.806.500	57.550.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			250.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	518.600.000	537.420.000	531.912.000	13.312.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			518.600.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN SUKOSARI				281.560.655	394.620.655	389.563.655	108.003.000						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	281.560.655	394.620.655	389.563.655	108.003.000						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	281.560.655	394.620.655	389.563.655	108.003.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Sukosari		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	46.560.655	156.560.655	154.628.655	108.068.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			100.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	235.000.000	238.060.000	234.935.000	-65.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			235.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN KLEGEN				679.330.000	795.470.000	789.279.000	109.949.000						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	679.330.000	795.470.000	789.279.000	109.949.000						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	679.330.000	795.470.000	789.279.000	109.949.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Klegen		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	103.530.000	213.530.000	211.688.000	108.158.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	575.800.000	581.940.000	577.591.000	1.791.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			575.800.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN REJOMULYO				632.633.000	750.181.000	743.387.700	110.754.700						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	632.633.000	750.181.000	743.387.700	110.754.700						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	632.633.000	750.181.000	743.387.700	110.754.700		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	168.763.000	278.736.000	276.463.200	107.700.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			350.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	463.870.000	471.445.000	466.924.500	3.054.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			465.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN PILANGBANGO				367.241.000	449.946.000	442.838.083	75.597.083						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	367.241.000	449.946.000	442.838.083	75.597.083						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	367.241.000	449.946.000	442.838.083	75.597.083		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Pilangbango		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	88.641.000	163.641.000	161.329.500	72.688.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	278.600.000	286.305.000	281.508.583	2.908.583	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			278.600.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN TAWANGREJO				397.311.000	472.811.000	464.744.000	67.433.000						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	397.311.000	472.811.000	464.744.000	67.433.000						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	397.311.000	472.811.000	464.744.000	67.433.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	2 Unit	96.211.000	161.211.000	158.286.000	62.075.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	301.100.000	311.600.000	306.458.000	5.358.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			302.200.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KANIGORO				759.550.000	827.125.000	817.423.000	57.873.000						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	759.550.000	827.125.000	817.423.000	57.873.000						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	759.550.000	827.125.000	817.423.000	57.873.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Kanigoro		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	2 Unit	136.550.000	196.550.000	194.277.500	57.727.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			275.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	623.000.000	630.575.000	623.145.500	145.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			623.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KARTOHARJO				540.222.000	657.022.000	655.042.000	114.820.000						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	540.222.000	657.022.000	655.042.000	114.820.000						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	540.222.000	657.022.000	655.042.000	114.820.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	81.332.000	191.332.000	189.352.000	108.020.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	458.890.000	465.690.000	465.690.000	6.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			462.600.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KELUN				401.820.000	493.100.000	485.996.200	84.176.200						24.726.680.402,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	401.820.000	493.100.000	485.996.200	84.176.200						5.990.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	401.820.000	493.100.000	485.996.200	84.176.200		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Kelun		5.840.400.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	78.124.000	163.124.000	160.715.000	82.591.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	323.696.000	329.976.000	325.281.200	1.585.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			324.600.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KECAMATAN TAMAN				4.970.245.958	6.533.447.793	6.486.591.866	1.516.345.908						26.127.080.150,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	217.925.000	217.925.000	156.847.800	-61.077.200						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	80.990.000	80.990.000	62.442.800	-18.547.200		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	80.990.000	80.990.000	62.442.800	-18.547.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			83.836.121,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	2 Laporan	136.935.000	136.935.000	94.405.000	-42.530.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		145.013.087,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	2 Laporan	136.935.000	136.935.000	94.405.000	-42.530.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			145.013.087,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MOJOREJO				710.900.000	988.687.352	976.837.352	265.937.352						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	710.900.000	988.687.352	976.837.352	265.937.352						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	710.900.000	988.687.352	976.837.352	265.937.352		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	250.000.000	216.140.352	214.671.352	-35.328.648	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			250.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	460.900.000	772.547.000	762.166.000	301.266.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			460.900.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN PANDEAN				677.300.000	890.861.750	883.912.227	206.612.227						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	677.300.000	890.861.750	883.912.227	206.612.227						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	677.300.000	890.861.750	883.912.227	206.612.227		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	240.000.000	164.186.750	160.419.727	-79.580.273	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			240.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	437.300.000	726.675.000	723.492.500	286.192.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			437.300.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN BANJAREJO				446.500.000	552.862.672	531.894.172	85.394.172						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	446.500.000	552.862.672	531.894.172	85.394.172						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	446.500.000	552.862.672	531.894.172	85.394.172		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	180.000.000	111.362.672	107.622.672	-72.377.328	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			180.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	266.500.000	441.500.000	424.271.500	157.771.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			266.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN KUNCEN				200.300.000	222.179.129	216.177.850	15.877.850						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	200.300.000	222.179.129	216.177.850	15.877.850						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	200.300.000	222.179.129	216.177.850	15.877.850		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	100.000.000	83.263.519	79.999.354	-20.000.646	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			100.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.300.000	138.915.610	136.178.496	35.878.496	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			100.300.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN MANISREJO				665.100.000	938.124.940	1.028.565.980	363.465.980						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	665.100.000	938.124.940	1.028.565.980	363.465.980						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	665.100.000	938.124.940	1.028.565.980	363.465.980		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	2 Unit	240.000.000	209.918.240	307.169.240	67.169.240	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			240.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	425.100.000	728.206.700	721.396.740	296.296.740	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			425.100.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN KEJURON				576.700.000	772.852.800	765.887.600	189.187.600						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	576.700.000	772.852.800	765.887.600	189.187.600						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	576.700.000	772.852.800	765.887.600	189.187.600		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	210.000.000	165.322.800	161.462.800	-48.537.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			210.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	366.700.000	607.530.000	604.424.800	237.724.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			366.700.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN JOSENAN				413.521.400	513.881.400	503.816.330	90.294.930						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	413.521.400	513.881.400	503.816.330	90.294.930						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	413.521.400	513.881.400	503.816.330	90.294.930		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	170.000.000	113.950.000	110.681.350	-59.318.650	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			170.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	243.521.400	399.931.400	393.134.980	149.613.580	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			243.521.400,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN DEMANGAN				455.100.000	594.340.000	583.791.000	128.691.000						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	455.100.000	594.340.000	583.791.000	128.691.000						4.981.170.166,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	455.100.000	594.340.000	583.791.000	128.691.000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	180.000.000	145.715.000	143.173.500	-36.826.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			180.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	275.100.000	448.625.000	440.617.500	165.517.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			275.100.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN TAMAN				606.899.558	841.732.750	838.861.555	231.961.997						26.127.080.150,00	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	606.899.558	841.732.750	838.861.555	231.961.997						4.981.170.166,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat*	100 %	100 %	606.899.558	841.732.750	838.861.555	231.961.997		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		4.836.157.079,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	230.000.000	202.823.192	201.391.532	-28.608.468	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			230.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	376.899.558	638.909.558	637.470.023	260.570.465	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			376.899.558,00	KECAMATAN TAMAN
						32.329.772.713,00	36.974.252.548	43.846.860.457,43	11.517.087.744,43							

PRIORITAS 2: Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.380.155.269	28.875.199.875	27.189.015.319	-191.139.950						28.902.901.035,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				237.115.917.744	239.615.917.744	197.144.237.287	64.267.818.056						245.377.158.997,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85,3	85,3	180.342.162.744	180.342.162.744	134.996.647.971	58.893.983.740						187.599.221.677,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian*	100 %	100 %	7.382.980.983	7.382.980.983	7.247.617.083	-135.363.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen Perencanaan, Mahasiswa dan Pegawai Dinas Pendidikan		7.328.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	7.382.980.983	7.382.980.983	7.247.617.083	-135.363.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.328.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan*	100 %	100 %	169.266.927.641	161.927.066.681	117.147.178.385	52.119.749.256		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan		176.359.864.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1537 Orang /bulan	1537 Orang /bulan	169.266.927.641	161.927.066.681	117.147.178.385	52.119.749.256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			176.359.864.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum*	100 %	100 %	2.606.021.000	9.945.881.960	9.515.619.383	6.909.598.383		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Kantor Dinas Pendidikan		2.697.241.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	37 Paket	37 Paket	2.306.021.000	9.645.881.960	9.365.214.383	7.059.193.383	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.306.021.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	130 Laporan	130 Laporan	300.000.000	300.000.000	150.405.000	- 149.595.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			391.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum*	100 %	100 %	404.137.120	404.137.120	404.137.120	0,00		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Kantor Dinas Pendidikan		532.020.677,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	30 Unit	30 Unit	404.137.120	404.137.120	404.137.120	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			532.020.677,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum*	100 %	100 %	682.096.000	682.096.000	682.096.000	-		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Kantor Dinas Pendidikan		682.096.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	66 Unit	66 Unit	208.674.000	208.674.000	208.674.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			208.674.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	270.075.000	270.075.000	270.075.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			270.075.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	276 Unit	276 Unit	203.347.000	203.347.000	203.347.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			203.347.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	23.750.394.320	25.860.906.870	25.749.848.293	1.999.453.973						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola*	100 %	100 %	5.817.844.000	5.715.844.000	5.984.748.002	166.904.002		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	106 Peserta Didik	106 Peserta Didik	662.788.000	662.788.000	504.116.560	-158.671.440	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			662.788.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	574.986.000	457.986.000	388.652.702	-186.333.299	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			574.986.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.814.570.000	2.814.570.000	2.814.570.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.814.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1.765.500.000	1.780.500.000	2.277.408.740	511.908.740	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.765.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	7.407.415.000	9.633.613.444	9.425.475.549	2.018.060.549		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	1 Unit	1.776.500.000	2.281.672.450	2.271.872.650	495.372.650	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.776.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	5850 Paket	5850 Paket	3.975.000.000	5.696.025.994	5.607.335.581	1.632.335.581	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	548.479.000	448.479.000	342.365.618	-206.113.382	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			573.479.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	70.466.000	170.466.000	166.931.700	96.465.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			70.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1.036.970.000	1.036.970.000	1.036.970.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.036.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Satuan PAUD yang dikelola*	100 %	100 %	8.966.306.320	8.760.620.426	8.671.249.798	-295.056.522		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		9.189.826.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	960 Orang	960 Orang	4.032.000.000	4.032.000.000	4.032.000.000	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			4.032.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	153 Satuan Pendidikan	153 Satuan Pendidikan	718.750.000	518.750.000	436.261.500	-282.488.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			718.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	152 Satuan Pendidikan	152 Satuan Pendidikan	3.878.820.000	3.878.820.000	3.878.820.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.878.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	6 Unit	6 Unit	336.736.320	331.050.426	324.168.298	-12.568.022	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			336.736.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola*	100 %	100 %	1.558.829.000	1.750.829.000	1.668.374.944	109.545.944		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		1.956.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	875.509.000	1.067.509.000	985.054.944	109.545.944	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.272.884.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	683.320.000	683.320.000	683.320.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			683.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	100 %	100 %	1.209.968.680	1.580.756.130	1.528.225.622	318.256.942						1.310.088.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum*	100 %	100 %	851.968.680	998.799.530	1.089.954.822	237.986.142		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		952.088.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	223.000.000	223.000.000	433.412.494	210.412.494	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			223.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*	96 Orang	96 Orang	162.968.680	162.968.680	125.818.901	- 37.149.779	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			163.088.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	466.000.000	612.830.850	530.723.427	64.723.427	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			566.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase satuan Paud yang menetapkan kurikulum*	100 %	100 %	358.000.000	581.956.600	438.270.800	80.270.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		358.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	358.000.000	581.956.600	438.270.800	80.270.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			358.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	63 %	63 %	1.486.812.000	1.486.812.000	2.342.869.910	856.057.910						1.968.500.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi*	100 %	100 %	1.486.812.000	1.486.812.000	2.342.869.910	856.057.910		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		1.968.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	1 Dokumen	1 Dokumen	941.312.000	741.312.000	660.491.010	- 280.820.990	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.268.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	2 Laporan	2 Laporan	545.500.000	745.500.000	1.682.378.900	1.136.878.900	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			700.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 KARTOHARJO				452.340.000	452.340.000	450.974.260	- 1.365.740						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	452.340.000	452.340.000	450.974.260	- 1.365.740						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	452.340.000	452.340.000	450.974.260	- 1.365.740		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	322.740.000	322.740.000	322.740.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			322.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	129.600.000	128.234.260	- 1.365.740	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			129.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 KARTOHARJO				213.570.000	213.570.000	207.671.100	- 5.898.900						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	213.570.000	213.570.000	207.671.100	- 5.898.900						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	213.570.000	213.570.000	207.671.100	- 5.898.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	62.370.000	62.370.000	62.370.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			62.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000	151.200.000	145.301.100	-5.898.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			151.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 KLEGEN				477.480.000	477.480.000	465.091.560	-12.388.440						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	477.480.000	477.480.000	465.091.560	-12.388.440						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	477.480.000	477.480.000	465.091.560	-12.388.440		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	328.680.000	328.680.000	328.680.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			328.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	148.800.000	136.411.560	-12.388.440	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			148.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 KLEGEN				239.370.000	215.370.000	206.356.300	-33.013.700						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	239.370.000	215.370.000	206.356.300	-33.013.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	239.370.000	215.370.000	206.356.300	-33.013.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	121.770.000	121.770.000	121.770.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			121.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	117.600.000	93.600.000	84.586.300	-33.013.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			117.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 KLEGEN				479.160.000	474.360.000	480.637.400	1.477.400						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	479.160.000	474.360.000	480.637.400	1.477.400						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	479.160.000	474.360.000	480.637.400	1.477.400		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	320.760.000	320.760.000	320.760.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			320.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	153.600.000	159.877.400	1.477.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 04 KLEGEN				175.770.000	175.770.000	167.808.450	- 7.961.550						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	175.770.000	175.770.000	167.808.450	- 7.961.550						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	175.770.000	175.770.000	167.808.450	- 7.961.550		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	82.170.000	82.170.000	82.170.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			82.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	93.600.000	85.638.450	- 7.961.550	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN ORO ORO OMBO				296.400.000	296.400.000	331.979.700	35.579.700						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	296.400.000	296.400.000	331.979.700	35.579.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	296.400.000	296.400.000	331.979.700	35.579.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	198.000.000	198.000.000	198.000.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	98.400.000	133.979.700	35.579.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			98.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 REJOMULYO				273.960.000	273.960.000	256.887.000	- 17.073.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	273.960.000	273.960.000	256.887.000	- 17.073.000						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	273.960.000	273.960.000	256.887.000	-17.073.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	122.760.000	122.760.000	122.760.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			122.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000	151.200.000	134.127.000	-17.073.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			151.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 KANIGORO				146.670.000	146.670.000	360.279.700	213.609.700						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	146.670.000	146.670.000	360.279.700	213.609.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	146.670.000	146.670.000	360.279.700	213.609.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	72.270.000	72.270.000	72.270.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			72.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	288.009.700	213.609.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 KANIGORO				232.800.000	232.800.000	226.056.100	-6.743.900						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	232.800.000	232.800.000	226.056.100	-6.743.900						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	232.800.000	232.800.000	226.056.100	-6.743.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	158.400.000	158.400.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	67.656.100	-6.743.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SDN 03 KANIGORO				251.010.000	251.010.000	246.255.840	- 4.754.160						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	251.010.000	251.010.000	246.255.840	- 4.754.160						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	251.010.000	251.010.000	246.255.840	- 4.754.160		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	157.410.000	157.410.000	157.410.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			157.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	93.600.000	88.845.840	- 4.754.160	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN SUKOSARI				127.260.000	145.960.000	206.030.880	78.770.880						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	127.260.000	145.960.000	206.030.880	78.770.880						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	127.260.000	145.960.000	206.030.880	78.770.880		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	33.660.000	33.660.000	33.660.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			33.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	112.300.000	172.370.880	78.770.880	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN PILANGBANGO				383.880.000	383.880.000	379.945.000	- 3.935.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	383.880.000	383.880.000	379.945.000	- 3.935.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	383.880.000	383.880.000	379.945.000	- 3.935.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	249.480.000	249.480.000	249.480.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			249.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	134.400.000	134.400.000	130.465.000	-3.935.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			134.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 TAWANGREJO				243.540.000	243.540.000	236.586.990	-6.953.010						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	243.540.000	243.540.000	236.586.990	-6.953.010						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	243.540.000	243.540.000	236.586.990	-6.953.010		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	164.340.000	164.340.000	164.340.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			164.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	79.200.000	72.246.990	-6.953.010	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			79.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 TAWANGREJO				141.330.000	141.330.000	191.892.380	50.562.380						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	141.330.000	141.330.000	191.892.380	50.562.380						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	141.330.000	141.330.000	191.892.380	50.562.380		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	86.130.000	86.130.000	86.130.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			86.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.200.000	55.200.000	105.762.380	50.562.380	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			55.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN KELUN				242.940.000	242.940.000	257.561.000	14.621.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	242.940.000	242.940.000	257.561.000	14.621.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	242.940.000	242.940.000	257.561.000	14.621.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	144.540.000	144.540.000	144.540.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			144.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	98.400.000	113.021.000	14.621.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			98.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 MANGUHARJO				356.910.000	356.910.000	390.515.000	33.605.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	356.910.000	356.910.000	390.515.000	33.605.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	356.910.000	356.910.000	390.515.000	33.605.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	246.510.000	246.510.000	246.510.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			246.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	110.400.000	144.005.000	33.605.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			110.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 NAMBANGAN LOR				452.970.000	433.770.000	528.372.210	75.402.210						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	452.970.000	433.770.000	528.372.210	75.402.210						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	452.970.000	433.770.000	528.372.210	75.402.210		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	280.170.000	280.170.000	280.170.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			280.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	172.800.000	153.600.000	248.202.210	75.402.210	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			172.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 NAMBANGAN LOR				230.070.000	230.070.000	211.790.200	- 18.279.800						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	230.070.000	230.070.000	211.790.200	- 18.279.800						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	230.070.000	230.070.000	211.790.200	-18.279.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	131.670.000	131.670.000	131.670.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			131.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	98.400.000	80.120.200	-18.279.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			98.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 MADIUN LOR				181.710.000	205.710.000	211.705.400	29.995.400						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	181.710.000	205.710.000	211.705.400	29.995.400						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	181.710.000	205.710.000	211.705.400	29.995.400		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	88.110.000	88.110.000	88.110.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			88.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	117.600.000	123.595.400	29.995.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 MADIUN LOR				166.470.000	166.470.000	218.416.500	51.946.500						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	166.470.000	166.470.000	218.416.500	51.946.500						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	166.470.000	166.470.000	218.416.500	51.946.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	92.070.000	92.070.000	92.070.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			92.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	126.346.500	51.946.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 MADIUN LOR				747.300.000	747.300.000	711.358.400	- 35.941.600						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	747.300.000	747.300.000	711.358.400	- 35.941.600						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	747.300.000	747.300.000	711.358.400	- 35.941.600		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	504.900.000	504.900.000	504.900.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			504.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	242.400.000	242.400.000	206.458.400	- 35.941.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			242.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 04 MADIUN LOR				396.120.000	396.120.000	388.772.880	- 7.347.120						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	396.120.000	396.120.000	388.772.880	- 7.347.120						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	396.120.000	396.120.000	388.772.880	- 7.347.120		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	304.920.000	304.920.000	304.920.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			304.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	91.200.000	91.200.000	83.852.880	- 7.347.120	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			91.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 05 MADIUN LOR				687.570.000	687.570.000	742.062.700	54.492.700						245.377.158.997,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	687.570.000	687.570.000	742.062.700	54.492.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	687.570.000	687.570.000	742.062.700	54.492.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	497.970.000	497.970.000	497.970.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			497.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.600.000	189.600.000	244.092.700	54.492.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			189.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 NAMBANGAN KIDUL				255.030.000	255.030.000	304.037.040	49.007.040						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	255.030.000	255.030.000	304.037.040	49.007.040						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	255.030.000	255.030.000	304.037.040	49.007.040		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	155.430.000	155.430.000	155.430.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			155.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	99.600.000	99.600.000	148.607.040	49.007.040	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			99.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 NAMBANGAN KIDUL				199.140.000	199.140.000	187.776.270	-11.363.730						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	199.140.000	199.140.000	187.776.270	-11.363.730						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	199.140.000	199.140.000	187.776.270	-11.363.730		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	124.740.000	124.740.000	124.740.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			124.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	63.036.270	-11.363.730	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 NAMBANGAN KIDUL				437.880.000	437.880.000	422.297.040	-15.582.960						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	437.880.000	437.880.000	422.297.040	-15.582.960						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	437.880.000	437.880.000	422.297.040	-15.582.960		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	289.080.000	289.080.000	289.080.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			289.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	148.800.000	133.217.040	-15.582.960	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			148.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 WINONGO				457.680.000	438.480.000	664.820.000	207.140.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	457.680.000	438.480.000	664.820.000	207.140.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	457.680.000	438.480.000	664.820.000	207.140.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	308.880.000	308.880.000	308.880.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			308.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	129.600.000	355.940.000	207.140.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			148.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 WINONGO				124.890.000	148.890.000	143.906.000	19.016.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	124.890.000	148.890.000	143.906.000	19.016.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	124.890.000	148.890.000	143.906.000	19.016.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	50.490.000	50.490.000	50.490.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			50.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	98.400.000	93.416.000	19.016.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN NGEGONG				255.570.000	274.770.000	305.908.000	50.338.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	255.570.000	274.770.000	305.908.000	50.338.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	255.570.000	274.770.000	305.908.000	50.338.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	181.170.000	181.170.000	181.170.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			181.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	93.600.000	124.738.000	50.338.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN PATIHAN				371.160.000	371.160.000	363.091.000	- 8.069.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	371.160.000	371.160.000	363.091.000	- 8.069.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	371.160.000	371.160.000	363.091.000	- 8.069.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	241.560.000	241.560.000	241.560.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			241.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	129.600.000	121.531.000	- 8.069.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			129.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 PANGONGANGAN				510.390.000	491.190.000	541.353.100	30.963.100						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	510.390.000	491.190.000	541.353.100	30.963.100						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	510.390.000	491.190.000	541.353.100	30.963.100		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	297.990.000	297.990.000	297.990.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			297.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	212.400.000	193.200.000	243.363.100	30.963.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			212.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN SOGATEN				240.720.000	240.720.000	308.726.735	68.006.735						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	240.720.000	240.720.000	308.726.735	68.006.735						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	240.720.000	240.720.000	308.726.735	68.006.735		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	166.320.000	166.320.000	166.320.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			166.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	142.406.735	68.006.735	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 TAMAN				755.160.000	755.160.000	807.854.800	52.694.800						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	755.160.000	755.160.000	807.854.800	52.694.800						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	755.160.000	755.160.000	807.854.800	52.694.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	479.160.000	479.160.000	479.160.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			479.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	276.000.000	276.000.000	328.694.800	52.694.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			276.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SDN 02 TAMAN				155.970.000	155.970.000	150.693.900	- 5.276.100						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	155.970.000	155.970.000	150.693.900	- 5.276.100						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	155.970.000	155.970.000	150.693.900	- 5.276.100		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	62.370.000	62.370.000	62.370.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			62.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	93.600.000	88.323.900	- 5.276.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 TAMAN				193.830.000	150.630.000	255.587.900	61.757.900						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	193.830.000	150.630.000	255.587.900	61.757.900						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	193.830.000	150.630.000	255.587.900	61.757.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	76.230.000	76.230.000	76.230.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			76.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	117.600.000	74.400.000	179.357.900	61.757.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			117.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 PANDEAN				453.180.000	453.180.000	660.857.200	207.677.200						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	453.180.000	453.180.000	660.857.200	207.677.200						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	453.180.000	453.180.000	660.857.200	207.677.200		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	318.780.000	318.780.000	318.780.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			318.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	134.400.000	134.400.000	342.077.200	207.677.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			134.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 PANDEAN				457.680.000	457.680.000	545.176.850	87.496.850						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	457.680.000	457.680.000	545.176.850	87.496.850						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	457.680.000	457.680.000	545.176.850	87.496.850		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	308.880.000	308.880.000	308.880.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			308.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	148.800.000	236.296.850	87.496.850	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			148.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN BANJAREJO				583.320.000	626.520.000	847.893.800	264.573.800						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	583.320.000	626.520.000	847.893.800	264.573.800						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	583.320.000	626.520.000	847.893.800	264.573.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	423.720.000	423.720.000	423.720.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			423.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	159.600.000	202.800.000	424.173.800	264.573.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			159.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 MOJOREJO				220.110.000	220.110.000	201.336.090	-18.773.910						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	220.110.000	220.110.000	201.336.090	-18.773.910						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	220.110.000	220.110.000	201.336.090	-18.773.910		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	88.110.000	88.110.000	88.110.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			88.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	132.000.000	132.000.000	113.226.090	-18.773.910	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 MOJOREJO				662.970.000	662.970.000	734.540.700	71.570.700						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	662.970.000	662.970.000	734.540.700	71.570.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	662.970.000	662.970.000	734.540.700	71.570.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	478.170.000	478.170.000	478.170.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			478.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	184.800.000	184.800.000	256.370.700	71.570.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			184.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 MANISREJO				441.060.000	441.060.000	645.672.500	204.612.500						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	441.060.000	441.060.000	645.672.500	204.612.500						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	441.060.000	441.060.000	645.672.500	204.612.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	330.660.000	330.660.000	330.660.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			330.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	110.400.000	315.012.500	204.612.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			110.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 MANISREJO				433.530.000	433.530.000	433.734.500	204.500						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	433.530.000	433.530.000	433.734.500	204.500						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	433.530.000	433.530.000	433.734.500	204.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	303.930.000	303.930.000	303.930.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			303.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	129.600.000	129.804.500	204.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			129.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 MANISREJO				227.850.000	247.050.000	247.522.540	19.672.540						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	227.850.000	247.050.000	247.522.540	19.672.540						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	100 %	100 %	227.850.000	247.050.000	247.522.540	19.672.540		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	153.450.000	153.450.000	153.450.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			153.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	93.600.000	94.072.540	19.672.540	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 04 MANISREJO				288.810.000	288.810.000	405.026.210	116.216.210						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	288.810.000	288.810.000	405.026.210	116.216.210						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	288.810.000	288.810.000	405.026.210	116.216.210		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	177.210.000	177.210.000	177.210.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			177.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	111.600.000	111.600.000	227.816.210	116.216.210	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			111.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 DEMANGAN				212.400.000	212.400.000	257.700.000	45.300.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	212.400.000	212.400.000	257.700.000	45.300.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	212.400.000	212.400.000	257.700.000	45.300.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	118.800.000	118.800.000	118.800.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			118.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	93.600.000	138.900.000	45.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 DEMANGAN				220.920.000	220.920.000	251.274.640	30.354.640						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	220.920.000	220.920.000	251.274.640	30.354.640						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	220.920.000	220.920.000	251.274.640	30.354.640		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	146.520.000	146.520.000	146.520.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			146.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	74.400.000	104.754.640	30.354.640	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 01 JOSENAN				263.730.000	263.730.000	243.330.000	- 20.400.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	263.730.000	263.730.000	243.330.000	- 20.400.000						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	263.730.000	263.730.000	243.330.000	-20.400.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	165.330.000	165.330.000	165.330.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			165.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	98.400.000	78.000.000	-20.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			98.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 02 JOSENAN				225.480.000	225.480.000	215.600.100	-9.879.900						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	225.480.000	225.480.000	215.600.100	-9.879.900						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	225.480.000	225.480.000	215.600.100	-9.879.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	170.280.000	170.280.000	170.280.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			170.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.200.000	55.200.000	45.320.100	-9.879.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			55.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN 03 JOSENAN				164.880.000	164.880.000	257.852.000	92.972.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	164.880.000	164.880.000	257.852.000	92.972.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	164.880.000	164.880.000	257.852.000	92.972.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	71.280.000	71.280.000	71.280.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			71.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	93.600.000	186.572.000	92.972.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			93.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SDN KEJURON				124.230.000	124.230.000	127.471.720	3.241.720						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	124.230.000	124.230.000	127.471.720	3.241.720						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	124.230.000	124.230.000	127.471.720	3.241.720		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	36.630.000	36.630.000	36.630.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			36.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	87.600.000	87.600.000	90.841.720	3.241.720	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			87.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SDN KUNCEN				175.620.000	175.620.000	167.504.400	- 8.115.600						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	175.620.000	175.620.000	167.504.400	- 8.115.600						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola*	100 %	100 %	175.620.000	175.620.000	167.504.400	- 8.115.600		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		22.527.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	77.220.000	77.220.000	77.220.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			77.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	98.400.000	90.284.400	- 8.115.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			98.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 1				1.226.800.000	1.226.800.000	1.190.699.700	- 36.100.300						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.226.800.000	1.226.800.000	1.190.699.700	- 36.100.300						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.226.800.000	1.226.800.000	1.190.699.700	- 36.100.300		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	919.600.000	919.600.000	919.600.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			919.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	307.200.000	307.200.000	271.099.700	- 36.100.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			307.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 2				1.280.650.000	1.280.650.000	1.290.907.859	10.257.859						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.280.650.000	1.280.650.000	1.290.907.859	10.257.859						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.280.650.000	1.280.650.000	1.290.907.859	10.257.859		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	901.450.000	901.450.000	901.450.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			901.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	379.200.000	379.200.000	389.457.859	10.257.859	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			379.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 3				857.640.000	857.640.000	888.151.050	30.511.050						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	857.640.000	857.640.000	888.151.050	30.511.050						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	857.640.000	857.640.000	888.151.050	30.511.050		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	682.440.000	682.440.000	682.440.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			682.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	175.200.000	175.200.000	205.711.050	30.511.050	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			175.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 4				1.272.040.000	1.272.040.000	1.292.387.700	20.347.700						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.272.040.000	1.272.040.000	1.292.387.700	20.347.700						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.272.040.000	1.272.040.000	1.292.387.700	20.347.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.021.240.000	1.021.240.000	1.021.240.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.021.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	250.800.000	250.800.000	271.147.700	20.347.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			250.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 5				737.460.000	737.460.000	719.616.320	-17.843.680						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	737.460.000	737.460.000	719.616.320	-17.843.680						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	737.460.000	737.460.000	719.616.320	-17.843.680		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	515.460.000	515.460.000	515.460.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			515.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	222.000.000	222.000.000	204.156.320	-17.843.680	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 6				985.210.000	985.210.000	1.001.691.000	16.481.000						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	985.210.000	985.210.000	1.001.691.000	16.481.000						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	985.210.000	985.210.000	1.001.691.000	16.481.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	727.210.000	727.210.000	727.210.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			727.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	258.000.000	258.000.000	274.481.000	16.481.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			258.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 7				1.255.040.000	1.255.040.000	1.235.071.460	-19.968.540						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.255.040.000	1.255.040.000	1.235.071.460	-19.968.540						54.499.349.320,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.255.040.000	1.255.040.000	1.235.071.460	-19.968.540		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	851.840.000	851.840.000	851.840.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			851.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	403.200.000	403.200.000	383.231.460	-19.968.540	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			403.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 8				741.660.000	741.660.000	801.694.200	60.034.200						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	741.660.000	741.660.000	801.694.200	60.034.200						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	741.660.000	741.660.000	801.694.200	60.034.200		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	588.060.000	588.060.000	588.060.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			588.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	153.600.000	153.600.000	213.634.200	60.034.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			153.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 9				673.560.000	673.560.000	676.284.200	2.724.200						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	673.560.000	673.560.000	676.284.200	2.724.200						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	673.560.000	673.560.000	676.284.200	2.724.200		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	479.160.000	479.160.000	479.160.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			479.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	194.400.000	194.400.000	197.124.200	2.724.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			194.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SMPN 10				867.760.000	867.760.000	883.067.600	15.307.600						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	867.760.000	867.760.000	883.067.600	15.307.600						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	867.760.000	867.760.000	883.067.600	15.307.600		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	600.160.000	600.160.000	600.160.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			600.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	267.600.000	267.600.000	282.907.600	15.307.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			267.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 11				1.042.890.000	1.042.890.000	1.079.754.238	36.864.238						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.042.890.000	1.042.890.000	1.079.754.238	36.864.238						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.042.890.000	1.042.890.000	1.079.754.238	36.864.238		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	736.890.000	736.890.000	736.890.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			736.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	306.000.000	306.000.000	342.864.238	36.864.238	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			306.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 12				903.230.000	903.230.000	903.236.280	6.280						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	903.230.000	903.230.000	903.236.280	6.280						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	903.230.000	903.230.000	903.236.280	6.280		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	681.230.000	681.230.000	681.230.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			681.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	222.000.000	222.000.000	222.006.280	6.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 13				1.120.680.000	1.120.680.000	1.149.636.400	28.956.400						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	1.120.680.000	1.120.680.000	1.149.636.400	28.956.400						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	1.120.680.000	1.120.680.000	1.149.636.400	28.956.400		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	856.680.000	856.680.000	856.680.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			856.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	264.000.000	264.000.000	292.956.400	28.956.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 14				428.650.000	428.650.000	417.375.500	- 11.274.500						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	428.650.000	428.650.000	417.375.500	- 11.274.500						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola*	100 %	100 %	428.650.000	428.650.000	417.375.500	- 11.274.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		20.825.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	320.650.000	320.650.000	320.650.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			320.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	108.000.000	108.000.000	96.725.500	- 11.274.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			108.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		TK PEMBINA				223.520.000	223.520.000	223.520.000	-						245.377.158.997,00	
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 5-15 Tahun	100 %	100 %	223.520.000	223.520.000	223.520.000	-						54.499.349.320,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Satuan PAUD yang dikelola*	100 %	100 %	223.520.000	223.520.000	223.520.000	-		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan		9.189.826.320,00	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	90.420.000	90.420.000	90.420.000	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			90.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	133.100.000	133.100.000	133.100.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				194.771.826.557	192.487.253.511	197.904.937.285	3.133.110.728						272.919.201.559,00	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	40.278.832.306	43.168.127.406	46.826.889.330	6.548.057.024						78.604.983.532,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target*	90,32 %	90,32 %	6.749.269.134	7.097.395.834	10.237.854.256	3.488.585.122		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		21.581.157.939,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	6 Unit	6 Unit	240.000.000	240.000.000	0,00	-240.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			252.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	15 Unit	15 Unit	220.326.000	220.326.000	0,00	-220.326.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			231.342.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	100 Unit	30 Unit	1.170.083.000	1.423.497.000	1.536.752.554	366.669.554	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			609.074.064,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	138 Unit	138 Unit	150.000.000	142.200.000	133.804.000	-16.196.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			21.964.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	100 Unit	100 Unit	297.768.032	297.768.032	211.175.800	-86.592.232	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	10 Paket	10 Paket	4.628.179.402	4.730.692.102	8.356.121.902	3.727.942.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.500.184.061,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	12 Paket	12 Paket	42.912.700	42.912.700	0,00	- 42.912.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			45.058.335,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	33.529.563.172	36.070.731.572	36.589.035.074	3.059.471.902		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2430 Orang	2338 Orang	339.891.900	520.516.900	470.517.600	130.625.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			737.657.666,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2318 Orang	2338 Orang	55.048.300	55.048.300	42.446.100	- 12.602.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			160.112.293,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2207 Orang	2227 Orang	77.589.500	115.837.500	74.049.600	- 3.539.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			115.093.020,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8981 Orang	9081 Orang	418.713.400	418.713.400	524.911.100	106.197.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			255.696.640,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	31582 Orang	31683 Orang	30.698.000	30.698.000	20.595.800	- 10.102.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			94.668.866,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	129950 Orang	129950 Orang	69.802.300	278.242.300	155.404.400	85.602.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			138.161.623,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	34490 Orang	34485 Orang	43.368.200	42.468.200	29.819.200	- 13.549.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			229.196.814,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	40710 Orang	18910 Orang	27.003.500	27.003.500	18.377.500	- 8.626.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			257.610.974,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8142 Orang	6906 Orang	207.629.500	207.629.500	7.732.000	- 199.897.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			231.849.877,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	343 Orang	387 Orang	112.931.100	111.331.100	78.225.400	- 34.705.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			120.190.567,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5729 Orang	5268 Orang	783.915.200	818.715.200	169.908.600	- 614.006.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			246.142.362,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	6051 Orang	6436 Orang	71.392.500	71.392.500	17.137.500	- 54.255.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			240.444.454,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	206.459.600	255.843.000	394.308.100	187.848.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.416.196.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	2 Dokumen	2 Dokumen	171.619.000	164.299.000	191.040.400	19.421.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			48.158.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	5 Dokumen	5 Dokumen	292.075.200	289.675.200	60.014.500	- 232.060.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			24.473.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	154.252.800	154.252.800	178.876.000	24.623.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			154.252.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	3 Dokumen	3 Dokumen	97.124.100	97.124.100	282.775.100	185.651.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			53.468.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	343 Orang	240 Orang	26.925.600	26.925.600	9.335.700	-17.589.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.016.286.200	1.527.786.200	897.764.000	-118.522.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			422.163.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	36 Dokumen	36 Dokumen	27.218.762.555	28.764.874.555	30.964.867.598	3.746.105.043	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			34.754.525.821,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	18 Paket	18 Paket	29.686.000	29.686.000	83.546.000	53.860.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			30.062.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	9 Dokumen	9 Dokumen	376.478.800	356.858.800	196.624.000	-179.854.800	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			281.754.830,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	7 Dokumen	7 Dokumen	1.096.936.017	1.100.836.017	1.117.222.776	20.286.759	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.088.891.017,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	6 Unit	6 Unit	11.000.000	11.000.000	8.600.000	-2.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			38.896.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	0,00	-1.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	1 Unit	461.017.000	461.017.000	453.940.000	-7.077.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			565.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1179 Orang	1016 Orang	10.815.500	10.815.500	7.376.500	-3.439.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			43.266.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	575 Orang	500 Orang	13.400.500	13.400.500	9.068.500	-4.332.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			31.896.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	50 Orang	15 Orang	27.079.300	27.079.300	10.337.500	-16.741.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			42.570.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	2 Dokumen	2 Dokumen	80.161.600	80.161.600	114.213.600	34.052.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			74.162.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	95 %	95 %	608.824.000	608.524.000	414.107.150	-194.716.850						719.968.500,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	100 %	100 %	69.282.000	69.282.000	0,00	-69.282.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan)		69.282.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	0 Dokumen	6 Dokumen	69.282.000	69.282.000	0,00	-69.282.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			69.282.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP*	95 %	95 %	539.542.000	539.242.000	414.107.150	-125.434.850		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan)		650.686.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	650 Orang	100 Orang	539.542.000	539.242.000	414.107.150	-125.434.850	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			650.686.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	89 %	89 %	466.827.000	466.827.000	365.115.500	-101.711.500						98.421.200,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar*	89 %	89 %	139.761.000	139.761.000	53.475.000	-86.286.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		25.971.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	2 Dokumen	2 Dokumen	139.761.000	139.761.000	53.475.000	-86.286.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			25.971.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)*	89 %	89 %	327.066.000	327.066.000	311.640.500	-15.425.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	2 Dokumen	2 Dokumen	327.066.000	327.066.000	311.640.500	-15.425.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			72.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	71 %	72.20 %	2.767.594.600	2.881.932.400	2.681.538.800	-86.055.800						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	100 %	100 %	312.444.600	318.444.600	219.569.000	-92.875.600		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		86.889.412,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	312.444.600	318.444.600	219.569.000	-92.875.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			86.889.412,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota*	100 %	100 %	2.455.150.000	2.563.487.800	2.461.969.800	6.819.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.455.150.000	2.563.487.800	2.461.969.800	6.819.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.700.113.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN				133.093.705.651	127.805.799.705	129.005.805.705	-4.087.899.946						275.658.830.243,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	88	127.994.140.651	121.089.805.705	121.089.805.705	-6.904.334.946						189.667.613.915,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah*	100 %	100 %	35.618.202.540	10.758.996.094	10.758.996.094	-24.859.206.446		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	ASN di RSUD Kota Madiun		103.961.272.595,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	409 Orang/ bulan	397 Orang/ bulan	35.618.202.540	10.758.996.094	10.758.996.094	-24.859.206.446	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			44.158.879.538,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah*	100 %	100 %	92.375.938.111	110.330.809.611	110.330.809.611	17.954.871.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	BLUD RSUD Kota Madiun		82.502.246.027,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	92.375.938.111	110.330.809.611	110.330.809.611	17.954.871.500	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			82.502.246.027,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	5.099.565.000	6.715.994.000	7.916.000.000	2.816.435.000						78.604.983.532,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target*	90,32 %	90,32 %	5.099.565.000	6.715.994.000	7.916.000.000	2.816.435.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun		21.581.157.939,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	-	3 Unit	0,00	0,00	1.200.006.000	1.200.006.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			10.790.606.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	6 Paket	38 Paket	5.099.565.000	6.715.994.000	6.715.994.000	1.616.429.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.020.928.479,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS MANGUHARJO				2.853.816.000	2.853.816.000	3.178.724.000	324.908.000						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	2.853.816.000	2.853.816.000	3.170.094.000	316.278.000						78.604.983.532,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	2.853.816.000	2.853.816.000	3.170.094.000	316.278.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	510 Orang	0,00	0,00	59.064.000	59.064.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			59.064.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	3472 Orang	0,00	0,00	8.000.000	8.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	71 Orang	0,00	0,00	7.200.000	7.200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	198 Orang	0,00	0,00	850.000	850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	405.900.000	405.900.000	928.621.000	522.721.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			381.003.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.600.000	3.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000	2.400.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.939.000	8.939.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.939.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	122 Orang	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	618.566.000	618.566.000	120.755.000	497.811.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			64.603.662,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.829.350.000	1.829.350.000	1.982.872.000	153.522.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.930.197.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.084.000	7.084.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.084.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	34.109.000	34.109.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			34.109.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	800.000	800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.800.000	4.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.20 %	0,00	0,00	8.630.000	8.630.000						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	8.630.000	8.630.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.630.000	8.630.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.630.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS NGEGONG				2.571.015.000	2.571.015.000	2.651.548.000	80.533.000						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	2.571.015.000	2.571.015.000	2.643.918.000	72.903.000						78.604.983.532,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	2.571.015.000	2.571.015.000	2.643.918.000	72.903.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	350 Orang	0,00	0,00	84.185.000	84.185.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			84.185.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	7905 Orang	0,00	0,00	20.400.000	20.400.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	45 Orang	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	177 Orang	0,00	0,00	5.600.000	5.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	364.976.000	364.976.000	632.705.000	267.729.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			342.402.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.700.000	3.700.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.500.000	4.500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	2.850.000	2.850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	76 Orang	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	617.445.000	617.445.000	119.732.000	- 497.713.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			64.044.222,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.588.594.000	1.588.594.000	1.741.699.000	153.105.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.693.478.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.073.000	7.073.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.073.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.424.000	16.424.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			16.424.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	300.000	300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.250.000	1.250.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.20 %	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.630.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SUKOSARI				2.812.153.000	2.812.153.000	2.946.027.000	133.874.000						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	2.812.153.000	2.812.153.000	2.942.681.000	130.528.000						78.604.983.532,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	2.812.153.000	2.812.153.000	2.942.681.000	130.528.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	481 Orang	0,00	0,00	76.615.000	76.615.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			76.615.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	2587 Orang	0,00	0,00	14.000.000	14.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	62 Orang	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	224 Orang	0,00	0,00	1.850.000	1.850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	497.260.000	497.260.000	818.286.000	321.026.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			486.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.100.000	6.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	10.800.000	10.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	66 Orang	0,00	0,00	9.400.000	9.400.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			9.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	617.893.000	617.893.000	114.037.000	- 503.856.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			65.771.774,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.697.000.000	1.697.000.000	1.854.516.000	157.516.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.077.000	7.077.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.077.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.500.000	20.500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			20.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	200.000	200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.20 %	0,00	0,00	3.346.000	3.346.000						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	3.346.000	3.346.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.346.000	3.346.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.346.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS TAWANGREJO				2.733.929.000	2.733.929.000	2.850.518.000	116.589.000						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	2.733.929.000	2.733.929.000	2.846.872.000	112.943.000						78.604.983.532,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	2.733.929.000	2.733.929.000	2.846.872.000	112.943.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	349 Orang	0,00	0,00	70.368.000	70.368.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			70.368.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	2127 Orang	0,00	0,00	18.000.000	18.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	45 Orang	0,00	0,00	6.600.000	6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	134 Orang	0,00	0,00	1.600.000	1.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	335.004.000	335.004.000	651.533.000	316.529.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			296.004.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	900.000	900.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.700.000	6.700.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.800.000	5.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	68 Orang	0,00	0,00	5.600.000	5.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	605.825.000	605.825.000	115.862.000	489.963.000 -	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			61.600.231,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.793.100.000	1.793.100.000	1.947.204.000	154.104.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.688.611.050,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	13.805.000	13.805.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			13.805.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	500.000	500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000	2.400.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.20 %	0,00	0,00	3.646.000	3.646.000						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	3.646.000	3.646.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.646.000	3.646.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.646.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS BANJAREJO				3.432.429.000	3.432.429.000	3.657.537.800	225.108.800						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	3.432.429.000	3.432.429.000	3.647.207.800	214.778.800						78.604.983.532,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	3.432.429.000	3.432.429.000	3.647.207.800	214.778.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	613 Orang	0,00	0,00	107.850.000	107.850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			107.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	7353 Orang	0,00	0,00	7.800.000	7.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	86 Orang	0,00	0,00	3.000.000	3.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	224 Orang	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	706.200.000	706.200.000	1.024.591.000	318.391.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			672.959.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.600.000	1.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.000.000	3.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.100.000	8.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	140 Orang	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	663.229.000	663.229.000	241.723.800	- 421.505.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			68.650.191,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	2.063.000.000	2.063.000.000	2.229.049.000	166.049.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.550.000	7.550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.550.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.744.000	8.744.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.744.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	600.000	600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.600.000	1.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.2 %	0,00	0,00	10.330.000	10.330.000						3.828.214.412,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	10.330.000	10.330.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	10.330.000	10.330.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			10.330.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS DEMANGAN				3.152.701.000	3.152.701.000	3.327.126.000	174.425.000						275.658.830.243,00	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	3.152.701.000	3.152.701.000	3.319.496.000	166.795.000						78.604.983.532,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target*	75 %	75 %	3.152.701.000	3.152.701.000	3.319.496.000	166.795.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.023.825.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	572 Orang	0,00	0,00	108.720.000	108.720.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			108.720.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	-	8239 Orang	0,00	0,00	6.800.000	6.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	78 Orang	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	224 Orang	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	3 Dokumen	646.954.000	646.954.000	1.018.911.000	371.957.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			593.706.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.850.000	1.850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.050.000	6.050.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.600.000	8.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			8.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	148 Orang	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	655.747.000	655.747.000	120.998.000	-534.749.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			68.641.939,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.850.000.000	1.850.000.000	2.013.934.000	163.934.000	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.472.000	7.472.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.472.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	14.661.000	14.661.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			14.661.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	500.000	500.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-	72.20 %	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000						3.828.214.412,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*	-	100 %	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.741.325.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.630.000	7.630.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			7.630.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.901.028.275	20.424.099.182	19.099.710.516	198.682.241						28.902.901.035,00	
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	67 %	67 %	3.086.808.012	3.086.508.012	2.571.340.253	-515.467.759						3.387.768.395,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dibina*	67 %	67 %	3.086.808.012	3.086.508.012	2.571.340.253	-515.467.759		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	PSKS		3.387.768.395,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	209 Orang	209 Orang	379.254.841	378.954.841	351.985.722	-27.269.119	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			436.499.115,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Orang	3 Orang	47.159.440	47.159.440	42.400.780	-4.758.660	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			54.277.675,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	6 Keluarga	6 Keluarga	113.386.011	113.386.011	102.957.451	-10.428.560	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			130.504.978,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	13 Lembaga	13 Lembaga	2.547.007.720	2.547.007.720	2.073.996.300	-473.011.420	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			2.766.486.627,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	3.887.602.763	4.153.687.763	4.189.772.563	302.169.800						4.198.791.369,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial*	100 %	100 %	3.317.915.110	3.584.000.110	3.613.281.510	295.366.400		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		3.545.916.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	185 Orang	185 Orang	523.410.000	789.495.000	789.495.000	266.085.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			727.681.841,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	70 Orang	70 Orang	163.228.310	163.228.310	176.836.310	13.608.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			253.349.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	6 Orang	6 Orang	25.847.000	25.847.000	25.847.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			27.916.106,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	15 Orang	15 Orang	13.596.000	13.596.000	13.596.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			19.264.653,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	70 Orang	70 Orang	41.395.000	41.395.000	25.545.000	-15.850.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			10.095.664,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	300 Orang	300 Orang	1.876.900.000	1.876.900.000	1.877.271.400	371.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			2.116.977.871,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*	75 Orang	75 Orang	673.538.800	673.538.800	704.690.800	31.152.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			390.630.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial*	100%	100%	569.687.653	569.687.653	576.491.053	6.803.400		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	-		652.874.419,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*	38 Orang	38 Orang	218.917.200	218.917.200	225.930.200	7.013.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			264.711.358,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	*Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	65 Orang	65 Orang	16.386.200	16.386.200	16.386.200	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			24.723.574,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	20.280.000	20.280.000	16.790.000	-3.490.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			21.396.432,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota*	115 Orang	115 Orang	20.730.253	20.730.253	21.674.653	944.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			26.896.587,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	250 Orang	250 Orang	164.674.000	164.674.000	164.744.000	70.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			179.656.809,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	90 Orang	90 Orang	121.902.000	121.902.000	121.902.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			125.857.333,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	22 Orang	22 Orang	6.798.000	6.798.000	9.064.000	2.266.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			9.632.326,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	11.513.773.100	12.771.059.007	11.932.434.300	418.661.200						11.910.457.169,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang valid*	100 %	100 %	11.513.773.100	12.771.059.007	11.932.434.300	418.661.200		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	PMKS		11.910.457.169,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*	8460 Orang	8460 Orang	1.020.943.100	1.020.943.100	975.794.300	-45.148.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			1.175.048.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Koa*	3600 Keluarga	3600 Keluarga	246.326.000	246.270.000	144.690.000	-101.636.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			283.530.461,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Koa*	3600 Keluarga	3600 Keluarga	10.046.564.000	10.700.469.000	10.636.869.000	590.305.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			10.221.734.661,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Koa*	58 Orang	58 Orang	199.940.000	803.376.907	175.081.000	-24.859.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			230.143.270,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 %	100 %	412.844.400	412.844.400	406.163.400	-6.681.000						475.624.915,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban bencana yang mendapat pelayanan*	100 %	100 %	48.000.400	48.000.400	43.900.400	-4.100.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		55.361.541,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	300 Orang	300 Orang	25.791.000	25.791.000	25.791.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			29.689.223,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Koa*	300 Orang	300 Orang	13.959.400	13.959.400	13.959.400	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			16.108.004,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Koa*	15 Orang	15 Orang	8.250.000	8.250.000	4.150.000	-4.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			9.564.314,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana*	100 %	100 %	364.844.000	364.844.000	362.263.000	-2.581.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat di Kelurahan		420.263.374,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Koa*	1 Kampung	1 Kampung	16.744.000	16.744.000	8.835.000	-7.909.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			19.322.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Koa*	26 Orang	26 Orang	348.100.000	348.100.000	353.428.000	5.328.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			400.941.335,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.041.222.515	13.096.222.515	14.988.604.665	1.947.382.150						14.115.404.708,00	
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	30 %	2.122.380.000	2.122.380.000	2.244.727.827	122.347.827						2.325.458.860,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi*	150 orang	150 orang	2.071.900.000	2.071.900.000	2.202.147.727	130.247.727		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Masyarakat/Pencari Kerja		2.301.838.860,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	210 Orang	210 Orang	2.071.900.000	2.071.900.000	2.202.147.727	130.247.727	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			2.301.838.860,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Prosentase LPKS yang berijin*	50 %	50 %	10.480.000	10.480.000	8.882.500	-1.597.500		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*	27 Lembaga	27 Lembaga	10.480.000	10.480.000	8.882.500	-1.597.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja*	30 perusahaan	30 perusahaan	40.000.000	40.000.000	33.697.600	-6.302.400		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Perusahaan		13.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	33.697.600	-6.302.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			13.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	15 %	374.590.600	374.590.600	328.573.980	-46.016.620						220.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja*	200 orang	200 orang	374.590.600	374.590.600	328.573.980	-46.016.620		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat/Pencari Kerja		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*	1 Dokumen	1 Dokumen	116.306.600	116.306.600	108.946.900	-7.359.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*	150 Orang	150 Orang	108.284.000	108.284.000	86.085.200	-22.198.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	40 Orang	50 Orang	150.000.000	150.000.000	133.541.880	-16.458.120	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	16 %	3.391.228.948	3.391.228.948	3.649.739.468	258.510.520						3.449.228.948,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB*	50 perusahaan	50 perusahaan	64.223.800	64.223.800	157.544.620	93.320.820		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Perusahaan		154.223.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*	20 Perusahaan	20 Perusahaan	33.973.800	33.973.800	21.138.620	-12.835.180	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			123.973.800,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*	1 Laporan	1 Laporan	30.250.000	30.250.000	136.406.000	106.156.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			30.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan*	75 %	75 %	3.327.005.148	3.327.005.148	3.492.194.848	165.189.700		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Perusahaan		3.295.005.148,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	15 Perkara	15 Perkara	100.000.000	100.000.000	79.452.000	-20.548.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05. 2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	15.000 Orang	15.000 Orang	3.227.005.148	3.227.005.148	3.412.742.848	185.737.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)1 Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi			3.220.005.148,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.718.038.725	1.800.044.383	1.743.853.392	25.814.667						2.090.190.637,00	
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	100 %	100 %	824.946.939	909.202.597	595.628.571	- 229.318.369						950.522.304,00	
	2.08.02. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase program yang di ARG*	100 %	100 %	88.311.842	88.311.842	65.175.000	- 23.136.842		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pemerintahan		102.626.099,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	28.176.000	28.176.000	19.586.000	- 8.590.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			32.631.206,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	60.135.842	60.135.842	45.589.000	- 14.546.842	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			69.994.893,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	100 %	100 %	8.823.000	8.823.000	7.923.000	- 900.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		10.038.231,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.02.000 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.823.000	8.823.000	7.923.000	- 900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			10.038.231,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina*	100 %	100 %	727.812.097	812.067.755	522.530.571	- 205.281.527		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		837.857.974,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02. 2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	580 Orang	580 Orang	708.412.097	792.667.755	492.360.571	- 216.051.527	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			815.453.478,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.400.000	19.400.000	30.170.000	10.770.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			22.404.496,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	100 %	264.471.348	264.471.348	518.294.748	253.823.400						384.957.159,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan*	100 %	100 %	72.165.199	72.165.199	102.598.799	30.433.600		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan pada Lembaga Masyarakat		59.010.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.628.986	19.628.986	77.071.586	57.442.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			22.656.477,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	52.536.213	52.536.213	25.527.213	-27.009.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			36.353.743,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan*	100 %	100 %	173.472.015	173.472.015	363.455.115	189.983.100		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		194.224.349,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Layanan	1 Layanan	173.472.015	173.472.015	363.455.115	189.983.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			194.224.349,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif*	100 %	100 %	18.834.134	18.834.134	52.240.834	33.406.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		131.722.590,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	-	10 Orang	0,00	0,00	37.460.700	37.460.700	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik*	12 Orang	12 Orang	12.587.832	12.587.832	9.233.832	-3.354.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			14.500.683,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.246.302	6.246.302	5.546.302	-700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			7.221.907,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	40 %	40 %	195.391.263	195.391.263	222.892.563	27.501.300						224.943.649,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak*	100 %	100 %	135.205.863	135.205.863	127.156.963	-8.048.900		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Keluarga di Kota Madiun		155.653.698,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	60.276.000	60.276.000	57.576.000	-2.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			69.409.219,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	1 Dokumen	1 Dokumen	74.929.863	74.929.863	69.580.963	-5.348.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			86.244.479,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak*	100 %	100 %	60.185.400	60.185.400	95.735.600	35.550.200		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		69.289.951,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	280 Orang	280 Orang	60.185.400	60.185.400	95.735.600	35.550.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			69.289.951,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	66.662.028	66.662.028	61.700.783	-4.961.245						76.724.422,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengumpulan data gender dan anak*	100 %	100 %	66.662.028	66.662.028	61.700.783	-4.961.245		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Kelembagaan Data		76.724.422,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	66.662.028	66.662.028	61.700.783	-4.961.245	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			76.724.422,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif Dalam Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	299.951.000	298.001.000	182.760.620	-117.190.380						346.256.175,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak*	100 %	100 %	36.924.000	36.774.000	27.988.620	-8.935.380		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		63.503.044,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	36.924.000	36.774.000	27.988.620	-8.935.380	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			63.503.044,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	100 %	100 %	263.027.000	261.227.000	154.772.000	-108.255.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		282.753.131,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	110 Orang	110 Orang	8.852.000	8.852.000	8.452.000	-400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			18.048.867,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	137.462.000	135.662.000	57.354.000	-80.108.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			146.833.201,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	74.498.000	74.498.000	60.492.000	-14.006.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			75.147.359,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	42.215.000	42.215.000	28.474.000	-13.741.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			42.723.704,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	0,04 %	0,04 %	66.616.147	66.316.147	162.576.107	95.959.960						106.786.928,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak*	100 %	100 %	19.554.769	19.554.769	52.973.529	33.418.760		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		37.512.079,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	*Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.554.769	19.554.769	8.731.129	-10.823.640	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			22.512.079,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA*	-	20 Orang	0,00	0,00	44.242.400	44.242.400	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus*	100 %	100 %	21.341.000	21.341.000	58.754.700	37.413.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		24.659.441,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	10 Layanan	10 Layanan	21.341.000	21.341.000	58.754.700	37.413.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			24.659.441,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak*	100 %	100 %	25.720.378	25.420.378	50.847.878	25.127.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		44.615.408,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.720.378	25.420.378	20.196.378	-5.524.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			29.615.408,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*	-	15 Orang	0,00	0,00	30.651.500	30.651.500	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				623.777.634	659.333.000	808.857.300	185.079.666						7.852.762.030,00	
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi Persentase Angka Kecukupan Energi	2000 kkal/kapita 95%	2000 kkal/kapita 95%	473.214.634	495.111.000	652.974.000	179.759.366						395.923.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Prosentase ketersediaan pangan utama*	100 %	100 %	230.716.634	235.016.600	201.458.000	-29.258.634		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		223.425.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	1 Laporan	185.862.734	190.162.700	159.348.000	-26.514.734	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			172.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	6 Laporan	6 Laporan	44.853.900	44.853.900	42.110.000	-2.743.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			50.585.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka Kecukupan Protein / AKP*	63 gram/kapita	63 gram/kapita	242.498.000	260.094.400	451.516.000	209.018.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		172.498.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	51.571.000	57.967.400	54.079.000	2.508.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	1 Laporan	190.927.000	202.127.000	397.437.000	206.510.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			128.498.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	22 %	22 %	63.300.000	65.853.000	62.779.300	-520.700						54.300.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	63.300.000	65.853.000	62.779.300	-520.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		54.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	63.300.000	65.853.000	62.779.300	-520.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			54.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	80 %	87.263.000	98.369.000	93.104.000	5.841.000						87.263.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	8 Lokasi	8 Lokasi	87.263.000	98.369.000	93.104.000	5.841.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		87.263.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokumen	1 Dokumen	87.263.000	98.369.000	93.104.000	5.841.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			87.263.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.892.802.000	4.971.612.600	3.400.720.300	-1.492.081.700						2.739.628.684,00	
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatnya Kampung KB yang Berstandar Paripurna	14 7 SSK Kampung KB	14 7 SSK Kampung KB	614.587.000	618.587.000	337.836.000	-276.751.000						304.288.800,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK*	6 Sekolah	6 Sekolah	71.520.000	71.520.000	48.417.000	-23.103.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		24.857.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota*	13 Dokumen	13 Dokumen	71.520.000	71.520.000	48.417.000	-23.103.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			24.857.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data keluarga yang diupdating*	100 %	100 %	543.067.000	547.067.000	289.419.000	-253.648.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		279.431.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	-	4 Laporan	0,00	0,00	60.000.000	60.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	27 Laporan	27 Laporan	494.521.000	498.521.000	199.899.000	-294.622.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			166.448.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	27 Dokumen	27 Dokumen	48.546.000	48.546.000	29.520.000	-19.026.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			52.983.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	6,8 %	6,8 %	2.187.515.000	2.196.740.000	1.322.400.000	-865.115.000						1.040.415.084,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB*	100 %	100 %	736.891.000	736.891.000	507.310.000	-229.581.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		483.940.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	2 Laporan	2 Laporan	140.000.000	140.000.000	0,00	-140.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	12 Laporan	12 Laporan	131.754.000	131.754.000	81.480.000	-50.274.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			192.642.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	9 Laporan	9 Laporan	45.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	150.000.000	100.000.000	-50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			100.298.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	27 Organisasi	27 Organisasi	270.137.000	270.137.000	265.830.000	-4.307.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			72.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase kader yang melakukan updating data*	100 %	100 %	88.687.000	101.512.000	44.040.000	-44.647.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		67.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	150 Orang	150 Orang	88.687.000	101.512.000	44.040.000	-44.647.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			67.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon*	100 %	100 %	975.777.000	972.177.000	484.917.000	-490.860.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		309.598.884,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	24 Laporan	24 Laporan	15.300.000	15.300.000	18.400.000	3.100.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	661 Orang	661 Orang	943.827.000	940.227.000	438.551.000	-505.276.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			284.898.884,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	4 Laporan	4 Laporan	16.650.000	16.650.000	27.966.000	11.316.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			11.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Ber-KB	*Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB*	100 %	100 %	386.160.000	386.160.000	286.133.000	-100.027.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		179.676.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	7 Dokumen	7 Dokumen	3.707.000	3.707.000	0,00	-3.707.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			3.707.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	7 Kampung	7 Kampung	382.453.000	382.453.000	286.133.000	-96.320.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			175.969.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	87,7 %	97.10 %	2.090.700.000	2.156.285.600	1.740.484.300	-350.215.700						1.394.924.800,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS*	32 %	32 %	1.145.700.000	1.211.285.600	750.484.300	-395.215.700		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		449.924.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*	8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	28.800.000	28.800.000	28.800.000	0,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			28.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	32 Laporan	32 Laporan	711.456.500	782.754.100	542.799.700	-168.656.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			36.576.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	25 Unit	10 Unit	302.686.000	302.686.000	132.147.600	-170.538.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			302.686.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	210 Orang	100 Orang	102.757.500	97.045.500	46.737.000	-56.020.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			81.862.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting*	72 %	72 %	945.000.000	945.000.000	990.000.000	45.000.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		945.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	10 laporan	10 laporan	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	10 laporan	10 laporan	495.000.000	495.000.000	540.000.000	45.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.797.503.863	6.677.503.863	6.902.659.563	2.105.155.700						6.270.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	81 Orang	81 Orang	200.000.000	120.000.000	97.159.200	-102.840.800						250.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan*	5 Event	1 Event	200.000.000	120.000.000	97.159.200	-102.840.800		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kota Madiun		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	120.000.000	97.159.200	-102.840.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	128 Medali	128 Medali	4.597.503.863	6.557.503.863	6.805.500.363	2.207.996.500						5.900.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi*	100 %	100 %	1.811.388.863	1.811.388.863	2.861.388.863	1.050.000.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kota Madiun		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	3 Unit	3 Unit	1.811.388.863	1.811.388.863	2.861.388.863	1.050.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelenggaraan event olahraga*	6 Event	6 Event	1.421.115.000	2.181.115.000	1.503.458.500	82.343.500		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kota Madiun		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.321.115.000	2.081.115.000	1.453.458.500	132.343.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	50.000.000	-50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Prosentase pengembangan organisasi keolahragaan*	100 %	100 %	1.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	1.200.000.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kota Madiun		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	1.200.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Cabang olahraga yang mendapat pembinaan*	3 Cabor	3 Cabor	365.000.000	365.000.000	240.653.000	-124.347.000		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kota Madiun		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	13 Lembaga	13 Lembaga	365.000.000	365.000.000	240.653.000	-124.347.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.350.127.000	2.350.127.000	2.418.478.310	68.351.310						2.590.000.000,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event/kegiatan pelestarian kebudayaan	15 Kali	15 Kali	2.080.000.000	2.080.000.000	2.212.236.600	132.236.600						2.350.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran*	162 orang	162 orang	1.622.572.400	1.622.572.400	1.769.295.500	146.723.100		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Masyarakat Kota Madiun		1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	8 Objek	8 Objek	1.622.572.400	1.622.572.400	1.769.295.500	146.723.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran*	162 Orang	162 Orang	457.427.600	457.427.600	442.941.100	-14.486.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Masyarakat Kota Madiun		450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*	25 Sertifikat	25 Sertifikat	457.427.600	457.427.600	442.941.100	-14.486.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah event/kegiatan pelestarian kesenian tradisional	15 Kali	15 Kali	170.127.000	170.127.000	120.358.310	-49.768.690						120.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah seni budaya yang dibina*	2 Jenis	2 Jenis	170.127.000	170.127.000	120.358.310	-49.768.690		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Masyarakat Kota Madiun		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	40 Orang	40 Orang	170.127.000	170.127.000	120.358.310	-49.768.690	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	2 Obyek	2 Obyek	100.000.000	100.000.000	85.883.400	-14.116.600						120.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dalam bidang perekonomian*	2 Obyek	2 Obyek	100.000.000	100.000.000	85.883.400	-14.116.600		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Masyarakat Kota Madiun		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	2 Objek	2 Objek	100.000.000	100.000.000	85.883.400	-14.116.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				8.361.844.291,00	8.334.815.858	8.133.258.996,77	-228.585.294,23						6.095.256.624,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	82 Nilai	7.044.126.968	7.017.098.535	6.895.303.065	-148.823.903						5.199.726.321,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen PerencanaPersentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	57.001.532	57.001.532	57.001.532	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi Perangkat Daerah		31.089.855,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	57.001.532	57.001.532	57.001.532	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			31.089.855,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	3.898.506.810	2.321.710.390	2.320.055.868	-1.578.450.942		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi Perangkat Daerah		4.045.291.218,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	3.898.506.810	2.321.710.390	2.320.055.868	-1.578.450.942	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.045.291.218,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	275.828.000	150.000.000	75.000.000	-200.828.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi Perangkat Daerah		97.998.544,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	45 Laporan	20 Laporan	275.828.000	150.000.000	75.000.000	-200.828.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			97.998.544,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	34.363.280	981.477.840	962.998.560	928.635.280		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi Perangkat Daerah		55.346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	167 Unit	34.363.280	981.477.840	962.998.560	928.635.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	826.192.140	2.210.889.620	2.112.537.492	1.286.345.352		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi Perangkat Daerah		745.000.499,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	826.192.140	2.210.889.620	2.112.537.492	1.286.345.352	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			745.000.499,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak digunakan*	100 %	100 %	1.952.235.206	1.296.019.153	1.367.709.613	584.525.593		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi perangkat Daerah		224.999.705,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	22 Unit	22 Unit	210.814.000	210.814.000	210.814.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			88.499.855,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	1.651.551.277	995.335.224	1.067.025.684	-584.525.593	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			71.999.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	72 Unit	72 Unit	89.869.929	89.869.929	89.869.929	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			64.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	36,79 %	36,79 %	1.272.717.543	1.272.717.543	1.213.152.252	-59.565.291						845.530.413,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat*	4,9 %	4,9 %	504.085.230	504.085.230	473.014.992	-31.070.238		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Madiun		405.504.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	750 Eksemplar	1890 Eksemplar	180.042.110	180.042.110	179.054.000	-988.110	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			85.502.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK*	76 Perpustakaan	76 Perpustakaan	324.043.120	324.043.120	293.960.992	-30.082.128	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			320.002.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca*	20 Kali	20 Kali	768.632.313	768.632.313	740.137.260	-28.495.053		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Madiun		440.026.413,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*	5 Perpustakaan	18 Perpustakaan	98.860.792	98.860.792	92.211.692	-6.649.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			57.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*	212 Lokus	216 Lokus	669.771.521	669.771.521	647.925.568	-21.845.953	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			382.526.413,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	94 %	94 %	44.999.780	44.999.780	24.803.680	-20.196.100						49.999.890,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang Dilestarikan*	210 Eksemplar	210 Eksemplar	44.999.780	44.999.780	24.803.680	-20.196.100		Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Madiun		49.999.890,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno*	2 Orang	1 Orang	26.999.895	26.999.895	14.634.100	-12.365.795	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			29.999.990,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	*Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan*	4 Eksemplar	1 Eksemplar	17.999.885	17.999.885	10.169.580	-7.830.305	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan			19.999.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				13.007.383.644	12.541.876.249	11.717.637.383	-1.289.746.261						26.533.658.438,00	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.007.383.644	12.541.876.249	11.717.637.383	-1.289.746.261						26.533.658.438,00	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	1.367.239.210	1.918.417.565	1.499.503.062	132.263.852						2.300.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah jenis kegiatan*	6 jenis	6 jenis	1.367.239.210	1.918.417.565	1.499.503.062	132.263.852		Memperkokokh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		2.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	200 Orang	200 Orang	581.343.210	869.173.595	740.802.956	159.459.746	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokokh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*	2 Dokumen	2 Dokumen	785.896.000	1.049.243.970	758.700.106	-27.195.894	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokokh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100 %	100 %	2.079.743.250	1.149.398.000	1.102.526.740	-977.216.510						3.499.916.500,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat*	80 persen	80 persen	2.079.743.250	1.149.398.000	1.102.526.740	-977.216.510		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		3.499.916.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	50 Orang	50 Orang	1.039.398.000	1.039.398.000	1.019.689.000	-19.709.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			1.455.563.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	55 Orang	55 Orang	534.353.000	60.000.000	42.963.440	-491.389.560	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			534.353.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	505.992.250	50.000.000	39.874.300	-466.117.950	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			1.510.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas	100 %	100 %	337.740.500	348.400.000	318.703.110	-19.037.390						940.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarkatan*	100 persen	100 persen	337.740.500	348.400.000	318.703.110	-19.037.390		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		940.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	300 Orang	300 Orang	337.740.500	348.400.000	318.703.110	-19.037.390	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			940.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	100 %	6.774.769.912	6.771.969.912	6.525.416.071	-249.353.841						8.271.316.512,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah koordinasi*	4 kali	4 kali	6.774.769.912	6.771.969.912	6.525.416.071	-249.353.841		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-		8.271.316.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	100 Orang	100 Orang	95.294.400	45.294.400	42.531.403	-52.762.997	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			95.294.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	500 Orang	500 Orang	6.679.475.512	6.726.675.512	6.482.884.668	-196.590.845	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai - Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas			8.176.022.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang Terfasilitasi	100 %	100 %	2.447.890.772	2.353.690.772	2.271.488.400	-176.402.372						4.500.866.190,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*[deleted] Jumlah konflik Persentase konflik yang terfasilitasi*	0 konflik 100 persen	0 konflik 100 persen	2.447.890.772	2.353.690.772	2.271.488.400	-176.402.372		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	-		4.500.866.190,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	100 Orang	100 Orang	1.984.515.074	1.916.715.074	1.875.937.074	-108.578.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			3.500.866.190,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	12 Dokumen	12 Dokumen	463.375.698	436.975.698	395.551.326	-67.824.372	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P1-Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						492.428.449.281,00	495.750.782.938	455.497.391.607,31	-36.931.057.673,69							

PRIORITAS 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.604.978.992	22.770.753.992	20.965.059.065	-1.639.919.927						26.706.239.671,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				60.024.678.149	84.982.967.094	84.710.355.322	24.685.677.173						272.919.201.559,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	88	60.024.678.149	84.982.967.094	84.710.355.322	24.685.677.173						189.667.613.915,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun*	100 %	100 %	439.047.000	403.747.000	246.421.600	-192.625.400		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Kesehatan PP dan KB		460.999.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	8 Dokumen	273.326.100	243.126.100	91.481.600	-181.844.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			296.905.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	104.800.000	104.800.000	106.450.000	1.650.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			107.310.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	60.920.900	55.820.900	48.490.000	-12.430.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			56.784.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah*	100 %	100 %	55.946.579.110	62.233.181.006	62.782.825.634	6.836.246.524		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB		103.961.272.595,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	496 Orang/ bulan	496 Orang/ bulan	55.946.579.110	62.233.181.006	62.782.825.634	6.836.246.524	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			59.802.393.057,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.621.699.589	1.702.322.089	1.203.466.089	-418.233.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Kesehatan PP dan KB		1.866.076.271,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	936.699.589	1.017.922.089	861.266.089	-75.433.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.216.076.271,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	70 Laporan	685.000.000	684.400.000	342.200.000	-342.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	430.668.450	430.668.450	430.668.450	-		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Kesehatan PP dan KB		219.375.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	76 Unit	154.997.450	154.997.450	154.997.450	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			126.417.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	75 Unit	44 Unit	275.671.000	275.671.000	275.671.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			92.958.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang*	100 %	100 %	867.690.000	19.494.054.549	19.327.979.549	18.460.289.549		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Kesehatan PP dan KB		33.445.372,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	867.690.000	19.494.054.549	19.327.979.549	18.460.289.549	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			33.445.372,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	718.994.000	718.994.000	718.994.000	-		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Kesehatan PP dan KB		624.199.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	109 Unit	89 Unit	405.696.900	405.696.900	405.696.900	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			389.312.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	162.876.000	162.876.000	162.876.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			19.013.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	273 Unit	273 Unit	150.421.100	150.421.100	150.421.100	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			215.873.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				14.814.889.953	16.060.819.641	17.108.553.322	2.293.663.369						137.374.400.000,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	14.814.889.953	16.060.819.641	17.108.553.322	2.293.663.369						16.150.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*[deleted] Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah*	81 persen	81 persen	294.251.670	294.251.670	192.151.712	-102.099.958		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	8 Dokumen	140.868.950	140.868.950	166.463.069	25.594.119	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	153.382.720	153.382.720	25.688.643	-127.694.077	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 persen	100 persen	7.500.000.000	4.646.599.190	4.828.455.817	-2.671.544.183		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		7.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	7.500.000.000	4.646.599.190	4.828.455.817	-2.671.544.183	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			7.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 persen	100 persen	467.087.000	467.467.000	233.663.000	-233.424.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	467.087.000	467.467.000	233.663.000	-233.424.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah*	100 persen	100 persen	496.721.848	1.198.340.368	1.766.030.368	1.269.308.520		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	403.890.000	403.890.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	496.721.848	1.198.340.368	1.362.140.368	865.418.520	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah*	100 persen	100 persen	4.200.316.799	7.289.459.777	7.576.787.989	3.376.471.190		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		4.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	4.200.316.799	7.289.459.777	7.576.787.989	3.376.471.190	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 persen	100 persen	1.856.512.636	2.164.701.636	2.511.464.436	654.951.800		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Internal dan Eksternal		1.775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	54 Unit	54 Unit	945.673.670	1.009.193.670	1.355.956.470	410.282.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	678.650.000	923.319.000	923.319.000	244.669.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	232.188.966	232.188.966	232.188.966	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.077.641.051	11.058.555.051	10.792.887.004	- 284.754.047						45.984.674.176,00	
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor	84,85 Skor	11.077.641.051	11.058.555.051	10.792.887.004	- 284.754.047						11.394.880.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah*	100 %	100 %	18.050.000	18.050.000	17.349.100	- 700.900		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	20 Laporan	20 Laporan	18.050.000	18.050.000	17.349.100	- 700.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	5.678.750.000	3.325.836.360	3.470.003.492	- 2.208.746.508		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		5.511.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.617.750.000	3.264.836.360	3.409.365.273	- 2.208.384.727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	13 Laporan	61.000.000	61.000.000	60.638.219	-361.781	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			61.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian*	100 %	100 %	135.350.000	135.350.000	96.939.000	-38.411.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		135.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	125.350.000	125.350.000	86.338.000	-39.012.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	34 Orang	34 Orang	10.000.000	10.000.000	10.601.000	601.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	233.880.000	283.880.000	156.392.800	-77.487.200		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		233.880.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	20 Laporan	233.880.000	283.880.000	156.392.800	-77.487.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			233.880.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	115.570.735	115.570.735	145.201.575	29.630.840		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	11 Unit	11 Unit	115.570.735	115.570.735	145.201.575	29.630.840	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	2.185.795.316	4.469.622.956	4.216.756.038	2.030.960.722		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.185.795.316	4.469.622.956	4.216.756.038	2.030.960.722	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan*	100 %	100 %	2.710.245.000	2.710.245.000	2.690.245.000	-20.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Perkim		2.870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	65 Unit	65 Unit	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	80.000.000	-20.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	106 Unit	106 Unit	510.245.000	510.245.000	510.245.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			520.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.580.605.992	20.746.380.992	19.331.000.777	-1.249.605.215						26.706.239.671,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	84 Nilai	84 Nilai	14.541.705.432	14.541.705.432	14.005.183.135	-536.522.297						14.801.404.671,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah*	100 %	100 %	195.425.000	2.000.000	1.400.000	-194.025.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP		246.067.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	195.425.000	2.000.000	1.400.000	-194.025.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			246.067.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	9.772.101.808	5.615.926.228	5.541.912.077	-4.230.189.731		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		7.472.847.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	93 Orang/b ulan	93 Orang/b ulan	9.772.101.808	5.615.926.228	5.541.912.077	-4.230.189.731	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			7.472.847.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian*	100 %	100 %	824.086.000	824.086.000	583.820.000	-240.266.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	824.086.000	824.086.000	583.820.000	-240.266.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	350.000.000	350.000.000	175.000.000	-175.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	36 Laporan	36 Laporan	350.000.000	350.000.000	175.000.000	-175.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	100 %	100 %	1.019.255.000	1.023.101.000	1.044.839.000	25.584.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		1.281.912.271,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	18 Unit	18 Unit	59.585.000	59.585.000	59.585.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			205.622.271,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	810.670.000	806.290.000	806.290.000	-4.380.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			806.290.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	12 Unit	12 Unit	149.000.000	157.226.000	178.964.000	29.964.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	1.193.196.000	5.542.796.580	5.540.420.058	4.347.224.058		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		3.290.578.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.193.196.000	5.542.796.580	5.540.420.058	4.347.224.058	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.290.578.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	1.187.641.624	1.183.795.624	1.117.792.000	-69.849.624		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP dan Damkar		1.360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	25 Unit	25 Unit	745.500.000	741.654.000	741.654.000	-3.846.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	332.141.624	332.141.624	266.138.000	-66.003.624	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			390.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	6 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang Diselesaikan	98 %	98 %	6.038.900.560	6.204.675.560	5.325.817.642	-713.082.918						9.880.462.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	200 Kasus 98 %	200 Kasus 98 %	4.196.471.760	4.196.471.760	3.895.239.481	-301.232.279		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat		6.128.720.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	4 Dokumen	4 Dokumen	158.860.000	158.860.000	104.505.000	-54.355.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			198.672.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	4 Dokumen	2.562.125.500	2.562.125.500	2.603.010.000	40.884.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.765.368.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	119 Orang	119 Orang	615.216.260	615.216.260	251.850.772	-363.365.488	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			712.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	*Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas*	-	50 Orang	0,00	0,00	239.688.709	239.688.709	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			301.554.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	12 laporan	12 laporan	294.400.000	294.400.000	289.013.000	-5.387.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			466.019.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	12 Laporan	12 Laporan	565.870.000	565.870.000	407.172.000	-158.698.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			685.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota*	98 %	98 %	1.692.428.800	1.858.203.800	1.326.339.451	-366.089.349		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat		3.601.741.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	6 Laporan	6 Laporan	792.428.800	409.913.800	280.918.160	-511.510.640	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.701.741.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	6 Laporan	6 Laporan	900.000.000	1.448.290.000	1.045.421.291	145.421.291	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas*	80 %	80 %	150.000.000	150.000.000	104.238.710	-45.761.290		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	SatpolPP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	104.238.710	-45.761.290	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.324.177.694	8.296.151.393	7.934.355.503	-389.822.191						28.902.901.035,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 Nilai	85,50 Nilai	8.324.177.694	8.296.151.393	7.934.355.503	-389.822.191						8.751.913.062,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	162.215.000	162.215.000	88.835.000	-73.380.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		195.383.514,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10 Laporan	10 Laporan	162.215.000	162.215.000	88.835.000	-73.380.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			195.383.514,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah*	100 %	100 %	6.557.938.804	3.758.355.716	3.736.194.119	-2.821.744.685		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		6.381.079.229,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	6.557.938.804	3.758.355.716	3.736.194.119	-2.821.744.685	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			6.381.079.229,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	927.288.840	3.386.585.627	3.115.171.334	2.187.882.494		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		964.192.043,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	612.565.840	3.087.782.627	2.972.950.334	2.360.384.494	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			607.821.043,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	314.723.000	298.803.000	142.221.000	-172.502.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			356.371.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah*	100 %	100 %	256.610.000	568.870.000	574.030.000	317.420.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		612.860.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	256.610.000	568.870.000	574.030.000	317.420.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			612.860.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	420.125.050	420.125.050	420.125.050	-		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, PP dan PA		598.398.276,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	6 Unit	198.790.000	198.790.000	198.790.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.187.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3 Unit	132.843.750	132.843.750	132.843.750	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			256.436.670,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	110 Unit	110 Unit	88.491.300	88.491.300	88.491.300	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			141.774.606,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.153.022.967	7.208.022.967	8.765.563.390	1.612.540.423						14.115.404.708,00	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,02 Nilai	81,2 Nilai	7.153.022.967	7.208.022.967	8.765.563.390	1.612.540.423						8.120.716.900,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	65.687.000	-34.313.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	100.000.000	65.687.000	-34.313.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	5.480.716.900	3.364.401.760	3.400.539.239	-2.080.177.661		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		5.480.716.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	5.480.716.900	3.364.401.760	3.400.539.239	-2.080.177.661	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.480.716.900,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian*	100 %	100 %	19.710.000	19.710.000	1.000.000	-18.710.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	70 Orang	65 Orang	19.710.000	19.710.000	1.000.000	-18.710.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	983.548.271	3.099.863.411	2.874.289.356	1.890.741.085		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	9 Paket	9 Paket	700.000.000	2.816.315.140	2.689.388.220	1.989.388.220	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			575.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	75 Laporan	50 Laporan	283.548.271	283.548.271	184.901.136	-98.647.136	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	285.757.796	340.757.796	1.972.131.150	1.686.373.354		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		1.585.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	35.000.000	45.409.000	1.595.282.354	1.560.282.354	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	21 Unit	21 Unit	119.757.796	164.348.796	164.348.796	44.591.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	125.000.000	125.000.000	206.500.000	81.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	283.290.000	283.290.000	451.916.646	168.626.646		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Tenaga Kerja, KUKM		155.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	22 Unit	24 Unit	83.290.000	83.290.000	133.416.646	50.126.646	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3 Unit	150.000.000	150.000.000	268.500.000	118.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	66 Unit	66 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.044.268.608	7.058.800.648	6.914.425.950	- 129.842.658						7.852.762.030,00	
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05 Nilai	81,05 Nilai	7.044.268.608	7.058.800.648	6.914.425.950	- 129.842.658						7.315.276.030,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	75.535.000	85.979.000	75.369.000	- 166.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		75.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	75.535.000	85.979.000	75.369.000	- 166.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi keuangan*	100 %	100 %	4.995.931.000	3.013.099.500	3.022.899.500	- 1.973.031.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		5.382.457.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	4.995.931.000	3.013.099.500	3.022.899.500	- 1.973.031.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.382.457.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai*	100 %	100 %	117.078.000	117.078.000	109.002.750	- 8.075.250		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		121.078.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	80 Paket	80 Paket	70.000.000	70.000.000	69.319.750	- 680.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	3 Dokumen	3 Dokumen	47.078.000	47.078.000	39.683.000	- 7.395.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			51.078.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	1.187.137.000	3.174.056.540	2.974.020.600	1.786.883.600		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		1.212.347.430,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	827.137.000	2.816.760.540	2.795.372.600	1.968.235.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			834.347.430,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000	357.296.000	178.648.000	-181.352.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			378.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	119.727.000	119.727.000	127.797.200	8.070.200		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		82.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	30 Unit	32 Unit	119.727.000	119.727.000	127.797.200	8.070.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			82.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	548.860.608	548.860.608	605.336.900	56.476.292		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	DKPP dan Masyarakat		441.553.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	35 Unit	35 Unit	163.688.600	163.688.600	163.688.600	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			163.688.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	322.207.008	322.207.008	352.209.200	30.002.192	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	80 Unit	95 Unit	62.965.000	62.965.000	89.439.100	26.474.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			57.865.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.341.175.988	8.746.175.988	8.418.608.000	5.169.406.844						9.509.495.639,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 Nilai	85,61 Nilai	7.961.684.078	8.317.966.328	7.981.299.681	5.111.590.435						8.865.234.479,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 %	100 %	111.809.100	103.985.700	35.829.100	-75.980.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		162.548.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	27.760.500	27.560.500	21.110.500	-6.650.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			48.060.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	84.048.600	76.425.200	14.718.600	-69.330.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			114.487.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	5.017.104.832	3.090.272.252	2.828.256.004	2.903.126.004		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		5.217.104.832,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	28 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	5.017.104.832	3.088.262.252	2.826.246.004	2.826.246.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.138.214.832,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	12 Dokumen	78.890.000	2.010.000	2.010.000	- 76.880.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			78.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	237.420.000	237.420.000	118.710.000	- 118.710.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		378.613.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	237.420.000	237.420.000	118.710.000	- 118.710.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			378.613.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	203.899.980	518.960.000	752.664.604	548.764.624		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		715.682.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	15 Unit	45 Unit	203.899.980	518.960.000	752.664.604	548.764.624	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			715.682.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	1.692.934.963	3.578.958.273	3.468.175.346	1.775.240.383		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		1.584.184.114,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.692.934.963	3.578.958.273	3.468.175.346	1.775.240.383	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.584.184.114,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	698.515.203	788.370.103	777.664.627	79.149.424		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat		807.101.493,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	21 Unit	21 Unit	95.730.000	85.384.900	85.384.900	- 10.345.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			116.880.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	336.510.666	437.515.666	481.390.666	144.880.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			372.687.050,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	75 Unit	75 Unit	266.274.537	265.469.537	210.889.061	- 55.385.476	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			317.534.443,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	98,30 %	98,30 %	151.548.850	200.266.600	188.757.900	37.209.050						213.628.060,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase penerbitan dokumen kependudukan*	100 %	100 %	151.548.850	200.266.600	188.757.900	37.209.050		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		213.628.060,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	12 Laporan	12 Laporan	128.908.850	177.826.600	169.817.900	40.909.050	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			160.654.060,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	38000 Dokumen	50000 Dokumen	22.640.000	22.440.000	18.940.000	-3.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			52.974.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	99,95 %	99,95 %	81.909.200	81.909.200	91.694.119	9.784.919						181.765.600,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil*	100 %	100 %	81.909.200	81.909.200	91.694.119	9.784.919		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		181.765.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*	7000 Dokumen	7000 Dokumen	53.284.400	53.284.400	73.485.619	20.201.219	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			103.784.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*	4 Layanan	4 Layanan	28.624.800	28.624.800	18.208.500	-10.416.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			77.981.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan Persentase stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	17 stakeho lder	100 %	146.033.860	146.033.860	156.856.300	10.822.440						248.867.500,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Data Kependudukan yang terupdate*	100 %	25 %	146.033.860	146.033.860	156.856.300	10.822.440		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		248.867.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*	2 Dokumen	2 Dokumen	98.330.500	98.330.500	76.535.500	-21.795.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			162.257.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*	34 Dokumen	34 Dokumen	47.703.360	47.703.360	80.320.800	32.617.440	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			86.610.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.862.317.213	10.862.317.213	10.593.504.966	-268.812.247						17.342.458.436,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,70 Nilai	83,70 Nilai	10.862.317.213	10.862.317.213	10.593.504.966	-268.812.247						10.661.400.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	38.870.000	38.870.000	35.870.000	-3.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	38.870.000	38.870.000	35.870.000	-3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	8.060.523.969	4.552.013.709	4.834.373.649	-3.226.150.320		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		7.892.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	8.060.523.969	4.552.013.709	4.834.373.649	-3.226.150.320	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			7.892.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai*	100 %	100 %	127.969.043	127.969.043	98.240.110	-29.728.933		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	2 Paket	127.969.043	127.969.043	98.240.110	-29.728.933	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum*	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000	125.000.000	-125.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	60 Laporan	250.000.000	250.000.000	125.000.000	-125.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan peralatan kantor*	100 %	100 %	128.259.720	128.259.720	128.259.720	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	19 Unit	19 Unit	128.259.720	128.259.720	128.259.720	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor*	100 %	100 %	1.022.217.951	4.530.728.211	4.137.284.957	3.115.067.006		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		1.028.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Laporan	2 Laporan	1.022.217.951	4.530.728.211	4.137.284.957	3.115.067.006	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.028.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	1.234.476.530	1.234.476.530	1.234.476.530	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perhubungan		1.186.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	57 Unit	57 Unit	704.022.530	704.022.530	704.022.530	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	394.454.000	394.454.000	394.454.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 Unit	10 Unit	136.000.000	136.000.000	136.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			136.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.933.965.153	28.615.340.153	32.706.324.378	7.772.359.225						27.274.370.138,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25 Nilai	82,25 Nilai	7.595.074.262	7.664.409.462	7.491.731.334	-103.342.928						7.502.500.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	65.000.000	65.000.000	9.380.000	-55.620.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Komunikasi dan Informatika		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	5 Laporan	65.000.000	65.000.000	9.380.000	-55.620.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	5.600.000.000	3.392.696.552	3.424.436.462	-2.175.563.538		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	5.600.000.000	3.392.696.552	3.424.436.462	-2.175.563.538	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	200.000.000	-200.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Komunikasi dan Informatika		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	25 Laporan	25 Laporan	400.000.000	400.000.000	200.000.000	-200.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	2.500.000	2.500.000	12.050.000	9.550.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Komunikasi dan Informatika		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	2.500.000	2.500.000	12.050.000	9.550.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah*	100 %	100 %	1.125.348.262	3.380.736.910	3.311.588.815	2.186.240.553		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1.125.348.262	3.380.736.910	3.311.588.815	2.186.240.553	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	402.226.000	423.476.000	534.276.058	132.050.058		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		482.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	30 Unit	30 Unit	252.216.000	252.216.000	347.816.058	95.600.058	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3 Unit	34.660.000	55.910.000	67.510.000	32.850.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			135.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	50 Unit	50 Unit	115.350.000	115.350.000	118.950.000	3.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			182.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84 %	84 %	2.836.000.000	3.448.039.800	2.930.696.356	94.696.356						3.743.250.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	2.836.000.000	3.448.039.800	2.930.696.356	94.696.356		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		3.743.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	698.265.650	-301.734.350	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	4 Komunitas	4 Komunitas	200.000.000	200.000.000	153.441.656	-46.558.344	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	200 Permohonan	200 Permohonan	150.000.000	150.000.000	140.606.760	-9.393.240	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik*	100 Persentase	100 Persentase	25.000.000	25.000.000	23.800.000	-1.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	10.000.000	10.000.000	7.000.000	-3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	1 Media	1 Media	1.000.000	582.375.000	582.375.000	581.375.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*	120 Konten	120 Konten	1.400.000.000	1.430.664.800	1.289.877.290	-110.122.710	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.441.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	35.330.000	-14.670.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	14.502.890.891	17.502.890.891	22.283.896.688	7.781.005.797						16.028.620.138,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD pengguna domain.id*	100 %	100 %	197.550.000	197.550.000	227.550.000	30.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		197.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	197.550.000	197.550.000	227.550.000	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			197.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah*	100 %	100 %	14.305.340.891	17.305.340.891	22.056.346.688	7.751.005.797		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		15.831.070.138,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	2 Laporan	2 Laporan	97.687.078	97.687.078	64.998.555	-32.688.523	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			73.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	2 Aplikasi	2 Aplikasi	364.696.000	364.696.000	366.868.000	2.172.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	1 Aplikasi	1 Aplikasi	335.400.000	335.400.000	311.400.000	-24.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			787.370.138,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas*	34 unit	34 unit	890.697.193	890.697.193	804.855.635	-85.841.558	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	896.180.620	3.896.180.620	6.523.648.638	5.627.468.018	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	11.720.680.000	11.720.680.000	13.984.575.860	2.263.895.860	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			12.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.454.980.916	5.600.110.916	5.386.090.636	-68.890.280						7.404.742.001,00	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Skor	84 Skor	5.454.980.916	5.600.110.916	5.386.090.636	-68.890.280						5.750.150.201,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	14.410.000	14.410.000	11.810.000	-2.600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	14.410.000	14.410.000	11.810.000	-2.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 Persen	100 Persen	4.222.500.840	2.460.955.479	2.487.317.945	-1.735.182.895		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		4.321.523.961,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	4.222.500.840	2.460.955.479	2.487.317.945	-1.735.182.895	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.321.523.961,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 Persen	100 Persen	245.213.819	276.064.000	97.610.000	-147.603.819		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		274.233.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	50 Laporan	245.213.819	276.064.000	97.610.000	-147.603.819	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			274.233.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	100 Persen	52.498.560	162.555.060	162.555.060	110.056.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	52.498.560	162.555.060	162.555.060	110.056.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	100 Persen	769.259.192	2.535.027.872	2.475.699.126	1.706.439.934		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		796.111.161,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Laporan	20 Laporan	769.259.192	2.535.027.872	2.475.699.126	1.706.439.934	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			796.111.161,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 Persen	100 Persen	151.098.505	151.098.505	151.098.505	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai DPMPTSP		199.281.285,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	20 Unit	20 Unit	68.599.000	68.599.000	68.599.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			107.558.246,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	29.280.000	29.280.000	29.280.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			32.281.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	53.219.505	53.219.505	53.219.505	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			59.441.838,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				125.000.000	125.000.000	100.523.000	- 24.477.000						125.000.000,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	125.000.000	100.523.000	- 24.477.000						125.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan*	1 Survey	1 Survey	125.000.000	125.000.000	100.523.000	- 24.477.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	100 Persentase	100 Persentase	55.000.000	55.000.000	45.605.500	- 9.394.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	37.173.500	- 12.826.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	17.744.000	- 2.256.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				190.000.000	190.000.000	146.975.000	- 43.025.000						245.000.000,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	146.975.000	- 43.025.000						245.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi*	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	146.975.000	- 43.025.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		245.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000	40.000.000	29.920.000	- 10.080.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	117.055.000	- 32.945.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				680.147.305	680.147.306	640.147.307	86.506.058						699.999.919,00	
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjwaban nasional	90 Skor	90 Skor	553.641.250	553.641.250	513.641.250	- 40.000.000						570.000.930,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Dinamis yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip*	100 %	100 %	315.639.770	315.639.770	298.140.580	- 17.499.190		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi perangkat Daerah		279.999.945,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*	60000 Berkas	60000 Berkas	315.639.770	315.639.770	298.140.580	- 17.499.190	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			279.999.945,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik Arsip*	100 %	100 %	207.999.980	207.999.980	185.499.170	-22.500.810		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi perangkat Daerah		239.999.985,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	1500 Arsip	1500 Arsip	207.999.980	207.999.980	185.499.170	-22.500.810	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			239.999.985,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN*	3 %	3 %	30.001.500	30.001.500	30.001.500	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi perangkat Daerah		50.001.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*	25 Pengguna	25 Pengguna	30.001.500	30.001.500	30.001.500	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.001.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8,8 Skor	8,8 Skor	126.506.055	126.506.056	126.506.057	126.506.058						129.998.989,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK*	100 %	100 %	126.506.055	126.506.056	126.506.057	126.506.058		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Organisasi perangkat Daerah		129.998.989,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan*	700 Berkas	700 Berkas	63.605.136	63.605.136	63.605.136	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			64.998.998,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	1000 Arsip	1000 Arsip	62.900.919	62.900.919	62.900.919	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			64.999.991,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.467.521.953	7.467.401.358	7.417.657.245	-49.864.708						10.295.000.000,00	
3	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,6 Nilai	82,6 Nilai	7.467.521.953	7.467.401.358	7.417.657.245	-49.864.708						9.170.000.000,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Evaluasi implementasi sakip perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 % 82,60 skor	100 % 82,60 skor	19.756.000	19.756.000	13.826.290	-5.929.710		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	19.756.000	19.756.000	13.826.290	-5.929.710	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	5.255.053.953	2.874.003.820	2.812.007.199	-2.443.046.754		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		6.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	5.255.053.953	2.874.003.820	2.812.007.199	-2.443.046.754	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			6.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 %	100 %	94.500.000	94.496.000	53.660.000	-40.840.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	94.500.000	94.496.000	53.660.000	-40.840.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	200.260.000	200.153.405	150.521.703	-49.738.298		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	200.260.000	200.153.405	150.521.703	-49.738.298	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	163.376.000	163.376.000	363.376.000	200.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		340.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	106.181.000	106.181.000	106.181.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	57.195.000	57.195.000	257.195.000	200.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	1.502.016.000	3.883.066.133	3.753.111.364	2.251.095.364		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		2.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1.502.016.000	3.883.066.133	3.753.111.364	2.251.095.364	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	232.560.000	232.550.000	271.154.690	38.594.690		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Budparpora		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	30 Unit	30 Unit	80.000.000	80.000.000	118.604.690	38.604.690	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	102.560.000	102.550.000	102.550.000	-10.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				10.393.451.201	10.423.001.201	10.239.663.395	-153.787.806						18.574.876.408,00	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,36 Nilai	84,36 Nilai	10.393.451.201	10.423.001.201	10.239.663.395	-153.787.806						11.560.460.400,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	6.710.000	21.260.000	2.000.000	-4.710.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	6.710.000	21.260.000	2.000.000	-4.710.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100` %`	100` %`	8.917.000.233	6.085.022.573	6.097.022.573	-2.819.977.660		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perdagangan		9.010.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	67 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	8.917.000.233	6.085.022.573	6.097.022.573	-2.819.977.660	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			9.010.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai*	100 %	100 %	65.227.000	65.227.000	65.227.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		125.460.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	65.227.000	65.227.000	65.227.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			125.460.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	243.167.895	243.167.895	121.583.948	-121.583.947		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pegawai Dinas Perdagangan		380.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	243.167.895	243.167.895	121.583.948	-121.583.947	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			380.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah*	100 %	100 %	60.321.800	60.321.800	60.321.800	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		840.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	38.288.000	38.288.000	38.288.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	22.033.800	22.033.800	22.033.800	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	706.780.073	3.553.757.733	3.465.690.274	2.758.910.201		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	706.780.073	3.553.757.733	3.465.690.274	2.758.910.201	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	394.244.200	394.244.200	427.817.800	33.573.600		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		345.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	45 Unit	45 Unit	284.010.000	284.010.000	302.530.000	18.520.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	65.053.600	15.053.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	122 Unit	122 Unit	60.234.200	60.234.200	60.234.200	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				49.772.821.370	108.416.451.622	99.233.084.865	3.536.528.531						50.789.946.678,00	
		BAGIAN PEMERINTAHAN				3.527.484.962	3.015.745.362	2.998.364.438	- 529.120.524						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	1.586.791.023	747.438.623	739.412.479	- 847.378.545						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	8.500.000	1.500.000	1.050.000	- 7.450.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000	1.500.000	1.050.000	- 7.450.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	898.410.000	0,00	0,00	- 898.410.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	898.410.000	0,00	0,00	- 898.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			898.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	176.881.023	176.881.023	204.921.569	28.040.546		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	176.881.023	176.881.023	204.921.569	28.040.546	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	-	-	-	-		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			99.262.592,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	250.000.000	316.057.600	280.440.910	30.440.910		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	316.057.600	280.440.910	30.440.910	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	253.000.000	253.000.000	253.000.000	-		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	4 Unit	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	210.000.000	210.000.000	210.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	17 Unit	17 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	1.940.693.939	2.268.306.739	2.258.951.960	318.258.021						7.112.200.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan*	100 %	100 %	1.595.693.939	1.923.306.739	2.002.914.960	407.221.021		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.715.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.075.693.939	1.075.693.939	1.360.540.000	284.846.061	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	7 Dokumen	7 Dokumen	510.000.000	837.612.800	632.374.960	122.374.960	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Fasilitasi Kerjasama daerah*	100 %	100 %	345.000.000	345.000.000	256.037.000	-88.963.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		345.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	5 Dokumen	5 Dokumen	345.000.000	345.000.000	256.037.000	-88.963.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			345.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI				3.078.135.535	2.228.487.600	1.896.120.378	-1.182.015.157						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85	3.078.135.535	2.228.487.600	1.896.120.378	-1.182.015.157						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	15.000.000	3.000.000	2.100.000	-12.900.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	3.000.000	2.100.000	-12.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	920.135.535	0,00	0,00	-920.135.535		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	920.135.535	0,00	0,00	-920.135.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			930.593.092,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	180.000.000	190.611.000	95.305.500	-84.694.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000	190.611.000	95.305.500	-84.694.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	27.157.000	17.157.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	27.157.000	17.157.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	275.200.000	347.076.600	294.219.311	19.019.311		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	275.200.000	347.076.600	294.219.311	19.019.311	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			279.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	185.000.000	185.000.000	271.625.100	86.625.100		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	6 Unit	27.000.000	27.000.000	32.844.000	5.844.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	145.000.000	145.000.000	226.000.000	81.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	21 Unit	21 Unit	13.000.000	13.000.000	12.781.100	-218.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tingkat Kematangan Organisasi*	46.2 nilai	46.2 nilai	1.492.800.000	1.492.800.000	1.205.713.467	-287.086.533		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.552.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	2 Dokumen	2 Dokumen	370.800.000	340.000.000	277.766.400	-93.033.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			390.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	2 Laporan	2 Laporan	722.000.000	772.500.000	560.620.867	-161.379.133	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			742.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	380.300.000	367.326.200	-32.673.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM				3.849.086.406	55.688.893.148	50.791.421.604	1.018.600.234						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Skor	85 Skor	2.187.129.958	1.277.696.396	1.181.129.496	-1.006.000.462						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	700.000	-300.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	1.000.000	1.000.000	700.000	-300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	1.032.000.000	0,00	0,00	-1.032.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.032.000.000	0,00	0,00	-1.032.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	300.000.000	345.349.000	267.507.962	-32.492.038		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	36 Laporan	36 Laporan	300.000.000	345.349.000	267.507.962	-32.492.038	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	224.979.958	205.839.235	248.090.497	23.110.539		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	17 Unit	10 Unit	184.673.646	111.111.795	153.363.057	-31.310.589	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	47 Unit	40.306.312	94.727.440	94.727.440	54.421.128	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			14.259.062,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	425.000.000	526.214.161	482.444.037	57.444.037		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	250 Laporan	250 Laporan	425.000.000	526.214.161	482.444.037	57.444.037	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	204.150.000	199.294.000	182.387.000	-21.763.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	7 Unit	7 Unit	38.000.000	33.144.000	33.144.000	-4.856.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			38.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	126.150.000	126.150.000	126.150.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	20 Unit	40.000.000	40.000.000	23.093.000	-16.907.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	1.661.956.448	1.683.638.278	1.168.628.847	-493.327.601						7.112.200.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Produk Hukum yang disusun*	100 %	100 %	1.661.956.448	1.683.638.278	1.168.628.847	-493.327.601		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.052.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	24 Dokumen	7 Dokumen	755.493.400	703.649.400	347.962.890	-407.530.510	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			665.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	25 Kasus	47 Kasus	450.237.609	521.763.439	556.537.199	106.299.590	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			647.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	400 Dokumen	300 Dokumen	456.225.439	458.225.439	264.128.758	-192.096.681	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			739.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				3.022.240.435	1.811.360.101	1.510.101.390	-1.512.139.045						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	2.566.140.435	1.355.260.101	1.237.774.629	-1.328.365.806						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	1.500.000	1.500.000	1.050.000	-450.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.050.000	-450.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	1.780.000.000	0,00	0,00	-1.780.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.780.000.000	0,00	0,00	-1.780.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-100.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	200.163.650	200.163.650	295.533.550	95.369.900		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	200.163.650	200.163.650	295.533.550	95.369.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	300.000.000	869.119.666	651.773.854	351.773.854		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	869.119.666	651.773.854	351.773.854	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	84.476.785	84.476.785	189.417.225	104.940.440		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	10 Unit	30.000.000	30.000.000	33.444.000	3.444.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	29.476.785	29.476.785	130.973.225	101.496.440	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			115.697.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	40 Unit	40 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	456.100.000	456.100.000	272.326.761	-183.773.239						1.327.985.952,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target*	100 Persen	100 Persen	116.100.000	116.100.000	77.768.000	-38.332.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		140.000.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.100.000	26.100.000	18.270.000	-7.830.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	90.000.000	59.498.000	-30.502.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target*	100 Persen	100 Persen	340.000.000	340.000.000	194.558.761	-145.441.239		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		352.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	12 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000	190.000.000	96.850.000	-93.150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			182.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	150.000.000	97.708.761	-52.291.239	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.322.802.418	4.273.521.301	3.389.542.143	-1.933.260.276						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	2.191.404.810	1.174.414.600	959.892.273	-1.231.512.538						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	15.000.000	1.500.000	1.050.000	-13.950.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000	1.500.000	1.050.000	-13.950.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	1.081.294.810	0,00	0,00	-1.081.294.810		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.081.294.810	0,00	0,00	-1.081.294.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.081.294.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum*	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-100.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	177.000.000	175.000.000	213.792.280	36.792.280		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	0 Unit	0 Unit	2.000.000	0,00	0,00	-2.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	175.000.000	175.000.000	213.792.280	38.792.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	467.110.000	546.914.600	470.342.273	3.232.273		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	467.110.000	546.914.600	470.342.273	3.232.273	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			613.219.636,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	251.000.000	251.000.000	174.707.720	-76.292.280		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	12 Unit	12 Unit	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			77.374.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	123.707.720	-76.292.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	31 Unit	31 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			36.803.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	2.154.187.108	2.156.187.108	1.736.651.661	-417.535.447						7.112.200.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat*	100 %	100 %	2.154.187.108	2.156.187.108	1.736.651.661	-417.535.447		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	15 Dokumen	15 Dokumen	2.154.187.108	2.156.187.108	1.736.651.661	-417.535.447	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	977.210.500	942.919.593	692.998.209	-284.212.291						1.327.985.952,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan*	87 skor	87 skor	577.210.500	577.210.500	397.160.578	-180.049.922		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		435.984.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	308.000.000	215.643.498	-84.356.502	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			235.984.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD*	3 Dokumen	3 Dokumen	277.210.500	269.210.500	181.517.080	-95.693.420	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan*	100 %	100 %	400.000.000	365.709.093	295.837.631	-104.162.369		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Daerah		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	365.709.093	295.837.631	-104.162.369	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM				30.973.071.614	41.398.444.110	38.647.534.912	7.674.463.298						50.789.946.678,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	30.973.071.614	41.398.444.110	38.647.534.912	7.674.463.298						42.349.760.726,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	5.000.000	1.500.000	1.050.000	-3.950.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	5.000.000	1.500.000	1.050.000	-3.950.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	15.298.038.714	12.475.224.284	12.819.860.239	-2.478.178.475		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		19.664.297.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	125 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	15.298.038.714	12.475.224.284	12.819.860.239	-2.478.178.475	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			13.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai*	100 %	100 %	2.488.595.000	2.488.595.000	1.906.850.000	-581.745.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	2.488.595.000	2.488.595.000	1.906.850.000	-581.745.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	1.350.000.000	2.805.350.000	1.452.675.000	102.675.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	1.250.000.000	2.705.350.000	1.352.675.000	102.675.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	1.350.423.625	5.552.510.625	5.542.737.625	4.192.314.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		1.328.521.654,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	904.700.000	4.408.700.000	4.408.700.000	3.504.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	279.073.625	594.510.625	618.637.625	339.564.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	25 Unit	25 Unit	166.650.000	549.300.000	515.400.000	348.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	3.970.514.275	11.582.218.201	10.660.122.208	6.689.607.933		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		6.906.765.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	3.970.514.275	11.582.218.201	10.660.122.208	6.689.607.933	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.019.346.348,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*	100 %	100 %	1.868.000.000	2.111.100.000	2.111.100.000	243.100.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		2.704.375.186,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	110 Unit	110 Unit	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	500.000.000	743.100.000	743.100.000	243.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	125 Unit	125 Unit	268.000.000	268.000.000	268.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah*	100 %	100 %	1.000.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000	70.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	320.000.000	320.000.000	290.000.000	- 30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	680.000.000	750.000.000	780.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik*	100 %	100 %	1.667.500.000	1.718.750.000	1.825.264.840	157.764.840		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		1.625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	900.000.000	900.000.000	999.734.640	99.734.640	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	417.500.000	468.750.000	496.140.200	78.640.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	350.000.000	350.000.000	329.390.000	-20.610.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan*	100 %	100 %	1.975.000.000	1.593.196.000	1.257.875.000	-717.125.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Dearah		1.985.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	12 Laporan	12 Laporan	1.975.000.000	1.593.196.000	1.257.875.000	-717.125.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.985.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4,02	SEKRETARIAT DPRD				40.269.472.912	45.396.472.413	36.781.015.400	-3.488.457.512						42.577.266.507,00	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	82 Nilai	29.526.842.794	31.534.778.757	27.493.819.163	-2.033.023.631						30.299.273.389,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah*	100 %	100 %	59.731.577	2.000.000	1.400.000	-58.331.577		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		59.731.577,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	59.731.577	2.000.000	1.400.000	-58.331.577	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			59.731.577,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan*	100 %	100 %	3.386.604.920	1.901.433.248	1.959.560.611	-1.427.044.309		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		3.366.682.326,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	17 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	3.386.604.920	1.901.433.248	1.959.560.611	-1.427.044.309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.366.682.326,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persetase Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan yang Terpenuh*	100 %	100 %	164.818.894	198.140.500	153.240.500	-11.578.394		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		189.818.894,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	64.818.894	48.340.500	48.340.500	-16.478.394	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			64.818.894,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	17 Orang	17 Orang	100.000.000	149.800.000	104.900.000	4.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum*	100 %	100 %	1.341.309.329	1.251.393.000	624.534.000	-716.775.329		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		1.414.047.924,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	34 Laporan	17 Laporan	1.341.309.329	1.251.393.000	624.534.000	-716.775.329	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.414.047.924,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik*	100 %	100 %	8.241.750	285.677.648	386.927.648	378.685.898		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		8.241.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	8.241.750	285.677.648	386.927.648	378.685.898	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			8.241.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	2.514.226.687	4.184.364.353	4.175.364.353	1.661.137.666		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		2.655.656.282,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	24 Laporan	24 Laporan	2.514.226.687	4.184.364.353	4.175.364.353	1.661.137.666	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.655.656.282,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Dapat Digunakan*	100 %	100 %	1.001.078.460	1.047.817.100	1.029.969.900	28.891.440		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD		1.021.078.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	26 Unit	26 Unit	298.841.290	305.170.000	273.076.000	-25.765.290	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			308.841.290,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	180 Unit	180 Unit	238.673.550	238.722.900	238.722.900	49.350	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			238.673.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	6 Unit	463.563.620	503.924.200	518.171.000	54.607.380	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			473.563.620,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD*	100 %	100 %	15.979.367.238	15.860.029.620	15.860.029.620	-119.337.618		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pimpinan dan Anggota DPRD		16.262.552.237,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	15.620.388.218	15.551.893.620	15.551.893.620	-68.494.598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.903.573.217,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	253.979.020	203.136.000	203.136.000	-50.843.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			253.979.020,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	30 Orang	30 Orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi DPRD*	100 %	100 %	5.071.463.939	6.803.923.288	3.302.792.532	-1.768.671.407		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		5.321.463.939,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	8 Laporan	8 Laporan	37.957.150	41.260.288	36.436.032	-1.521.118	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			37.957.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	16 Laporan	10 Laporan	5.033.506.789	6.762.663.000	3.266.356.500	-1.767.150.289	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.283.506.789,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standart Pelayanan	100 %	100 %	10.742.630.118	13.861.693.656	9.287.196.237	-1.455.433.881						12.277.993.118,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Tercapaimya Fungsi Pembentukan Perda DPRD*	100 %	100 %	3.219.737.000	4.573.900.000	2.503.699.415	-716.037.585		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		3.819.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	9 Dokumen	9 Dokumen	2.029.737.000	2.697.500.000	2.055.303.845	25.566.845	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.629.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.190.000.000	1.876.400.000	448.395.570	-741.604.430	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD*	100 %	100 %	1.346.000.000	1.825.135.000	1.190.740.000	-155.260.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		1.451.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	5 Dokumen	5 Dokumen	1.346.000.000	1.825.135.000	1.190.740.000	-155.260.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.451.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	785.088.422	1.242.957.560	755.086.663	-30.001.759		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		1.192.040.647,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	373.933.900	590.684.660	363.505.227	-10.428.673	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			573.933.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	411.154.522	652.272.900	391.581.436	-19.573.086	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			618.106.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD*	100 %	100 %	4.541.197.471	5.349.093.871	4.071.682.709	-469.514.762		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		4.541.197.471,00	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	6 Dokumen	6 Dokumen	1.869.304.000	2.462.508.000	2.181.606.000	312.302.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.228.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	2 Dokumen	1 Dokumen	1.387.857.225	1.533.490.225	911.901.063	- 475.956.162	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.005.070.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	15 Dokumen	15 Dokumen	1.284.036.246	1.353.095.646	978.175.646	- 305.860.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.307.787.471,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD*	100 %	100 %	850.607.225	870.607.225	765.987.450	- 84.619.775		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		1.273.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	2 Dokumen	3 Dokumen	850.607.225	870.607.225	765.987.450	- 84.619.775	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.273.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5,01	PERENCANAAN				9.383.055.484,00	10.150.333.684	9.349.509.983,91	- 33.545.500,09						15.354.431.200,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 Nilai	89 Nilai	7.381.702.859	7.294.459.059	6.821.582.360	- 560.120.499						7.629.365.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan*	100 %	100 %	149.316.160	89.362.450	134.553.715	- 14.762.445		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		138.476.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	56.013.060	23.013.060	52.109.142	- 3.903.918	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			103.290.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	44.603.100	17.649.390	12.354.573	- 32.248.527	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	48.700.000	48.700.000	70.090.000	21.390.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.185.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan*	100 %	100 %	5.528.896.785	3.484.653.669	3.166.487.952	- 2.362.408.833		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		5.566.950.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	5.512.396.785	3.468.153.669	3.154.893.108	- 2.357.503.677	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.550.950.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	16.500.000	16.500.000	11.594.844	-4.905.156	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan adminsitrasi pegawai yang terpenuhi*	100 %	100 %	72.550.800	72.550.800	66.688.800	-5.862.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		175.005.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	35 Orang	35 Orang	63.800.000	63.800.000	60.492.000	-3.308.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			67.995.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	35 Orang	35 Orang	8.750.800	8.750.800	6.196.800	-2.554.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			107.010.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan*	100 %	100 %	447.153.000	446.773.000	228.257.351	-218.895.649		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		455.934.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	447.153.000	446.773.000	228.257.351	-218.895.649	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			455.934.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi*	100 %	100 %	74.667.480	56.000.610	56.000.610	-18.666.870		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	8 Unit	8 Unit	74.667.480	56.000.610	56.000.610	-18.666.870	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor*	100 %	100 %	848.582.204	2.884.582.100	2.909.143.902	2.060.561.698		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	848.582.204	2.884.582.100	2.909.143.902	2.060.561.698	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan*	100 %	100 %	260.536.430	260.536.430	260.450.030	-86.400		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Bapppeda Kota Madiun		333.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	33 Unit	33 Unit	112.310.000	112.310.000	112.223.600	-86.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	75.235.865	75.235.865	75.235.865	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	50 Unit	50 Unit	72.990.565	72.990.565	72.990.565	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan tingkat kota yang tersusun	100 %	100 %	1.249.059.725	1.862.481.725	1.847.931.065	598.871.340						2.277.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kota*	3 Dokumen	3 Dokumen	1.045.835.625	1.659.257.625	1.284.601.065	238.765.440		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		2.057.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	145.774.500	99.550.500	13.831.500	-131.943.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			152.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	156.715.000	133.405.000	131.085.000	-25.630.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	324.712.100	527.918.100	477.495.140	152.783.040	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	2 Dokumen	2 Dokumen	418.634.025	898.384.025	662.189.425	243.555.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun*	4 dokumen	4 dokumen	203.224.100	203.224.100	563.330.000	360.105.900		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	2 Laporan	2 Laporan	178.659.000	182.659.000	195.243.000	16.584.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	24.565.100	20.565.100	368.087.000	343.521.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	100 %	100 %	1.144.032.900	1.395.132.900	1.012.966.559	-131.066.341						5.448.066.200,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*JUmlah dokumen hasil verivikasi*	1 dokumen	1 dokumen	535.992.900	757.092.900	553.393.559	17.400.659		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		788.066.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000	253.100.000	150.010.000	78.010.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	150.000.000	140.829.070	30.829.070	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			115.780.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	1 Dokumen	1 Dokumen	347.742.900	347.742.900	258.179.531	-89.563.369	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			550.486.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	2 Laporan	2 Laporan	6.250.000	6.250.000	4.374.958	-1.875.042	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			6.800.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah dokumen hasil verifikasi dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA*	1 dokumen	1 dokumen	216.300.000	236.300.000	126.603.000	-89.697.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemerintah Kota Madiun		4.010.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	1 Dokumen	1 Dokumen	103.300.000	123.300.000	43.955.000	-59.345.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	5 Laporan	5 Laporan	113.000.000	113.000.000	82.648.000	-30.352.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5,02	KEUANGAN				57.716.498.976	55.646.492.901	65.937.758.943,92	-32.731.575						57.632.699.329,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,2 Nilai	84,2 Nilai	51.273.928.329	43.688.231.129	43.208.742.398	-8.065.185.931						51.273.928.329,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	1.400.000	-600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	BKAD KOTA MADIUN		2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8 Laporan	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.400.000	-600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	34.360.000.497	27.836.786.320	27.839.755.365	-6.520.245.132		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	BKAD KOTA MADIUN		36.510.000.497,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	34.360.000.497	27.836.786.320	27.839.755.365	-6.520.245.132	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			36.510.000.497,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi umum*	100 %	100 %	600.000.000	600.000.000	300.000.000	-300.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	BKAD KOTA MADIUN		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	89 Laporan	89 Laporan	600.000.000	600.000.000	300.000.000	-300.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		214.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	13 Unit	13 Unit	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			214.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah daerah*	100 %	100 %	15.804.927.832	14.326.944.809	14.145.087.033	-1.659.840.799		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	BKAD KOTA MADIUN		13.804.927.832,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	15.804.927.832	14.326.944.809	14.145.087.033	-1.659.840.799	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			13.804.927.832,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	293.000.000	708.500.000	708.500.000	415.500.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	BKAD KOTA MADIUN		293.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	36 Unit	36 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	75.000.000	490.500.000	490.500.000	415.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	8 Unit	108.000.000	108.000.000	108.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			108.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	100 %	100 %	4.476.622.647	9.992.313.772	20.803.793.546	8.073.179.356						4.392.823.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Pengesahan Perda APBD tepat waktu*	100 %	100 %	1.126.814.000	1.150.814.000	1.150.814.000	24.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD KOTA MADIUN		1.175.014.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	83.421.000	83.421.000	83.421.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	56.819.000	56.819.000	56.819.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			56.819.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	34 Dokumen	34 Dokumen	16.876.000	16.876.000	16.876.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			16.876.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	34 Dokumen	34 Dokumen	23.640.000	23.640.000	23.640.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			23.640.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	113.677.400	113.677.400	113.677.400	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			154.679.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	195.680.600	195.680.600	195.680.600	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			198.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	4 Dokumen	4 Dokumen	636.700.000	660.700.000	660.700.000	24.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			640.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan*	100 %	100 %	55.050.000	55.050.000	55.050.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD KOTA MADIUN		55.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	47 Dokumen	47 Dokumen	49.950.000	49.950.000	49.950.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			49.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	3 Dokumen	3 Dokumen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			5.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi*	100 %	100 %	1.162.759.000	1.162.759.000	1.027.427.500	-135.331.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD KOTA MADIUN		1.162.759.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	2 Laporan	2 Laporan	140.000.000	140.000.000	98.345.000	-41.655.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	66.000.000	66.000.000	45.000.000	-21.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000	90.000.000	63.345.000	-26.655.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	345 Orang	345 Orang	866.759.000	866.759.000	820.737.500	-46.021.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			866.759.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	100 %	100 %	2.131.999.647	7.623.690.772	18.570.502.046	8.184.510.856		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD KOTA MADIUN		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	12 Laporan	2.131.999.647	7.623.690.772	18.570.502.046	8.184.510.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	100 %	100 %	1.965.948.000	1.965.948.000	1.925.223.000	- 40.725.000						1.965.948.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*[deleted]* *Jumlah laporan pengelolaan BMD* *Jumlah laporan pengelolaan BMD [deleted]*	22 Dokumen	22 Dokumen	1.965.948.000	1.965.948.000	1.925.223.000	- 40.725.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	OPD KOTA MADIUN		1.965.948.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	123.142.000	123.142.000	123.142.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			123.142.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	1.803.206.000	1.803.206.000	1.762.481.000	- 40.725.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.803.206.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	18 Laporan	18 Laporan	39.600.000	39.600.000	39.600.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			39.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5,02	KEUANGAN				12.851.205.520	13.801.205.520	12.694.370.573	- 156.834.947						13.801.205.520,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 Nilai	81,5 Nilai	11.557.203.467	12.111.211.887	10.919.355.500	- 637.847.967						12.111.211.887,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	1.400.000	- 600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8 Laporan	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.400.000	- 600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	10.675.173.675	10.960.742.095	9.416.140.195	- 1.259.033.480		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		11.070.182.095,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	10.675.173.675	10.960.742.095	9.416.140.195	- 1.259.033.480	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			11.070.182.095,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu*	100 %	100 %	80.000.000	80.000.000	48.192.000	- 31.808.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	40 Paket	40 Paket	30.000.000	30.000.000	21.000.000	-9.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	40 Orang	40 Orang	50.000.000	50.000.000	27.192.000	-22.808.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan pelayanan admistrasi umum*	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	50.000.000	-50.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	35 Laporan	35 Laporan	100.000.000	100.000.000	50.000.000	-50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan*	100 %	100 %	25.080.000	25.080.000	404.648.440	379.568.440		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		25.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	12 Unit	12 Unit	80.000	80.000	284.628.000	284.548.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			80.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	25.000.000	25.000.000	120.020.440	95.020.440	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang*	100 %	100 %	524.949.792	793.389.792	789.154.585	264.204.793		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		683.949.792,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	13 Laporan	524.949.792	793.389.792	789.154.585	264.204.793	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			683.949.792,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	209.820.280	59.820.280		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	30 Unit	30 Unit	50.000.000	50.000.000	109.820.280	59.820.280	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,5 %	81,5 %	1.294.002.053	1.689.993.633	1.775.015.073	481.013.020						1.689.993.633,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*[deleted] Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	100 %	100 %	1.294.002.053	1.689.993.633	1.775.015.073	481.013.020		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Lingkungan BAPENDA		1.689.993.633,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	44.318.000	25.267.500	267.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			44.318.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	450 Laporan	450 Laporan	419.002.053	419.002.053	419.002.053	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			419.002.053,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	198.986.000	-1.014.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	199.940.000	-60.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	100.000.000	100.000.000	99.112.000	-888.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	47.780.600	-2.219.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	300 Layanan	300 Layanan	30.000.000	30.000.000	262.676.030	232.676.030	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	161.026.580	129.575.488	-20.424.512	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			161.026.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	48.973.600	-21.026.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	300 Dokumen	300 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	375.647.000	315.744.924	305.744.924	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			375.647.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	27.956.878	-12.043.122	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5,03	KEPEGAWAIAN				9.120.332.220	9.183.324.620	8.520.289.865	-600.042.355						9.121.102.020,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai	86 Nilai	7.257.773.820	7.289.270.020	7.144.728.001	-113.045.819						7.327.709.177,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi*	100 %	100 %	9.400.000	9.400.000	7.051.536	-2.348.464		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		9.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	5 Laporan	9.400.000	9.400.000	7.051.536	-2.348.464	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			9.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	6.275.394.183	3.846.815.623	3.884.928.996	-2.390.465.187		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		6.224.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	6.275.394.183	3.846.815.623	3.884.928.996	-2.390.465.187	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			6.224.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	340.000.000	340.000.000	208.940.000	-131.060.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		338.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	85 Laporan	85 Laporan	340.000.000	340.000.000	208.940.000	-131.060.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			338.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan BMD*	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	82.407.589	32.407.589		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		111.309.177,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	82.407.589	32.407.589	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			111.309.177,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang*	100 %	100 %	317.979.637	2.778.054.397	2.684.345.400	2.366.365.763		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		440.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	317.979.637	2.778.054.397	2.684.345.400	2.366.365.763	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			440.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	265.000.000	265.000.000	277.054.480	12.054.480		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		205.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	18 Unit	18 Unit	35.000.000	35.000.000	38.912.900	3.912.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	180.000.000	180.000.000	188.141.580	8.141.580	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	8 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100 %	100 %	1.862.558.400	1.894.054.600	1.375.561.864	-486.996.536						1.793.392.843,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan Informasi*	100 %	100 %	1.128.590.200	1.128.590.200	714.735.464	-413.854.736		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		1.194.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN*	1 Laporan	1 Laporan	934.230.200	934.230.200	596.487.664	-337.742.536	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	225 Dokumen	200 Dokumen	89.360.000	89.360.000	55.285.200	-34.074.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			89.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	3036 Dokumen	1000 Dokumen	105.000.000	105.000.000	62.962.600	-42.037.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi*	100 %	100 %	345.746.200	345.746.200	252.733.660	-93.012.540		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		245.746.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*	702 Dokumen	376 Dokumen	275.116.200	275.116.200	204.210.660	-70.905.540	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			175.116.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	455 Dokumen	380 Dokumen	70.630.000	70.630.000	48.523.000	-22.107.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			70.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi*	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	138.403.000	38.403.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		75.314.643,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	290 Dokumen	290 Dokumen	100.000.000	100.000.000	138.403.000	38.403.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			75.314.643,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Realisasi Evalusai Kinerja*	100 %	100 %	288.222.000	319.718.200	269.689.740	-18.532.260		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		277.972.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	14.500.000	-5.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	200 Orang	200 Orang	22.850.000	42.846.200	36.921.540	14.071.540	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			22.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	60 Orang	60 Orang	245.372.000	256.872.000	218.268.200	-27.103.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			235.122.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.022.354.448	3.022.354.448	3.709.208.679	686.854.231						3.080.000.000,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	17 %	17 %	3.022.354.448	3.022.354.448	3.709.208.679	686.854.231						3.080.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis*	100 %	100 %	2.117.354.448	2.117.354.448	2.923.929.779	806.575.331		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		2.080.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	232 Orang	232 Orang	2.117.354.448	2.117.354.448	2.923.929.779	806.575.331	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.080.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Realiasai Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	100 %	100 %	905.000.000	905.000.000	785.278.900	-119.721.100		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Kota Madiun		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	186 Laporan	186 Laporan	905.000.000	905.000.000	785.278.900	-119.721.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.577.768.129	1.771.193.129	1.449.638.684	-128.129.445						1.280.000.000,00	
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian/penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis daerah	100 %	100 %	1.577.768.129	1.771.193.129	1.449.638.684	-128.129.445						1.280.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.298.211.629	1.491.636.629	1.268.137.853	-30.073.776		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		1.030.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	2 Laporan	2 Laporan	1.171.780.829	1.365.205.829	1.160.778.313	-11.002.516	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	1 Laporan	1 Laporan	126.430.800	126.430.800	107.359.540	-19.071.260	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi*	2 dokumen	2 dokumen	279.556.500	279.556.500	181.500.831	-98.055.669		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	4 Dokumen	4 Dokumen	279.556.500	279.556.500	181.500.831	-98.055.669	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.516.899.866	13.010.381.900	12.073.488.057	556.588.191						12.400.236.669,00	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH				11.516.899.866	13.010.381.900	12.073.488.057	556.588.191						12.400.236.669,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	85 Nilai	9.612.621.866	10.747.627.548	10.382.166.705	769.544.839						10.162.236.669,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8 Laporan	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	7.600.000.000	4.428.127.158	4.520.322.948	-3.079.677.052		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		7.700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	7.600.000.000	4.428.127.158	4.520.322.948	-3.079.677.052	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			7.700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	745.536.000	872.584.000	442.618.500	-302.917.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	65 Laporan	65 Laporan	745.536.000	872.584.000	442.618.500	-302.917.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	101.066	183.501.770	207.256.880	207.155.814		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		580.236.669,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	900,00	900,00	900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	21.200	21.200	21.200	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.236.669,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	78.966	183.479.670	207.234.780	207.155.814	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	645.860.800	3.889.696.620	3.838.250.377	3.192.389.577		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	8 Laporan	8 Laporan	645.860.800	3.889.696.620	3.838.250.377	3.192.389.577	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah*	85 Nilai	85 Nilai	619.124.000	1.371.718.000	1.371.718.000	752.594.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	30 Unit	30 Unit	37.594.000	69.688.000	69.688.000	32.094.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	551.410.000	1.271.910.000	1.271.910.000	720.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	25 Unit	25 Unit	30.120.000	30.120.000	30.120.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	94 %	94 %	846.464.000	1.186.889.352	742.335.352	-104.128.648						1.118.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah dokumen hasil pengawasan intern*	31 Dokumen	31 Dokumen	771.064.000	1.111.489.352	694.635.352	-76.428.648		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Semua OPD Kota Madiun		1.038.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	3 Laporan	3 Laporan	65.764.000	104.426.000	82.826.000	17.062.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	15 Laporan	15 Laporan	483.049.000	483.012.352	279.183.352	-203.865.648	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	4 Laporan	4 Laporan	52.981.000	52.981.000	37.292.000	-15.689.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	3 Laporan	3 Laporan	73.940.000	73.940.000	51.256.000	-22.684.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	2 Kesepaka tan	2 Kesepaka tan	70.088.000	371.888.000	234.136.000	164.048.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	4 Dokumen	4 Dokumen	25.242.000	25.242.000	9.942.000	-15.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Prosentase penyelesaian dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu*	100 %	100 %	75.400.000	75.400.000	47.700.000	-27.700.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Semua OPD Kota Madiun		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	1 Laporan	1 Laporan	18.300.000	18.300.000	18.300.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	1 Laporan	1 Laporan	57.100.000	57.100.000	29.400.000	-27.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100 %	100 %	1.057.814.000	1.075.865.000	948.986.000	-108.828.000						1.120.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi*	100 %	100 %	84.572.000	100.572.000	97.930.000	13.358.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Inspektorat Kota Madiun		110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	48.461.000	64.461.000	64.461.000	16.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	36.111.000	36.111.000	33.469.000	-2.642.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi*	3 Dokumen	3 Dokumen	973.242.000	975.293.000	851.056.000	-122.186.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Semua OPD Kota Madiun		1.010.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	0 0	0 0	446.474.000	446.474.000	316.036.000	-130.438.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			460.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	0 0	0 0	526.768.000	528.819.000	535.020.000	8.252.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				24.729.244.381	26.419.812.381	25.599.454.295	870.209.914						25.825.471.703,00	
	7,01	KECAMATAN				59.775.479.117	60.820.185.422	58.290.076.767	-1.485.402.350						25.825.471.703,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MANGUHARJO				21.432.584.681	21.467.652.681	20.601.790.552	- 830.794.129						25.825.471.703,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,35 Nilai	83,35 Nilai	16.653.342.462	16.487.210.462	16.342.180.951	- 311.161.511						15.748.542.486,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	2.810.000	2.810.000	2.210.000	- 600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		3.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20 Dokumen	20 Dokumen	2.810.000	2.810.000	2.210.000	- 600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	11.823.928.494	7.079.457.594	7.126.767.594	- 4.697.160.900		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		12.451.035.394,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	11.821.628.494	7.077.157.594	7.125.157.594	- 4.696.470.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			12.448.472.894,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	26 Laporan	26 Laporan	2.300.000	2.300.000	1.610.000	- 690.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.562.500,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai*	100 %	100 %	68.890.000	68.890.000	68.890.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		68.890.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	100 Orang	68.890.000	68.890.000	68.890.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			68.890.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	115.890.000	114.966.000	57.988.000	- 57.902.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		117.091.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	115.890.000	114.966.000	57.988.000	- 57.902.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			117.091.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	1.184.149.000	1.070.717.000	1.070.567.000	- 113.582.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		1.040.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	9 Unit	9 Unit	398.512.000	285.080.000	285.080.000	- 113.432.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			400.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	188.850.000	188.850.000	188.850.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			340.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	596.787.000	596.787.000	596.637.000	-150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			300.000.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	2.953.840.068	7.646.293.468	7.482.267.957	4.528.427.889		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		1.233.817.864,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.953.840.068	7.646.293.468	7.482.267.957	4.528.427.889	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.233.817.864,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persetase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	503.834.900	504.076.400	533.490.400	29.655.500		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		834.708.228,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	15 Unit	15 Unit	88.680.000	88.680.000	88.680.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			107.625.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	6 Unit	358.000.000	358.241.500	387.655.500	29.655.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			666.250.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	60 Unit	60 Unit	57.154.900	57.154.900	57.154.900	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			60.833.228,00	KECAMATAN MANGUHARJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0,00						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		47.154.573,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1 Dokumen	1 Dokumen	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			47.154.573,00	KECAMATAN MANGUHARJO
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	100 %	294.921.000	348.921.000	258.076.000	-36.845.000						275.620.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti [deleted]*	100 %	100 %	192.151.000	246.151.000	157.634.000	-34.517.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		180.610.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	1 Laporan	1 Laporan	192.151.000	246.151.000	157.634.000	-34.517.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			180.610.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	102.770.000	102.770.000	100.442.000	-2.328.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		95.010.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Laporan	1 Laporan	102.770.000	102.770.000	100.442.000	-2.328.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			95.010.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	100 %	112.448.000	112.448.000	110.794.400	-1.653.600						115.070.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	112.448.000	112.448.000	110.794.400	-1.653.600		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		115.070.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	350 Orang	350 Orang	54.858.000	54.858.000	53.566.200	-1.291.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			54.950.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	1 Laporan	1 Laporan	45.080.000	45.080.000	44.718.200	-361.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			47.460.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	2 Dokumen	2 Dokumen	12.510.000	12.510.000	12.510.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			12.660.000,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN MANGUHARJO				486.984.500	497.784.500	426.438.420	-60.546.080						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	486.984.500	497.784.500	426.438.420	-60.546.080						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	486.984.500	497.784.500	426.438.420	-60.546.080		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	486.984.500	497.784.500	426.438.420	-60.546.080	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			694.614.390,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN SOGATEN				462.034.790	472.834.790	386.661.540	-75.373.250						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	462.034.790	472.834.790	386.661.540	-75.373.250						6.396.759.947,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	462.034.790	472.834.790	386.661.540	-75.373.250		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	462.034.790	472.834.790	386.661.540	-75.373.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			669.165.686,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN PATIHAN				442.388.400	453.188.400	382.385.437	-60.002.963						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	442.388.400	453.188.400	382.385.437	-60.002.963						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	442.388.400	453.188.400	382.385.437	-60.002.963		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	442.388.400	453.188.400	382.385.437	-60.002.963	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			649.126.368,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN NGEGONG				414.816.500	443.616.500	387.853.890	-26.962.610						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	414.816.500	443.616.500	387.853.890	-26.962.610						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	414.816.500	443.616.500	387.853.890	-26.962.610		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	414.816.500	443.616.500	387.853.890	-26.962.610	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			620.850.030,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN WINONGO				468.905.000	479.705.000	414.346.981	-54.558.019						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	468.905.000	479.705.000	414.346.981	-54.558.019						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	468.905.000	479.705.000	414.346.981	-54.558.019		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	468.905.000	479.705.000	414.346.981	-54.558.019	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			676.173.300,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN MADIUN LOR				499.542.800	522.342.800	445.567.614	-53.975.186						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	499.542.800	522.342.800	445.567.614	-53.975.186						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	499.542.800	522.342.800	445.567.614	-53.975.186		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	499.542.800	522.342.800	445.567.614	-53.975.186	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			708.137.856,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN PANGONGANGAN				448.993.070	459.793.070	391.951.896	-57.041.174						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	448.993.070	459.793.070	391.951.896	-57.041.174						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	448.993.070	459.793.070	391.951.896	-57.041.174		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	448.993.070	459.793.070	391.951.896	-57.041.174	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			629.332.931,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN NAMBANGAN LOR				609.615.400	627.415.400	560.320.274	-49.295.126						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	609.615.400	627.415.400	560.320.274	-49.295.126						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	609.615.400	627.415.400	560.320.274	-49.295.126		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	609.615.400	627.415.400	560.320.274	-49.295.126	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			995.097.199,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL				498.532.759	522.332.759	455.153.149	-43.379.610						25.825.471.703,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	92,45 Indeks	498.532.759	522.332.759	455.153.149	-43.379.610						6.396.759.947,00	
	7.01.02.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	498.532.759	522.332.759	455.153.149	-43.379.610		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		6.349.605.374,00	KECAMATAN MANGUHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	498.532.759	522.332.759	455.153.149	-43.379.610	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			707.107.614,00	KECAMATAN MANGUHARJO
		KECAMATAN KARTOHARJO				18.583.896.013	19.455.043.293	18.505.980.683	-77.915.330						24.726.680.402,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	82,77 nilai	82,77 nilai	14.826.598.000	15.304.378.220	15.127.336.818	300.738.818						13.399.598.000,00	
	7.01.01.2.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	4.000.000	2.000.000	1.600.000	-2.400.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		4.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	18 Dokumen	18 Dokumen	4.000.000	2.000.000	1.600.000	-2.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	11.605.840.495	6.751.690.245	6.787.046.526	-4.818.793.969		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		11.532.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	11.603.840.495	6.749.690.245	6.785.646.526	-4.818.193.969	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			11.530.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	13 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.400.000	-600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai*	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	27.178.725	-2.821.275		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		30.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	150 Orang	150 Orang	30.000.000	30.000.000	27.178.725	-2.821.275	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			30.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Perangkat Daerah*	88,67 indeks	88,67 indeks	197.768.000	197.656.000	95.780.000	-101.988.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		197.768.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	197.768.000	197.656.000	95.780.000	-101.988.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			197.768.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	352.126.690	734.935.340	712.841.843	360.715.153		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		500.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	3 Unit	11 Unit	65.953.190	337.433.800	316.660.303	250.707.113	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	74.173.500	134.873.300	133.553.300	59.379.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	29 Unit	212.000.000	262.628.240	262.628.240	50.628.240	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	2.451.862.815	7.339.560.635	7.253.003.724	4.801.140.909		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		950.830.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.451.862.815	7.339.560.635	7.253.003.724	4.801.140.909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			950.830.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	185.000.000	248.536.000	249.886.000	64.886.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan / karyawati Kecamatan Kartoharjo		185.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	16 Unit	60.000.000	56.236.000	56.236.000	-3.764.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			60.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	1 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	55.000.000	122.300.000	123.650.000	68.650.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	60 Unit	43 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			35.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,67 Indeks	88,67 Indeks	57.832.400	57.785.000	51.090.000	-6.742.400						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	57.832.400	57.785.000	51.090.000	-6.742.400		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		55.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	3 Dokumen	4 Dokumen	57.832.400	57.785.000	51.090.000	-6.742.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.000.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	100 %	352.553.600	471.053.600	347.293.600	-5.260.000						352.553.600,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	264.203.600	382.703.600	290.888.600	26.685.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		264.203.600,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	16 Laporan	20 Laporan	264.203.600	382.703.600	290.888.600	26.685.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			264.203.600,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	88.350.000	88.350.000	56.405.000	-31.945.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		88.350.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	4 Laporan	3 Laporan	88.350.000	88.350.000	56.405.000	-31.945.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			88.350.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	100 %	153.655.000	153.655.000	88.466.000	-65.189.000						158.210.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	153.655.000	153.655.000	88.466.000	-65.189.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		158.210.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	100 Orang	200 Orang	66.900.000	66.900.000	36.212.000	-30.688.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			66.900.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	4 Laporan	2 Laporan	78.500.000	78.500.000	46.162.000	-32.338.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			78.500.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	2 Dokumen	2 Dokumen	8.255.000	8.255.000	6.092.000	-2.163.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			12.810.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN ORO-ORO OMBO				384.317.700	419.017.700	343.989.499	-40.328.201						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	384.317.700	419.017.700	343.989.499	-40.328.201						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	384.317.700	419.017.700	343.989.499	-40.328.201		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	384.317.700	419.017.700	343.989.499	-40.328.201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			605.457.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN SUKOSARI				298.118.858	316.338.858	268.542.558	-29.576.300						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	298.118.858	316.338.858	268.542.558	-29.576.300						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	298.118.858	316.338.858	268.542.558	-29.576.300		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Sukosari		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	298.118.858	316.338.858	268.542.558	-29.576.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			490.120.959,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KLEGEN				421.688.043	469.792.503	396.451.951	-25.236.092						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	421.688.043	469.792.503	396.451.951	-25.236.092						4.825.918.802,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	421.688.043	469.792.503	396.451.951	-25.236.092		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Klegen		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	421.688.043	469.792.503	396.451.951	-25.236.092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			585.446.643,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN REJOMULYO				391.498.612	426.298.612	345.211.958	-46.286.654						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	391.498.612	426.298.612	345.211.958	-46.286.654						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	391.498.612	426.298.612	345.211.958	-46.286.654		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	391.498.612	426.298.612	345.211.958	-46.286.654	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			555.000.600,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN PILANGBANGO				327.693.900	347.753.900	291.370.620	-36.323.280						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	327.693.900	347.753.900	291.370.620	-36.323.280						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	327.693.900	347.753.900	291.370.620	-36.323.280		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Pilangbango		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	327.693.900	347.753.900	291.370.620	-36.323.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			479.575.700,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN TAWANGREJO				296.178.600	321.218.600	275.596.668	-20.581.932						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	296.178.600	321.218.600	275.596.668	-20.581.932						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	296.178.600	321.218.600	275.596.668	-20.581.932		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	296.178.600	321.218.600	275.596.668	-20.581.932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			439.759.000,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KANIGORO				420.077.200	459.717.200	378.657.766	-41.419.434						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	420.077.200	459.717.200	378.657.766	-41.419.434						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	420.077.200	459.717.200	378.657.766	-41.419.434		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Kanigoro		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	420.077.200	459.717.200	378.657.766	-41.419.434	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			570.829.800,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KARTOHARJO				351.843.600	385.233.600	322.583.545	-29.260.055						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	351.843.600	385.233.600	322.583.545	-29.260.055						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	351.843.600	385.233.600	322.583.545	-29.260.055		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	351.843.600	385.233.600	322.583.545	-29.260.055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			553.126.500,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KELURAHAN KELUN				301.840.500	322.800.500	269.389.700	-32.450.800						24.726.680.402,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67 indeks	88,67 indeks	301.840.500	322.800.500	269.389.700	-32.450.800						4.825.918.802,00	
	7.01.02.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	301.840.500	322.800.500	269.389.700	-32.450.800		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Kelun		4.770.918.802,00	KECAMATAN KARTOHARJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	301.840.500	322.800.500	269.389.700	-32.450.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			491.602.600,00	KECAMATAN KARTOHARJO
		KECAMATAN TAMAN				19.758.998.423	19.897.489.448	19.182.305.532	-576.692.891						26.127.080.150,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,92 Nilai	82,92 Nilai	16.134.945.121	15.981.231.933	15.689.996.371	-444.948.750						17.605.542.573,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokomen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	2.000.000	2.000.000	1.400.000	-600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		2.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	2.000.000	1.400.000	-600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	12.213.718.027	7.044.334.446	7.131.650.240	-5.082.067.787		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		13.533.794.923,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	78 Orang/b ulan	78 Orang/b ulan	12.213.718.027	7.044.334.446	7.131.650.240	-5.082.067.787	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			13.533.794.923,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian*	100 %	100 %	219.110.000	219.110.000	118.435.000	-100.675.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		219.110.000,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	150 Orang	150 Orang	219.110.000	219.110.000	118.435.000	-100.675.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			219.110.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	100 %	362.410.000	361.894.000	181.374.000	-181.036.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		120.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	15 Laporan	15 Laporan	362.410.000	361.894.000	181.374.000	-181.036.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			120.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak*	100 %	100 %	330.946.374	787.318.090	776.169.028	445.222.654		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		879.987.610,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	9 Unit	9 Unit	18.794	337.053.800	318.167.372	318.148.578	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			288.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	330.927.580	450.264.290	458.001.656	127.074.076	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			591.987.610,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	2.283.105.210	7.129.756.947	7.044.104.753	4.760.999.543		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		2.529.914.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.283.105.210	7.129.756.947	7.044.104.753	4.760.999.543	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			2.529.914.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	100 %	100 %	723.655.510	436.818.450	436.863.350	-286.792.160		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman		320.736.040,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16 Unit	16 Unit	145.382.450	118.314.450	118.314.450	-27.068.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			146.360.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	457.633.560	197.864.500	197.864.500	-259.769.060	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			123.168.590,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	6 Unit	120.639.500	120.639.500	120.684.400	44.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			51.207.450,00	KECAMATAN TAMAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	16.610.000	16.610.000	10.790.000	-5.820.000						3.173.344.091,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	16.610.000	16.610.000	10.790.000	-5.820.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		19.704.300,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	4 Laporan	4 Laporan	16.610.000	16.610.000	10.790.000	-5.820.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			19.704.300,00	KECAMATAN TAMAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	100 %	375.180.000	444.930.000	273.450.000	-101.730.000						242.002.235,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	265.145.000	334.895.000	200.065.000	-65.080.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		128.940.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	12 Laporan	12 Laporan	265.145.000	334.895.000	200.065.000	-65.080.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			128.940.000,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	110.035.000	110.035.000	73.385.000	-36.650.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		113.062.235,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	6 Laporan	6 Laporan	110.035.000	110.035.000	73.385.000	-36.650.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			113.062.235,00	KECAMATAN TAMAN
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	100 %	120.823.000	120.823.000	88.515.800	-32.307.200						125.021.085,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti*	100 %	100 %	120.823.000	120.823.000	88.515.800	-32.307.200		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		125.021.085,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	60 Orang	60 Orang	38.060.000	38.060.000	24.716.000	-13.344.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			38.270.400,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	4 Laporan	4 Laporan	66.292.000	66.292.000	52.725.000	-13.567.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			64.734.600,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	4 Dokumen	4 Dokumen	16.471.000	16.471.000	11.074.800	-5.396.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			22.016.085,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN MOJOREJO				329.948.200	361.490.200	351.596.087	21.647.887						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	329.948.200	361.490.200	351.596.087	21.647.887						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	329.948.200	361.490.200	351.596.087	21.647.887		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	329.948.200	361.490.200	351.596.087	21.647.887	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			346.445.610,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN PANDEAN				340.000.000	371.765.000	343.564.525	3.564.525						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	340.000.000	371.765.000	343.564.525	3.564.525						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	340.000.000	371.765.000	343.564.525	3.564.525		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	340.000.000	371.765.000	343.564.525	3.564.525	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			320.922.630,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN BANJAREJO				378.564.970	399.319.970	372.599.966	-5.965.004						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	378.564.970	399.319.970	372.599.966	-5.965.004						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	378.564.970	399.319.970	372.599.966	-5.965.004		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	378.564.970	399.319.970	372.599.966	-5.965.004	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			397.493.219,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN KUNCEN				170.890.204	195.692.039	199.016.005	28.125.801						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	170.890.204	195.692.039	199.016.005	28.125.801						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	170.890.204	195.692.039	199.016.005	28.125.801		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	170.890.204	195.692.039	199.016.005	28.125.801	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			179.434.714,00	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MANISREJO				404.927.600	444.476.150	406.229.787	1.302.187						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	404.927.600	444.476.150	406.229.787	1.302.187						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	404.927.600	444.476.150	406.229.787	1.302.187		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	404.927.600	444.476.150	406.229.787	1.302.187	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			404.927.600,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN KEJURON				366.850.088	404.808.916	373.547.511	6.697.423						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	366.850.088	404.808.916	373.547.511	6.697.423						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	366.850.088	404.808.916	373.547.511	6.697.423		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	366.850.088	404.808.916	373.547.511	6.697.423	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			366.850.088,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN JOSENAN				439.975.440	457.075.440	443.790.896	3.815.456						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	439.975.440	457.075.440	443.790.896	3.815.456						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	439.975.440	457.075.440	443.790.896	3.815.456		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	439.975.440	457.075.440	443.790.896	3.815.456	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			439.975.440,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN DEMANGAN				355.150.000	347.719.000	315.363.148	- 39.786.852						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	355.150.000	347.719.000	315.363.148	- 39.786.852						3.173.344.091,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	355.150.000	347.719.000	315.363.148	- 39.786.852		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	355.150.000	347.719.000	315.363.148	- 39.786.852	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			355.150.000,00	KECAMATAN TAMAN
		KELURAHAN TAMAN				325.133.800	351.547.800	313.845.437	- 11.288.363						26.127.080.150,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	92,16 Indeks	325.133.800	351.547.800	313.845.437	- 11.288.363						3.173.344.091,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan*	100 %	100 %	325.133.800	351.547.800	313.845.437	-11.288.363		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3.153.639.791,00	KECAMATAN TAMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	325.133.800	351.547.800	313.845.437	-11.288.363	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			342.440.490,00	KECAMATAN TAMAN
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.927.739.005	6.007.750.213	5.790.265.978	-137.473.027						26.533.658.438,00	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.927.739.005	6.007.750.213	5.790.265.978	-137.473.027						26.533.658.438,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75 Nilai	81,75 Nilai	5.927.739.005	6.007.750.213	5.790.265.978	-137.473.027						7.021.559.236,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 persen	100 persen	51.910.000	51.910.000	51.910.000	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	51.910.000	51.910.000	51.910.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 persen	100 persen	4.147.854.594	2.507.503.422	2.490.363.359	-1.657.491.235		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		4.526.559.236,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	4.147.854.594	2.507.503.422	2.490.363.359	-1.657.491.235	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			4.526.559.236,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian*	100 persen	100 persen	4.215.000	50.000	50.000	-4.165.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	31 Orang	31 Orang	4.215.000	50.000	50.000	-4.165.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 persen	100 persen	891.552.446	2.616.679.826	2.416.335.653	1.524.783.207		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	534.965.446	2.289.558.826	2.252.775.153	1.717.809.707	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	80 Laporan	80 Laporan	356.587.000	327.121.000	163.560.500	-193.026.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan barang milik daerah*	100 persen	100 persen	686.353.680	685.753.680	685.753.680	-600.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		520.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	14 Unit	14 Unit	224.131.660	223.531.660	223.531.660	-600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	20 Unit	462.222.020	462.222.020	462.222.020	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			520.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 persen	100 persen	145.853.285	145.853.285	145.853.285	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	17 Unit	17 Unit	59.891.000	59.891.000	59.891.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	35.479.485	35.479.485	35.479.485	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	50.482.800	50.482.800	50.482.800	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						458.401.471.190,00	502.619.779.320	496.593.679.730,52	38.192.208.540,52							

PRIORITAS 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106.470.063.653	106.813.130.705	122.528.667.767	16.058.604.114						137.374.400.000,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				91.655.173.700	90.752.311.064	105.420.114.445	13.764.940.745						137.374.400.000,00	
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan	82,66 persen	82,66 persen	7.538.940.000	7.418.590.000	7.403.500.000	-135.440.000						14.100.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan bebas banjir/genangan*	81,67 persen	81,67 persen	7.538.940.000	7.418.590.000	7.403.500.000	-135.440.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		14.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi*	0 Unit	0 Unit	639.460.000	438.110.000	436.310.000	-203.150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	805.260.000	886.260.000	885.060.000	79.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			1.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	1 KM	1 KM	6.094.220.000	6.094.220.000	6.082.130.000	-12.090.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			7.025.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan*	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			5.025.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	*Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun*	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	0,23 0,23 % persen	0,23 0,23 % persen	598.476.100	645.649.300	642.517.510	44.041.410						275.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum*	100 Sambungan Rumah	100 Sambungan Rumah	598.476.100	645.649.300	642.517.510	44.041.410		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	100 SR	100 SR	598.476.100	645.649.300	642.517.510	44.041.410	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	100 %	100 %	1.742.925.50	1.670.125.50	1.142.330.64	600.594.86						1.125.000.000,0	
	1.03.05.2.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan domestik*	100 persen	100 persen	1.742.925.50	1.670.125.50	1.142.330.64	600.594.86		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		1.125.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.0 .0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	*Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	1.415.100.00	1.342.300.00	564.325.39	850.774.6	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			500.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 .0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Sistem Pengelolaa Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasika dan Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	327.825.50	327.825.50	578.005.25	250.179.75	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			625.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan	82,66 %	82,66 %	20.623.990.20	18.456.590.20	22.461.102.29	1.837.112.09						28.125.000.000,0	
	1.03.06.2.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan bebo banjir/genangan*	81,67 persen	81,67 persen	20.623.990.20	18.456.590.20	22.461.102.29	1.837.112.09		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		28.125.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 .0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangu*	2000 M	2000 M	7.632.870.00	7.632.870.00	7.611.360.00	21.510.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			12.025.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 .0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan*	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	9.783.020.00	7.080.920.00	11.167.780.00	1.384.760.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			12.025.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 .0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*	12 Dokumen	12 Dokumen	949.910.00	949.910.00	938.660.00	11.250.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			975.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 .0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperas dan Terpelihara*	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.258.190.20	2.792.890.20	2.743.302.29	485.112.09	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			3.100.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan	22 %	22 %	231.300.00	0,0	0,0	231.300.00						2.000.000,0	
	1.03.07.2.0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan sampah di wilayah kota*	72 %	72 %	231.300.00	0,0	0,0	231.300.00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim indust di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		2.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.0 .0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun*	1 Ton/hari	1 Ton/hari	231.300.00	0,0	0,0	231.300.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			2.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terbangun	100 %	100 %	19.291.870.00	24.300.070.16	27.235.421.30	7.943.551.30						36.050.000.000,0	
	1.03.08.2.0	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi*	100 persen	100 persen	19.291.870.00	24.300.070.16	27.235.421.30	7.943.551.30		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		36.050.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 .0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala*	8 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	500.000.00	500.000.00	499.238.00	762.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 .0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	18.541.870.00	23.550.070.16	26.597.405.30	8.055.535.30	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			35.250.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 .0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	10 Dokumen	10 Dokumen	250.000.00	250.000.00	138.778.00	111.222.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			275.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis/cagar budaya terbangun/terehab	100 persen	100 persen	1.829.302.00	1.014.206.00	5.844.185.00	4.014.883.00						1.327.400.000,0	
	1.03.09.2.0	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi*	100 persen	100 persen	1.829.302.00	1.014.206.00	5.844.185.00	4.014.883.00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		1.327.400.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.0 .0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata*	1 Kawasan	1 Kawasan	1.829.302.00	1.014.206.00	5.844.185.00	4.014.883.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			1.327.400.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan kota yang baik	95,80 persen	95,80 persen	37.372.671.60	34.486.731.60	38.040.429.98	667.758.38						37.910.000.000,0	
	1.03.10.2.0	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab*	95,80 persen	95,80 persen	37.372.671.60	34.486.731.60	38.040.429.98	667.758.38		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		37.910.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.0 .0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan da Jembatan yang Disusun*	5 Dokumen	5 Dokumen	221.998.4(	221.998.4(	1.078.050.1	856.051.7	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			325.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0031	Penggantian Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Diganti*	2 Jembatan	2 Jembatan	23.710.0(	23.710.0(	23.710.0(	0,(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			3.000.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0032	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun*	1 KM	1 KM	2.216.740.0(	2.216.740.0(	2.215.300.0(	1.440.0(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			2.000.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*	8 KM	8 KM	23.288.630.0(	21.952.430.0(	21.941.420.0(	1.347.210.0(	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNK) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSE PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			18.025.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	*Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standa*	1 KM	1 KM	929.010.0(	929.010.0(	927.630.0(	1.380.0(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			1.525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0038	Pemeliharaan Rutin Jembata	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	25 Jembatan	25 Jembatan	221.430.0(	221.430.0(	220.980.0(	450.0(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			275.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	*Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur*	1 KM	1 KM	4.175.930.0(	2.626.190.0(	5.390.130.5	1.214.200.5	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			6.025.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala*	2 Jembatan	2 Jembatan	243.960.0(	243.960.0(	482.649.9	238.689.9	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			275.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	3 KM	3 KM	408.810.0(	408.810.0(	407.970.0(	840.0(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			435.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 .0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	20 KM	20 KM	5.642.453.2(	5.642.453.2(	5.352.589.3	289.863.8(	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			6.025.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	22,75 persen	22,75 persen	1.175.698.30	1.360.348.30	1.234.170.53	58.472.25						985.000.000,0	
	1.03.11.2.0	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeter*	22,75 persen	22,75 persen	262.795.00	264.295.00	267.555.00	4.760.00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 .0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi*	60 Orang	60 Orang	262.795.00	264.295.00	267.555.00	4.760.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeter*	100 persen	100 persen	103.926.50	103.926.50	52.551.53	51.374.95		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	-		125.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 .0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data da Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	103.926.50	103.926.50	52.551.53	51.374.95	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			125.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi*	100 persen	100 persen	808.976.80	992.126.80	914.064.00	105.087.20		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	-		335.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 .0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*	100 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	808.976.80	992.126.80	914.064.00	105.087.20	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			335.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100 %	100 %	1.250.000.00	1.400.000.00	1.416.457.16	166.457.16						1.325.000.000,0	
	1.03.12.2.0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW*	100 persen	100 persen	500.000.00	650.000.00	639.663.37	139.663.37		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 .0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataa Ruang	*Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.00	650.000.00	639.663.37	139.663.37	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			525.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW Persentase ketaatan pemanfaatan tat ruang sesuai RTRW [deleted]*	100 persen	100 persen	400.000.00	400.000.00	308.709.31	91.290.68		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	-		425.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.0 .0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataa ruang*	20 Dokumen	20 Dokumen	400.000.00	400.000.00	308.709.3	91.290.6	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			425.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted] Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW*	100 persen	100 persen	350.000.00	350.000.00	468.084.4	118.084.4		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	-		375.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 .0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ata pernyataan mandiri pelaku UMK	*Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*	300 Dokumen	300 Dokumen	350.000.00	350.000.00	468.084.4	118.084.4	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			375.000.000,0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.370.196.52	26.061.793.52	26.392.042.9	21.846.4						45.984.674.176,0	
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	1.369.341.00	1.369.341.00	1.918.774.00	549.433.0						2.022.850.000,0	
	1.04.02.2.0	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Reabilita Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang Dihasilkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	66.360.00	66.360.00	66.360.00	0,0		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	Masyarakat		118.950.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0 .0006	Pendataan Rumah Sewa Mili Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susu dan Rumah Khusus*	1 Dokumen	1 Dokumen	66.360.00	66.360.00	66.360.00	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			118.950.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program*	3 Unit	3 Unit	1.210.481.00	1.210.481.00	1.790.706.5	580.225.5		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	Masyarakat		1.757.900.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0 .0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah pada Loka Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasiona dan Pemeliharaan*	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	1.210.481.00	1.210.481.00	1.790.706.5	580.225.5	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			1.757.900.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Presentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus*	100 %	100 %	92.500.00	92.500.00	61.707.4	30.792.5		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah	Masyarakat		146.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0 .0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun*	1 Laporan	1 Laporan	92.500.00	92.500.00	61.707.4	30.792.5	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif sert mengembangkan agromaritim industr di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangar Wilayah			146.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	100 %	100 %	7.139.650.00	6.861.650.00	6.670.787.70	468.862.29						10.516.944.176,0	
	1.04.03.2.0	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani*	0,5 %	0,5 %	301.000.00	301.000.00	286.638.03	14.361.97		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat		220.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 .0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*	1 Dokumen	1 Dokumen	301.000.00	301.000.00	286.638.03	14.361.97	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			220.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani*	0,5 %	0,5 %	6.838.650.00	6.560.650.00	6.384.149.67	454.500.32		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat		10.296.944.176,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 .0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	160 Unit Rumah	160 Unit Rumah	2.368.850.00	2.368.850.00	2.273.475.07	95.374.92	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			2.886.200.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 .0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*	16,41 Ha	16,41 Ha	1.412.350.00	1.412.350.00	1.402.978.00	9.372.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			4.410.744.176,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 .0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	55 Unit	55 Unit	3.057.450.00	2.779.450.00	2.707.696.60	349.753.40	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-REGULER-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran akti koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			3.000.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	100 %	17.861.205.52	17.830.802.52	17.802.481.22	58.724.29						22.050.000.000,0	
	1.04.05.2.0	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Prosentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang memada*	100 %	100 %	17.861.205.52	17.830.802.52	17.802.481.22	58.724.29		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		22.050.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.0 .0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	3 Lokasi	3 Lokasi	17.861.205.52	17.830.802.52	17.802.481.22	58.724.29	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			22.050.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.024.373.00	2.024.373.00	1.634.058.28	390.314.71						26.706.239.671,0	
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	2.024.373.00	2.024.373.00	1.634.058.28	390.314.71						2.024.373.000,0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.0	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	1.974.373.00	1.974.373.00	1.606.071.88	368.301.1		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		1.974.373.000,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 .0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.617.195.00	1.617.195.00	1.287.254.28	329.940.7	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			1.634.995.000,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 .0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	357.178.00	357.178.00	318.817.60	38.360.40	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			339.378.000,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran*	100 %	100 %	50.000.00	50.000.00	27.986.40	22.013.60		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		50.000.000,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 .0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.00	50.000.00	27.986.40	22.013.60	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			50.000.000,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DA PEMADAM KEBAKARAN
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.465.861.703,0	4.465.861.70	4.118.595.603,3	-347.266.099,70						5.534.815.501,0	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.00 Nilai	86.00 Nilai	3.842.961.70	3.842.961.70	3.574.139.50	268.822.20						4.491.769.501,0	
	1.05.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah*	100 %	100 %	2.300.00	870.00	852.00	1.448.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		3.315.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	2.300.00	870.00	852.00	1.448.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			3.315.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	1.694.600.70	1.081.342.74	1.075.967.50	618.633.20		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		1.756.212.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	11 Orang/b ulan	11 Orang/b ulan	1.694.600.70	1.081.342.74	1.075.967.50	618.633.20	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.756.212.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	200.000.00	200.000.00	100.000.00	100.000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		275.000.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.0 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	200.000.00	200.000.00	100.000.00	100.000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			275.000.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusa pemerintahan daerah*	100 %	100 %	52.498.00	52.498.00	54.258.00	1.760.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		107.319.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	3 Unit	52.498.00	52.498.00	54.258.00	1.760.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			107.319.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jas urusan pemerintahan daerah*	100 %	100 %	1.559.391.00	2.174.078.96	2.006.387.00	446.996.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		1.903.087.501,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralata dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.559.391.00	2.174.078.96	2.006.387.00	446.996.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.903.087.501,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	334.172.00	334.172.00	336.675.00	2.503.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		446.836.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	8 Unit	214.917.00	214.917.00	214.917.00	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			323.065.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor da Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	101.010.00	101.010.00	103.513.00	2.503.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	18.245.00	18.245.00	18.245.00	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			23.771.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	100 %	622.900.00	622.900.00	544.456.10	78.443.90						1.043.046.000,0	
	1.05.03.2.0	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	100 %	100 %	120.490.00	120.490.00	106.516.00	13.974.00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		158.475.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu tahun*	450 Orang	450 Orang	120.490.00	120.490.00	106.516.00	13.974.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			158.475.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.0	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	100 %	100 %	209.824.0	209.824.0	183.766.0	26.058.0		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		627.785.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petuga sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggal/n*	5 Unit	6 Unit	8.754.0	8.754.0	8.754.0	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			50.000.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhada Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yan mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP da keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kot*	250 Orang	250 Orang	47.360.0	47.360.0	45.545.0	1.815.0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			99.302.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencar Alam*	30 Keluarga	30 Keluarga	25.085.0	25.085.0	20.718.5	4.366.5	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			101.416.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancam bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghada bencana*	11 Kawasan	11 Kawasan	44.260.0	44.260.0	37.057.0	7.203.0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			175.351.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0021	Pengembangan Kapasitas Tir Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reak Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	50 Orang	50 Orang	21.005.0	21.005.0	17.376.5	3.628.5	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			44.957.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentar di kawasan rawan bencar Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	11 Kawasan	11 Kawasan	63.360.0	63.360.0	54.315.0	9.045.0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			156.759.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0	Pelayanan Penyelamatan dar Evakuasi Korban Bencana	*Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	100 %	100 %	172.419.0	172.419.0	148.330.1	24.088.9		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Madiun		175.251.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	42 Orang	42 Orang	34.410.0	34.410.0	24.330.0	10.080.0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dar Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			58.137.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.0 .0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota da lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	70 Orang	70 Orang	122.209.00	122.209.00	108.200.10	14.008.90	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			87.114.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	18 Orang	18 Orang	15.800.00	15.800.00	15.800.00	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			30.000.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana*	100 %	100 %	120.167.00	120.167.00	105.844.00	14.323.0		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	BPBD Kota Madiun dan Instansi terkait		81.535.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan linta perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan tekn dalam menyusun dokume Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASN dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	50 Orang	50 Orang	49.965.00	49.965.00	42.509.00	7.456.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			57.475.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 .0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	1 Laporan	1 Laporan	70.202.00	70.202.00	63.335.00	6.867.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			24.060.000,0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				154.949.30	154.949.30	154.949.30	0,0						28.902.901.035,0	
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 %	100 %	154.949.30	154.949.30	154.949.30	0,0						178.346.125,0	
	1.06.07.2.0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan*	100 %	100 %	154.949.30	154.949.30	154.949.30	0,0		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Taman Makam Pahlawan		178.346.125,0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.0 .0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kot*	966 Makam	966 Makam	154.949.30	154.949.30	154.949.30	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			178.346.125,0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				885.855.00	885.855.00	708.167.38	177.687.62						15.576.200.000,0	
1	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	100 %	145.855.00	145.855.00	93.826.88	52.028.12						15.036.200.000,0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.0	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Penyelesaian Masalah Ganri Kerugian dan Santunan Tanah untu Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	145.855.00	145.855.00	93.826.88	52.028.12		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		15.036.200.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.0 .0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untu Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	109.655.00	109.655.00	65.709.73	43.945.27	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			15.000.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.0 .0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordina dan Fasilitasi Penyelesaia Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	36.200.00	36.200.00	28.117.15	8.082.85	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			36.200.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Perentae Penatagunaan Tanah	100 %	100 %	740.000.00	740.000.00	614.340.50	125.659.50						540.000.000,0	
	2.10.10.2.0	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Penggunaan Tanah yang Hamparanny Dalam Satu Daerah*	100 %	100 %	740.000.00	740.000.00	614.340.50	125.659.50		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		540.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.0 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	*Jumlah Laporan Koordina dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	10 Laporan	10 Laporan	740.000.00	740.000.00	614.340.50	125.659.50	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkunga dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			540.000.000,0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDU				26.740.036.124,0	26.990.036.12	27.401.389.446,62	661.353.322,62						27.061.300.000,0	
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,40 Nilai	80,40 Nilai	13.060.357.19	13.150.357.19	12.917.203.50	143.153.68						14.137.500.000,0	
	2.11.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluas perangkat daerah*	100 %	100 %	22.387.37	52.810.00	28.810.00	6.422.62		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		100.000.000,0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	22.387.37	52.810.00	28.810.00	6.422.62	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan*	100 %	100 %	9.269.540.17	5.650.780.43	5.809.182.81	3.460.357.35		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		10.200.000.000,0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	9.269.540.173	5.650.780.435	5.809.182.817	- 3.460.357.356	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			10.200.000.000,0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian*	100 %	100 %	129.413.60	129.413.60	117.004.60	12.409.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		237.500.000,0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.0 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	3 Paket	3 Paket	70.039.7	70.039.7	51.075.7	18.964.0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			137.500.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	220 Orang	220 Orang	59.373.89	59.373.89	65.928.89	6.555.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum*	100 %	100 %	250.000.00	250.000.00	125.505.00	124.495.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		200.000.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	30 Laporan	30 Laporan	250.000.00	250.000.00	125.505.00	124.495.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	199.052.53	199.052.53	291.712.69	92.660.16		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		225.000.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	8 Unit	8 Unit	115.392.00	115.392.00	115.392.00	0,0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,0	DINAS LINGKUNGA HIDUP
	2.11.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	83.660.530	83.660.530	176.320.694	92.660.164	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	1.401.347.340	4.938.062.951	4.709.701.627	3.308.354.287		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		1.575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	670.382.745	720.386.490	657.062.484	13.320.261	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			725.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	730.964.595	4.217.676.461	4.052.639.143	3.321.674.548	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan*	100 %	100 %	1.788.616.172	1.930.237.672	1.835.286.762	46.670.590		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Indeks Pelayanan Publik		1.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	6 Unit	1.399.956.192	1.399.956.192	1.417.768.362	17.812.170	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			1.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	15 Unit	124.921.480	124.921.480	103.733.400	21.188.080	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	3 Unit	263.738.500	405.360.000	313.785.000	50.046.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,5 %	79,5 %	293.800.000	293.800.000	270.844.000	- 22.956.000						230.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia*	79,50% 79,50%	79,50% 79,50%	125.000.000	125.000.000	107.844.000	- 17.156.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	107.844.000	- 17.156.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia*	1 Dokumen	1 Dokumen	168.800.000	168.800.000	163.000.000	- 5.800.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	168.800.000	168.800.000	163.000.000	- 5.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	50,10 %	50,10 %	1.176.400.000	1.336.400.000	1.120.881.678	- 55.518.322						1.215.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya*	78 Kegiatan/usaha	78 Kegiatan/usaha	800.000.000	950.000.000	840.829.100	40.829.100		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	650.000.000	538.567.500	38.567.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000	300.000.000	302.261.600	2.261.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03. 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair*	18 Kegiata n/usaha	18 Kegiata n/usaha	376.400.000	386.400.000	280.052.578	- 96.347.422		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03. 2.02.000 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	2 Laporan	2 Laporan	211.400.000	221.400.000	157.052.578	- 54.347.422	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03. 2.02.000 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*	2 Titik	2 Titik	165.000.000	165.000.000	123.000.000	- 42.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan	50 %	50 %	27.000.000	27.000.000	18.235.000	- 8.765.000						35.000.000,00	
	2.11.04. 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah RTH yang di pantau*	5 Lokasi	5 Lokasi	27.000.000	27.000.000	18.235.000	- 8.765.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04. 2.01.000 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000	27.000.000	18.235.000	- 8.765.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	78,20 %	78,20 %	60.000.000	60.000.000	31.860.000	- 28.140.000						65.000.000,00	
	2.11.05. 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat*	18 Lokasi	18 Lokasi	60.000.000	60.000.000	31.860.000	- 28.140.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05. 2.01.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000	60.000.000	31.860.000	- 28.140.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	88,20 %	88,20 %	420.000.000	420.000.000	290.471.993	- 129.528.007						440.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Koa*	18 Perusahaan	18 Perusahaan	420.000.000	420.000.000	290.471.993	-129.528.007		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	4 Dokumen	4 Dokumen	260.000.000	260.000.000	174.536.893	-85.463.107	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	160.000.000	160.000.000	115.935.100	-44.064.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	703.750.000	703.750.000	493.803.000	-209.947.000						750.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota*	15 Kegiatan	15 Kegiatan	703.750.000	703.750.000	493.803.000	-209.947.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	4 Dokumen	4 Dokumen	703.750.000	703.750.000	493.803.000	-209.947.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	260.000.000	260.000.000	220.848.000	-39.152.000						260.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan*	5 laporan	5 laporan	260.000.000	260.000.000	220.848.000	-39.152.000		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*	5 Pengaduan	5 Pengaduan	130.000.000	130.000.000	103.394.000	-26.606.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*	5 Perkara	5 Perkara	130.000.000	130.000.000	117.454.000	-12.546.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71 %	71 %	10.738.728.928	10.738.728.928	12.037.242.267	1.298.513.339						9.928.800.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah sampah yang dikelola*	43.790 Ton	43.790 Ton	10.637.728.928	10.637.728.928	11.967.224.287	1.329.495.359		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		9.828.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	41 Kelompok	41 Kelompok	4.927.335.940	4.927.335.940	4.555.451.300	-371.884.640	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			4.478.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	3 Unit	3 Unit	2.666.792.988	2.666.792.988	4.223.282.988	1.556.490.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	*Jumlah sampah yang terdaur ulang*	43780 Ton	43780 Ton	315.600.000	315.600.000	313.600.000	-2.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*	32280 Ton	32280 Ton	2.728.000.000	2.728.000.000	2.874.889.999	146.889.999	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			2.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi*	50 Kelompok	50 Kelompok	101.000.000	101.000.000	70.017.980	-30.982.020		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	*Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja*	3 Unit	3 Unit	101.000.000	101.000.000	70.017.980	-30.982.020	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5.431.645.693	13.193.337.693	17.460.178.700	12.028.533.007						17.342.458.436,00	
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	100 %	100 %	5.431.645.693	13.193.337.693	17.460.178.700	12.028.533.007						6.681.058.436,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*[deleted] Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik*	100 %	100 %	2.054.204.767	9.815.896.767	14.280.756.767	12.226.552.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		2.952.854.951,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	200 Unit	200 Unit	715.633.001	8.477.325.001	12.477.033.001	11.761.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			1.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	2 Unit	2 Unit	1.188.571.766	1.188.571.766	1.653.723.766	465.152.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			1.352.854.951,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase terminal berfungsi baik*	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*[deleted] Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir yang baik*	100 %	100 %	846.700.500	846.700.500	926.166.500	79.466.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		881.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	846.700.500	846.700.500	926.166.500	79.466.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			881.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*[deleted] Persentase kendaraan lulus uji*	100 %	100 %	387.415.600	387.415.600	372.075.600	-15.340.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		337.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	4000 Dokumen	4000 Dokumen	90.000.000	90.000.000	81.860.000	-8.140.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	12 Unit	12 Unit	297.415.600	297.415.600	290.215.600	-7.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			336.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*[deleted] Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	100 %	100 %	375.758.000	375.758.000	329.144.600	-46.613.400		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		463.303.485,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	6 Laporan	6 Laporan	375.758.000	375.758.000	329.144.600	-46.613.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			463.303.485,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ*	100 %	100 %	702.460.826	702.460.826	514.793.233	-187.667.593		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		797.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	702.460.826	702.460.826	514.793.233	-187.667.593	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			797.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan angkutan umum*	100 %	100 %	1.015.106.000	1.015.106.000	987.242.000	-27.864.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Masyarakat Kota Madiun		1.098.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	37 Unit	37 Unit	1.015.106.000	1.015.106.000	987.242.000	-27.864.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2025)4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan P4-Keterpaduan Pengembangan Wilayah			1.098.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5,01	PERENCANAAN				391.740.000	401.740.000	332.970.000	- 58.770.000						15.354.431.200,00	
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	100 %	100 %	391.740.000	401.740.000	332.970.000	- 58.770.000						5.448.066.200,00	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilyahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	391.740.000	401.740.000	332.970.000	- 58.770.000		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kota Madiun		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	1 Dokumen	1 Dokumen	62.120.000	62.120.000	45.060.000	- 17.060.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	1 Dokumen	1 Dokumen	138.910.000	148.910.000	121.050.000	- 17.860.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	1 Dokumen	1 Dokumen	114.550.000	114.550.000	101.010.000	- 13.540.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	1 Laporan	1 Laporan	76.160.000	76.160.000	65.850.000	- 10.310.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	(2025)3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik P8-Penyelenggaran Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						158.119.831.041,00	164.930.257.405	183.622.466.093,05	25.502.635.052,05							

Tabel 5. 3 Perubahan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2025

NO			INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	2025			LABEL
					2024	RPD	RKPD	RKPD-P	
						2025-2026	2025	2025	
1			2	3	4	5			6
NO			INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	2025			LABEL
					2024	RPD	RKPD	RKPD-P	
						2025-2026	2025	2025	
1			2	3	4	5	6	7	8
I			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
a			Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
	1		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	3,08-5,75	5,92	5,80	Indikator makro/ Tujuan Kota
	2		Pendapatan Per Kapita (ADHK)	Juta	61,66	66,34	62,99	62,99	Indikator makro/ Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
	4		Indeks Gini	Indeks	0,435	0,385	0,385	0,433	Indikator Tujuan Kota
	5		Tingkat Kemiskinan	%	4,38	4,55	4,55	4,30	Indikator sasaran kota
	6		Pengeluaran Per Kapita	Juta	17,518	17,72	17,72	17,720	Indikator sasaran kota
	7		Tingkat Inflasi	%	1,31	4±1	3±1	3±1	Indikator sasaran kota
	8		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,56	0,40-0,60	0,40-0,60	0,56	Indikator sasaran kota
b			Fokus Kesejahteraan Sosial						
	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,51	83,7	84,1	84,51	Indikator Tujuan Kota
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
		1	Jumlah Fakir Miskin yang mandiri	orang	-	400	400	400	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,093	0,093	0,093	0,090	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,92	4,83	4,83	4,83	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	96,21	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100	92,01	92,01	92,01	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,25	85,5	85,5	85,5	Indikator Program PD
		8	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	100	67	76	76	Indikator Program PD
		9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87	100	100	100	Indikator Program PD
		10	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		11	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100	100	100	Lppd
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100	100	100	Lppd
		3	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	layanan	3 (UPTD PPA, SLRT dan LK3)	4	3	3	Lppd
		4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1207	1100	1100	1100	Lppd
		5	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	3 (UPTD PPA, SLRT dan LK3)	4	4	4	Lppd
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1207	1100	1100	1100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		7	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4	5	5	5	Lppd
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang		1100	1100	1100	Lppd
		9	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2	2	2	2	Lppd
		10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang		145	145	145	Lppd
		11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang		2	2	2	Lppd
		12	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18	18	18	18	Lppd
		13	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1	1	1	1	Lppd
		14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang		145	145	145	Lppd
		15	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1	1	5	5	Lppd
		16	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 23)	255	255	255	Lppd
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	orang		200	200	200	Lppd
		18	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali		3	4	4	Lppd
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang		3	3	3	Lppd
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang		145	145	145	Lppd
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang		145	145	145	Lppd
		22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang		145	145	145	Lppd
		23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang		10	10	10	Lppd
		24	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	49	20	9	9	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		25	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	49	9	9	9	Lppd
		26	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	0	-	-	-	Lppd
		27	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	0	9	9	9	Lppd
		28	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	orang	49	9	9	9	Lppd
		29	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 23)	255	255	255	Lppd
		30	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang		450	450	450	Spm
		31	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	anak		40	40	40	Spm
		32	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang		475	475	475	Spm
		33	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang		15	25	25	Spm
		34	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	orang		9	9	9	Spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,26	94,6	94,6	95,26	Indikator Tujuan Kota
		2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,093	0,093	0,093	0,090	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	%	31,27	25,02	25,02	25,02	Indikator Sasaran PD
		5	persentase keluarga yang berkualitas	%	86,67	80	80	80	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		7	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	55,3	40	40	40	Indikator Program PD
		8	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	1	1	1	1	Indikator Program PD
		9	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		10	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0.04	0,044	0,044	0,044	Indikator Program PD
		11	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	32,88	32	32	32	Lppd
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%		0,04	0,04	0,04	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%		14,58	14,55	14,55	Lppd
		4	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga		34	34	34	Lppd
		5	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program		34	34	34	Lppd
		6	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	2	2	2	Lppd
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga		15	15	15	Lppd
		8	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	Lppd
		9	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	15	15	15	15	Lppd
		10	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	12	15	13	13	Lppd
		11	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	lembaga	1	1	1	1	Lppd
		12	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	45	45	45	45	Lppd
		13	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga	1	1	1	1	Lppd
		14	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	20	20	20	20	Lppd
		15	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/ Program	3	3	3	3	Lppd
		16	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	1	1	1	1	Lppd
		17	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	Lppd
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
		1	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga	%		3	3	3	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase peningkatan pemuda aktif berprestasi	%		3	3	3	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase peningkatan prestasi keolahragaan	%		6	6	6	Indikator Sasaran PD
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,19	3,58	3,58	3,58	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		82,6	82,6	82,6	Indikator Program PD
		6	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	orang		81	81	81	Indikator Program PD
		7	Jumlah Prestasi Olahraga	medali		128	128	128	Indikator Program PD
		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%		44,57	44,57	44,57	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%		47,46	47,46	47,46	Lppd
		3	Peningkatan prestasi olahraga	medali		6	6	6	Lppd
		4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang		80	80	80	Lppd
		5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang		0	0	0	Lppd
		6	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang		80	80	80	Lppd
		7	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang		5	5	5	Lppd
		8	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang		158	158	158	Lppd
		9	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event		6	6	6	Lppd
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
		1	Jumlah pelaku Seni Budaya yang ada di Kota Madiun	Orang		252	252	252	Indikator Tujuan PD
		2	Jumlah pelaku Seni Budaya yang Aktif	Orang		75	75	75	Indikator Sasaran PD
		3	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	Obyek		2	2	2	Indikator Program PD
		4	Jumlah event/kegiatan pelestarian kebudayaan	kali		15	15	15	Indikator Program PD
		5	Jumlah event/kegiatan pelestarian kesenian tradisional	Kali		15	15	15	Indikator Program PD
		1	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek		20	20	20	Lppd
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek		32	32	32	Lppd
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek		32	32	32	Lppd
		4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek		32	32	32	Lppd
		5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang		100	100	100	Lppd
		6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek		148	148	148	Lppd
		7	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek		20	20	20	Lppd
		8	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	layanan		0	0	0	Lppd
		9	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek		2	2	2	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		10	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek		20	20	20	Lppd
		11	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			0	0	0	Lppd
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			0	0	0	Lppd
		13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota			0	0	0	Lppd
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang		6	6	6	Lppd
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	orang		0	0	0	Lppd
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	orang		0	0	0	Lppd
		17	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	orang		0	0	0	Lppd
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	orang		0	0	0	Lppd
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			0	0	0	Lppd
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			0	0	0	Lppd
II			ASPEK PELAYANAN UMUM						
a			Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib						
	1		Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
		1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	11,83	11,82	12,20	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100%	100	100	100	Indikator Sasaran Kota
		3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,46	14,46	14,54	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,85	4,86	4,86	4,85	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,27	85,3	85,3	85,27	Indikator Program PD
		7	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		8	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		9	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	%	72	64	64	64	Indikator Program PD
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Peserta didik	4752	5,395	5,395	4752	Lppd
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Peserta didik	13058	18,928	18,943	13058	Lppd
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Peserta didik	8393	9,489	9,489	8393	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Peserta didik	305	273	273	305	Lppd
		5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	155	91	91	155	Lppd
		6	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	112	137	137	112	Lppd
		7	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	112	137	137	112	Lppd
		8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	1:12	01:12	01:12	1:12	Lppd
		9	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	536	439	439	536	Lppd
		10	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	340	415	415	340	Lppd
		11	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	81	91	91	81	Lppd
		12	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	66	66	66	66	Lppd
		13	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2616	2750	2750	2616	Lppd
		14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	3224	3200	3200	3224	Lppd
		15	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10641	10766	10766	10641	Lppd
		16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	8451	8201	8201	8451	Lppd
		17	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	1:17	01:17	01:17	1:17	Lppd
		18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	1:15	01:14	01:14	1:15	Lppd
		19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	816	1210	1210	816	Lppd
		20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	606	739	739	606	Lppd
		21	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	1:3	194	1,65	1:3	Lppd
		22	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	1:6	129	1,63	1:6	Lppd
		23	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	229	194	194	229	Lppd
		24	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	147	129	129	147	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	452	1207	1207	452	Lppd
		26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	383	735	735	383	Lppd
		27	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	59	84	84	59	Lppd
		28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	18	27	27	18	Lppd
		29	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	108	76	76	108	Lppd
		30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	orang	86	33	33	86	Lppd
		31	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	4	3	3	4	Lppd
		32	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	0	0	0	0	Lppd
		33	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	0	0	0	0	Lppd
		34	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	1:15	01:15	01:15	1:15	Lppd
		35	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	31	40	40	31	Lppd
		36	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	31	39	39	31	Lppd
		37	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	6	6	6	6	Lppd
		38	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Orang	21451	28417	28432	21451	spm
		39	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	305	273	273	305	spm
		40	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	4752	5395	5395	4752	spm
		41	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	91,01	89,56	89,56	88,23	spm
		42	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	72,69	72,79	82,65	spm
		43	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,59	75,13	75,13	78,51	spm
		44	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	76,93	72,83	72,83	76,67	spm
		45	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,25	60,14	60,14	61,36	spm
		46	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,00	92,48	92,48	96,95	spm
		47	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	88,89	73,84	73,84	93,65	spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		48	Iklim Keamanan SMP	Nilai	75,89	73,41	73,41	76,29	spm
		49	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	77,14	70,98	70,98	75,90	spm
		50	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	61,96	58,46	58,46	67,17	spm
		51	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai		94,6	94,6		spm
		52	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	93,87	94,81	94,81	93,87	spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
		1	Angka Harapan Hidup	Skor	75,67	73,44	73,7	75,67	Indikator Sasaran Kota
		2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	11.8	6,3	10,8	11,2	Indikator Sasaran Kota
		3	Persentase Keluarga Sehat	%	59%	57	57	59	Indikator Tujuan PD
		4	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,59	0,57	0,57	0,59	Indikator Sasaran PD
		5	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Skor	4,88	4,78	4,78	4,88	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,58	4,39	4,39	4,51	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	88,57	88,1	88	88	Indikator Program PD
		8	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	72,14	71	71	72,20	Indikator Program PD
		9	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	100	75	75	75	Indikator Program PD
		10	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	96%	95	95	95	Indikator Program PD
		11	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	91%	89	89	89	Indikator Program PD
		1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2847	2410	2410	2410	Lppd/ Spm
		2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2847	2300	2300	2300	Lppd/ Spm
		3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2690	2207	2207	2207	Lppd/ Spm
		4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10611	8981	8981	8981	Lppd/ Spm
		5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31650	31582	31582	31582	Lppd/ Spm
		6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	129392	129950	129950	129950	Lppd/ Spm
		7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	33470	34490	34490	34490	Lppd/ Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	12730	40710	40710	40710	Lppd/ Spm
		9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	10755	8142	8142	8142	Lppd/ Spm
		10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	383	343	343	343	Lppd/ Spm
		11	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	6597	5729	5729	5729	Lppd/ Spm
		12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	6240	6051	6051	6051	Lppd/ Spm
		13	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	6,19	4,91	4,91	4,91	Lppd
		14	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	10	9	9	9	Lppd
		15	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	88,8	88,8	88,8	Lppd
		16	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	10	9	9	9	Lppd
		17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	Lppd
		18	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	5	5	5	Lppd
		19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	483	497	497	497	Lppd
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	Lppd
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	3	3	3	Lppd
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	483	459	459	459	Lppd
		23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	Lppd
		24	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	6	6	6	Lppd
		25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	1201	458	458	458	Lppd
		26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	10	9	9	9	Lppd
		28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1297	1241	1241	1241	Lppd
		29	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		30	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	5	5	5	Lppd
		31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	3270	3240	3240	3240	Lppd
		32	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	Lppd
		34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	586	617	617	617	Lppd
		35	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		36	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	3	3	3	Lppd
		37	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1170	1201	1201	1201	Lppd
		38	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	60	60	60	Lppd
		39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	3	3	3	Lppd
		40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	260	204	204	204	Lppd
		41	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		42	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	Lppd
		43	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	279	218	218	218	Lppd
		44	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	4	4	4	Lppd
		46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	69	64	64	64	Lppd
		47	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		48	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	7	7	7	Lppd
		49	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	725	665	665	665	Lppd
		50	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4	4	4	Lppd
		52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	374	375	375	375	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		1	Indeks Ketentraman	Skor	84,23	83	83	84,23	Indikator Sasaran Kota
		2	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	83	83	84	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	99	98	98	98	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	4,60	4,26	84	4,6	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,75	84	83	83	Indikator Program PD
		7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	99	98	98	98	Indikator Program PD
		8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99	98	98	98	Lppd
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	Lppd
		3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	Lppd
		4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	8,43	15	15	15	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		5	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggar	2.189	2000	2000	2000	Lppd
		6	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.300	1348	1300	1300	Lppd
		7	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	peraturan	26	76	76	26	Lppd
		8	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3	5	3	3	Lppd
		9	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	15	4	4	15	Lppd
		10	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jenis	12 bidang barang (985 barang)	93	12	12	Lppd
		11	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5	5	5	5	Lppd
		12	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	1	1	1	1	Lppd
		13	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Shift	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	3	3	3	Lppd
		14	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	ada 1 pos garasi damkar	1	1	1	Lppd
		15	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	jenis	88	33	34	33	Lppd
		16	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	23	9	9	23	Lppd
		17	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	44	45	22	44	Lppd
		18	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	4	4	4	0	Lppd
		19	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100	100	100	100	Spm
		20	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	Spm
		1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	91,61	95,5	99,64	90	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,77	4,7	4,7	4,80	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,51	0,54	0,54	0,58	Indikator sasaran PD
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	92,31	90,21	90,21	92,32	Indikator sasaran PD
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	85,87	86	86	86,00	Indikator Sasaran dan Program PD
		6	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100	100	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	142.047	140,035	141,874	141,874	Lppd
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.209	260	511	511	Lppd
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	826	42	42	42	Lppd
		4	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
		5	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100	100	100	Lppd
		6	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
		7	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
		8	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100	34,3	24,76	100	Lppd
		9	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	100	30,84	21,59	100	Lppd
		10	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	Lppd
		11	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	Lppd
		12	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	Lppd
		13	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100	100	Lppd
		14	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	Lppd
		15	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	Lppd
		16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	Spm
		17	Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	Spm
		18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	Spm
	2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
		1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	4,3	5,8	5,61	4,20	Indikator Tujuan PD
		2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	91,90	90	90	70	Indikator Tujuan PD
		3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		4	Persentase penyerapan Tenaga Kerja	%	91,90	50	50	50	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	84,45	75	75	75	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,75	4,11	4,11	4,11	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,2	81,02	81,02	81,02	Indikator Program PD
		8	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	98	30	30	30	Indikator Program PD
		9	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	91,90	15	15	15	Indikator Program PD
		10	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahan	%	16	16	16	15	Indikator Program PD
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100%	76	76	76	Lppd
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,64%	68	68	68	Lppd
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	140810296,81	10,748,101,01	10,748,101,01	112,88-127,20	Lppd
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100%	75	75	75	Lppd
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	92,57%	53	53	53	Lppd
		6	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	1	1	1	1	Lppd
		7	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	%	0		0	0	Lppd
		8	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Perusahaan	0	15	15	15	Lppd
		9	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	100	30	30	30	Lppd
		10	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	80	30	30	30	Lppd
		11	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	51	50	50	30	Lppd
		12	Persentase LPK yang terakreditasi	%	39	30	30		Lppd
		13	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	84	90	90		Lppd
			Persentase LPKS yang tersertivikasi standar	%	-	-	-	75	Pengganti no 12 dan 13
		14	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	274	200	200	200	Lppd
		15	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100	Lppd
		16	Persentase penyerapan lulusan	%	90	50	50	50	Lppd
		17	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	99	90	90	90	Lppd
		18	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0	0	0	0	Lppd
		19	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0	0	0	0	Lppd
		20	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	2%	1	1	1	Lppd
		21	Data tingkat produktivitas total	%	69,64	0	0	0	Lppd
		22	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	33.97	28	28	28	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		23	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	65%	62	62	62	Lppd
		24	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tercatat	18	21	21	18	Lppd
		25	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	33.97	14	14	14	Lppd
		26	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	Lppd
		27	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	1.6	2	2	2	Lppd
		28	Jumlah mogok kerja	Pekerja	0	0	0	0	Lppd
		29	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	3	0	0	0	Lppd
		30	Jumlah perselisihan kepentingan	kasus	0	0	0	0	Lppd
		31	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Kasus	0	0	0	0	Lppd
		32	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	12	10	10	10	Lppd
		33	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	90	50	50	50	Lppd
		34	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	11	12	12	12	Lppd
		35	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	0	0	0	0	Lppd
		36	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	91.67	90	90	90	Lppd
		37	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	326	250	250	250	Lppd
		38	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	606	400	400	400	Lppd
		39	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	22	22	22	22	Lppd
		40	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
		41	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	orang	1	2	2	1	Lppd
		42	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0	0	0	0	Lppd
		43	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Perjanjian kerja		100	100	100	Lppd
		44	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	penempatan	0	0	0	0	Lppd
		45	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	128	0	0	0	Lppd
		46	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	128	150	150	100	Lppd
		47	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang	0	0	0	0	Lppd
		48	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		49	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	data	0	0	0	0	Lppd
		50	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	layanan	0	0	0	0	Lppd
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		1	Persentase penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	95,50%	87,75	88,1	95,50%	Indikator Tujuan PD
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	92,83 Sangat Baik			92,83 Sangat Baik	
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,13%	96,75	99,13	99,13%	Indikator Sasaran PD
			Persentase data kependudukan yang akurat		99,62%			99,62%	
		3	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	5,00 PelayananPrima	4,95	4,95	5,00 PelayananPrima	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		84,4	84,4		Indikator Program PD
		5	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	85,61 A	17 stakeholder	35 stakeholder	85,61 A	Indikator Program PD
			Persentase Informasi administrasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	34 stakeholder				
		6	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%		94	98,3		Indikator Program PD
			Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	98,10%			98,10%	
			Peresentase kepemilikan kartu identitas anak	%	27,85%				
		7	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	96,40%	99,5	99,95	96,40%	Indikator Program PD
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99,43%			99,43%	
			Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%				
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%				
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%				
		1	Perekaman KTP elektronik	%	99,80%	97	97	99,80%	Lppd
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	96,40%	91	91	96,40%	Lppd
		3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,43%	100	100	99,43%	Lppd
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100%	50	50	100%	Lppd
		5	Penerbitan akta perkawinan	%	100%	100	100	100%	Lppd
		6	Penerbitan akta perceraian	%	100%	100	100	100%	Lppd
		7	Penerbitan akta kematian	%	100%	100	100	100%	Lppd
		8	Penyajian data kependudukan	%	100%	100	100	100%	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
		1	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	110.4	100	100	100	Indikator Sasaran Kota
		2	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	101.4 %	100	100	100	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	92.29	81,04	81,04	92,29	Indikator Tujuan PD
		4	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95	95,8	95,8	95	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83.77	81,05	81,05	81.05	Indikator Program PD
		6	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	92.32	80	80	80	Indikator Program PD
		7	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22	22	22	22	Indikator Program PD
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	237.18	100	100	100	Lppd
		2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		3	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		4	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		5	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	1	1	1	1	Lppd
		7	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
		8	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		9	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		1	*Contraception Prevalency Rate (CPR)* di atas rata-rata nasional	%	71%	68,5	68,5	69	Indikator Sasaran PD
		2	Menurunnya Unmet Need	%	5,58%	6,8	6,8	6,8	Indikator Program PD
		3	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	97,10%	87,7	87,7	97,1	Indikator Program PD
		4	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	13 SSK	14	14	14	Indikator Program PD
		5	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7 kampung KB	7	7	7	Indikator Program PD
		1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,58	6,8	6,8	6,8	Lppd
		2	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,94	1,93	1,93	1,85	Lppd
		3	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	26.5	> 21	> 21	> 21	Lppd
		5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	5,9	< 7,21	< 7,21	< 7,21	Lppd
		6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100	100	100	Lppd
		7	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27	27	28	28	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71	68,5	68,5	68,5	Lppd
		9	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	100	100	100	Lppd
		10	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43,36	40,2	40,2	40,2	Lppd
		11	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok Kerja		243	243	243	Lppd
		12	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	80,33	53	53	53	Lppd
		13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,58	6,8	6,8	6,8	
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%		3,7	3,7	3,7	Lppd
		15	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100	100	100	100	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,57	3	3	4,57	Indikator Sasaran Kota
		2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	4,82	3,2	3,2	4,82	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	%	71,79	69	69	69	Indikator Sasaran PD
		4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	97,42	94	94	96	Indikator Sasaran PD
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,83	4,67	4,67	4,83	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,53	82,25	84	83,55	Indikator Program PD
		7	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	95	84	84	85	Indikator Program PD
		8	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	Lppd
		2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	75	80	100	Lppd
		3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	98	92	92,3	98	Lppd
		4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	Lppd
		5	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd
		6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd
		7	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		8	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100	100	100	Lppd
		9	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
		10	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	100	100	100	100	Lppd
		11	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100	100	100	Lppd
		12	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	85,7	25	80	85,7	Lppd
		13	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	Lppd
		14	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	86	83	85	86	Lppd
		15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	Lppd
		16	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	Lppd
		17	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100	100	100	Lppd
		18	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100	100	100	Lppd
		19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	100	100	100	Lppd
		20	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd
		21	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		22	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
		23	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100	100	100	Lppd
		24	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
		1	Tingkat kematangan data statistik sektoral	Skor	2,18	2,6	2,6		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		2	Indeks Satu data Indonesia	skor				80	Indikator Sasaran PD
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	13	1	1	1	Indikator Program PD
		1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Lppd
		2	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		3	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	13	1	1	5	Lppd
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	13	1	1	5	Lppd
		5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	26	1	1	10	Lppd
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	75	100	100	Lppd
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100	75	100	100	Lppd
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
		1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	skor	625	560	560	560	Indikator Sasaran PD
		2	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96,89	86	95	96,89	Lppd
		2	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	0	0	0	0	Lppd
		3	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Lppd
		4	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	100	100	100	Lppd
		5	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	100	100	100	Lppd
	VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca	skor	3,41	3,1	3,1	3,41	Indikator Sasaran Kota
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	18,67	18,5	18,5	18,5	Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,68	4,2	4,2	4,2	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,94	82	82	82	Indikator Program PD
		5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	35	36,79	36,79	36,79	Indikator Program PD
		6	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	132	94	94	94	Indikator Program PD
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	5,14	4,49	4,49	4,49	Lppd
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,6	4,6	4,6	4,6	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,43	0,37	0,37	0,37	Lppd
		4	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	orang	89749	74300	74300	74300	Lppd
		5	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	15	92	92	92	Lppd
		6	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	7	1	1	1	Lppd
		7	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	235	210	210	210	Lppd
		8	Frekuensi Membaca (FM)	nilai	79	80	80	80	Lppd
		9	Durasi Membaca (DM)	nilai	59,3	60	60	60	Lppd
		10	Jumlah Buku (JB)	nilai	66,3	67	67	67	Lppd
		11	Frekuensi Akses Internet (FAI)	nilai	76,6	77	77	77	Lppd
		12	Durasi Akses Internet	nilai	60,3	61	61	61	Lppd
		13	Pemerataan Layanan Perpustakaan	nilai	0.8921	0,8922	0,8992	0.8992	Lppd
		14	Ketercukupan Koleksi	nilai	0.6588	0,6590	0,6590	0.6590	Lppd
		15	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	nilai	0.8025	0,8026	0,8026	0.8026	Lppd
		16	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	nilai	0.8645	0,8650	0,8650	0.8650	Lppd
		17	Perpustakaan ber Standar Nasional Perpustakaan	nilai	1	1	1	1	Lppd
		18	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan	nilai	1	1	1	1	Lppd
		19	Anggota Perpustakaan	nilai	1	1	1	1	Lppd
	IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
		1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	92,44	75	75	75	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	18	10	9	9	Indikator Sasaran PD
		3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Skor	91	90	90	90	Indikator Program PD
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	8,8	8,8	8,8	8,8	Indikator Program PD
		1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	100	100	100	Lppd
		2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	133	100	100	100	Lppd
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	100	100	100	Lppd
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	71	60	60	60	Lppd
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	1375	1	1	1	Lppd
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	4	1	1	1	Lppd
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1	1	1	1	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	3	1	1	1	Lppd
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	2	1	1	1	Lppd
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Aturan	1	1	1	1	Lppd
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	I		Sekretariat Daerah						
		1	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Nilai	91,95	(A) 80,01	(A) 80,01	91,95	Indikator Tujuan Kota
		2	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,03	80,2	80,2	81,03	Indikator Sasaran Kota
		3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	belum rilis	3,05 (sedang)	3,05 (sedang)	3,05-3,21	Indikator Sasaran Kota
		4	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi terhadap target	%	93	91	91	91	Indikator Tujuan PD
		5	Indeks Berakhlak	Indeks	74,5	67	67	67	Indikator Sasaran PD
			Hasil Survei Internalisasi Budaya Kerja	Skor					
		6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	4.5	4,5	4,5	Indikator Sasaran PD
		7	Tingkat Kematangan Organisasi	%	46,12	46,2	46,2	46,2	Indikator Sasaran PD
		8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	78,01	71	71	71	Indikator Sasaran PD
		9	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP	Nilai	24,37	24.5	24,5	24,5	Indikator Sasaran PD
		10	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	12,45	12.5	12,5	12,5	Indikator Sasaran PD
		11	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	68,67	56	56	65-75	Indikator Sasaran PD
		12	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,2	67	67	87,95-91,70	Indikator Sasaran PD
		13	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,42	85	85,5	85,5	Indikator Program PD
		14	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		15	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LPPD
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	98,53	13,63%	15,00%	15,00%	LPPD
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	20,95	29,93%	30,00%	20,95%	LPPD
	II		Sekretariat DPRD						
		1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,86	3,96	3,96	3,96	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	90,93	87	87	87	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standar Pelayanan	%	100%	100	100	100	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		4	Ketetapan Penetapan APBD Tahun N						Indikator Program PD
		5	Persentase Penentapan Raperda Tahun N						Indikator Program PD
		6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah						Indikator Program PD
	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
	III		Perencanaan						
		1	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26	25,8	25,8	26	Indikator Tujuan PD
		2	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan	Nilai	26	25,8	25,8	26	Indikator Sasaran PD
		3	Nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	3,6	86	86	3,6	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase kinerja program yang mencapai target	%	94	94	94	94	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	89	89	83	Indikator Program PD
		6	Persentase dokumen perencanaan Tingkat kota yang tersusun	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		7	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan REncana Pembangunan Daerah (RPD)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	IV		Keuangan						
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Kota
		2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,78	4,4	4,4	4,4	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.63	84,2	84,2	84,2	Indikator Program PD
		6	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		7	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	%	100	80	100	100	Indikator Program PD
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	16.58%	17,80%	18,73%	18,73%	Lppd
		2	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	2.24 %	1,67%	1,95%	1,95%	Lppd
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	79.85%	75,11%	76,24%	76,24%	Lppd
		4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-5.98%	-11,08%	7,50%	7,50%	Lppd
		5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	6.46%	-73,96%	1,00%	1,00%	Lppd
		6	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
		7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9.48%	115%	8%	8%	Lppd
		1	Capaian Target Pajak Daerah	%	122.310.588.046	2	100	100	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak	%	6,58	2	2	2	Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	4,5	4,5	4,5	4,5	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	82,28	81,5	81,36	81,36	Indikator Program PD
		5	Persentase Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	IV		Kepegawaian						
		1	Nilai Indeks NSPK	Indeks	belum ada skor	77,5	77,5	77,5	Indikator Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		2	Indeks Profesionalitas ASN		-			-	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Profesionalitas ASN Berdimensi Kompetensi		-			-	Indikator Tujuan PD
		4	Indeks Sistem Merit	Indeks	295	285	285	300	Indikator Sasaran PD
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	87,22	87,85	87,85	87,25	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,69	4,49	4,49	4,69	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,22	86	86	85	Indikator Program PD
		8	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	73,12	65	71,02	72,02	LPPD
		2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,24	26	23,86	24,24	LPPD
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	LPPD
	V		Pendidikan dan Pelatihan						
		1	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	%	41,77	37	37,15	37,15	Indikator Sasaran PD
		2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	13%	17	20	20	Indikator Program PD
	VI		Penelitian dan Pengembangan						
		1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67,09	54,3	54,3	67,09	Indikator sasaran Kota dan Indeks Sasaran PD
		2	Persentase Program Smart City yang tercapai	%	100	100	100	100	Indikator sasaran Kota
		3	persentase hasil kajian/ penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
	VII		Inspektorat Daerah						
		1	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	1	1	1	1	Indikator Sasaran Kota
		2	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Skor	3,286	3	3	3	Indikator Tujuan PD
		3	Level Manajemen Resiko Indeks	Skor	3	2	2	2	Indikator Sasaran PD
		4	Level Kapabilitas APIP	Skor	3,16	3	3	3	Indikator Sasaran PD
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4.33	4,55	4,5	4,5	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.5	85	84,5	82	Indikator Program PD
		7	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	94	94	94	94	Indikator Program PD
		8	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		9	Indeks Budaya Resiko	Indeks	-			2	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3	3	3	Lppd
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	Lppd
	7		Unsur Kewilayahan						
	VIII		Kecamatan						
		1	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Nilai	4,95	4,92	4,91	4,91	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Nilai	4,89	3	3	3	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Nilai	4,83	4,8	4,8	4,8	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	77	77	77	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Kecamatan Manguharjo	Nilai	83,66	83,35	83,35	83,35	Indikator Sasaran dan Program PD
		8	Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo	Nilai	82,84	81	82,77	82,77	Indikator Sasaran dan Program PD
		9	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Nilai	83,82	82,92	82,86	82,86	Indikator Sasaran dan Program PD
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	92,71	92,45	92,45	92,45	Indikator Sasaran dan Program PD
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	92,62	87,81	88,67	88,67	Indikator Sasaran dan Program PD
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	89,72	92,16	92,16	92,16	Indikator Sasaran dan Program PD
		13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		15	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		16	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		17	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		19	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		20	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	8		Unsur Pemerintahan Umum						
	IX		Kesatuan Bangsa dan Politik						
		1	Indeks Kerukunan	Indeks	78,04	78,2	78,2	78,2	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase orkemas baru yang berbadan hukum	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase pencegahan konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,60	3,5	3,5	3,5	Indikator Sasaran PD
		8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,37	81,75	81,75	81,75	Indikator Program PD
		9	Cakupan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		10	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		11	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		12	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		13	Persentase Konflik yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	A		Kemampuan Ekonomi						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
		1	persentase peningkatan Usaha Mikro yang beromset naik	%	1,02	0,14	0,14	0,14	Indikator Tujuan PD
		2	persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	0	5	5	5	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	88,57	75	75	75	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase usaha mikro yang beromset naik	%	2,17	1,5	1,5	1,5	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	10,14	7,33	7,33	7,33	Indikator Program PD
		6	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertfikat NIK	%	100	80	80	80	Indikator Program PD
		7	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,5	2,5	2,5	2,5	Indikator Program PD
		1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	88,57	85	85	85	Lppd
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%		30	30	30	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	Lppd
		4	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	Lppd
		5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	16.42	30	30	30	Lppd
		6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	16.42	30	30	30	Lppd
		7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	81	40	40	40	Lppd
		8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	0.75	1,5	1,5	1,5	Lppd
		9	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	%	1	1	1	1	Lppd
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0	0	0	0	Lppd
		11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	94	85,26	85,26	85,26	Lppd
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	55	55	55	Lppd
		13	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1.29	1,29	1,29	1,29	Lppd
		14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	81	74,36	74,36	74,36	Lppd
		15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1.29	1,29	1,29	1,29	Lppd
		16	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	1,18	0,5	0,5	0,5	Lppd
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100	100	100	100	Lppd
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	1,72	0,16	0,16	0,16	Lppd
		19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0	0,09	0,09	0,09	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		20	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	1,92	2	2	2	Lppd
		21	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,37	0,47	0,47	0,47	Lppd
		22	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,40	0,47	0,47	0,47	Lppd
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
		1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar	498.086.314.746	198	198	198	Indikator Tujuan PD
		2	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,92	4,51	4,51	4,51	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase peningkatan jumlah investor	%	42,86	37	37	42	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	92,66	89,5	89,5	89,50	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,07	84	84	84	Indikator Program PD
		6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	100%	100	100	100	Indikator Program PD
		7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	42,86	42	42	42	Indikator Program PD
		8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	99,70	97	97	97	Indikator Program PD
		9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	152	120	120	120	Indikator Program PD
		10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	110,74%	2	2	2	Lppd
		2	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	0	1	1	1	Lppd
		3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	0	1	1	1	Lppd
		4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	0	1	1	1	Lppd
		5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1	1	1	1	Lppd
		6	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	1	1	1	0	Lppd
		7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	16	1	1	1	Lppd
		8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	1260 konsultasi	23	23	23	Lppd
		9	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	8238 izin	4250	4250	4250	Lppd
		10	Laporan realisasi penanaman modal	Milyar	498,086,314,746	198	198	198	Lppd
		11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	5 orang	5	5	5	Lppd
		12	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Perusahaan	749	390	390	390	Lppd
		13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1	1	1	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
		1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1.35	1,35	1,35	1.35	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	290.1	290	290	290.1	Indikator Program PD
		3	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita/tahun	20.46	33,57	33,57	20.46	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	96.2	89	89	96.2	Indikator Program PD
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	386.3	381	381	381	Lppd
		2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435	435	435	435	Lppd
		3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		4	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	262	260	260	260	Lppd
		6	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	652,000	517,4	517,4	517.4	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	7,6	6,97	6,97	6,97	Indikator Sasaran Kota
		2	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap nilai PDRB	%	5,22*	5,22	5,22	5,22	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,08*	13,08	13,08	13,08	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	%	75,68*	79	79	79	Indikator Program PD
		5	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	%	100*	100	100	100	Indikator Program PD
		6	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	%	6,6*	7	7	7	Indikator Program PD
		1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%		32	32	32	Lppd
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%		79	79	79	Lppd
		3	Tingkat hunian akomodasi	%		100	100	100	Lppd
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%		3,7	3,7	3,7	Lppd
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		56	56	56	Lppd
		6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			0	0	0	Lppd
		7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Orang		704	704	704	Lppd
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang		4738	4738	4738	Lppd
		9	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali		5	5	5	Lppd
		10	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			0	0	0	Lppd
		11	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	kali		2	2	2	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		12	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%		18,68	18,68	18,68	Lppd
		13	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi		3	3	3	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
		1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1.26	1,22	1,22	1.26	Indikator Sasaran PD
		2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1.2	1,16	1,16	1.2	Indikator Sasaran PD
		3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	70	65	65	70	Indikator Program PD
		4	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		5	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	15	10	10	15	Indikator Program PD
		6	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	85	76	76	85	Indikator Program PD
		7	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	15	15	15	15	Indikator Program PD
		8	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	45	20	20	45	Indikator Program PD
		1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ ha	7	6	6	6	Lppd
		2	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	2	2	2	2	Lppd
		3	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	3 jenis	3	3	3	Lppd
		4	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	2	2	2	2	Lppd
		5	Persentase prasarana yang digunakan	%	75	75	75	75	Lppd
		6	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	50	50	50	50	Lppd
		7	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	50	50	50	50	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,59	5,65	5,65	4,90	Indikator Sasaran Kota
		2	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	26,37	25,05	25,05	25,05	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Pengelolaan Perdagangan	Indeks	-	96,5	96,5	96,5	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	%	100	95	95	95	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,5	3,97	3,98	4,5	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,34	84,36	84,36	84,36	Indikator Program PD
		8	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		9	Persentase pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		10	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		11	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		12	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	100	100	100	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	55,26	52,5	52,5	55,26	Lppd
		2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	76,71	49	49	76,71	Lppd
		3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100%	100	100	100%	Lppd
		4	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:						
			a. Pusat perbelanjaan	%	100%	100	100	100%	Lppd
			b. Toko swalayan	%	100%	100	100	100%	Lppd
		5	Persentase penerbitan TDG	%	61,62	100	100	61,62	Lppd
		6	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	61,62	61,2	61,2	61,62	Lppd
		7	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100	100	100%	Lppd
		8	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		9	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Lppd
		10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	100	100	100%	Lppd
		11	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Lppd
		12	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	76,71	49	49	76,71	Lppd
		13	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100	100	100%	Lppd
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
		1	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tangguh	%	17.76	13	13	13	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase IKM yang bertambah kapasitas produksinya	%	22.33	8	8	22.33	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	10	10	10	10	Indikator Program PD
		4	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	13	5	5	5	Indikator Program PD
		1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	48.44	150	150	150	Lppd
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	1.5	0	0	0	Lppd
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	Lppd
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0	0	0	0	Lppd
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	125	4240	4240	4240	Lppd
		7	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0	0	0	0	Lppd
		8	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	0	100	100	100	Lppd
		9	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	0	90	90	90	Lppd
		10	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	0	0	0	0	Lppd
		11	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	3.49	3	3	3	Lppd
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	92.34	92,49	92,49	92,49	Indikator Tujuan, PD
		2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.2	3,94	3,94	3,94	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase ketaatan penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	96.01	98,18	95,8	95,8	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	81.03	80,15	80,15	80,15	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	17.17	16,97	16,97	16,97	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		9	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	%	-	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		10	Presentase pelaku jasa konstruksi yang kompeten	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	85	85	85	Indikator Program
		12	Presentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82.83	82,66	83,03	83,03	Indikator Program
		13	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82.83	82,66	83,03	83,03	Indikator Program
		14	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	%	0,23	0,23	75,43	0,23	Indikator Program
		15	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	%	100	100	100	100	Indikator Program
		16	Persentase bangunan gedung yang terbangun	%	100	100	100	100	Indikator Program
		17	Persentase kawasan strategis/cagar budaya terbangun/terehab	%	100	100	100	100	Indikator Program
		18	Persentase kondisi jalan kota yang baik	%	96,01	95,8	95,8	95,8	Indikator Program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		19	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	22,75	22,75	22,75	22,75	Indikator Program
		20	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Indikator Program
		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0.699	100	100	0,13	Lppd
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	Lppd
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	0	0	0	Lppd
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81%	99,74	99,74	99,74	Lppd
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	Lppd
		7	Tingkat kemantaban Jalan Kabupaten/ Kota	%	96,01	95,03	95,03	95,80	Lppd
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	106.50	22,75	22,75	22,75	Lppd
		9	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	5,71	5,63	5,63	5,63	Lppd
		10	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72,776	72.776	72.776	72,776	Lppd
		11	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Ha	0	0	0	0	Lppd
		12	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	0	0	0	0	Lppd
		13	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	ada	ada	ada	Lppd
		14	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	ada	ada	ada	Lppd
		15	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	jumlah	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	62	62	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	Lppd
		16	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
		17	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
		18	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
		19	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		20	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		21	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Unit		1	1	1	Lppd
		22	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Izin	1	0	0	0	Lppd
		23	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Kerja sama	1	0	0	0	Lppd
		24	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	rumah	0	0	0	0	Lppd
		25	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah	0	0	0	0	Lppd
		26	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	rumah	0	0	0	0	Lppd
		27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd
		28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd
		29	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah	0	0	0	0	Lppd
		30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	0	100	100	0	Lppd
		31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	0	0	0	0	Lppd
		32	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%	0	0	0	0	Lppd
		33	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0	0	0	Lppd
		34	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		35	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		36	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0	0	0	Lppd
		37	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		38	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	3,5%	100	100	100	Lppd
		39	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	250	275	275	275	Lppd
		40	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		41	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 Unit	20	20	20	Lppd
		43	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 Unit	20	20	20	Lppd
		44	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	Lppd
		45	Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	8	8	8	8	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		46	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485 Km	433.485	433.485	433,485	Lppd
		47	Panjang jalan yang dibangun	km	0,4 km	2	2	2	Lppd
		48	Panjang jembatan yang dibangun	m	10 m	-	-	-	Lppd
		49	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	3,5 km	-	-	-	Lppd
		50	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	-	5	5	5	Lppd
		51	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	5 km	14,9	14,9	14,9	Lppd
		52	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	0	0	0	Lppd
		53	Panjang jalan yang dipelihara	km	40 km	52	52	52	Lppd
		54	Panjang jembatan yang dipelihara	km	3,8 km	3,95	3,95	3,95	Lppd
		55	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	kali	3	0	0	0	Lppd
		56	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	80	284	284	284	Lppd
		57	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	213	270	270	270	Lppd
		58	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		61	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		62	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		63	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		64	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		66	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		67	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		68	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
		69	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
		70	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
		71	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
		72	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan usaha	100	100	100	100	Lppd
		73	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota	usaha	0	0	0	0	Lppd
		74	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	50	70	70	70	Lppd
		75	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	100	100	100	100	Lppd
		76	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Komit men	0	0	0	0	Lppd
		77	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	pengawasan	0	0	0	0	Lppd
		78	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kejadi an	0	0	0	0	Lppd
		79	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	0	0	0	0	Lppd
		80	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	SPM
		81	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81%	99,74	99,74	99,74	SPM
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
		1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	99,05	97,31	97,31	99,98	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,31	4,15	4,15	4,15	Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,90	99,77	99,77	99,77	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		4	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	98	94,3	94,3	98,02	Indikator Sasaran PD
		5	persentase Pengembangan Perumahan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		6	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	100	100	9,75	Indikator Program PD
		7	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	rumah	0	0	0	0	lppd
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	KK	140	105	105	105	lppd
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	21,32	94,28	94,28	94,28	lppd
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	48 unit	130	130	130	lppd
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	60	55	55	55	lppd
		6	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	rumah	0	0	0	0	lppd
		7	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	rumah	0	0	0	0	lppd
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	lppd
		9	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		10	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		11	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		12	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	unit	0	0	0	0	lppd
		13	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	orang	0	0	0	0	lppd
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		15	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		16	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		17	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	140 KK	145	145	140	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		18	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		19	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0	0	0	0	lppd
		20	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	166,1	190	190	190	lppd
		21	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	100 unit	130	130	130	lppd
		22	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	21,32	24	24	24	lppd
		23	Jumlah rumah di kab/kota	unit	47702	46201	46201	46201	lppd
		24	Jumlah unit PK RTLH	unit	100 unit	130	130	130	lppd
		25	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	48 unit	200	200	200	lppd
		26	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	lppd
		27	Rasio rumah dan KK	%		119,08	119,08	119,08	lppd
		28	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	87	145	145	145	lppd
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit perumahan	60	55	55	55	lppd
		30	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6831	6516	6516	6516	lppd
		31	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6831	6516	6516	6516	lppd
		32	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6831	6516	6516	6516	lppd
		33	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit perumahan	6831	55	55	55	lppd
		34	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6831	6516	6516	6516	lppd
		35	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengembang	60	55	55	55	lppd
		36	Jumlah pengembang yang terregistrasi	pengembang	60	55	55	55	lppd
		37	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang	60	55	55	55	lppd
		38	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100	100	Spm
		39	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	100	spm
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan						
		1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		3	Persentase Penatagunaan Tanah	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100	100	100	Lppd
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52 ha	30,52	30,52	30,52	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	lokasi	0	0	0	0	Lppd
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	Lppd
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	Lppd
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	5	5	5	5	Lppd
		7	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	0	0	0	0	Lppd
		8	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		0	0	0	0	Lppd
		9	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		0	0	0	0	Lppd
		10	Dokumen Izin membuka tanah		0	0	0	0	Lppd
		11	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,21	57,94	57,94	66,23	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,14	50	50	50	Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,12	86,15	86,15	86,15	Indikator Sasaran PD
		4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,18	24,17	24,17	24,17	Indikator Sasaran PD
		5	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	99.069	99,20	99,20	99,20	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,43	3,3	3,3	3,3	Indikator Sasaran PD
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,45	84	85,01	85,01	Indikator Sasaran PD
		8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,15	80,4	80,4	80,4	Indikator Sasaran PD
		9	persentase data Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia	%	79,5	79,5	79,5	79,5	Indikator Program PD
		10	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	64,95	50,1	50,1	50,1	Indikator Program PD
		11	Persentase Tutupan Lahan	%	100	50	50	50	Indikator Program PD
		10	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	78	78,2	78,2	78,2	Indikator Program PD
		11	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	90,05	88,2	80,2	80,2	Indikator Program PD
		12	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		13	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	140	100	100	100	Indikator Program PD
		14	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	70,97	71	71	71	Indikator Program PD
		1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,069	99	99	99	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	Lppd
		3	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		4	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,028	1.603	1.603	1.603	Lppd
		5	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	6,21	6,25	6,25	6,25	Lppd
		6	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	Ada/ tidak ada	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd
		7	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	90,05	100	100	100	Lppd
		8	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		9	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		10	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		11	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100	100	100	100	Lppd
		12	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	140	100	100	100	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
		1	Rasio Konektivitas Kota						Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Fatalitas	%	8,58*	8	8	8	Indikator Tujuan PD
		3	Tingkat Kecelakaan	JPKP	42*	40	40	40	Indikator Sasaran PD
		4	Konektivitas Transportasi Darat						Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,78	4,6	4,6	4,78	Indikator Sasaran PD
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,82	83,7	83,7	83,7	Indikator Program PD
		8	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		9	Persentase sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	nilai	1	1	1	1	Lppd
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	nilai	0,33	0,35	0,35	0,35	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5			6
		3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100%	100	100	100	Lppd
		4	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	100%	100	100	100	Lppd
		5	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100	100	100	Lppd
		6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna menjamin tercapainya target dan prioritas pembangunan secara optimal, perubahan ini merupakan bagian dari upaya tindak lanjut pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pelantikan serentak guna mensinergikan program Asta Karya dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 mencakup revisi pada struktur pendapatan dan belanja di seluruh urusan pemerintahan, yang dirinci dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, dokumen ini juga digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta menjadi instrumen evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara